ANALISIS KETERKAITAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI WILAYAH KAPET PAREPARE

THE ANALYSIS OF INTER-REGENCIES/CITY ECONOMIC LINKAGES AND ITS IMPACTS ON ECONOMIC GROWTH EMPLOYMENT AND INCOME IN KAPET PAREPARE

ABD RAHMAN R

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. Terima	10-3-6
Asal Dari	pasca.
Banyaknya	2 CDua/Cd
Harga	H.
No. Inventaris	1228/10-3-6
No. Klas	31996-E

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005

ANALISIS KETERKAITAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI WILAYAH KAPET PAREPARE

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi

Ilmu Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh;

ABD. RAHMAN R.

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005

DISERTASI

ANALISIS KETERKAITAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA, DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI WILAYAH KAPET PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

ABD. RAHMAN R.
Nomor Pokok P3EK97001

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi
pada tanggal 5 Desember 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing,

Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA.
Promotor

Prof. Dr. H. Rachman Panetto, MA.
Ko-Promotor

Dr. Marsuki, SE. DEA.
Ko-Promotor

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi

Prof.Dr. Muhammad Yunus Zain, MA.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Ir. M. Natsir Nessa, M.S.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia, nikmat dan hidayah yang diberikan, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

Ide penelitian dalam disertasi ini timbul dari pengamatan penulis terhadap kinerja KAPET Parepare yang dinyatakan sebagai KAPET yang tidak aktif diantara KAPET-KAPET lainnya di Kawasan Timur Indonesia. Penulis bermaksud untuk menyumbangkan konsep untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian kabupaten/kota di daerah ini, khususnya yang ada di dalam wilayah KAPET Parepare, sehingga mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Propinsi Sulawesi Selatan di luar Kota Makassar.

Dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, terutama kepada Prof.DR. H. Basri Hasanuddin, MA sebagai Promotor serta Prof. DR. H. Abdul Rachman Panetto, MA dan DR. Marsuki, DEA sebagai Ko-Promotor atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan selama penelitian dan penulisan disertasi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada pengelola KAPET Parepare, Pemerintah Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Sidrap, Barru dan Enrekang, serta pimpinan dan staf Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, utamanya

Drs. Nasrun; Agus, S.Si; Muh. Labbi, S.Si, serta staf lainnya, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, utamanya pada saat dilakukan pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Demikian pula ucapan terima kasih kepada saudara Mursalim Nohong, SE,M.Si serta semua pihak yang telah membantu penulis selama kegiatan penelitian dan penulisan disertasi ini.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, utamanya kepada isteri Andi Asnani,SE beserta putri-putri penulis tercinta Andi Tenri Arni Rahman; Andi Tenri Ayu Rahman dan Andi Tenri Asniar Rahman, serta kedua orang tua penulis H.Abd.Razak Badolo dan Hj. Kalobang Madjid serta mertua H.Andi Mappisabbi atas dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis pada saat kuliah sampai seluruh rangkaian penulisan skripsi ini selesai. Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, Amin.

Makassar; 2 Agustus 2005

ABD. RAHMAN R.

ABSTRAK

ABD. RAHMAN R. *Analisis Keterkaitan Ekonomi Antar Kabupaten/ Kota dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat di Wilayah KAPET Parepare* (dibimbing oleh Basri Hasanuddin dan Abdul Rachman Panetto serta Marsuki).

Studi ini bertujuan untuk menganalisis sektor/sub sektor unggulan kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare serta tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pen-dapatan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder dilengkapi dengan data primer khusus yang diperoleh melalui survey terbatas. Beberapa metode analisis yang digunakan, antara lain: (1) LQ, MRP, dan Overlay; (2) Index Krugman; (4) Model Keseimbangan Perdagangan Antar Daerah (MKPAD); dan (4) Typologi Klassen.

Dari penelitian ini diperoleh nilai *index spesialisasi regional* kabupaten/ kota di wilayah ini lebih kecil dari 1 yang menunjukkan bahwa masih sangat rendah tingkat konsentrasi aktivitas sektor/subsektor unggulan di setiap kabupaten/kota di wilayah ini, sehingga belum mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini. Selain itu, ditemukan pula bahwa tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET ini masih relatif kecil, sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di wilayah ini masih relatif kecil pula. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Lebih 50 % dari total output setiap sektor/subsektor di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini dikonsumsi sendiri oleh masyarakatnya, sehingga masih relatif sedikit yang dapat didistribusi ke kabupaten/kota lainnya di wilayah ini maupun ke wilayah-wilayah lainnya; (2) rantai aktivitas produksi dan pemasaran produk sektor/subsektor unggulan setiap kabupaten/kota di wilayah ini relatif pendek; serta (3) tidak ada sektor inovasi, utamanya agroindustri, yang berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan.

ABSTRACT

ABD. RAHMAN R. *The Analyses of Inter-Regencies/City Economc Linkages and its Impacts on Economic Growth, Employment and Income in KAPET Parepare (supervised by Basri Hasanuddin, Abdul Rahman Panetto And Marsuki)*

This study is aimed to analyse the leading sector and sub-sectors in each regency and city in the Integrated Economic Development Zone (Kawasan Pengembanangan Ekonomi Terpadu = KAPET) Parepare as well as levels of their economic linkages and its impacts on economic growth, employment and income of the participating regencies and city. Secondary data were employed together with special primary data obtained through a limited survey. Some methods of analysis were also applied, i.e: (1) LQ, MRP, and Overlay; (2) Krugman's Index; (4) Model of Interregional Trade Balance (MKPAD); and (4) Klassen's Typologi.

This study indicates that the Index of Regional Specialization of the participating regencies and city in KAPET Parepare were all less than one, implying that the level of concentration of economic activities of the sectors and sub-sectors in each of the KAPET member regencies and city were relatively low which in turn could not create enough impetus to the development of the KAPET member regions. In addition, it is also found that the level of economic linkages between all the KAPET member regions were also relatively small, so that the impacts of economic linkage among the five KAPET member regions on economic growth, employment and income were also relatively small. This among as indicated by the following indicators, i.e: (1) more than 50 per cent of the total output of all the sectors and sub-sectors were used for local consumption of the respective regency and city, such that only small portion of the products could be supplied to other regency or city; (2) production activities and marketing chains of the leading sectors and sub-sectors products were also relatively short; and (3) the absence of innovation, especially in agro-industry that may play as engine of growth and impetus in increasing economic linkage among the five KAPET member regions.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pembangunan Ekonomi Walayah	14
B. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	44
C. Keterkaitan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota	65

D. Perkembangan Studi/Penelitian Terdahulu 74
E. Kerangka Konseptual. 82
F. Hipotesis 93
G. Definisi Operasional Variabel 93

BAB III. METODE PENELITIAN 96
A. Lokasi dan Waktu Penenlitian..... 96
B. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 96
C. Metode Pengumpulan Data 98
D. Metode Analisis 99

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 115
A. Profil Wilayah KAPET Parepare 115
B. Keadaan Perekenomian Wilayah KAPET Parepare..... 118
C. Analisis Sektor/Subsektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota dalam Wilayah KAPET Parepare..... 130
D. Analisis Keterkaitan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Wilayah KAPET Parepare 181
E. Analisis Dampak Keterkaitan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat di Wilayah KAPET Parepare..... 228

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 268
A. Kesimpulan 268
B. Saran-saran 270

DAFTAR PUSTAKA 274

LAMPIRAN-LAMPIRAN 282

DAFTAR TABEL

Nomor		halaman
1.	Persentase kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan harga konstan 1993, tahun 1999 – 2003.	119
2.	PDRB kabupaten/kota dI wilayah KAPET Parepare, berdasarkan harga konstan 1993, tahun 1999 – 2003.	125
3.	Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, tahun 1999 – 2003.	126
4.	Pendapatan perkapita masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan harga konstan 1993, tahun 1999 – 2003.	129
5.	Nilai LQ rata-rata sektor/subsektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, tahun 1999 –2003.	132
6.	Nilai Ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kota Parepare (RPs) dan Propinsi Sul-Sel (RPr), periode 1999 -2003.	138
7.	Nilai Ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kab. Sidrap (RPs) dan Propinsi Sul-Sel (RPr), periode 1999 - 2003.	140
8.	Nilai Ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kab. Pinrang (RPs) dan Propinsi Sul-Sel (RPr), periode 1999 - 2003.	143
9.	Nilai Ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kab. Enrekang (RPs) dan Prop. Sul-Sel (RPr), periode 1999 - 2003.	144
10.	Nilai Ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kab. Barru (RPs) dan Propinsi Sul-Sel (RPr), periode 1999 - 2003.	146
11.	Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kota Parepare dalam konteks perekonomian Sul-Sel, periode 1999 - 2003.	149
12.	Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kab. Sidrap dalam konteks perekonomian Sul-Sel, periode 1999-2003.	152

13. Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kab. Pinrang dalam konteks perekonomian Sul-Sel, periode 1999-2003. 155

14. Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kab. Enrekang dalam konteks perekonomian Sul-Sel, periode 1999-2003. 158

15. Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kab. Barru dalam konteks perekonomian Sul-Sel, periode 1999-2003. 162

16. Index spesialisasi regional kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare tahun 1999. 167

17. Index spesialisasi regional kabupaten/kota di wiayah KAPET Parepare tahun 2003. 169

18. Nilai barang dan (output) setiap sektor ekonomi yang didistribusi oleh masing-masing kab./kota di wilayah KAPET Parepare. 185

19. Nilai barang dan jasa (output) setiap sektor ekonomi yang diminta (dibutuhkan) oleh penduduk di masing-masing kab./kota di wilayah KAPET 208

20. Posisi perekonomian kabupaten/kota di wil. KAPET Parepare dalam konteks perekonomian Propinsi Sul-Sel, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1995 - 1997. 236

21. Posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam konteks perekonomian Propinsi Sul-Sel, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1999-2003. 237

22. Posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam konteks perekonomian Propinsi Sul-Sel, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1995 - 1997. 256

23. Posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam konteks perekonomian Propinsi Sul-Sel, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1999-2003. 257

DAFTAR GAMBAR

Nomor		halaman
1.	Perbedaan tipe komoditi di dua wilayah (daerah)	72
2.	Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1995.	230
3.	Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1996.	231
4.	Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1997.	231
5.	Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1999.	233
6	Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 2000.	233
7.	Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 2001.	234
8.	Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 2002.	234
9.	Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 2003.	235
10.	Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1995.	251

11. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1996. 251

12. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1997. 252

13. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1999. 253

14. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 2000. 254

15. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 2001. 254

16. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 2002. 255

17. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 2003. 255

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		halaman
1.	Peta Wilayah KAPET Parepare	282
2.	Contoh cara perhitungan nilai LQ sektor/subsektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET	283
3.	PDRB Kota Parepare, menurut harga konstan 1993, periode 1999-2003.	284
4.	PDRB Kabupaten Barru, menurut harga konstan 1993, periode 1999-2003.	285
5.	PDRB Kabupaten Sidrap, menurut harga konstan 1993, periode 1999-2003	286
6.	PDRB Kabupaten Pinrang, menurut harga konstan 1993, periode 1999-2003	287
7.	PDRB Kabupaten Enrekang, menurut harga konstan 1993, periode 1999-2003	288
8.	PDRB Propinsi. Sul-Sel, menurut harga konstan 1993, periode 1999-2003.	289
9.	Cara perhitungan RPR dan RPs masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare, tahun 1999 – 2003	290
10.	Contoh cara perhitungan nilai index spesialisasi	291
11.	Cara perhitungan nilai barang dan jasa (output) setiap sektor ekonomi yang diminta dan didistribusi oleh pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare	293
12.	Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan Propinsi Sul-sel, periode 1995 - 1997.	296
12.	Pendapatan perkapita masyarakat di kabupaten/kota dalam wilayah KAPET dan Propinsi Sul-Sel, periode 1995 - 1997.	296

13. Persentase angkatan kerja yang bekerja pada setiap sektor ekonomi di kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare, tahun 1995 - 1997. 297

14. Persentase angkatan kerja yang bekerja pada setiap sektor ekonomi di kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare, tahun 1999 - 2003. 298

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Analisis ekonomi wilayah (*regional*) sangat menarik karena adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa tingkat intensitas perpindahan barang dan jasa (*output*) dan faktor produksi (*input*) antar wilayah dan daerah jauh lebih tinggi daripada antar negara, sehingga dinamika perubahan suatu wilayah atau daerah lebih tinggi daripada suatu negara. Besarnya peluang untuk masuk dan keluar barang dan jasa (output) serta faktor-faktor produksi (input) di tingkat wilayah dan daerah sangat memperbesar peluang bagi terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan wilayah dan daerah. Selain itu, tingkat pertumbuhan suatu wilayah atau daerah dapat pula jauh lebih tinggi daripada tingkat normal yang dapat dicapai perekonomian nasional. Akibatnya, akan terjadi adanya perbedaan tingkat pertumbuhan antara satu wilayah dengan wilayah-wilayah lainnya (Richardson, 2001).

Menurut Horst Sieber (1969) bahwa terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah adalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal yang dimaksud adalah potensi ekonomi dan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, seperti fasilitas transportasi, ketersediaan pasar bagi output yang dihasilkan oleh wilayah

bersangkutan, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat mobilitas perpindahan faktor produksi tenaga kerja, modal dan tekhnologi, serta output (barang dan jasa) dari dan ke masing-masing wilayah tersebut.

Adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah telah mendorong pemerintah di banyak negara untuk menerapkan konsep pengembangan ekonomi suatu wilayah tertentu yang berbeda dengan wilayah lainnya. Konsep pengembangan wilayah tersebut didasarkan pada konsep atau teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi, seperti Weber (1909), Christaller (1931), Perroux (1964), Friedman (1964), Hirschman (1970), dan sebagainya. Mereka telah mendasarkan teorinya pada pandangan adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, sehingga ada wilayah tertentu yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan yang menjadi sumber dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lainnya, utamanya *hinterland*-nya.

Dalam kurun waktu antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II (masa depresi), di Inggris telah diperkenalkan dan diterapkan konsep "*Special Areas*" untuk membangun dan mengembangkan suatu wilayah tertentu melalui penerapan berbagai macam kebijakan dan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi wilayah tersebut, mulai dari masalah migrasi tenaga kerja sampai pada masalah kawasan perdagangan. Pada pertengahan dasawarsa 1930-an sampai awal tahun 1940 terlihat adanya perkembangan ekonomi yang mantap pada wilayah-wilayah (*regions*) di Inggris dengan lahirnya banyak kebijaksanaan pemerintah Inggris pada

saat itu, seperti perancangan *Development Areas* dan pengendalian lokasi industri yang tetap dipertahankan hingga sekarang (Glasson, 1990 : 14).

Bentuk konsep pengembangan wilayah yang telah banyak diterapkan di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang dalam rangka untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah pemusatan kegiatan pembangunan pada wilayah tertentu yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kebijaksanaan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan (*Growth Centre*) tidak saja populer sejak tahun 1970-an, tetapi juga sangat dominan dalam setiap kebijakan operasional perencanaan wilayah, baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Upaya yang banyak dilakukan untuk meningkatkan perekonomian wilayah miskin atau kurang berkembang adalah dengan cara mengkonsentrasikan investasi terutama di bidang industri pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Melalui cara ini, maka dapat diharapkan bahwa tidak saja wilayah tersebut akan mampu tumbuh dan berkembang, tetapi juga mampu merangsang pertumbuhan wilayah sekitarnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh para pendukung kebijakan atau strategi pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi tersebut (Hansen, 1972).

Meskipun pengarahan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan (*growth centre*) bukan lagi merupakan strategi yang baru, tetapi sampai saat ini masih selalu memperoleh perhatian yang sangat besar dari para pengambil kebijakan maupun perencana, baik di negara-negara maju

maupun di negara-negara berkembang. Bahkan strategi *Growth Centre* dipercaya sebagai suatu strategi yang dapat mengatasi kesulitan dalam melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Di samping itu, pengarahan pembangunan pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan (*growth centre*) dimaksudkan pula untuk menarik perhatian para migran agar tidak menuju atau pergi ke kota-kota besar atau metropolitan (Hansen, 1972).

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah Indonesia telah menggunakan pendekatan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi yang ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), mengingat bahwa pembangunan ekonomi di KTI ini masih sangat tertinggal dibandingkan dengan yang telah dicapai di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Padahal dilihat dari aspek geografis, luas wilayah KTI mencakup hampir 70% dari total luas wilayah Indonesia dan hanya didiami sekitar 20 % dari total penduduk Indonesia saat ini. Sedangkan wilayah KBI hanya mempunyai luas wilayah sekitar 30 % dari total luas wilayah Indonesia dan didiami sekitar 80 % dari total penduduk Indonesia dewasa ini (Setiono, 2001 : 6).

Melihat data luas wilayah KTI di atas, ditambah dengan melimpahnya sumberdaya alam yang dimiliki wilayah ini, maka sangat ironis jika KTI harus menghadapi ketertinggalan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya lebih rendah dibanding di wilayah KBI. Oleh karena itu, percepatan pembangunan KTI dewasa ini merupakan agenda penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia dan merupakan masalah yang

mendesak, baik dilihat dari aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya maupun dilihat dari aspek sosial dan politik yang berkembang selama ini. Pentingnya misi pembangunan KTI tersebut adalah didasarkan pada kenyataan yang menunjukkan beratnya permasalahan pembangunan yang dihadapi KTI, di satu pihak, dan besarnya potensi pembangunan yang dimiliki kawasan ini, di pihak lain (Panetto, 2001 : 3).

Atas dasar pertimbangan di atas dan sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan KTI, maka pemerintah telah memutuskan untuk membentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada 12 propinsi yang ada di KTI melalui Keputusan Presiden Nomor 89, Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Presiden Nomor 150, Tahun 2000, Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Keputusan ini merupakan langkah kebijaksanaan pemerintah untuk mengembangkan kawasan-kawasan potensil pada beberapa propinsi di KTI yang diharapkan dapat berkembang dengan cepat.

Salah satu KAPET di Propinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan pemerintah melalui KEPRES Nomor 89, Tahun 1986 tersebut adalah KAPET Parepare yang berada pada wilayah *Ajatappareng* dan meliputi lima kota/kabupaten, yakni Kota Parepare, Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang, dengan menetapkan Kota Parepare sebagai pusat/intinya.

Penetapan wilayah ini sebagai KAPET dilaksanakan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya potensi ekonomi dan infrastruktur yang dimiliki serta letak geografis wilayah ini yang strategis,

sehingga memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kepres tersebut untuk dijadikan sebagai KAPET, yakni: (1) wilayah tersebut mempunyai potensi untuk cepat tumbuh; (2) wilayah tersebut mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya; serta (3) memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya (Anonim, 1996).

Strategi ini dipilih agar dana pembangunan yang terbatas jumlahnya dapat difokuskan pada pembangunan satu wilayah yang selanjutnya dapat berfungsi sebagai titik simpul tumbuhnya wilayah-wilayah di sekitarnya. Dengan demikian, KAPET di KTI, termasuk KAPET Parepare, diharapkan dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan (*prime mover development*) pada propinsi lainnya di KTI.

Melalui KAPET diharapkan agar investasi dan pembangunan yang dilakukan dapat lebih efisien dan efektif melalui keterpaduan rencana dan sinkronisasi kegiatan investasi. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan memperluas sektor-sektor unggulan pada kabupaten dan kota yang ada dalam KAPET sebagai motor penggerak kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, pengembangan KAPET Parepare diarahkan pada upaya pengembangan potensi lokal kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di wilayah ini, sehingga mampu berkembang secara mandiri yang didasarkan pada sinergi potensi daerahnya masing-masing yang saling terkait dan selanjutnya akan menjadi perekat potensi ekonomi lintas kabupaten/kota di wilayah ini sebagai *Growth Centre*. Bahkan

nantinya dapat pula berperan sebagai perekat potensi ekonomi lintas propinsi dan lintas negara. Pada akhirnya, diharapkan KAPET Parepare dapat berfungsi sebagai salah satu wilayah yang memiliki daya saing dan daya adaptasi yang kuat untuk ikut terlibat dalam dinamika percaturan perekonomian nasional dan internasional, sehingga dapat memperkecil kesenjangan ekonomi antara KBI dengan KTI di masa datang.

Dalam kaitan ini, secara umum pengembangan KAPET di wilayah KTI, termasuk KAPET Parepare, diarahkan untuk menjadikan KAPET sebagai:

1. Wilayah yang mempunyai kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan (*prime mover*) daerah. KAPET harus mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi, baik di dalam wilayah KAPET itu sendiri berupa diversifikasi kegiatan ekonomi maupun kegiatan ekonomi di *hinterland*-nya. Sektor unggulan yang dimaksud di sini adalah sektor ekonomi yang mampu menghasilkan: (a) komoditas yang mempunyai *multiplier effect* yang besar terhadap kegiatan ekonomi lainnya serta bagi pengembangan wilayah sekitarnya; (b) komoditas yang dapat menarik minat swasta untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut; (c) komoditas yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan (d) komoditas yang mempunyai permintaan pasar yang tinggi.
2. Wilayah yang mempunyai keterkaitan dengan *hinterland*-nya. Prioritas pembangunan pada wilayah KAPET dikwatirkan akan memicu terjadinya ketimpangan antara pusat pertumbuhan dengan *hinterland*-nya,

sehingga perlu diciptakan keterkaitan yang kuat antara pusat pertumbuhan dengan *hinterland*-nya untuk mengeliminir terjadinya ketimpangan tersebut.

3. Wilayah yang mempunyai infrastruktur yang relatif baik dan tersedia insentif bagi investor, sehingga dapat menarik investor.

Oleh karena itu, masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare diharapkan memiliki sektor/subsektor unggulan yang mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini yang selanjutnya akan mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah KAPET Parepare.

Namun demikian, setelah penerapan kebijakan pembentukan KAPET Parepare ini berjalan beberapa tahun, ternyata belum dapat menunjukkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada indikator belum adanya investor yang merealisasikan investasinya di wilayah ini untuk mendirikan industri yang diharapkan dapat menjadi sektor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, meskipun Badan Pengelola KAPET Parepare telah menandatangani beberapa MOU dengan para calon investor, termasuk investor asing. Akibatnya, setelah dievaluasi, maka KAPET Parepare dikategorikan sebagai KAPET yang pasif, yakni KAPET yang belum mampu menunjukkan kemajuan aktivitas dan hasil yang dicapai, sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat urgen untuk dilakukan pengkajian secara mendalam mengapa aktivitas ekonomi di wilayah KAPET Parepare belum dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan setelah wilayah ini ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Apakah sektor/subsektor unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini serta dapat menciptakan keterkaitan ekonomi yang kuat antar kabupaten/kota yang ada dalam wilayah ini dan antara wilayah KAPET Parepare dengan wilayah-wilayah lainnya, sehingga perekonomian masing-masing kabupaten/kota tersebut dapat tumbuh dengan pesat seiring dengan adanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah ini.

Dalam kajian ini, keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dilihat pada aspek aktivitas perdagangan output setiap sektor ekonomi yang menimbulkan terjadinya arus barang dan jasa (output) yang keluar dan masuk di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini serta arus barang dan jasa (output) yang masuk dan keluar dari wilayah KAPET Parepare ke wilayah-wilayah lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Ada beberapa masalah pokok yang dikaji dalam kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Apakah sektor/subsektor unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini?.
2. Seberapa besar keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare?.
3. Seberapa besar dampak keterkaitan ekonomi antara kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di wilayah ini?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini ditujukan untuk:

a. Menganalisis sektor/subsektor ekonomi unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare.
b. Mengukur tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare;
c. Mengukur dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di wilayah ini.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Sebagai sarana untuk menganalisis penerapan konsep pusat pertumbuhan (*Growth Centre)* dalam mendorong pembangunan ekonomi wilayah-wilayah di KTI sebagai wilayah tertinggal dibanding dengan KBI.

b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan, khususnya di wilayah KAPET Parepare, guna mendorong peranan KAPET Parepare sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan di masa datang;

c. Sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten/kota di KAPET Parepare dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan dan arah kegiatan investasi di kabupaten/kotanya masing-masing di masa datang.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini hanya mencakup wilayah KAPET Parepare yang meliputi 5 (lima) kabupaten/kota, yakni Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Barru, Sidrap dan Enrekang. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dilihat dari aspek keterkaitan dalam bentuk aktivitas perdagangan barang dan jasa (output) yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di

masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan, yakni periode 1999 – 2003.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih memudahkan mengetahui isi disertasi ini, maka penulisannya dilakukan dengan mengikuti sistimatika sebagai berikut:

BAB I. Merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II. Merupakan bab Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai pembangunan ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah, keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota, dan perkembangan studi terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis dan defenisi operasional variabel.

BAB III. Merupakan bab Metode Penelitian yang berisikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, populasi dan tekhnik penarikan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV. Merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat tentang gambaran umum wilayah KAPET Parepare sebagai tempat penelitian, analisis sektor/subsektor ekonomi unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, analisis keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah

KAPET Parepare, serta analisis dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan perkapita masyarakat di wilayah KAPET Parepare.

BAB V. Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH

Munculnya wilayah (*region*) sebagai unit analisis dalam ilmu ekonomi yang banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi selama ini adalah didasarkan pada peranan wilayah sebagai sub-nasional, baik propinsi maupun kabupaten dan kota, dalam mempengaruhi lokasi aktifitas ekonomi yang semakin penting dewasa ini. Berbagai studi dalam bidang sosial-ekonomi dan perubahan sosial menekankan semakin pentingnya wilayah dan peranan barunya sebagai pelaku ekonomi dalam konfigurasi baru pola pembangunan *spasial* (Rodriguez-Pose, 1998).

Ohamae (1995) telah menyatakan pula bahwa dalam dunia tanpa batas, wilayah (*region state)* akan menggantikan negara bangsa *(nation states)* sebagai pintu gerbang memasuki perekonomian global. Demikian pula Porter (1990) yang telah mempertanyakan peran negara sebagai unit analisis yang relevan dengan mengatakan bahwa "para pesaing" di banyak industri, dan bahkan seluruh *kluster* industri, yang sukses pada skala internasional, ternyata seringkali berlokasi di suatu kota atau beberapa wilayah tertentu di dalam suatu negara.

Menurut Rodriguez-Pose (1998) bahwa digunakannya wilayah, dan bukan negara, sebagai unit analisis di banyak studi empiris disebabkan oleh

beberapa faktor, yakni: (1) Pendekatan *flexible specialisation*, yang pada dasarnya mendasarkan kasus Amerika dengan menitikberatkan analisis pada wilayah-wilayah, seperti Silicon Valley, Route 128 di Boston, dan Southern California; (2) pendekatan *Italian industrial districts* yang muncul dari analisis kisah sukses industri kecil dan menengah dengan memfokuskan analisis pada kluster-kluster industri; (3) mazab *French regulation school* berargumen bahwa runtuhnya model kapitalis mengenai regulasi dan akumulasi telah memicu dilakukannya banyak penelitian, terutama di sektor dan kluster industri; (4) pendekatan *Jerman*, yang menekankan peran institusi sebagai motor perubahan dalam proses produksi, cenderung memfokuskan pada analisis sektor industri dan wilayah-wilayah tertentu. Sejalan dengan trend di atas, maka penelitian ini memfokuskan analisis pada wilayah KAPET Parepare sebagai unit analisis.

Dalam kaitan itu, maka ilmu ekonomi wilayah (*regional*) merupakan bidang ilmu ekonomi yang banyak digunakan dalam menyusun perencanaan dan mengkaji masalah pembangunan ekonomi wilayah. Bidang ilmu ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang relatif baru dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya, seperti ekonomi internasional. Ilmu ekonomi wilayah mulai berkembang pada abad XIX sejalan dengan semakin berkembangnya minat para ahli ekonomi untuk melakukan analisis ekonomi dengan memperhatikan aspek *spatial*, yakni menitikberatkan pada pembahasan masalah lokasi dan tata ruang (Spillane dan Usman, 1993).

Pemikiran para ahli ekonomi wilayah didasari pada pertimbangan bahwa masalah lokasi dari setiap kegiatan produktif harus dipertimbangkan dan dipilih secara tepat agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Rahardjo A., 1989 : 2).

Dalam ilmu ekonomi wilayah, konsep tata ruang ekonomi sangat penting dan senantiasa digunakan dalam mengkaji masalah pembangunan ekonomi dan pengembangannya di suatu wilayah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tata ruang ekonomi senantiasa mengalami perubahan dan pertumbuhan karena adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik yang ada di dalam wilayah itu sendiri maupun pelaku-pelaku ekonomi yang berasal dari luar wilayah bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Akibatnya, beberapa kasus *spasial* akan senantiasa terjadi, seperti terjadinya pemusatan atau konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu di suatu wilayah; terjadinya urbanisasi ke perkotaan; terbentuknya pasar-pasar dan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru, dan sebagainya.

Peranan penting konsep tata ruang ekonomi yang menjadi dasar perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu ekonomi wilayah beberapa dasawarsa terakhir dipertegas pula oleh Perroux (1964) yang menyatakan bahwa dilihat dari segi hubungan formal pembangunan, maka tata ruang ekonomi merupakan tata ruang *polarisasi*, yakni sebagai suatu tempat di mana terdapat konsentrasi atau pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang relatif besar dan berbeda nyata dengan *hinterland*-nya.

Sejalan dengan usaha keras yang telah dilakukan oleh para ahli ekonomi wilayah untuk mengembangkan bidang ilmu ini, maka terlihat bahwa ilmu ekonomi wilayah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, utamanya sejak 50 tahun terakhir. Perkembangan ilmu ekonomi wilayah telah dipercepat pula oleh implikasi-implikasinya di bidang kebijaksanaan pembangunan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 50 tahun terakhir ini telah semakin memperjelas bahwa kekuatan-kekuatan pasar tidak mampu menciptakan kesamaan pendapatan antar wilayah. Perpindahan faktor-faktor produksi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antar wilayah, di mana wilayah-wilayah yang kurang berkembang akan menderita kerugian karena larinya modal dan sumberdaya manusia mereka ke wilayah-wilayah yang lebih maju. Oleh karena itu, desakan yang menuntut campur tangan pemerintah pusat dan daerah, terutama didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pemerataan antar wilayah, utamanya dalam distribusi pendapatan dan kesempatan kerja (Richardson, 2001).

Penerapan kebijaksanaan ekonomi dengan fokus kepada pembangunan ekonomi wilayah, utamanya di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, sangat intens dilakukan oleh pemerintah di negara-negara bersangkutan. Hal ini terlihat pada kebijaksanaan ekonomi yang telah diterapkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang banyak melaksanakan pembangunan ekonomi dengan mengelompokkan lingkungan territorial menjadi wilayah-wilayah sub nasional dengan mempertimbangkan 2

(dua) aspek utama, yaitu aspek fisik (geografis) dan aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Berkaitan uraian di atas, maka Arsyad (1999) menyatakan bahwa pada dasarnya pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu wilayah yang merupakan ruang ekonomi tertentu yang dapat dibedakan berdasarkan aspek fisik dan non fisik.

Secara umum, pembangunan ekonomi wilayah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah di wilayah tersebut beserta seluruh komponen masyarakatnya mengelola berbagai sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Blakely, 1989). Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi wilayah senantiasa terjadi proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta pengembangan perusahaan baru.

Pada dasarnya pembangunan wilayah berkaitan dengan tingkat dan perubahan sejumlah variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, dan sebagainya, selama kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah yang dibatasi secara jelas. Sejalan dengan itu, maka fokus analisis wilayah

adalah aktivitas *agregatif* (perekonomian makro) di wilayah tertentu *(node)* dalam suatu set wilayah-wilayah yang terpisah *(nodes)*.

Kegiatan pembangunan ekonomi wilayah penting untuk dilakukan mengingat bahwa pada dasarnya pembangunan nasional yang dilakukan di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, seperti Indonesia, merupakan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah yang berbeda tingkatannya berdasarkan luyas cakupan masing-masing wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksana-an pembangunan nasional yang diambil oleh pemerintah pusat pada dasarnya dilaksanakan di wilayah-wilayah yang berbeda tingkatannya tersebut.

Pembangunan ekonomi wilayah lebih penting lagi dilaksanakan di setiap negara jika dikaitkan dengan adanya perbedaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap wilayah dalam suatu negara, sehingga terlihat adanya wilayah yang cukup maju perekonomiannya dan dilain pihak terdapat pula wilayah yang masih relatif terbelakang. Dimana kesenjang-an tersebut cenderung menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat yang berada di wilayah yang relatif tertinggal tersebut, sehingga dapat mengancam keutuhan negara kesatuan yang telah lama terbangun.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan wilayah di negara-negara berkembang, selama ini telah digunakan 3 (tiga) konsep utama (Rondinelli, 1985), yakni:

1. Konsep Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Concept*)
2. Integrasi Spasial secara Fungsional (*Functional–Spatial Integration*).
3. Pendekatan Territonal yang terdesentralisasi (*Desentralized-Territional Approach*).

Ketiga konsep di atas akan diuraikan secara satu per satu sebagai berikut:

1. Konsep Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Concept*)

Penerapan konsep ini, utamanya pada negara-negara berkembang, adalah didasarkan pada 2 (dua) pertimbangan utama, yakni: (a) bahwa karena adanya keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki, maka tidak mungkin aktivitas pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan intensitas yang sama pada semua wilayah dalam waktu yang sama; dan (b) adanya kenyataan yang menunjukkan perbedaan kemampuan masing-masing wilayah dalam menyerap investasi karena adanya perbedaan potensi ekonomi yang dimiliki.

Adanya perbedaan intensitas aktivfitas ekonomi yang dilaksanakan serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, maka muncul ciri yang paling menyolok dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi di setiap wilayah, yakni *konsentrasi* dan *ketimpangan (unevenness)*. Konsentrasi aktivitas ekonomi secara *spasial* dalam suatu wilayah senantiasa wujud dalam proses pembangunan ekonomi wilayah, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang. Sebagai ilustrasi, di Amerika Serikat,

mayoritas industri manufaktur telah sekian lama terkonsentrasi pada suatu lokasi yang terkenal dengan sebutan "sabuk manufaktur" *(manutacturing belt),* yakni sejak paruh kedua abad ke-19 (Krugman, 1991: 114). Konsentrasi *spasial* yang serupa juga ditemukan di kawasan industri *Axial Belt di* Inggris dan sabuk manufaktur di Jerman Ruhr (Hayter, 1997: 45). Pengelompokan industri secara spasial *(spatial clustering)* di India, Itali, Portugal, Jepang, Australia, Brazil, dan Spanyol telah menjadi obyek kajian yang populer selama ini (Krugman, 1995; Krugman, 1998; Porter, 1998; Schmitz, 1995). Menariknya, di kebanyakan negara sedang berkembang, distribusi industri dan penduduk yang timpang mengelompok di sekitar ibukota negara, seperti Bangkok, New Delhi, Mexico City Sao Paulo, dan Jakarta, yang menandai suatu sistem spasial berdasarkan akumulasi modal dan tenaga kerja dalam *aglomerasi* perkotaan. Kendati demikian, fenomena ekonomi yang menarik ini ternyata masih kurang dianalisis secara mendalam. Ironisnya, arus pemikiran ekonomi yang utama, sebelum dasawarsa 1990-an, studi geografi ekonomi- studi "di mana" dan "mengapa" aktifitas ekonomi berlokasi— relatif diabaikan (Fujita, Krugman & Venables, 1999; Krugman, 1995).

Dalam kaitannya dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu pada wilayah tertentu, maka Hirschman (1970) menyatakan bahwa di suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan di mana industri-industri berkelompok karena di tempat tersebut dapat diperoleh berbagai manfaat dalam bentuk penghematan-penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan-kesempatan investasi, lapangan kerja dan upah buruh yang relatif tinggi lebih

banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan daripada di *hinterland*-nya. Antara pusat dan *hinterland*-nya terdapat ketergantungan dalam *supplay* barang dan tenaga kerja. Pengaruh *polarisasi* yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (*urbanisasi*) yang akan mengabsorbsi tenaga kerja terampil dan di lain pihak akan mengurangi pengangguran tidak kentara di *hinterland*-nya. Hal ini tergantung pada tingkat komplementaritas antara dua tempat tersebut, yakni jika tingkat komplementaritasnya kuat, maka akan terjadi proses penyebaran pembangunan ke *hinterland*. Sebaliknya jika tingkat komplementaritasnya lemah, maka akan terjadi pengaruh polarisasi (*Polarization Effect*).

Konsep kutub pertumbuhan (*Growth Pole)* ini diperkenalkan oleh Perroux (1964) yang dalam analisisnya menekankan penggunaan istilah kutub pertumbuhan (*Growth Pole*) yang pengertiannya sama dengan pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Hirschman (1970). Penekanan pengertian kutub pertumbuhan oleh Perroux dikaitkan pada ruang ekonomi, yakni "..... sebagai medan kekuatan, di mana ruang ekonomi mengandung pusat-pusat dan kutub yang mempunyai kekuatan *sentrifugal* yang memancar ke sekeliling dan mempunyai kekuatan *sentripetal* yang menarik sekitarnya ke pusat-pusat tersebut. Tiap pusat merupakan pusat penarik dan penolak serta mempunyai medan sendiri dalam suatu gugus medan pusat-pusat yang lain.

Perroux (1964) menyatakan bahwa pertumbuhan atau pembangunan tidak dilakukan di seluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat

banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan daripada di *hinterland*-nya. Antara pusat dan *hinterland*-nya terdapat ketergantungan dalam *supplay* barang dan tenaga kerja. Pengaruh *polarisasi* yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (*urbanisasi*) yang akan mengabsorbsi tenaga kerja terampil dan di lain pihak akan mengurangi pengangguran tidak kentara di *hinterland*-nya. Hal ini tergantung pada tingkat komplementaritas antara dua tempat tersebut, yakni jika tingkat komplementaritasnya kuat, maka akan terjadi proses penyebaran pembangunan ke *hinterland*. Sebaliknya jika tingkat komplementaritasnya lemah, maka akan terjadi pengaruh polarisasi (*Polarization Effect*).

Konsep kutub pertumbuhan (*Growth Pole)* ini diperkenalkan oleh Perroux (1964) yang dalam analisisnya menekankan penggunaan istilah kutub pertumbuhan (*Growth Pole*) yang pengertiannya sama dengan pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Hirschman (1970). Penekanan pengertian kutub pertumbuhan oleh Perroux dikaitkan pada ruang ekonomi, yakni "..... sebagai medan kekuatan, di mana ruang ekonomi mengandung pusat-pusat dan kutub yang mempunyai kekuatan *sentrifugal* yang memancar ke sekeliling dan mempunyai kekuatan *sentripetal* yang menarik sekitarnya ke pusat-pusat tersebut. Tiap pusat merupakan pusat penarik dan penolak serta mempunyai medan sendiri dalam suatu gugus medan pusat-pusat yang lain.

Perroux (1964) menyatakan bahwa pertumbuhan atau pembangunan tidak dilakukan di seluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat

atau lokasi tertentu. Tata ruang diidentifikasi sebagai arena atau medan kekuatan yang didalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat, dimana setiap kutub merupakan kekuatan pencaran pengembangan keluar dan kekuatan tarikan ke dalam.

Konsep dasar kutub pertumbuhan menurut Perroux (1964) dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Konsep industri atau perusahaan utama dan pendorong

   Perusahaan atau industri utama dan pendorong akan mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Hal ini berarti akan terdapat suatu gugus perusahaan atau industri pada kutub pertumbuhan tersebut. Lokasi geografis dapat terjadi berdasarkan manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari lokasi sumberdaya, tenaga kerja atau fasilitas/ prasarana.

b. Konsep *polarisasi*

   Pertumbuhan industri atau perusahaan utama dan pendorong akan menimbulkan polarisasi unit-unit ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan, sehingga terdapat aglomerasi ekonomi yang ditandai dengan: (1) *economic internal to the firm* yang dicirikan oleh biaya produksi rata-rata rendah yang ditimbulkan oleh produksi dalam skala besar, spesialisasi dan efisiensi; (2) *economic external to the firm but internal to industry* yang ditandai dengan penurunan biaya tiap unit produksi, karena lokasi tertentu dari industri tersebut; (3) *economic internal to industry but internal to urban area* yang dicirikan oleh

adanya penurunan biaya produksi rata-rata tiap perusahaan, karena banyaknya industri yang tumbuh pada suatu tempat atau kota.

Berdasarkan pandangan di atas, maka konsep ini percaya bahwa dengan lebih banyak berinvestasi pada industri padat modal di pusat-pusat kota besar, maka pemerintah di negara-negara berkembang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan wilayah di negaranya. Hal ini disebabkan karena skala ekonomis ditemukan di kota-kota besar yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, adanya dukungan komersial, jasa administrasi dan infrasturktur yang dibutuhkan oleh industri-industri yang beroperasi secara efisien dan menimbulkan diversifikasi pertumbuhan ekonomi di daerah pusat (*Pole*). Investasi dalam industri pada pusat pertumbuhan akan menjadi mesin pembangunan bagi kegiatan sektor pertanian dan kegiatan-kegiatan komersil.

Konsep kutub pertumbuhan ini didasarkan pada 3 (tiga) asumsi, yakni: (a) bahwa barang yang diproduksi dalam pusat pertumbuhan akan diekspor ke pusat metropolitan di negara tersebut dan luar negeri; (b) bahwa barang pabrikan lainnya akan datang dari pusat metropolitan ke pusat pertumbuhan; dan (3) bahwa operasi bebas kekuatan pasar akan menciptakan "reaksi" atau "efek menetes ke bawah (*tricle down effect*)" yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah.

Penerapan konsep ini sebagai strategi dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah telah dilakukan di banyak negara. Strategi ini

telah banyak menarik perhatian pemerintah sebagai penentu kebijaksanaan pembangunan ekonomi di negaranya dengan dilandasi beberapa pertimbangan sebagai berikut (Friedman et. al, 1964 dalam Abadi, 1995):

a. Berbagai aglomerasi ekonomi cenderung menjadi jalan yang efisien dalam rangka mewujudkan pembangunan;
b. Konsentrasi investasi di titik-titik pertumbuhan yang spesifik menjadi lebih murah, khususnya pembiayaan pemerintah daripada bila tersebar di wilayah-wilayah yang lebih luas;
c. *Spread effects* akan mengimbas ke wilayah sekitar titik-titik pertumbuhan yang akan menanggulangi masalah-masalah di *hinterland*.

Dalam kaitannya dengan penerapan konsep ini di negara-negara berkembang, seperti India, maka Misra (1975) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan pedesaan, maka pemerintah India menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yakni: (1) pembangunan masyarakat yang diperkenalkan pada tahun 1950-an; (2) pengembangan Blok; dan (3) pengembangan kawasan terpadu. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (dalam Abadi, 1995):

Pada tahun 1952 dilaksanakan 55 proyek pembangunan masyarakat pada 500 desa dengan total penduduk sebanyak 300.000 jiwa. Kegiatan penyuluhan sebagai unsur pokok dalam program ini dilaksanakan oleh *National Extension Service* (NES). Dalam pengembangan program ini

ditetapkan satu unit blok untuk setiap jumlah penduduk mencapai kurang lebih 100.000 jiwa. Oleh karena itu, India dibagi ke dalam 5.000 blok atau sekitar 15 – 16 blok untuk setiap distrik, sehingga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diharapkan sudah dapat meliputi seluruh negara. Selanjutnya, setiap blok tersebut mempunyai biaya tahuan tersendiri. Selama 5 (lima) tahun pertama, maka program ini telah mencakup 98 % dari total wilayah India. Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan politik terhadap pelaksanaan program ini yang sangat besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nehru bahwa program Pembangunan Masyarakat telah sukses sebagai program pembangunan bangsa.

Setelah program ini berjalan selama 10 (sepuluh) tahun, maka titik beratnya tidak lagi pada pengembangan tiap desa atau blok, tetapi dikembangkan menjadi pendekatan pembangunan regional yang lebih terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Perkembangan selanjutnya program ini yang diterapkan sampai saat ini adalah penerapan konsep pengembangan kawasan terpadu (PKT) yang merupakan integrasi vertikal dan horisontal dari aspek-aspek sosial, ekonomi, dan tata ruang, sehingga merupakan proyek multi sektor dan lintas sektoral. Setiap kawasan direncanakan dan diprogram sesuai dengan sumberdaya, tingkat pembangunannya dan lokasi spesifik dari kawasan tersebut dalam ruang lingkup regional dan nasional.

Penerapan konsep ini telah dilaksanakan pula di Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah sebelum program KAPET di

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dijalankan. Hal ini dapat dilihat pada konsep pembangunan Pulau Batam yang telah dibangun untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di KBI, khususnya bagi *hinterland*-nya yang ada di Propinsi Riau serta ditujukan untuk menampung kelebihan investasi di Singapura, karena jaraknya sangat dekat.

Dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa penerapan konsep pusat pertumbuhan ekonomi dalam membangun perekonomian Pulau Batam telah berhasil dijalankan oleh pemerintah yang ditandai dengan mampunya perekonomian Pulau Batam untuk berkembang dan bertumbuh dengan laju yang cukup tinggi, sehingga secara langsung menarik para investor masuk ke pulau ini untuk menanamkan modalnya serta para tenaga kerja yang berasal dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Keberhasilan penerapan konsep pusat pertumbuhan dalam mendorong pembangunan ekonomi Pulau Batam tidak terlepas dari adanya faktor eksternal sebagai faktor pendukung, utamanya faktor kedekatan jarak antara Pulau Batam dengan Singapura sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, utamanya kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh keterkaitan ekonomi Singapura dengan Pulau Batam dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pulau ini adalah sangat signifikan. Oleh karena itu, hal tersebut harus menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan konsep pusat pertumbuhan ekonomi guna mendorong laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

wilayah di KTI dengan membentuk KAPET, termasuk KAPET Parepare di Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kaitan dengan penerapan konsep ini, maka Hansen (1972) menemukan dalam studinya bahwa penerapan konsep ini di negara-negara Amerika Latin dan Afrika pada umumnya menunjukkan hasil yang tidak optimal karena rekasi dan efek menetes ke bawah adalah tidak cukup kuat untuk mendorong pembangunan wilayah dimana konsep ini diterapkan, serta senantiasa pusat-pusat pertumbuhan tersebut telah menjadi "*Daerah Kantong*" kegiatan modern yang akan menghisap bahan mentah, modal, tenaga kerja dan usahawan dari daerah-daerah pedesaan sekitarnya. Menurutnya bahwa penetesan ke bawah modernisasi tidak akan menyentuh masyarakat miskin, utamanya yang ada di daerah pedesaan.

Di banyak negara berkembang yang telah menerapkan konsep ini ditemukan bahwa dorongan konsentrasi investasi pada industri-industri padat modal di pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) tidak dapat menyebar dan insentif ekonomi untuk menyebarluaskan produktivitas tidak dapat diciptakan.

Dalam kaitan ini, maka Tyler (dalam Prantilla, 1981) menyatakan bahwa strategi "*Growth Centre*" hanya memperbesar ketimpangan dan perbedaan wilayah karena dalam kenyataannya banyak industri yang berada di dalam pusat-pusat pertumbuhan tersebut tidak mempunyai

kaitan (*linkage*) dan terisolir dengan sektor tradisional yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya, hasil studi Stohr dan Todling (1977) menunjukkan bahwa dampak atau manfaat strategi pusat pertumbuhan di China adalah kurang memuaskan, terutama *spread effect* ke *hinterland* tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. *Spread effect* pusat pertumbuhan biasanya lebih kecil dari yang diharapkan atau lebih kecil daripada *backwash effect* dan memberikan hasil akhir yang negatif bagi *hinterland*-nya. *Spread effects* secara geografis amat terbatas dan sempit, yakni biasanya terbatas pada *community area* dan berfungsi sesuai dengan ukuran pusat-pusat bersangkutan.

Kemudian dalam kerangka pembangunan yang lebih luas, khususnya pembangunan tata ruang, agak sulit untuk menerapkan konsep pusat pertumbuhan bagi wilayah- wilayah terbelakang, karena kurangnya *spread effects* dari kota ke *hinterland* yang lebih luas (Nichaus, 1969; Moseley, 1973; dan Hansen, 1972).

Selain itu, peningkatan pendapatan di pusat-pusat yang hirarkinya lebih rendah menyebabkan pengganda pendapatan yang kuat akan terjadi di pusat yang hirarkinya lebih tinggi, tidak sebaliknya, sehingga pembangunan lebih berorientasi ke atas (Isard, 1967; Misra, 1975).

Dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki konsep ini, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka konsep ini telah mengalami modifikasi dengan cara: (a) mengadakan pusat pelayanan di tingkat

lokal; (b) mengadakan titik pertumbuhan pada tingkat sub-wilayah; (c) Terdapat pusat pertumbuhan pada tingkat wilayah (*region*); dan (d) mengadakan kutub pertumbuhan pada tingkat nasional (Rondinelli dan Rudle, 1985; Hanafiah, 1986).

Selanjutnya, Rondinelli (1985) menyatakan bahwa "*the development of small towns can play important role and have functions that not only can stimulate the economy of the rural hinterlands but also can function as centers of social transformation*".

2. Integrasi Spasial secara Fungsional (*Functional – Spatial Integration*).

Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan sistem yang mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan yang berbeda ukuran dan ciri-ciri funsionalnya dapat memainkan peranan penting dalam memudahkan penyebaran pembangunan wilayah secara luas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa di banyak negara berkembang, pendorong utama pembangunan wilayah harus melalui pembangunan sektor pertanian daripada sektor industri. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memproduksi bahan pangan yang lebih banyak, perluasan lapangan kerja dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi bagi penduduk secara keseluruhan, utamanya penduduk miskin.

Rondinelli (1985) menyatakan bahwa jika tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar diharapkan untuk dicapai, maka beberapa pelayanan massa penting harus disediakan di

daerah pedesaan, seperti teknologi pertanian yang tepat guna, penyediaan bibit unggul, kredit dan input-input lainnya yang cukup. Pengaturan lembaga keuangan yang mudah diakses sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan arus modal ke daerah pedesaan dan meningkatkan tabungan penduduk desa. Oleh karena itu, menurutnya bahwa pembangunan kerangka lembaga untuk pembangunan pedesaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan untuk mengalihkan atau mengubah usaha pertanian subsisten ke usaha pertanian komersial serta perluasan kesempatan kerja non pertanian di daerah pedesaan dengan mendirikan industri-industri yang memproses produk-produk pertanian serta menghasilkan input yang dibutuhkan petani dalam mengelola usaha taninya, sehingga mereka dapat menekan biaya produksinya.

Selanjutnya, Johnson (dalam Rondinelli, 1985) menyatakan bahwa tanpa kemudahan ke suatu sistem pusat-pusat pasar yang terintegrasi, maka para petani tidak dapat dengan mudah menjual surplus produksi mereka, mendapatkan input yang dibutuhkan, memodernisasi tekhnologi yang mereka gunakan serta menyesuaikan produk mereka dengan permintaan konsumen.

Menurut Benyamin Fisher dan Rushton (1975) bahwa berdasarkan pengalaman penerapan perencanaan pembangunan daerah di India dan Indonesia, maka dengan menciptakan suatu sistem pelayanan pusat perdagangan produksi yang terintegrasi memberikan keuntungan bagi

pemerintah yang mencoba untuk meningkatkan pembagunan wilayah dan bagi pendududk yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena akan menciptakan efesiensi biaya transport bagi produsen dan konsumen, memudahkan konsumen untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, memungkinkan suatu monitoring yang lebih efesien dan efektif terhadap aktivitas-aktivitas yang diatur dalam pasar dan pusat-pusat pelayanan.

Selanjutnya, Bromley (1982) menyatakan tempat-tempat sentral yang merupakan system *Settlement* yang terintegrasi merupakan unsur-unsur yang sangat dibutuhkan dalam memfungsikan perekonomian pedesaan dan wilayah, sehingga memberikan keuntungan bagi pembangunan wilayah. Dalam kaitan ini, maka Roy dan Patil (1977) menyatakan bahwa terdapat suatu hubungan simbiotik antara pembangunan pusat-pusat pelayanan dengan pengembangan hinterlandnya.

Suatu system perkampungan (*Settlement*) yang terintegrasi dengan baik memberikan kemudahan potensil bagi penduduk yang tinggal di suatu region ke pasar yang berbeda-beda ukurannya dan untuk berbagai macam fasilitas-fasilitas kota dan input-input yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian. Tujuan atau sasaran strategis lokasional yang didasarkan pada pendekatan integrasi fungsional adalah untuk mengidentifikasi tingkat pelayanan yang paling rendah dan desa-desa di dalam gerakan menuju perbaikannya dimana secara bersama membentuk suatu unik yang giat dan aktifyang dapat mendorong suatu paket pelayanan minimum.

Menurut Rondinelli (1985), bahwa konsentarasi investasi yang terdesentralisasi melalui perkampungan-perkampungan (*Settlements*) yang berbeda ukuran dan ciri-ciri fungsionalnya dapat :

a. Menciptakan skala ekonomis, penyebaran efek yang menguntungkan bagi pendududk yang tinggal di pusat/kota dan daerah-daerah pedesaan sekitarnya.
b. Membantu mengatur perekonomian daerah-daerah hinterland melalui penawaran, pasar, adnistrasi dan system pelayanan pengiriman yang memberikan peningkatan dan diversifikasi kesempatan kerja yang dibutuhkan.
c. Membantu dalam menarik usahawan dan personal inovatif dan kreatif dengan nilai-nilai, sifat dan pola-pola perilaku yang dapat menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk inovasi di masa dating.
d. Memberikan hasil (*return*) dari investasi sebelumnya yang dapat digunakan untuk pembangunan selanjutnya dan untuk menciptakan keuntungan perbandingan lokasi dan kesempatan yang lebih baik bagi pertumbuhan dimasa datang melalui pengaruh-pengaruh ransangan.
e. Menciptkan tekanan dan permintaan untuk pembangunan pelayanan-pelayanan fasilitas dan infrastruktur yang baru, sehingga menciptakan suatu siklus pertumbuhan dan pengembangan secara terus menerus.
f. Menciptakan keterkaitan phisik dan ekonmomi antar perkampungan dan diantara mereka dengan daerah-daerah *hinterland*-nya yang

meningkatkan kemudahan untuk mencapai tempat-tempat sentral (pusat).

g. Menarik keterkaitan kegiatan ekonomi dan sosial yang tercipta melalui efesiensi kedekatan pasar-pasar baru dengan bahan baku barang setengah jadi dan komoditi-komoditi baru.

3. Pendekatan Territorial yang Terdesentralisasi (*Desentralized-Territorial Approach*).

Konsep ini kadang-kadang disebut territorial yang terdesentralisasi atau agropolitan. Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa : a) pertumbuhan pusat-pusat kota, seperti kota-kota pasar dan kota-kota menengah adalah bersifat parasit; dan b) pertumbuhan pusat-pusat kota tersebut mengizinkan para pelaku ekonomi kota untuk membangun kerja sama yang luas dengan agen-agen pemerintah pusat untuk mengexploitasi penduduk desa dan sumber daya pedesaan. Jika kota-kota kecil dan sedang didorong untuk tumbuh, maka mereka akan menjadi alat sederhana yang siap dimana para kaum elit akan mengeksploitasi penduduk desa dengan lebih efektif.

Dalam kaitan padangan di atas, maka Schatzburg (1979) menyatakan bahwa pembangunan kota-kota kecil akan menjadi perusak bagi penduduk desa yang miskin karena kota-kota kecil dan sedang merupakan pusat-pusat yang menyedot sumber daya keuangan dan sumberdaya manusia daerah-

daerah *hinterland*-nya dan menjadi penghalang bagi mengalirnya sumber daya dari kota-kota besar dan metropolitan ke daerah-daerah pedesaan.

Para penganjur konsep ini membantah pandangan bahwa penduduk desa memiliki keterbatasan kemampuan dalam berinovasi di sektor pertanian serta menyebarkan ide-ide dan praktek modern. Mereka melihat bahwa para pedagang kota hanya berusaha untuk memaksimalkan profit mereka dan tidak berusaha untuk mendorong tingkat pendapatan petani sebagai produsen.

Menurut mereka upaya memperkuat keterkaiatn antar kota-kota kecil dan sedang dengan kota besar (metropolitan) akan membuat banyak pekerja daerah pedesaan yang akan menganggur, memutuskan jaringan perdagangan lokal dan kegiatan–kegiatan produksi skala kecil serta melemahkan sistem struktur ekonomi kota-kota kecil dan pada akhirnya membuat ketergantungan mereka terhadap perekonomian metropolitan.

Oleh karena itu, para penganjur konsep ini menyatakan bahwa sebaiknya diterapkan strategi pembangunan yang menciptakan per-ekonomian pedesaan yang mandiri melalui minimalisasi keterkaitan dengan perekonomian metropolitan. Dalamkaitan ini, maka Friedman dan Douglas (1975) menganjurkan diterapkannya suatu pendekatan agropolitan dengan mengkonsentrasikan kegiatan pembangunan pada distrik-distrik pedesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 sampai dengan 150.000 orang. Otoritas perencanaan dan pengambilan keputusan perlu didesentralisasikan, sehingga penduduk pada distrik-distrik pedesaan tersebut akan lebih tertarik

untuk membangun daerah mereka. Kemudian perlu dibangun keterkaitan dan komunikasi yang lebih luas antara wilayah pedesaan dan kota kecil dengan kota-kota besar dan wilayah lainnya, dimana pada masing-masing lokasi tersebut terdapat spesialisasi-spesialisasi yang akan menjadi perekat bagi saling hubungan dan membutuhkan diantara lokasi itu, sehingga akan tercipta arus barang dan jasa serta input pada masing-masing lokasi tersebut. Keterkaitan yang terbangun antara wilayah pusat dengan *hinterland*-nya harus mampu menciptkan peluang baru yang besar bagi penduduk di *hinterland* tersebut, sehingga pembangunan tempat-tempat sentral di pusat kota tidak menjadi parasit bagi penduduk desa yang menjadi *hinterland*-nya.

Hasil studi Preston (1978) di Bolivia menunjukkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan tempat-tempat sentral di pusat kota terhadap penduduk miskin di *hinterland*-nya dapat diperkecil dengan syarat harus terbangun keterkaitan ekonomi antara tempat-tempat sentral tersebut dengan *hinterland*-nya yang saling menguntungkan, yakni keterkaitan tersebut harus mampu mendorong terjadinya inovasi pertanian, sebagaimana yang terjadi di daerah tanah tinggi di Bolivia, yang wujud dari seringnya terjadi kontak pribadi antar petani di kota-kota pasar, dimana para petani dapat melihat langsung produk-produk baru pertanian.

Adanya inovasi-inovasi pertanian yang gencar dilakukan oleh para petani, akan menciptakan kemajuan yang pesat di sektor pertanian yang

mengarah pada pengelolaan usaha tani yang modern, sehingga pada akhirnya akan tercipta wilayah agropolitan.

Agropolitan merupakan kota pertanian atau kota di wilayah lahan pertanian. Kota pertanian yang dimaksud disini adalah kota yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Rivai, 2003).

Agropolitan berada dalam wilayah pemasok hasil pertanian (sentra hasil pertanian) dimana wilayah tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Agropolitan ini dapat merupakan kota menengah atau kota kecil atau kota kecamatan dan desa yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan wilayah-wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi juga sebagai pembangunan sektor ekonomi secara luas, seperti usaha pertanian, industri kecil, industri RT, agrowisata, jasa pelayanan, dan sebagainya.

Agropolitan yang sudah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berilkut (Rivai, 2003) :

a. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan agrobisnis dan agroindustri.
b. Kegiatan di wilayah tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian (agrobisnis dan agroindustri), agrowisata dan jasa pelayanan.

c. Hubungan antara agropolitan dengan hinterland-nya bersifat timbal-balik (interdependensi) yang harmonis dan saling membutuhkan
d. Kehidupan masyarakat di agropolitan telah mirip dengan suasana kota karena keadaan sarana yang ada di wilayah tersebut tidak berbeda jauh dengan yang ada di kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya penerapan masing-masing konsep pendekatan pembangunan wilayah di atas memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga belum ada diantara konsep tersebut yang telah diterapkan secara efektif dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Untuk itu, perlu suatu modifikasi pendekatan dengan menggabungkan ketiga konsep di atas, sehingga kelemahan suatu konsep yang satu dapat ditutupi oleh konsep-konsep lainnya, sehingga mereka dapat bekerja secara efesien dan efektif dalam menpercepat pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia.

Penggabungan ketiga konsep tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1. Membentuk pusat-pusat pertumbuhan yang banyak dengan skala yang berbeda-beda, yakni skala besar,sedang dan kecil, dan tersebar di seluruh wilayah, sehingga lebih mudah menhubungkan mereka.
2. menciptakan spesialisasi regional di masing-masing wilayah yang akan mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar wilayah atau antar pusat-pusat pertumbuhan di masing-masing wilayah tersebut. Keterkaitan ekonomi tersebut akan terwujud dalam bentuk terjadinya

arus barang dan jasa serta imput di masing-masing wilayah atau pusat pertumbuhan tersebut.

3. Meningkatkan integrasi fungsional antar wilayah atau pusat pertumbuhan berdasarkan spesialisasi regional yang dimiliki masing-masing dengan cara membangun infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan untuk melakukan interaksi antar pelaku ekonomi dimasing-masing wilayah atau pusat pertumbuhan tersebut.
4. Mendesentralisasikan kewenangan (otoritas) dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pelaku ekonomi di masing-masing wilayah, sehingga akan tercipta kemandirian pelaku ekonomi masing-masing wilayah tersebut, utamanya dalam melakukan inovasi-inovasi termasuk inovasi di sektor pertanian yang pada akhirnya akan menciptakan agropolitan, mengingat bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Indonesia, utamanya bagi penduduk yang berada di daerah pedesaan.

Jika cara-cara diatas dapat diterapkan dengan baik dan benar dalam pembangunan wilayah, maka :

1. Dapat direm derasnya arus urbanisasi dari desa ke kota yang selama ini senantiasa menimbulkan berbagai masalah di wilayah perkotaan.
2. Dapat dihindari terjadinya kota sebagai parasit atau penghisap sumber daya-sumber daya daerah pedesaan uyamanya sumber daya alam, tenaga kerja terampil, usahawan dan modal.

3. Kebijakan otoda dapat berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan esensi otoda, yakni pelayanan, kemandirian, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
4. Daya saing produk-produk yang dihasilkan di setiap wialyah di Indonesia, dapat meningkat untuk memasuki pasar global.

Untuk dapat melaksanakan langkah-langkah di atas, maka penekanan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan wilayah harus didasarkan kepada ciri khas wilayah bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik wilayah tersebut. Untuk dapat mewujudkan hal ini, maka pemerintah daerah harus mampu menjalankan beberapa bentuk peran dalam pembangunan di wilayahnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Blakely, (1989), yakni:

1. *Peran Wirausaha*

Sebagai wirausaha, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah kabupaten/kota dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnva, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Pantai, jalan raya, dan pusat hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja. Pemerintah kabupaten/kota memainkan peran

penting dalam menjalankan kewirausahaan sebagai pencipta peluang kerja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan swasta, atau untuk menjamin tersedianya jasa yang tidak mampu disediakan oleh perusahaan swasta.

Melaui peran sebagai wirausaha, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk jeli dan proaktif dalam mengembangkan bisnis di daerahnya masing-masing, termasuk bagaimana memanfaatkan aset mereka, mendorong pertumbuhan bisnis di daerahnya dan pemberdayaan masyarakat marginal.

2. *Peran Koordinator*

Pemerintah kabupaten/kota dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnva. Lebih jauh, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi, seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran, dan jumlah perusahaan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota dapat pula bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat, badan usaha, dan kelompok masyarakat lainnya dalam penyusunan tujuan, perencanaan, dan strategi ekonomi.

Perencanaan pembangunan ekonomi wilayah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan dimana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama

antara pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat lainnya. Pendekatan wilayah biasanya lebih efektif karena perhatian pemerintah dapat terpusat pada perekonomian wilayah dan dapat pula menciptakan pengelolaan wilayah yang lebih baik dan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota.

3. *Peran Fasilitator*

Pemerintah kabupaten/kota dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berbeda dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah kabupaten/kota dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya. Adanya tujuan yang jelas juga memberikan dasar berpijak untuk penentuan program-program tambahan yang lain.

4. *Stimulator*

Pemerintah kabupaten/kota dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke kabupaten/kota tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerahnya. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk

menarik pengusaha untuk masuk ke suatu kabupaten/kota, misalnya dengan menyediakan bangunan-bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha dengan potongan biaya sewa pada tahun pertama.

Konsep Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) memiliki relevansi yang sangat erat dengan teori pembangunan wilayah. Dilihat dari aspek kriteria penetapannya, maka konsep KAPET ini didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, teori pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi (Aswandi dan Kuncoro, 2002).

Sebagai wilayah yang memiliki potensi yang lebih besar untuk tumbuh dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam suatu provinsi, berarti KAPET memiliki faktor-faktor kelebihan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Menurut Todaro (2000) bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni: akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan tekhnologi (technological progress). Pada KAPET ini, penciptaan peluang investasi dapat dilakukan dengan memberdayakan sektor/ubsektor unggulan yang dimiliki kawasan ini. Hal ini relevan dengan pandangan Perroux (1988) yang mengatakan bahwa industri unggulan (*L'industrie matrice*) merupakan penggerak utama dalam pembangunan wilayah. Adanya sektor/industri unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena pemusatan industri tersebut akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar kabupaten/kota dalam suatu wilayah, sehingga

perkembangan industri di suatu kabupaten/kota akan mempengaruhi perkembangan perekonomian kabupaten/kota lainnya dalam wilayah tersebut serta wilayah-wilayah lainnya yang berkaitan. Menurut teori basis ekonomi, maka sektor unggulan yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan sektor basis, sehingga kriteria penetapan suatu KAPET harus memiliki sektor unggulan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dan keterkaitan ekonomi di dalam KAPET adalah relevan dengan teori basis.

B. PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH

Adanya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Menurut Sieber (1969) "*Regional economic growth is the sustained increase in the volume of an economic variable of a spatial subsystem of a nation*".

Dari definisi di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu terjadi jika variabel-variabel ekonomi yang dijadikan sebagai indikator mengalami perubahan dalam periode waktu tertentu. Variabel-variabel ekonomi yang pada umumnya digunakan sebagai indikator dalam melihat atau mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, antara lain: (a) peningkatan output yang dihasilkan di wilayah tersebut, baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi; (b) peningkatan permintaan (konsumsi) masyarakat di wilayah tersebut seiring dengan adanya

peningkatan pendapatan mereka; (c) peningkatan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.

Melihat uraian di atas, maka pertumbuhan ekonomi setiap wilayah harus senantiasa ditingkatkan karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan menciptakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sebagai tujuan akhir dari serangkaian kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di wilayah itu.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka terdapat faktor-faktor penentu yang senantiasa perlu dipertimbangkan. Dimana faktor-faktor penentu tersebut pada umumnya dapat dibagi 2, yakni faktor internal dan eksternal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan faktor internal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah menimbulkan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, teori-teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang telah ada saat ini senantiasa memperhatikan faktor-faktor penentu tersebut dalam analisisnya.

Faktor-faktor internal penentu tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang telah banyak dikaji atau dianalisis oleh para peneliti dan ahli ekonomi wilayah selama ini, antara lain adalah faktor ketersediaan sumber daya alam (faktor endowment) dan sumberdaya manusia di wilayah tersebut; keadaan geografi dan topografinya; keadaan sosial masyarakatnya; dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tingkat mobilitas input, utamanya tenaga kerja dan modal, antara wilayah tersebut dengan wilayah

lainnya; tingkat penyebaran pengetahuan antara wilayah tersebut dengan wilayah-wilayah lainnya; tingkat mobilitas output (barang dan jasa) antara wilayah tersebut dengan wilayah-wilayah lainnya.

Selain harus memahami proses dan penentu-penentu dari pertumbuhan ekonomi wilayah yang menjelaskan perbedaan-perbedaan antar wilayah, maka sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah berbagai ketimpangan antar wilayah akan kembali menjadi imbang dengan sendirinya.

Dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah, maka teori tempat sentral (*central place theory*) adalah yang paling banyak diteliti dan paling terkenal. Konsep teori ini dikaitkan dengan nama Christaller dan karya perintisnya tentang *The Central Places of Southern Germany*. Teori ini bermaksud untuk menghubungkan tempat sentral dengan *hinterland*-nya dan mendefinisikan tempat sentral sebagai suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk di *hinterland*-nya..

Teori-teori lainnya yang telah digunakan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah adalah: (1) teori sektor yang menunjukkan bahwa perkembangan wilayah pada hakekatnya adalah suatu proses evolusioner *intern*; dan (2) teori basis ekspor yang menitik-beratkan permintaan terhadap ekspor wilayah yang bersangkutan.

Teori sektor merupakan salah satu teori pertumbuhan wilayah yang paling sederhana. Teori ini timbul dari pengamatan empirik yang dilakukan oleh Clark dan Fisher, 1940 (dalam Glasson, 1990 : 87) yang telah menemu-

kan bahwa kenaikan pendapatan per kapita di berbagai wilayah pada berbagai waktu pada umumnyai dibarengi oleh *realokasi* sumberdaya, dengan penurunan proporsi angkatan kerja yang dipekerjakan dalam kegiatan-kegiatan primer (pertanian), dan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan sekunder (*manufakturing*) dan kemudian disusul dengan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan tersier (jasa). Laju perubahan sektor seperti itu serta evolusi spesialisasi dan pembagian kerja *intern* yang diakibatkannya, dipandang sebagai sumber dinamika bagi pertumbuhan wilayah.

Teori yang merupakan perluasan dari teori sektor ini adalah *teori tahap* (*stages theory*) yang menyatakan bahwa perkembangan wilayah merupakan suatu proses *evolusioner intern* dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Tahap pertama adalah tahap perekonomian subsistem dan swasembada, dimana hanya terdapat sedikit investasi atau perdagangan. Lapisan penduduk pertanian yang merupakan basis distribusi menurut lokasasi sumberdaya alam;
b. Seiring dengan kemajuan pengangkutan dalam wilayah yang bersangkutan mengembangkan perdagangan dan spesialisasi, sehingga muncul lapisan kedua yang mengusahakan industri desa sederhana untuk memenuhi kebutuhan para petani. Oleh karena pada mulanya semua bahan, pasar dan tenaga kerja disediakan oleh penduduk pertanian, maka lapisan baru ini berlokasi pada tempat yang berkaitan dengan lapisan basis;

c. Oleh karena adanya kegiatan perdagangan antar daerah dalam wilayah tersebut, maka wilayah tersebut maju melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian, yakni dari pengembalaan ternak yang *extensif* ke tanaman biji-bijian ke peternakan *intensif* dan penanaman buah-buahan;

d. Seiring dengan pertambahan penduduk dan semakin berkurangnya tambahan hasil pertanian, maka wilayah tersebut terpaksa melakukan industrialisasi. Industri sekunder berkembang, yakni mula-mula meng-olah produk-produk primer, kemudian semakin lebih ber-spesialisasi;

e). Tahap terakhir adalah pengembangan industri tersier yang meng-hasilkan produk untuk ekspor. Wilayah yang berkembang seperti ini akan mengekspor modal, ketrampilan dan jasa jasa yang bersifat khusus ke wilayah lain.

Dalam proses pertumbuhan menuju kematangan ini senantiasa terjadi perubahan-perubahan fundamental dalam struktur organisasi industri, terutama dalam bentuk berkurangnya jumlah unit usaha dalam suatu industri tertentu dengan ditutupnya unit-unit usaha kecil serta lebih terkonsentrasian ke dalam perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan lebih kuat. *Rasionalisasi* keorganisasian ini ditambah dengan *realokasi intern* semula antar sektor-sektor yang menyebabkan pula terjadinya perubahan-perubahan penting dalam pola lokasi dan pemukiman di wilayah tersebut yang men-

dorong terjadinya migrasi dari pusat-pusat kecil ke pusat-pusat yang lebih besar serta dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

Namun demikian, teori ini memiliki pula kelemahan, sehingga telah banyak dikritik, utamanya yang berkaitan dengan keketatannya dalam menetapkan urutan "primer-sekunder-tersier", atau kelima tahap yang terlalu menekankan keharusan industrialisasi, serta hanya mempunyai kemiripan yang kecil dengan perkembangan wilayah yang sesungguhnya. Selain itu, teori ini kurang memperhatikan pula hubungan-hubungan keluar suatu wilayah. Padahal perekonomian wilayah merupakan perekonomian yang sangat terbuka, sehingga kelemahan teori ini merupakan suatu kelemahan fundamental.

Meskipun teori ini memiliki banyak kelemahan yang telah dikritik oleh banyak orang, tetapi teori ini telah memberikan manfaat, yakni memberikan suatu gambaran umum mengenai tahap-tahap perkembangan wilayah dan menunjukkan syarat-syarat untuk berpindah dari suatu tahap ke tahap lain. Ia memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penting dari struktur industri dan jenis lapangan pekerjaan, dan perubahan-perubahan pola permintaan dan produktivitas, sehingga memberikan suatu titik-tolak yang bermanfaat untuk menganalisis pertumbuhan wilayah secara *disagregatip*.

Suatu pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan penentu-penentu *intern* dari pertumbuhan wilayah adalah melalui penggunaan *model- model*

ekonomi makro. Model-model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan *output* wilayah menurut faktor-faktor wilayah tertentu, yang masing-masing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri. Model pertumbuhan neo-klasik yang sederhana ini dapat disesuaikan untuk memperoleh suatu model pertumbuhan wilayah yang mantap (*a model of steady regional growth*).

Walaupun model ekonomi-makro ini menonjolkan beberapa penentu pokok dari pertumbuhan wilayah dan dapat digunakan untuk menerangkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, namun pendekatan ini masih mempunyai kelemahan-kelemahan dasar, terutama berkaitan dengan sifatnya yang sangat *agregatip* dan konsentrasinya pada segi penawaran.

Perkembangan selanjutnya teori pertumbuhan wilayah telah mulai mempertimbangkan faktor luar (*external*) wilayah sebagai faktor yang turut mempengaruhi atau menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tingkat mobilitas barang dan jasa (output) serta faktor produksi modal dan tenaga kerja (input) antar kabupaten/kota dalam suatu wilayah antau antar wilayah adalah lebih tinggi daripada antar negara. Relevan dengan hal ini, maka Glasson (1990) menyatakan bahwa dalam perekonomian yang sangat *interdependen* dewasa ini, wilayah bukanlah semacam tabung kosong yang ditutup terhadap segala kekuatan luar, tetapi "terbuka" bagi arus perdagangan dan informasi yang datang dari dunia luar. Derajat keterbukaan tersebut adalah berbeda-beda menurut faktor-faktor, seperti topografi dan

tahap perkembangan ekonomi di luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, faktor-faktor luar harus diperhitungkan dalam setiap penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Salah satu teori yang telah memperhitungkan faktor *external* dalam menganalisis fenomena pertumbuhan ekonomi wilayah adalah *teori basis ekspor* (*export base theory*). Teori ini merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan faktor permintaan luar dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada dasarnya, teori ini menerapkan model basis ekonomi statik komparatif jangka-pendek dalam situasi pertumbuhan dinamik jangka-panjang. Menurut teori ini, perekonomian suatu wilayah dapat dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor basis dan sektor bukan basis. Sektor basis merupakan sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang dapat diekspor keluar wilayah bersangkutan. Sedangkan sektor bukan basis merupakan sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang hanya ditujukan untuk memenuhi konsumsi bagi penduduk di wilayah itu sendiri. Antara sektor basis dan bukan basis terdapat hubungan kausal (sebab akibat), yakni bahwa pertambahan output sektor basis di suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah tersebut, sehingga dapat menambah permintaan terhadap output sektor bukan basis yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kegiatan di sektor bukan basis.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh *exploitasi* manfaat-manfaat alamiah dan pertumbuhan basis ekspor wilayah

tersebut, sehingga sangat tergantung kepada tingkat permintaan dari wilayah dan negara lain. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari penjualan ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, terjadinya perpindahan modal dan tenaga kerja, terjadinya keuntungan-keuntungan *external* dan pertumbuhan lebih lanjut wilayah bersangkut. Teori ini memandang tingkat permintaan luar terhadap produk dari industri atau sektor ekspor suatu wilayah sebagai faktor penentu yang strategik bagi pertumbuhan wilayah, sehingga sektor basis diyakini memiliki peranan sebagai penggerak utama (*prime mover*).

Namun demikian, dalam penerapannya ternyata konsep sederhana yang sangat menarik ini memiliki kelemahan. Selain berbagai keterbatasan teknik dan konseptualnya, terdapat pula beberapa persoalan lainnya jika teori ini digunakan untuk analisa dinamik jangka-panjang, diantaranya yang dapat menyesatkan adalah sifat teori ini yang sangat *agregative*. Pemisahan secara sederhana antara wilayah bersangkutan dan bagian dunia lainnya, menyembunyikan saling hubungan antar wilayah, dimana saling hubungan tersebut justru sangat penting dalam pertumbuhan wilayah. Pengagregasian menutup pula kenyataan bahwa pertambahan dalam beberapa industri basis dapat mempunyai efek pertumbuhan wilayah yang jauh lebih besar-daripada industri-industri lainnya di wilayah tertentu. Selain itu, masih ada persoalan-persoalan fundamental lainnya yang muncul dari penerapan teori ini, seperti apakah pertumbuhan ekspor akan selalu mengakibatkan

pertumbuhan wilayah dan apakah pertumbuhan ekspor hanya ditentukan oleh permintaan luar serta bagaimana pengaruh-pengaruh *intern* dan *extern* lainnya yang dianggap tidak begitu penting di dalam teori ini?.

Berkaitan dengan pertanyaan pertama di atas, maka keberhasilan pertumbuhan sektor ekspor (sektor basis) untuk merambat ke dalam pertumbuhan setempat dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah pada umumnya adalah tergantung pada beberapa variabel lainnya, seperti pendapatan dan pengeluaran sektor ekspor, prakarsa bisnis di wilayah tersebut dan peranan pemerintah. Jika pendapatan ekspor terutama digunakan untuk membeli barang-barang mewah, atau jika bisnis setempat tidak melakukan investasi di wilayah bersangkutan, atau jika pemerintah tidak menyediakan prasarana yang diperlukan, maka wilayah tersebut mungkin akan tetap berada dalam keadaan tergantung kepada wilayah-wilayah luar, dan akan mengalami pertumbuhan yang sangat rendah.

Meskipun sektor basis merupakan suatu penentu pokok pertumbuhan wilayah, namun nasibnya bukan hanya ditentukan oleh tingkat permintaan dari luar wilayah karena ternyata faktor-faktor *intern* memainkan pula peranan yang cukup penting. Faktor-faktor seperti itu sebenarnya diakui pula oleh para pendukung teori ini, walaupun titik-berat teori ini masih tetap pada tingkat permintaan luar sebagai penentu pokok. Selanjutnya, pertumbuhan ekspor suatu wilayah dipengaruhi pula oleh faktor-faktor, seperti kemajuan teknik yang mengubah komposisi relatif input serta

perkembangan infrastruktur transportasi yang memungkinkan untuk meningkatkan daya saing suatu wilayah karena biaya transpor telah dapat ditekan.

Selain itu, pengaruh faktor pertumbuhan *intern* wilayah itu sendiri merupakan faktor yang cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan kegiatan-kegiatan setempat yang menggantikan barang-barang impor dapat mendorong perkembangan wilayah tersebut. Pengaruh-pengaruh internal lainnya, seperti tingkat pengeluaran pemerintah, perubahan pola investasi dan konsumsi, dapat pula memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan wilayah daripada perubahan-perubahan basis expor.

Meskipun demikian, teori ini memang menekankan kenyataan yang penting bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara langsung terikat pada perkembangan-perkembangan di dalam perekonomian nasional dan perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak dapat dipelajari secara terpisah dari perubahan pola permintaan dan investasi nasional. Teori ini secara jelas menampilkan konsep Keynesian tentang permintaan *agregat* sebagai suatu penentu pertumbuhan, walaupun menonjolkan ekspor sebagai komponen primer dalam permintaan tersebut.

Suatu metode yang lebih *komprehensip* dan memasukkan faktor-faktor *extern* sebagai faktor penentu pertumbuhan wilayah adalah melalui

penerapan teori perdagangan internasional kepada wilayah. Model-model alokasi sumberdaya *interregional*, pertama kali dikembangkan oleh Ohlin (dalam Glasson, 1990) yang mengasumsikan bahwa faktor-faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal akan mengalir keluar dari wilayah yang rendah tingkat upahnya ke wilayah- wilayah yang lebih tinggi tingkat upahnya. Misalnya, jika upah tenaga kerja di suatu wilayah lebih rendah daripada di semua wilayah lainnya, maka ada kemungkinan terjadinya arus keluar ke wilayah lain atau arus masuk modal yang hendak memanfaatkan rendahnya biaya tenaga kerja di wilayah tersebut, ataupun suatu kombinasi dari kedua kemungkinan itu. Alokasi sumber daya *interregion* ini merupakan suatu faktor pertumbuhan yang utama.

Sebagaimana dapat diduga, model-model pertumbuhan ekonomi nasional juga dipergunakan untuk menjelaskan penentu-penentu *external* pertumbuhan wilayah. Formulasi ini adalah suatu teori yang didominasi oleh permimtaan yang menjelaskan laju pertumbuhan wilayah berdasarkan faktor-faktor permintaan *exogen*, seperti investasi dan ekspor. Luas lingkup teori ini adalah lebih luas daripada teori basis ekspor, tetapi dibatasi pula oteh pendekatannya yang bersifat satu-pihak dan tingkat agregasinya yang tinggi.

Walupun teori-teori pertumbuhan umum mengakui pentingnya struktur sektor ekonomi dalam proses pertumbuhan wilayah, namun sifatnya yang *agregatip* seringkali menyembunyikan perbedaan-perbedaan sektor ekonomi yang penting. Sektor ekonomi tidaklah *homogen* dan beberapa

sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada sektor-sektor ekonomi lainnya. Kemudian beberapa wilayah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada wilayah- wilayah lainnya. Oleh karena struktur sektor ekonomi di suatu wilayah berbeda dengan wilayah- wilayah lainnya, maka timbul kecenderungan untuk menarik kesimpulan bahwa antara struktur sektor ekonomi dan pertumbuhan wilayah terdapat suatu hubungan *kausal*. Analisa struktur industri berusaha menjelaskan hubungan ini. Metode pendekatan ini dipelopori oleh Jones (1958) dan Leser (1951) di Inggris dan kemudian dikembangkan oleh Dunn dan Perloff (1960) di Amerika Serikat. Penerapannya yang pertama di Inggris dilakukan oleh Hemming pada tahun 1963. Pendekatan analisis struktur ekonomi ini kemudian berkembang menjadi "*shift share analysis*", dan menjadi salah satu metode pendekatan yang semakin populer saat ini.

Suatu pertanyaan yang cukup penting diajukan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yakni apakah pertumbuhan wilayah itu *konvergen* atau *divergen*. Apakah "*gap*" antara kabupaten/kota makmur dan kabupaten/kota kurang makmur akan bertambah lebar ataukah menyempit dalam periode waktu tertentu?. Martin (1997) telah menemukan bahwa integrasi perdagangan di Eropa telah menimbulkan ketidak-seimbangan antar wilayah. Menurutnya, bahwa kenyataan ini telah diper-ingatkan oleh teori pertumbuhan klasik yang telah memprediksi bahwa integrasi wilayah akan menimbulkan konvergensi.

Beberapa diantara teori pertumbuhan yang sudah dibicarakan di atas menunjukkan bahwa ketidak-seimbangan wilayah dapat menjadi seimbang kembali dengan sendirinya, sehingga kurang memerlukan campur tangan pemerintah. Menurut teori sektor, luas-lingkup dari alokasi sumberdaya *internal* adalah besar di daerah pertanian miskin daripada di daerah yang lebih berkembang, sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan *konvergensi* kemakmuran wilayah. Arus faktor yang terjadi dalam perdagangan antar wilayah (*interregional)* telah menunjukkan pula terjadinya *konvergensi* pendapatan per kapita di suatu wilayah. Timbulnya kerugian-kerugian skala dapat pula membatasi pertumbuhan wilayah-wilayah kaya, sehingga wilayah-wilayah miskin dapat mengejar ketertinggalannya dari wilayah-wilayah kaya tersebut.

Namun demikian, dalam praktek kecenderungan *konvergensi* itu mungkin juga dibatasi oleh mobilitas perpindahan faktor produksi antar sektor ekonomi dan antar kabupaten/kota dalam suatu wilayah, sehingga keseimbangan perekonomian antar wilayah dan antar kabupaten/kota tidak dapat tercipta dengan sendirinya dengan hanya mengandalkan mekanisme pasar tetapi harus ada campur tangan pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, jika keseimbangan wilayah yang merupakan tujuan utama yang hendak dicapai dalam melaksanakan pembangunan wilayah, maka kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan mobilitas faktor produksi antar sektor dan antar wilayah maupun antar kabupaten/kota merupakan keharusan, sehingga dibutuhkan untuk segera membangun infrastruktur

transportasi dan telekomunikasi yang memadai. Menurut Martin (1997) cara ini telah diterapkan oleh pemerintah di negara-negara Eropa selama periode 1960-an sampai dengan 1970-an untuk mengatasi ketidakseimbangan antar wilayah di negaranya masing-masing. Bahkan mereka telah melaksanakan secara aktif kebijaksanaan pemberian subsidi untuk menarik industri-industri dan investasi ke wilayah-wilayah miskin. Bentuk kebijaksanaan seperti ini cukup efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, sehingga perlu pula dicoba untuk diterapkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, meskipun membutuhkan biaya yang cukup besar.

Salah satu kelompok *hybrida* dari teori-teori pertumbuhan wilayah yang mengakui bahwa pertumbuhan wilayah itu mungkin saja bersifat *divergen* dan bukannya *konvergen* adalah teori *"centre periphery"* (teori pusat lingkungan) yang dikemukakan oleh Myrdal (1957), Hirschman (1958), dan Friedman (1967).

Myrdal,1957 (dalam Glasson, 1990 : 101) menjelaskan bahwa proses *kausalisasi kumulatif* dapat terjadi berdasarkan kekuatan relatif dari "*spread effects*" dan "*backwash effect*". "*Spread effects*" merupakan kekuatan-kekuatan yang menciptakan *konvergens*i antara wilayah kaya dan wilayah miskin. Seiring dengan pertumbuhan wilayah kaya, maka bertambah pula permintaannya terhadap produk dari wilayah miskin, sehingga mendorong pertumbuhan wilayah miskin tersebut. Keluarnya faktor-faktor produksi dari wilayah miskin dapat mendorong lebih efisiennya penggunaan sumberdaya

melalui *reaksi intern* dari sektor upah rendah ke sektor upah tinggi dan produktivitas tinggi yang menimbulkan pertumbuhan. Di wilayah kaya dapat juga timbu kerugian skala, tetapi Myrdal percaya bahwa *spread effect* seperti itu pasti lebih kecil daripada *backwash effect*-nya karena pertambahan permintaan terhadap barang-barang dari wilayah miskin tersebut, terutama barang-barang hasil pertanian, mempunyai elastisitas pendapatan yang rendah.

Teori *centre-periphary* yang menitik-beratkan *kausalisasi kumulatif* dalam menganalisis pertumbuhan wilayah yang *divergen*, memberi pemahaman mengenai proses pertumbuhan dengan menggabungkan banyak unsur dari teori-teori lainnya. Teori ini mempunyai pula implikasi-implikasi kebijaksanaan yang penting karena jika proses pertumbuhan ekonomi itu tidak secara otomatis menyeimbangkan diri sendiri (*self-equilibrating*) maka diperlukan campur tangan pemerintah untuk membantu wilayah-wilayah yang lebih miskin. Dalam kaitan ini, maka pemerintah di negara-negara Eropa telah menerapkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam menyusun kebijaksanaan sebagai upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di negara mereka, yakni: (1) memperbanyak dan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan (model polycentric); (2) membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara kota dengan desa (*Urban–Rural Partnertship*); dan (3) menjamin kemudahan dan kesamaan untuk mengkases infrastruktur dan telekomunikasi (Martin,

1997). Konsekwensi penerapan ketiga pendekatan ini menggambar-kan berbagai dimensi integrasi *spasial*.

Kemudian salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah yang selama ini telah ditemukan dan banyak diuji kebenarannya oleh ahli-ahli ekonomi wilayah adalah *aglomerasi* dan *kluster*. Keduanya ditemukan telah menciptakan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi di suatu daerah tertentu di wilayah tersebut. Hasil pengujian empirik yang telah dilakukan oleh Krugman (1991), Baldwin (1997), Baldwin dan Forsild (2000), Martin dan Ottaviano (2001) dan Sbergami (2002) sampai pada kesimpulan yang sama bahwa *aglomerasi* dan *kluster* mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional.

Menurut Martin dan Ottaviano (2001) bahwa pertumbuhan ekonomi dan *aglomerasi* geografi merupakan proses yang saling menguatkan dengan syarat harus ada sektor *inovasi* yang berfungsi sebagai mesin atau motor pertumbuhan. Hal ini relevan dengan pernyataan Rivera – Batiz dan Romer, 1991 (dalam Sbergami, 2002) bahwa pertumbuhan *agregate* nasional dan wilayah tergantung pada total jumlah *inovasi* yang dilakukan pada masa lalu. Demikian pula, biaya *inovasi* akan berkurang seiring dengan banyaknya inovasi yang telah dilakukan pada masa lalu. Dalam kaitannya dengan biaya transaksi, maka biaya *inovasi* akan lebih efisien di daerah di mana lebih banyak perusahaan yang berlokasi di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena konsentrasi produksi dan aktivitas ekonomi akan menciptakan sebaran pengetahuan (*knowlidge spillover*).

Di balik itu, Sbergami (2002) telah menemukan pula bahwa ternyata penyebaran kegiatan ekonomi yang sama ke banyak daerah yang berdekatan di suatu wilayah adalah lebih baik bagi pertumbuhan *agregate* wilayah tersebut dan nasional dibandingkan dengan hanya mengkonsentrasi-kannya dalam beberapa daerah. Selain itu, ia menemukan pula bahwa penyebaran sektor-sektor ekonomi dengan suatu tekhnologi tinggi (*hight-tech*) akan mempertinggi pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Selanjutnya, Sbergami (2002) menyatakan bahwa terdapat hubungan positip antara *aglomerasi* dan *kluster* dengan kegiatan ekonomi dan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah, utamanya dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.

Dalam kaitannya dengan pandangan Sbergami di atas, maka pemberlakuan otonomi daerah dan liberalisasi perdagangan dapat dijadikan sebagai moment untuk menyebarkan konsentrasi aktivitas ekonomi di banyak daerah yang berdekatan, termasuk kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan kabupaten/kota di sekitarnya, utamanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan, sehingga pada akhirnya dapat diharapkan akan mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan antara kabupaten/kota di wilayah ini dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Selanjutnya, Krugman (1991) menyatakan bahwa jika banyak faktor produksi yang berpindah antar negara atau wilayah, maka akan mendorong terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan *aglomerasi*

atau *kluster*. Hal ini disebabkan karena mobilitas faktor produksi antar negara atau wilayah tersebut akan meningkatkan elastisitas penawaran faktor produksi. Namun demikian Baldwin (1997) mengusulkan suatu cara alternatif untuk menciptakan *aglomerasi* tanpa melalui migrasi faktor produksi karena ia menemukan bahwa akumulasi faktor produksi dapat memainkan peranan yang sama dengan migrasi faktor produksi dalam mengembangkan *aglomerasi* melalui keterkaitan permintaan. Oleh karena itu, akumulasi faktor produksi akan dapat pula menopang terjadinya *aglomerasi* dan *kluster*.

Menurut Kuncoro (2002 :219) bahwa ada beberapa aspek pembentuk *aglomerasi*, yakni: (a) skala ekonomis; (b) spesialisasi; dan (c) keanekaragaman (*diversifikasi*) aktivitas ekonomi yang ada di suatu wilayah. Keanekaragaman mendorong inovasi dan mencegah stagnasi aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan terjadinya sebaran pengetahuan dan pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, perlu diciptakan keanekaragaman aktivitas ekonomi di suatu wilayah jika pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut ingin dipacu dengan syarat bahwa aktivitas ekonomi tersebut harus saling berkaitan dan saling menguatkan, baik keterkaitan ke belakang maupun keterkaitan ke depan.

Kemudian Preer (1992) mengemukakan bahwa salah satu sumbangan yang paling penting dari teori neo-klasik adalah pengenalan terhadap keuntungan-keuntungan *aglomerasi*. Oleh karena itu, para pelopor teori neo-klasik (Neo-Classik Theory/NCT) mengajukan argumentasi bahwa *aglomerasi* muncul dari perilaku para pelaku ekonomi

dalam mencari penghematan *aglomerasi*, baik penghematan lokalisasi maupun urbanisasi. *Kluster* industri ala Marshal telah menawarkan beberapa manfaat *eksternalitas* melalui kedekatan geografis dan pengelompokan aktivitas produksi yang khusus. Teori-teori lokasi tradisional berpendapat bahwa *kluster* industri muncul terutama karena biaya transportasi dan produksi (Isard, 1956 dan Weber, 1909). Teori-teori ini bersandar pada beberapa asumsi, dimana basis geografi bahan mentah, ukuran lokasi konsumsi, dan tenaga kerja yang tidak mudah berpindah dan jumlahnya yang tidak terbatas, dianggap konstan.

Satu masalah yang paling serius dari teori neo klasik adalah kegagalannya dalam menangkap dinamika perubahan geografis pada tingkat global, sebagaimana yang ditekankan oleh Preer (1992) yang meliputi: (1) menurunnya peran sabuk manufaktur tradisional di Eropa dan Amerika Utara serta munculnya wilayah industri baru di "kawasan matahari" (*sun belt*); (2) menurunnya kota-kota dan menjamurnya daerah *sub-urban* dan pedesaan; (3) munculnya kota-kota besar sebagai pusat perusahaan, produsen, dan jasa; (4) munculnya *Technopolis* yang mendorong pusat inovasi teknologi pada skala wilayah.

Tumbuhnya kesadaran mengenai terbatasnya daya penjelas teori-teori lokasi yang tradisional dalam analisis ekonomi suatu wilayah telah mendorong munculnya teori baru, yakni geografi ekonomi baru *(new economic geography* atau *geographical economics)* (Fujita & Thisse, 1996). Argumen dasar teori ini menekankan pentingnya hasil yang meningkat *(increasing*

returns), skala ekonomis, dan persaingan yang tidak sempurna. Pelopor teori ini percaya bahwa ketiga hal ini jauh lebih penting daripada hasil skala yang konstan *(constant return to scale),* persaingan sempurna, dan keunggulan komparatif dalam menjelaskan perdagangan dan ketimpangan distribusi kegiatan ekonomi antar wilayah.

Perkembangan teori geografi ekonomi baru yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini didorong oleh adanya promosi dan karya Paul Krugman. Kontribusi Krugman yang cukup penting, sebagaimana telah diidentifikasi oleh Martin & Sunley (1996) adalah: (1) usahanya untuk mengkaitkan penghematan *eksternal* dan *aglomerasi* industri dalam skala wilayah dengan perdagangan. Ekonomi geografi ala Krugman merupakan kombinasi model persaingan tidak sempurna dan skala ekonomis yang digunakan dalam perdagangan baru, dan teori lokasi yang menekankan pentingnya biaya transportasi; (2) disadari bahwa pembangunan ekonomi wilayah merupakan proses historis *(path-dependent process);* (3) kejutan pada suatu daerah dapat menimbulkan konsekuensi pertumbuhan jangka panjang.

Walaupun teori ini menawarkan wawasan yang menarik mengenai kesenjangan geografis distribusi kegiatan ekonomi, tetapi memiliki pula beberapa kelemahan. Suatu kajian kritis atas munculnya kembali dimensi geografi dalam ilmu ekonomi menyimpulkan bahwa teori ekonomi geografi baru bukanlah pendekatan yang sama sekali baru dalam ilmu

ekonomi, melainkan hanya merupakan penemuan kembali teori lokasi tradisional dan ilmu wilayah (Martin, 1999 : 122).

C. KETERKAITAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA

Dalam kondisi perekonomian terbuka, sebagaimana yang terjadi saat ini, maka aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang ada dalam suatu wilayah senantiasa terkait dengan para pelaku ekonomi lainnya, baik yang ada di kabupaten/kota lain di wilayah tersebut maupun di wilayah lainnya dan luar negeri. Adanya keterkaitan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di suatu wilayah dan dengan di wilayah-wilayah lainnya dan luar negeri telah menimbulkan terjadinya arus barang dan jasa (oputput) dan input (tenaga kerja dan modal) yang wujud dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Akibatnya, kinerja perekonomian masing-masing kabupaten/kota di suatu wilayah, selain ditentukan oleh faktor internal juga ditentukan oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan keadaan ekonomi di kabupaten/kota lainnya dalam wilayah ini dan di wilayah lainnya serta luar negeri sebagai tujuan ekspor dan sumber barang dan jasa yang diimpor.

Keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota merupakan keterkaitan yang tercipta dari adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota tersebut, sehingga terjadi

transaksi (*supply* dan *demand*) antar pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota tersebut yang selanjutnya menciptakan terjadinya arus atau aliran output (barang dan jasa) dan input (tenaga kerja dan modal) antar kabupaten/kota itu.

Oleh karena adanya perbedaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota dalam suatu wilayah dan masing-masing wilayah dalam suatu negara, maka senantiasa terlihat adanya perbedaan kinerja perekonomian dan tingkat kemakmuran antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya dalam suatu wilayah dan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam suatu negara. Perbedaan tersebut terlihat pada adanya konsentrasi aktivitas ekonomi di lokasi tertentu dalam suatu wilayah serta adanya konsentrasi aktivitas eknomi tertentu di suatu lokasi, dimana pusat konsentrasi aktivitas ekonomi tersebut selanjutnya berkembang menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah *hinterland*-nya. Antara pusat pertumbuhan dengan *hinterland*-nya biasanya terjadi kesenjangan yang cukup menyolok, utamanya dalam hal Kinerja perekonomian dan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Hal tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil penelitian para ahli ekonomi regional di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang, pada umumnya terjadi karena terjadinya penghisapan sumberdaya daerah-daerah *hinterland* oleh pusat pertumbuhan, sehingga dalam perspektif ini maka kehadiran pusat pertumbuhan telah menjadi parasit bagi *hinterland*-nya.

transaksi (*supply* dan *demand*) antar pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota tersebut yang selanjutnya menciptakan terjadinya arus atau aliran output (barang dan jasa) dan input (tenaga kerja dan modal) antar kabupaten/kota itu.

Oleh karena adanya perbedaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota dalam suatu wilayah dan masing-masing wilayah dalam suatu negara, maka senantiasa terlihat adanya perbedaan kinerja perekonomian dan tingkat kemakmuran antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya dalam suatu wilayah dan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam suatu negara. Perbedaan tersebut terlihat pada adanya konsentrasi aktivitas ekonomi di lokasi tertentu dalam suatu wilayah serta adanya konsentrasi aktivitas eknomi tertentu di suatu lokasi, dimana pusat konsentrasi aktivitas ekonomi tersebut selanjutnya berkembang menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah *hinterland*-nya. Antara pusat pertumbuhan dengan *hinterland*-nya biasanya terjadi kesenjangan yang cukup menyolok, utamanya dalam hal Kinerja perekonomian dan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Hal tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil penelitian para ahli ekonomi regional di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang, pada umumnya terjadi karena terjadinya penghisapan sumberdaya daerah-daerah *hinterland* oleh pusat pertumbuhan, sehingga dalam perspektif ini maka kehadiran pusat pertumbuhan telah menjadi parasit bagi *hinterland*-nya.

Untuk menghindari kesenjangan antara pusat pertumbuhan dengan *hinterland*-nya, maka perlu diciptakan keterkaitan yang saling menguntungkan antara pusat pertumbuhan dengan *hinterland*-nya berdasarkan pertimbangan saling membutuhkan. Keterkaitan tersebut meliputi:

a. Keterkaitan produksi.

   Keterkaitan ini terjadi, karena setiap proses produksi memerlukan bahan baku. Idealnya *Hinterland* harus mampu memasok bahan baku yang dibutuhkan pada kegiatan produksi di wilayah pusat pertumbuhan;

b. Keterkaitan pemasaran.

   Keterkaitan ini merupakan konsekwensi dari adanya proses produksi di pusat pertumbuhan yang menghasilkan output yang perlu dipasarkan di *Hinterland*-nya maupun ke wilayah-wilayah lainnya.

c. Keterkaitan Transportasi.

   Kedua macam keterkaitan di atas memerlukan dukungan keterkaitan transportasi. Oleh karena itu, antara pusat pertumbuhan dengan *Hinterland*-nya dan antara satu pusat pertumbuhan dengan pusat-pusat pertumbuhan lainnya harus ada sarana dan prasarana transportasi yang cukup memadai yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut.

Berdasarkan potensi wilayah, maka ada 2 (dua) macam keterkaitan antar kabupaten/kota dalam suatu wilayah yang dapat dikembangkan, yakni (Sapto, 1999):

1. Keterkaitan *Aggregate*.

   Bentuk keterkaitan antar kabupaten/kota yang mempunyai potensi atau komoditas yang sama;

2. Keterkaitan *Complementary*.

   Bentuk keterkaitan antara kabupaten/kota yang mempunyai potensi atau komoditas ekonomi yang berbeda, sehingga antar kabupaten/ kota dalam wilayah tertentu bisa saling melengkapi, yakni kegiatan produksi dan pemasaran dapat dilaksanakan di wilayah tersebut.

   Pada wilayah yang terbentuk keterkaitan *Complementary* ini hanya dibutuhkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan kabupaten/ kota yang ada dalam wilayah ini.

Selanjutnya, Rondinelli (1985) menyatakan bahwa ada beberapa tipe keterkaitan yang senantiasa wujud dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah selama ini, yaitu:

1. Keterkaitan fisik, seperti jaringan jalan, irigasi, transportasi;
2. Keterkaitan ekonomi, seperti pasar, arus bahan baku dan barang setengah jadi, arus produksi, arus konsumsi (belanja), arus modal, arus pendapatan, aliran komoditi, dan sebagainya;
3. Keterkaitan pergerakan penduduk (migrasi dan urbanisasi);
4. Keterkaitan teknologi.
5. Keterkaitan sosial, yang wujud dalam bentuk interaksi sosial dan budaya, misalnya kegiatan ritual keagamaan, interaksi kelompok sosial, dan sebagainya.

6. Keterkaitan penyediaan pelayanan; dan
7. Keterkaitan politik, administratif dan organisasi.

Selain itu, tipe keterkaitan yang ada di suatu kabupaten/kota berkaitan pula dengan tingkat kemajuan masyarakat di kabupaten/kota tersebut, yakni pada saat masyarakatnya masih relatif terbelakang, maka kabupaten/kota tersebut masih mengandalkan tipe keterkaitan konsumsi dan jasa tradisional. Sedangkan kabupaten/kota yang relatif maju akan lebih fokus pada tipe keterkaitan produksi dengan keterkaitan ke depan dan ke belakang yang lebih kompleks. Sementara itu, keterkaitan finansial akan melanda semua wilayah seiring dengan meningkatnya proses desentralisasi (otonomi daerah).

Selanjutnya, menurut Bandavid (1991) bahwa keterkaitan produksi merupakan salah satu bentuk keterkaitan yang senantiasa wujud dalam keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kegiatan pengkajian (penelitian) terhadap keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota yang terwujud dalam bentuk keterkaitan produksi (barang dan jasa) untuk memperoleh beberapa manfaat, antara lain: (1) dapat dihitung besarnya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekspor dan besarnya kerugian yang diderita akibat adanya impor; (2) dapat diketahui atau dideteksi arus barang dan jasa antar daerah; (3) dapat diketahui cara bagaimana memperluas keterkaitan ekonomi yang menguntungkan dan sebaliknya mempersempit bagi yang merugikan; serta (4) dapat diketahui cara bagaimana menjalankan perekonomian suatu kabupaten/kota.

Selanjutnya, Bandavid (1991) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam prinsip keterkaitan produksi antar kabupaten/kota, yakni:

a. Keterkaitan produksi ke depan (*foreward*); menyangkut *processing* suatu produk akhir;
b. Keterkaitan produksi ke belakang (*backward*); menyangkut penawaran input-input ke proses produksi.

Dalam hubungannya dengan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/ ota, maka ada beberapa hal yang perlu pula diteliti/dikaji, yakni:

a. Keterkaitan distribusi; Hal ini mengacu pada lokasi masing-masing daerah dalam jaringan transportasi antar kabupaten/kota;
b. Keterkaitan barang dagangan dan jasa publik. Hal ini dihubungkan dengan area pasar pembeli dan perdagangan jasa publik yang melewati batas suatu kabupaten/kota.

Dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah (propinsi atau kabupaten/kota), peningkatan produksi biasanya diarahkan kepada tiga kelompok komoditi, yakni:

1. *Komoditi wilayah*, yaitu komoditi yang produksinya terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di tempat komoditi itu di hasilkan;
2. *Komoditi antar wilayah*, yaitu komoditi yang prouksinya terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di wilayah lainnya, tetapi masih dalam satu negara.

3. *Komoditi ekspor*, yaitu komoditi yang produksinya terutama ditujukan untuk memenuhi permintaan di pasar internasional.

Selanjutnya, komoditi daerah dapat pula dibagi dua, yakni:

1. Komoditi murni wilayah, yaitu komoditi yang produksinya relatif kecil dan hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lokal di wilayah itu sendiri.
2. Komoditi wilayah yang diakibatkan oleh adanya biaya transpor. Komoditi ini mempunyai harga yang relatif sama antara tempat produsen dengan konsumen. Sebenarnya komoditi ini dapat ditingkatkan produksinya untuk diperdagangkan antar wilayah jika peningkatan produksinya dibarengi dengan efisiensi produksi, dimana besarnya tingkat efisiensi tersebut dapat merupakan keuntungan jika komoditi itu diperdagangkan antar wilayah.

Oleh karena adanya kegiatan perdagangan antar wilayah (propinsi atau kabupaten/kota), maka bisa saja komoditi murni suatu wilayah merupakan komoditi antar wilayah di wilayah lainnya. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada gambar 1.

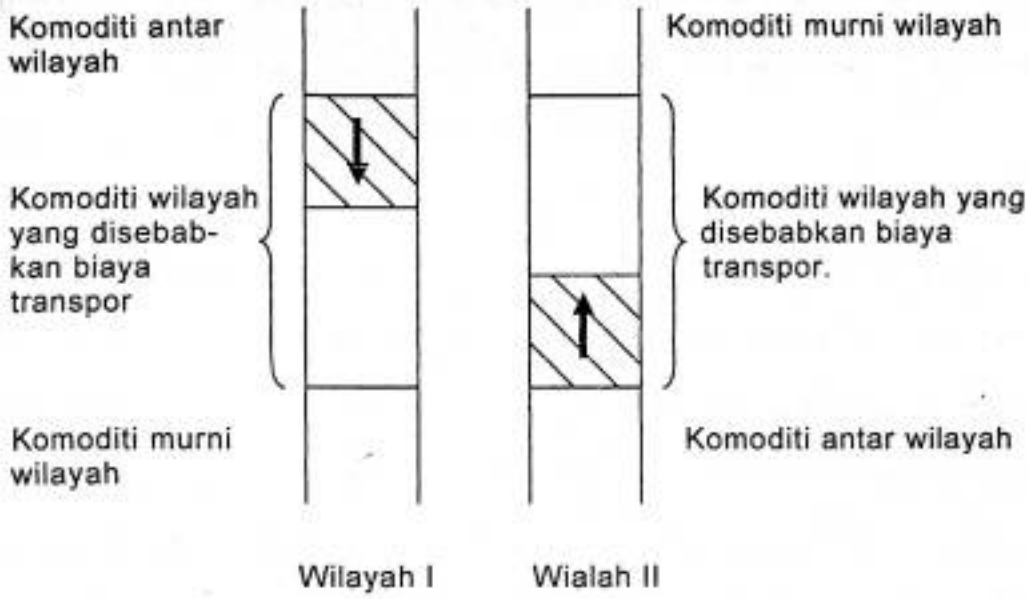

Gambar 1. Perbedaan tipe komoditi di dua wilayah (daerah)

(Sumber: A.R. Panetto, 1989)

Pada gambar 1 terlihat bahwa sekiranya produksi di wilayah I sama dengan di wilayah II, maka jenis komoditi antar wilayah di wilayah II merupakan komoditi murni di wilayah I. Hal ini dapat dilihat contohnya sebagai berikut: beras merupakan komoditi antar wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan, sedang di Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dewasa ini masih merupakan komoditi murni.

Untuk meneliti atau mengkaji keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di suatu wilayah, maka dapat digunakan beberapa alat analisis yang telah diaplikasikan oleh para ahli ekonomi regional dan peneliti-penelit lainnya, seperti analisis I – O, *Index Spesialisasi Regional*, analisis *multiplier*, *Location Quotient*, dan sebagainya. Penentuan alat analisis mana yang akan

digunakan dalam pengkajian yang dilakukan sangat ditentukan oleh faktor ketersediaan data dan sumberdaya yang dimiliki oleh si peneliti, utamanya ketersediaan sumberdaya dana, tenaga dan waktu.

Selain bentuk keterkaitan produksi, maka bentuk keterkaitan permintaan antar kabupaten/kota dalam suatu wilayah harus pula dikembangkan untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini relevan dengan pandangan Baldwin (1997) bahwa keterkaitan permintaan merupakan cara alternatif untuk menciptakan pemusatan kegiatan ekonomi di suatu *region* tanpa melalui migrasi faktor produksi. Hal ini disebabkan karena keterkaitan permintaan akan menciptakan akumulasi kapital yang memainkan peranan yang sama dengan migrasi faktor produksi dalam mengembangkan konsentrasi ekonomi (*aglomerasi*).

Keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam suatu KAPET dan antara KAPET dengan wilayah-wilayah lainnya sebagai salah satu kriteria penetapannya adalah relevan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditas sesuai dengan sektor/subsektor unggulan yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota dalam KAPET tersebut memungkinkan dilakukannya pemusatan kegiatan sektoral pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah itu yang akan meningkatkan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota tersebut serta dengan wilayah-wilayah lainnya di luar KAPET serta akan mempercepat pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di KAPET tersebut. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1995) bahwa masyarakat dapat lebih

efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja (spesialisasi) yang membagi keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi. Spesialisasi telah memungkinkan terbentuknya jaringan perdagangan antar individu, antar wilayah dan antar negara sedemikian luas sebagai salah satu ciri perekonomian yang maju dan terbuka. Adanya keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam suatu KAPET dan dengan wilayah-wilayah lainnya yang bersumber dari adanya spesialisasi di masing-masing kabupaten/kota dalam KAPET tersebut yang mendorong proses pertukaran sesuai kebutuhan masing-masing akan memungkinkan bergeraknya perekonomian masing-masing kabupaten/kota tersebut serta wilayah-wilayah lainnya yang terkait (*hinterland*) secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan.

D. PERKEMBANGAN STUDI/PENELITIAN TERDAHULU

1. Studi/Penelitian Keterkaitan Ekonomi Antar Wilayah

Analisis keterkaitan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah masih relatif baru dilaksanakan, yakni dimulai sejak dasawarsa 1980-an. Hal ini disebabkan oleh kurangnya data regional yang tersedia, sehingga harus dilakukan survey yang membutuhkan sumberdaya biaya dan tenaga cukup besar serta waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis tersebut. Alasan ini pula yang menyebabkan, sehingga tabel I – O antar daerah (IRIO) di Indonesia baru dibuat untuk pertama kali pada tahun 1985 dan terbatas pula dengan hanya

menggunakan 5 pulau utama di Indonesia. Data tersebut kemudian dikompilasi pada tahun 1989 dan dipublikasikan pada tahun 1990. Tabel IRIO yang dibuat pada tahun 1985 tersebut terdiri dari 25 sektor ekonomi dan 5 pulau utama di Indonesia, yakni Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan gabuangan pulau-pulau di Indonesia Bagian Timur, seperti Irian Jaya (Papua), Maluku, dan Nusa Tengara. Data Tabel IRIO Indonesia tahun 1990 ini telah dimanfaatkan oleh Ardani (1992) untuk menganalisis dampak Inpres dan pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap output, pendapatan dan kaitan antar sektor dan daerah. Kemudian Mudrajad Kuncoro (2000) telah memanfaatkannya pula untuk menganalisis eksternalitas aglomerasi dalam daerah metropolitan dengan mengambil daerah JABOTABEK sebagai daerah sampel.

Kemudian Abadi (1995) telah melakukan penelitian mengenai keterkaitan pembangunan ekonomi desa dan kota di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat analisis interregional I – O. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat keterkaitan antara pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan relatif masih rendah, pertumbuhan ekonominya kurang saling mendukung, dimana wilayah pedesaan memberi kontribusi yang lebih besar dalam bentuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan output terhadap wilayah perkotaan di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, Daryanto (2003) dalam penelitiannya mengenai disparitas pembangunan perkotaan-pedesaan di indonesia telah menemukan bahwa

efek keterkaitan konsumsi yang diinduksi oleh sektor pertanian menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibanding efek keterkaitan produksi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai keterkaitan konsumsi yang besar dengan sektor-sektor lainnya, sehingga sangat potensil untuk dijadikan sebagai perekat keterkaitan ekonomi antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan di Indonesia.

Adaya keterbatasan data yang tersedia di tingkat wilayah serta alasan dibutuhkannya dana yang cukup besar untuk melakukan survey guna mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka analisis keterkaitan ekonomi antar wilayah telah dilakukan pula dengan menggunakan alat analisis wilayah (regional) lainnya. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan alat analisis *Index Spesialisasi Regional* (Index Krugman) oleh oleh Kim (1995) untuk menganalisis spesialisasi regional di Amerika Serikat. Kemudian Kuncoro (2001) menggunakannya untuk mengukur dan menganalisis perkembangan tingkat spesialisasi antar kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Selatan serta antar kabupaten/kota di kawasan andalan dengan kabupaten/kota di luar kawasan andalan di Propinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, alat analisis ini telah digunakan pula oleh Aswandi dan Kuncoro (2002) dalam mengevaluasi penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan dengan melihat keterkaitan ekonomi kabupaten/kota dalam kawasan andalan dengan kabupaten/kota di luar kawasan andalan tersebut di Propinsi Kalimantan Selantan.

Kemudian Achjar (2003) telah pula melakukan penelitian mengenai peranan undang-undang otonomi daerah mengatasi ketimpangan wilayah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penerapan undang-undang otonomi daerah selama ini masih banyak persoalan yang terabaikan, utamanya masalah keterkiatan antar wilayah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan antara KTI dengan KBI. Padahal sebenarnya dimensi ruang (spasial) dalam pendekatan pemabngunan wilayah sebenarnya tidak hanya melihat wilayah sebagai bagian dari sub nasional, tetapi juga bagaiman wilayah itu dapat berinteraksi satu sama lain (*interregional linkage*) yang mampu menimbulkan sinergi, sehingga kegiatan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat memberikan dampak (*spillover effect*) positip terhadap wilayah sekitarnya. Dalam penelitiannya ini ditemukan pula masih lemahnya keterkaitan antar wilayah di lingkungan intra KTI. Sebaliknya, wilayah di KTI justru lebih banyak berinteraksi dengan KBI. Misalnya, kebutuhan input produksi di Proponsi Papua justru lebih banyak didatangkan dari Jawa dibandingkan dari Makassar sebagai pusat pertumbuhan utama di KTI.

Penelitian lainnya mengenai keterkaitan ekonomi antar wilayah telah dilakukan pula oleh Tsang, Shu-ki dan Yuk-Shing (1996) yang telah mengkaji mengenai keterkaitan ekonomi antara Hongkong dengan Guandong dilihat dari aspek alokasi sumberdaya antara kedua wilayah perkotaan tersebut. Hal penelitian mereka menemukan bahwa telah terjadi suatu perubahan alokasi sumberdaya di kedua wilayah perkotaan tersebut akibat adanya kebijakan keterbukaan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah China.

Kemudian Martin (1997) telah pula meneliti mengenai pengaruh kebijakan regional terhadap pertumbuhan regional di Eropa. dalam penelitian ini ia menemukan bahwa integrasi perdagangan di Eropa telah menimbulkan ketidakseimbangan antar wilayah yang disebabkan oleh faktor timbulnya konvergensi dalam integrasi tersebut. Menghadapi kenyataan ini, maka pemerintah di Eropa telah menempuh kebijakan regional yang sifatnya khusus selama periode 1960-an sampai 1970-an, yakni dalam bentuk pemberian subsidi secara aktif dan pembangunan infrastruktur, utamanya infrastruktur transportasi dan komunikasi, di wilayah-wilayah yang miskin untuk menarik industri-industri masuk ke wilayah tersebut.

Selanjutnya, dapat pula dilihat analisis keterkaitan ekonomi antar wilayah yang telah dilakukan Bandavid (1991) dengan menfokuskan kajiannya pada keterkaitan produksi antar wilayah di Amerika Serikan dengan menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ).

Suedekum (2004) telah pula melakukan kegiatan penelitian mengenai "*Concentration and specialization trends in Germany since reunification*". Hasil penelitiannya menemukan bahwa integrasi ekonomi mempengaruhi struktur aktivitas ekonomi spasila di Jerman dalam bentuk spesialisasi regional dan konsentrasi industri-industri secara geografi.

Dalam kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas ekonomi yang dilaksanakan di suatu wilayah terhadap wilayah-wilayah lainnya, maka dapat dilihat hasil penelitian Tjahjati (2003) mengenai dampak pembangunan industri di Lhok Seumawe, Ace Utara terhadap

lingkungan sekitarnya yang menunjukkan bahwa keterkaitan antara industri besar di wilayah tersebut dengan wilayah sekitarnya dapat dikatakan tidak ada, sehingga hanya menjadikan pembangunan Lhok Seumawe sebagai "*Enclave*" dan terisolir dari wilayah sekitarnya. Keadaan tersebut terjadi karena kehidupan masyarakat di sekitar Lhok Seumawe masih tetap berorientasi kepada sektor pertanian tradisional, sedangkan di Lhok Seumawe sendiri telah terbangun penuh dengan teknologi modern yang mempunyai karakteristik padat modal.

Selanjutnya, hasil penelitian Kuncoro (2004) mengenai dampak pembangunan ekonomi terhadap tipologi propinsi-propinsi di KTI berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan index pembangunan manusia (Human Developmen Index/HDI) selama periode 1993 – 2000 dengan menggunakan alat analisis Typologi Klassen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, maka propinsi di KTI yang termasuk dalam klasifikasi wilayah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Propinsi Papua, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kemudian yang berada pada klasifikasi wilayah berkembang cepat adalah Propinsi NTB, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan propinsi yang berada pada klasifikasi wilayah maju tapi tertekan adalah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya, propinsi-propinsi lainnya masuk klasifikasi sebagai wilayah relatif tertinggal.

2. Studi/Penelitian Sektor Unggulan

Dalam kaitannya dengan studi/penelitian mengenai sektor unggulan suatu wilayah, maka dapat dilihat hasil penelitian Maulana (1999) dengan menggunakan alat analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP) untuk melihat deskripsi struktur ekonomi wilayah Bangka-Belitung di Propinsi Sumatera Selatan dengan penekanan pada kriteria pertumbuhan ekonomi, baik secara eksternal (Propinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah acuan) maupun internal (wilayah Bangka-Belitung sebagai wilayah studi). Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula alat analisis LQ untuk menganalisis sector ekonomi basis (unggulan) di wilayah Bangka-Belitung dengan menggunakan criteria kontribusi masing-masing sector ekonomi terhadap PDRB wilayah ini dan Propinsi Sumatera Selatan sebagai daerah acuan. Hasil perhitungan dengan menggunakan MRP dan LQ tersebut selanjutnya di overlay untuk melihat deskripsi sector unggulan di wilayah Bangka-Belitung berdasarkan criteria pertumbuhan dan kontribusi secara bersamaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah Bangka-Belitung mempunyai keunggulan yang khas untuk masing-masing kabupaten/kota yang ada di dalamnya, yakni: (1) Kabupaten Bangka mempunyai keunggulan dalam pengembangan kegiatan primer dan sekunder, terutama pertanian dan industri pengolahan; (2) Kabupaten Belitung mempunyai keunggulan dalam pengembangan kegiatan sekunder dan tersier (perdagangan, hotesl dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, terutama jasa pariwisata); dan (3) Kota Pangkalpinang mempunyai keunggulan dalam pengembangan kegiatan sekunder dan tersier

(bangunan/konstruksi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa, terutama kegiatan pemerintahan dan pusat perdagangan).

Kemudian Muchdie (2000) telah meneliti pula mengenai kompetensi inti sector unggulan KAPET Manado-Bitung menunjukkan bahwa sector perkebunan (budidaya kelapa), sector pertambangan (tambang emas), sector perikanan (hasil tangkapan ikan tuna) dan sector peternakan (ayam pedaging dan ayam petelur) mempunyai indeks inti yang tergolong kuat. Sementara sector industri (industri kecil, menengah dan kerajinan), sector pertambangan (panas bumi, pasir, besi dan kaolin) mempunyai indeks kompetensi inti yang tergolong lemah.

Soepono (2001) dalam penelitiannya dengan menggunakan LQ untuk mengidentifikasi sektor unggulan atau sector basis dan bukan basis di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selama periode 1985 – 1995 menemukan bahwa sector listrik, gas dan air yang merupakan sektor basis (sector unggulan) Kabupaten Badung pada tahun 1985 berubah menjadi sector non basis (bukan unggulan) pada tahun 1995. Sebaliknya, sektor pertambangan dan galian yang merupakan sector non basis (bukan unggulan) pada tahun 1985 berubah menjadi sector basis (sector unggulan) pada tahun 1995.

Selanjutnya, penelitian mengenai identifikasi sector/subsektor unggulan di suatu wilayah dengan menggunakan alat analisis LQ telah pula dilakukan pula oleh Aswandi dan Kuncoro (2002) dalam mengevaluasi penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan selama periode 1993 – 1999. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di

kawasan andalan, memiliki naliai LQ lebih besar dari 1 (satu) pada beberapa subsektor ekonomi. Artinya, semua kabupaten/kota yang ada dalam kawasan andalan di Propinsi Kalimantan Selatan memiliki subsektor unggulan, sehingga penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sector unggulan di propinsi ini dapat dipandang sudat tepat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, maka perekonomian Indonesia masih menampakkan ciri-ciri umum, seperti yang dikemukakan oleh Todaro (2000), yakni:

a. Standar hidup masyarakat yang masih rendah sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan kesejahteraan yang parah, serta kurang memadainya pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan;
b. Tingkat produktivitas yang rendah;
c. Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi;
d. Angka pengangguran yang tinggi dan akan terus bertambah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas; dan
e. Ketergantungan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan-bahan mentah).

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat perlu dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat serta kesempatan kerja, sehingga masalah pengangguran secara perlahan-lahan dapat diatasi, dan pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia dituangkan dalam bentuk pembangunan nasional dan dijabarkan di setiap daerah yang men-jalankan pembangunan ekonomi daerahnya masing-masing dan lebih diintensifkan beberapa tahun terakhir ini seiring dengan dijalankannya strategi desentralisasi program pembangunan ekonomi dalam rangka mendukung perwujudan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama ini, terlihat bahwa aktivitas pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan di setiap wilayah dalam proporsi yang sama. Hal ini disebabkan oleh faktor: (1) keterbatasan sumberdaya, utamanya dana pembangunan, yang dimiliki; (2) terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat daripada wilayah lainnya. Wilayah-wilayah seperti ini pada umumnya terdapat di Kawasan Barat Indonesia (KBI), sehingga terlihat selama ini bahwa aktivitas pembangunan ekonomi lebih dominan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ada di KBI. Akibatnya, perekonomian wilayah-wilayah yang ada di KBI lebih maju dibanding dengan wilayah-wilayah yang ada di KTI. Oleh karena itu, selama ini terlihat bahwa telah

terjadi ketimpangan ekonomi antara wilayah-wilayah yang ada di KBI dengan wilayah-wilayah di KTI. Padahal wilayah-wilayah di KTI memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah.

Pemerintah Indonesia telah menyadari hal ini, sehingga mengambil kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah yang ada di KTI. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan membentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada 12 propinsi di KTI. Pembentukan KAPET di KTI dilaksanakan berdasarkan KEPRES No. 89, Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditembah dengan KEPRES No. 150, Tahun 2000, Tentang KAPET.

Penetapan wilayah tertentu sebagai KAPET dilaksanakan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya potensi ekonomi dan infrastruktur yang dimiliki serta letak strategis geografis wilayah bersangkutan, sehingga memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kepres tersebut untuk dijadikan sebagai KAPET, yakni: (1) wilayah tersebut mempunyai potensi untuk cepat tumbuh; (2) wilayah tersebut mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya; serta (3) memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya (Anonim, 1996).

Strategi pembentukan KAPET ditempuh oleh pemerintah dengan tujuan agar dana pembangunan yang terbatas jumlahnya dapat difokuskan pada pembangunan satu wilayah yang selanjutnya dapat berfungsi sebagai titik simpul tumbuhnya wilayah-wilayah di sekitarnya. Dengan demikian,

KAPET di KTI diharapkan dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan (*prime mover development*) ekonomi di KTI.

Melalui KAPET diharapkan agar investasi dan pembangunan yang dilakukan dapat lebih efisien dan efektif melalui keterpaduan rencana dan sikronisasi kegiatan investasi. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan memperluas sektor-sektor unggulan pada kabupaten dan kota yang ada dalam KAPET sebagai motor penggerak bagi wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, pengembangan KAPET diarahkan pada upaya pengembangan potensi lokal kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di wilayah ini, sehingga mampu berkembang secara mandiri yang didasarkan pada sinergi potensinya masing-masing yang saling terkait dan selanjutnya akan menjadi perekat potensi ekonomi lintas kabupaten/kota di wilayah ini sebagai *Growth Centre*. Bahkan nantinya dapat pula berperan sebagai perekat potensi ekonomi lintas propinsi dan lintas negara. Pada akhirnya, diharapkan KAPET dapat berfungsi sebagai salah satu wilayah yang memiliki daya saing dan daya adaptasi yang kuat untuk ikut terlibat dalam dinamika percaturan perekonomian nasional dan internasional, sehingga dapat memperkecil kesenjangan ekonomi antara KBI dengan KTI di masa datang.

Dalam kaitan ini, secara umum pengembangan KAPET di wilayah KTI diarahkan untuk menjadikan KAPET sebagai:

1. Wilayah yang mempunyai kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan (*prime mover*) ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, KAPET harus mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu

mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi, baik di dalam wilayah KAPET itu sendiri maupun di *hinterland*-nya. Sektor unggulan yang dimaksud di sini adalah sektor ekonomi yang mampu menghasilkan: (a) komoditas yang mempunyai *multiplier effect* yang besar terhadap kegiatan ekonomi lainnya serta bagi pengembangan wilayah sekitarnya; (b) komoditas yang dapat menarik minat swasta untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut; (c) komoditas yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan (d) komoditas yang mempunyai permintaan pasar yang tinggi.

2. Wilayah yang mempunyai keterkaitan dengan *hinterland*-nya. Prioritas pembangunan pada wilayah KAPET dikwatirkan akan memicu terjadinya ketimpangan antara pusat pertumbuhan dengan *hinterland*-nya, sehingga perlu diciptakan keterkaitan yang kuat antara pusat pertumbuhan dengan *hinterland*-nya untuk mengeliminir terjadinya ketimpangan tersebut.
3. Wilayah yang mempunyai infrastruktur yang relatif baik dan tersedia insentif bagi investor, sehingga dapat menarik investor.

Salah satu KAPET di Propinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan pemerintah melalui KEPRES Nomor 89, Tahun 1986 tersebut adalah KAPET Parepare yang berada pada wilayah *Ajatappareng* dan meliputi lima kota/ kabupaten, yakni Kota Parepare, Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang, dengan menetapkan Kota Parepare sebagai pusat/intinya.

Kemudian bentuk keterkaitan *complementary* merupakan bentuk keterkaitan antar kabupaten/kota yang mempunyai potensi atau komoditas yang berbeda. Oleh karena itu, keterkaitan antar kabupaten/kota di wilayah KAPET tersebut tumbuh karena adanya perbedaan potensi ekonomi dan komoditas yang dimiliki, sehingga masing-masing kabupaten/kota di wilayah tersebut dapat saling melengkapi, yakni surplus produksi di suatu kabupaten/kota dapat dipasarkan di kabupaten/kota lain di wilayah tersebut. Demikian pula kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dengan mendatangkan dari kabupaten/kota lain di wilayah tersebut. Oleh karena itu, di wilayah ini hanya dibutuhkan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang menghubungkan antar kabupaten/kota dalam wilayah tersebut.

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi aktivitas perdagangan barang dan jasa antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan antara kabupaten/kota tersebut dengan daerah-daerah di luar wilayah ini, tetapi belum terjadi peningkatan aktivitas ekonomi secara signifikan serta belum ada konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu yang menonjol di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Padahal wilayah ini memiliki potensi sebagai kelebihan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan, antara lain:

a. Letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dan transportasi darat dan laut di Pulau Sulawesi;

b. Memiliki prasarana dan sarana pendukung, seperti fasilitas transportasi (laut dan darat), fasilitas komunikasi, serta lembaga keuangan yang cukup memadai, sehingga memudahkan masyarakat di wilayah ini untuk melakukan hubungan ekonomi dengan pelaku-pelaku ekonomi di daerah-daerah lainnya.

c. Memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar, sehingga sektor pertanian masih sangat dominan dalam struktur ekonomi daerah-daerah tersebut kecuali Kota Parepare. Pemasaran hasil produk pertanian kabupaten-kabupaten di wilayah KAPET Parepare pada umumnya dilakukan ke daerah-daerah lain, bahkan ke Pulau Kalimantan melalui pelabuhan laut Parepare.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengkaji/menganlisis lebih mendalam apakah kabupaten/kota yang ada dalam wilayah KAPET Parepare memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat, sehingga masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini dapat bertumbuh dengan pesat dan menimbulkan dampak positip bagi perekonomian di wilayah ini berupa perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Dalam kajian ini, keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dilihat pada aspek arus barang dan jasa (output) pada setiap sektor ekonomi yang keluar dan masuk dari masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini serta arus barang dan jasa (output) yang keluar dari wilayah ini ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare

Dalam penelitian ini diidentifikasi dan dianalisis sektor/subsektor ekonomi unggulan di setiap kota/kabupaten dalam wilayah KAPET Parepare yang diharapkan dapat berperan sebagai sektor penggerak pertumbuhan ekonomi (sektor inovasi) di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini yang selanjutnya diharapkan akan mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini. Selain itu, dalam penelitian ini dikaji pula secara mendalam mengenai seberapa besar keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota yang ada di wilayah KAPET Parepare serta bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di wilayah ini.

Untuk melakukan kegiatan analisis tersebut, maka digunakan beberapa alat analisis ekonomi *regional*, utamanya menyangkut mengenai analisis keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan dampak yang ditimbukannya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di wilayah ini, seperti yang telah diperkenalkan dan banyak digunakan oleh pakar dan peneliti ekonomi regional sebelumnya. Alat analisis yang digunakan adalah: (1) Model Keseimbangan Perdagangan Antar Daerah; (2) *Index Spesialisasi regional*; (3) *Location Quotient* (LQ); (4) Model Ratio Pertumbuhan (MRP); (5) Analisis Overlay; dan (6) *Typologi Klassen*.

Dari hasil kajian ini dapat diidentifikasi dan dianalisis sektor/ subsektor ekonomi unggulan di masing-masing kota/kabupaten di wilayah KAPET Parepare yang diharapkan dapat berperan sebagai sektor inovasi yang akan

mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini, sehingga dapat diharapkan terjadinya percepatan aktivitas pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing wilayah ini dalam era globalisasi dan otonomi daerah. Selain itu, dapat pula diukur tingkat keterkaitan ekonomi antar kota/kabupaten di wilayah KAPET Parepare serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka konseptual dalam penelitian ini, maka dapat dilihat kerangkanya sebagai berikut:

KERANGKA KONSEPTUAL

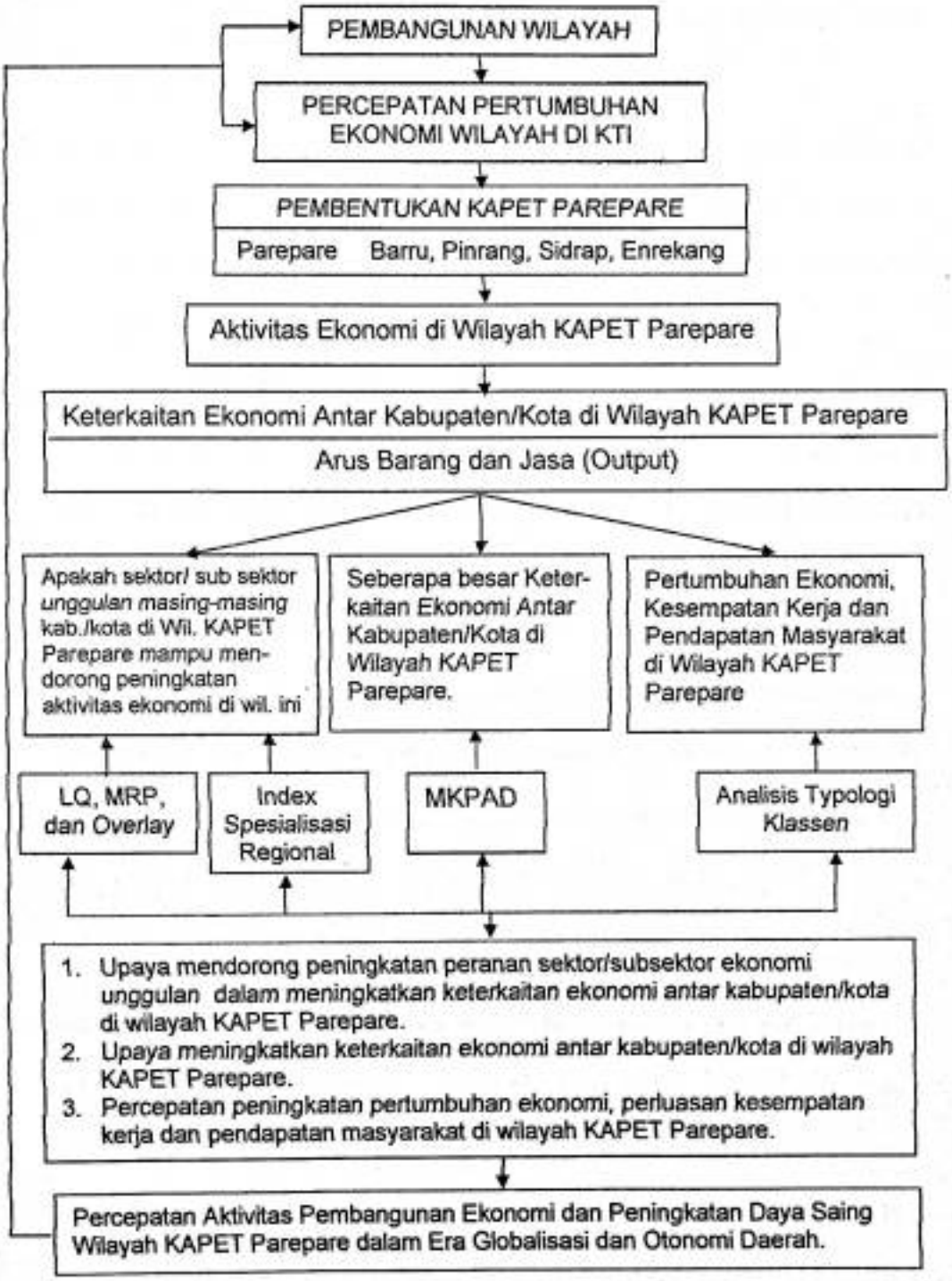

F. HIPOTESIS

Berdasarkan uraian pada kerangka pikir dan landasan teori, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Sektor/subsektor ekonomi unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare belum dapat menciptakan konsentrasi aktivitas ekonomi, sehingga belum mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah.
2. Tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare masih relatif kecil karena sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini belum mampu mendorong terjadinya keterkaitan ekonomi yang kuat antar kabupaten/kota di wilayah ini.
3. Dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di wilayah KAPET Parepare masih relatif kecil karena tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini juga masih relatif rendah.

G. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

a. Wilayah KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang telah ditetapkan secara administratif yang memenuhi persyaratan: (a) memiliki potensi untuk cepat tumbuh; (b) mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya;

dan atau (c) memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangan-nya.

b. Wilayah KAPET Parepare adalah wilayah daerah geografis yang meliputi wilayah administrasi 5 (lima) kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Kota Parepare, Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang.
c. Daerah adalah kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dan yang ada di luar wilayah KAPET Parepare.
d. Sektor ekonomi adalah agregasi sektor-sektor utama di wilayah KAPET Parepare yang disesuaikan dengan agregasi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam PDRB Propinsi Sulawesi Selatan.
e. Penduduk di wilayah KAPET Parepare meliputi perorangan (individu), perusahaan, badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga lainnya.
f. Keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare adalah keterkaitan antar kabupaten/kota di wilayah ini yang tercipta dari adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota tersebut, sehingga terjadi transaksi (supply dan demand) yang selanjutnya menciptakan terjadinya arus atau aliran output (barang dan jasa) antar kabupaten/kota di wilayah ini. Oleh karena itu, nilai barang dan jasa yang diminta dan didistribusikan atau disupply masing-masing kabupaten/kota di wilayah dapat digunakan

sebagai ukuran keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan.

g. Ekspor dan impor adalah nilai transaksi barang dan jasa antara penduduk di wilayah KAPET Parepare dengan penduduk daerah lain di luar wilayah KAPET Parepare dan luar negeri (antar daerah, antar pulau atau antar negara).

h. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare adalah peningkatan aktivitas ekonomi di setiap kabupaten/kota di wilayah ini yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan di masing-masing kabupaten/kota tersebut dari tahun dasar ke tahun acuan dalam periode pengamatan yang nilainya dihitung berdasarkan harga konstan.

i. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di wilayah KAPET Parepare yang diukur dalam satuan rupiah. Pendapatan perkapitan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini dihitung dari ratio PDRB berdasarkan harga konstan dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota tersebut dalam tahun tertentu.

j. Kesempatan kerja adalah jumlah angkatan kerja yang telah bekerja satu minggu pada waktu penelitian ini dilaksanakan. Kesempatan kerja di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dihitung dari persentase angkatan kerja yang bekerja pada setiap sektor ekonomi di setiap kabupaten/kota tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Wilayah KAPET Parepare yang meliputi 1 (satu) kota, yakni Kota Parepare, dan 4 (empat) kabupaten, yakni Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang pada tahun 2004.

B. POPULASI DAN TEKNIK PENARIKAN SAMPEL

Untuk melengkapi data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dilaksanakan pula kegiatan survey khusus dan terbatas. Untuk melaksanakan kegiatan survey tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan penarikan sampel dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah produsen dan pedagang perantara yang ada pada setiap sektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare. Oleh karena adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, maka dalam penelitian ini dilaksanakan penarikan sampel dengan pertimbangan bahwa karateristik anggota populasi relatif homogen. Untuk menarik sampel dari populasi, maka digunakan metode *cluster sampling*, *purposif* dan *random simple sampling* menurut keadaan di setiap sektor/subsektor ekonomi yang ada di masing-masing kota/kabupaten yang ada di wilayah KAPET Parepare.

Untuk mendapatkan gambaran keterkaitan ekonomi antar kabupaten/ kota di wilayah KAPET Parepare maupun antara kabupaten/kota di wilayah ini dengan daerah-daerah lainnya di luar wilayah ini, maka dilakukan suatu survei khusus untuk mengumpulkan informasi mengenai arus komoditi (barang dan jasa). Arus barang dan jasa (komoditi) yang terjadi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare maupun interaksi di luar wilayah KAPET Parepare menggambarkan keterkaitan ekonomi yang terlihat pada permintaan dan penyediaan atau penawaran barang dan jasa (output). Keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare lebih didominasi oleh kegiatan perdagangan, sehingga untuk memperoleh informasi arus barang dan jasa (output), maka pendekatan unit sampel lebih banyak diarahkan kepada para pedagang yang ada di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini. Namun demikian, untuk memperoleh data nilai output beberapa sektor/subsektor ekonomi, seperti industri, pertambang-an/penggalian, konstruksi dan jasa-jasa, Listrik dan Air Minum, serta Angkutan dan Komunikasi, maka penarikan sampelnya diarahkan langsung kepada produsen yang menghasilkan output tersebut.

Setelah anggota populasi dikelompokkan dengan menggunakan metode *Cluster*, maka selanjutnya dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode purposif dan simple random sampling dengan memprioritaskan kepada responden yang memiliki skala usaha yang relatif besar yang dianggap mampu menggerakan perekonomian di wilayahnya.

Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 300 responden, yakni sebanyak 60 responden setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare. Responden tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yakni: (1) produsen setiap komoditi yang diteliti; (2) pendagang pengumpul masing-masing komoditii tersebut; dan (3) pengusaha yang melakukan kegiatan *processing* komoditi yang diteliti.

Kemudian data output masing-masing komoditi yang disurvey diperoleh dari data output domestik masing-masing sektor/sub sektor ekonomi di setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare tahun 2003 yang tidak dipublikasikan di BPS Propinsi Sulawesi Selatan.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka dilakukan kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yakni: (1) observasi; (2) wawancara dengan menggunakan kuesioner; dan (3) dokumentasi.

Metode observasi dan wawancara digunakan pada saat mengumpulkan data primer dari sampel yang terpilih sebagai responden melalui survey. Kegiatan survey ini dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Kegiatan survey ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data nilai barang dan jasa (output) yang

dihasilkan pada setiap sektor/subsektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan nilainya yang didistribusikan ke masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini dan keluar wilayah ini (ekspor). Selain itu, dalam survey ini dihitung pula nilai barang dan jasa (output) pada setiap sektor/subsektor ekonomi yang dibutuhkan oleh masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang didatangkan dari kabupaten/kota lainnya di wilayah ini serta dari wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare (impor).

Kemudian metode dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data sekunder pada instansi pemerintah yang terkait, termasuk kantor statistik, di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare sebagai daerah penelitian.

D. METODE ANALISIS

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan guna menguji hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa alat analisis, yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah sektor/subsektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini, maka digunakan beberapa alat analisis, yakni:

a. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan sektor/subsektor unggulan ekonomi pada suatu negara atau daerah dilihat dari kriteria kontribusi setiap sektor/subsektor ekonomi terhadap variabel ekonomi yang digunakan dalam mengukurnya. Variabel yang dapat digunakan dalam penentuan sektor ekonomi unggulan tersebut adalah PDB/PDRB, kesempatan kerja, jumlah produksi, dan sebagainya, dari suatu negara/region. Dengan menggunakan alat analisis LQ, maka dapat diidentifikasi dan dianalisis sektor/subsektor ekonomi yang merupakan sektor/ subsektor ekonomi unggulan dalam perekonomian suatu kabupaten/kota dalam konteks perekonomian tingkat propinsi sebagai daerah acuan.

Menurut Rondinelli (1985), LQ adalah suatu tehnik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif (kemampuan) wilayah dan kegiatan atau karakteristik tertentu. Selanjutnya Isard (1972) menyatakan bahwa variabel yang dapat digunakan dalam analsis LQ adalah tenaga kerja, nilai tambah, jumlah penduduk, luas lahan, produksi dan pendapatan regional (PRDB).

Berarti alat analisis LQ merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor unggulan atau bukan di suatu negara atau daerah. Suatu sektor ekonomi dikategorikan sebagai sektor unggulan jika output sektor tersebut bukan hanya mampu memenuhi permintaan lokal, yakni permintaan pelaku ekonomi di daerah studi itu sendiri, tetapi juga ada pula kelebihan outputnya yang dapat di-

ekspor ke daerah atau negara lain. Sebaliknya, suatu sektor ekonomi dikatakan sebagai sektor non unggulan jika output sektor tersebut hanya dikonsumsi secara lokal dan tidak mampu memenuhi permintaan seluruh pelaku ekonomi di daerahnya sendiri, sehingga harus mengimpor output yang sama dari daerah atau negara lain jika tingkat konsumsi lokal ingin dipertahankan.

Untuk menghitung LQ suatu sektor ekonomi, misalnya sektor i, maka formulasi yang digunakan adalah (Soepono, 2001) sebagai berikut:

$$LQi = \frac{(Eij/Ej)}{(Ein/En)}$$

dimana :

Eij = Pendapatan regional (PDRB) sektor i di wilayah j (wilayah studi).
Ej = Total PDRB di wilayah j.
Ein = Pendapatan regional sektor i di wilayah n (wilayah acuan).
En = Total PDRB wilayah acuan.

Oleh karena dalam penelitian ini, daerah studi adalah kabupaten/kota yang ada dalam wilayah KAPET Parepare, maka daerah referensi (acuan) adalah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai tingkatan wilayah di atasnya.

Dalam penggunaan alat analsis LQ ini terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai LQ sektor/subsektor i (LQi) lebih besar 1 (LQ > 1), maka sektor/subsektor i merupakan sektor/subsektor unggulan di daerah studi pada periode tahun pengamatan

2. Jika nilai LQ sektor/subsektor i (LQi)lebih kecil dari satu (LQ < 1), maka sektor/subsektor i merupakan sektor/subsektor non unggulan di daerah studi tersebut. Artinya daerah tersebut kekurangan produksi yang dihasilkan oleh sektor/subsektor i, sehingga harus mengimpor produk tersebut dari daerah lain jika pola konsumsi di daerah itu ingin dipertahankan.

b. Analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP)

Model MRP ini digunakan untuk menentukan sektor/sub sektor ekonomi unggulan kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare sebagai daerah studi dalam kaitannya dengan perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan. MRP ini membandingkan pertumbuhan suatu sektor/sub sektor ekonomi, baik dalam skala yang lebih luas maupun dalam skala yang lebih kecil. Terdapat dua ratio pertumbuhan yang dilihat dalam analisis ini yaitu: (1) Ratio pertumbuhan wilayah/daerah studi (RPs), dan (2) Ratio pertumbuhan wilayah/daerah referensi (RPr).

Adapun formulasi kedua macam ratio pertumbuhan tersebut dapat dilihat (Maulana, 1999) sebagai berikut:

a. Ratio pertumbuhan wilayah/daerah referensi/acuan (RPr)

$$RPr = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}{\Delta E_{R} / E_{R(t)}} \qquad (1)$$

dimana :

RPr = Perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan atau sektor i di wilayah/daerah referensi (acuan) dengan laju pertumbuhan total kegiatan/sektor (PDRB) di wilayah referensi tersebut.

ΔE_{iR} = Perubahan pendapatan kegiatan/sektor i di wilayah/ daerah referensi.

ΔE_{R} = Perubahan PDRB di wilayah referensi.

$E_{iR(t)}$ = Pendapatan kegiatan/sektor i di wilayah referensi pada tahun t.

$E_{R(t)}$ = Total PDRB di wilayah referensi pada tahun t.

b. Ratio Pertumbuhan Wilayah/Daerah Studi (RPs)

$$RPs = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij(t)}}{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}} \qquad (2)$$

dimana :

RPs = Perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan/sektor i di wilayah/daerah studi laju pertumbuhan. Sektor i di wilayah referensi.

ΔE_{ij} = Perubahan pendapatan kegiatan/sektor i di wilayah/daerah studi pada periode waktu t dan t + n.

$E_{ij(t)}$ = Pendapatan kegiatan/sektor i di wilayah studi pada tahun t.

Analisis MRP dilakukan untuk menentukan sektor/subsektor ekonomi unggulan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dengan menggunakan kriteria pertumbuhan masing-masing sektor/subsektor ekonomi tersebut, baik secara eksternal (propinsi) maupun internal (wilayah studi). Pendekatan analisis MRP dapat dibagi menjadi dua, yaitu : (1) Ratio

pertumbuhan wilayah referensi (RPR) dan (2) Ratio pertumbuhan wilayah studi (RPS). RPR membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor/sub sektor ekonomi dalam PDRB Propinsi Sulawesi Selatan dengan total PDRB Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan (referensi). Analisis yang lebih jauh, yakni RPs membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor/ subsektor ekonomi dalam PDRB setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dengan laju pertumbuhan sektor/subsektor yang sama pada PDRB Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penggunaan alat analisis ini terdapat ketentuan bahwa: (1) Jika nilai RPR > 1, maka RPR dikatakan (+); Sebaliknya, (2) jika nilai RPR < 1, maka RPR dikatakan (-). RPR (+) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan suatu sektor/subsektor ekonomi dalam PDRB Propinsi Sulwesi Selatan sebagai daerah acuan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan total PDRB Propinsi Sulawesi Selatan pada periode pengamatan yang sama. Demikian pula sebaliknya jika RPR (-). Sedangkan RPs membandingkan laju pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi dalam PDRB setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dengan laju pertumbuhan sektor/subsektor yang sama pada PDRB Propinsi Sulawesi Selatan. Bila laju pertumbuhan suatu sektor/subsektor ekonomi di kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor/sub sektor ekonomi yang sama pada tingkat Propinsi Sulawesi Selatan, maka sektor/subsektor ekonomi tersebut diidentifikasikan sebagai sektor/subsektor ekonomi yang memiliki nilai RPs (+), demikian sebaliknya untuk RPs (-).

Dari analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nilai nominal. Kemudian kombinasi dari kedua perbandingan tersebut akan diperoleh deskripsi sektor/subsektor ekonomi yang potensial pada perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan yang terdiri dari empat klasifikasi, yaitu:

1) Klasifikasi 1, jika nilai RP_R (+) dan RPs (+) yang berarti bahwa sektor/subsektor ekonomi tersebut pada tingkat Propinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare mempunyai pertumbuhan yang menonjol. Dalam analisis yang lebih rinci, sektor/subsektor ekonomi ini selanjutnya disebut sebagai sektor/subsektor ekonomi yang dominan pertumbuhannya dan merupakan sektor/subsektor unggulan di kabupaten/kota di wilayah KAPET sebagai daerah studi.
2) Klasifikasi 2, jika nilai RP_R (+) dan RPs (-) yang berarti bahwa sektor/subsektor ekonomi tersebut pada tingkat Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai pertumbuhan menonjol namun pada tingkat kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare belum menonjol. Dalam analisis yang lebih rinci, sektor/subsektor ekonomi tersebut dikatakan mempunyai pertumbuhan yang menonjol pada tingkat Propinsi Sulawesi Selatan tetapi tidak menonjol pada tingkat kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare. Berarti sektor/subsektor ini merupakan sektor/subsektor ekonomi yang tidak unggul dalam perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET sebagai daerah studi.

3) Klasifikasi 3, jika nilai RP_R (-) dan RPs (+), berarti sektor/subsektor tersebut pada tingkat Propinsi Sulawesi Selatan tidak menonjol pertumbuhannya, akan tetapi pada tingkat kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, pertumbuhan sektor/subsektor tersebut adalah menonjol. Dilihat dari konteks perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, maka sektor/subsektor ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan sektor/subsektor yang sama dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, sektor/subsektor ini merupakan sektor/subsektor potensial yang dapat dikembangkan di kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare sebagai daerah studi dalam kegiatan penelitian ini di masa datang.
4) Klasifikasi 4, jika RP_R (-) dan RPs (-) yang berarti bahwa sektor/subsektor ekonomi tersebut, baik pada tingkat Propinsi Sulawesi Selatan maupun pada tingkat kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, mempunyai pertumbuhan yang rendah, sehingga merupakan sektor/subsektor ekonomi yang tidak potensil dan tidak unggul.

c. Analisis Overlay

Analisis Overlay ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menentukan sektor/subsektor unggulan dalam perekonomian setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare sebagai daerah studi selama periode pengamatan dengan mendasarkan analisis pada kriteria pertumbuhan

(MRP) dan kontribusi masing-masing sektor/subsektor ekonomi (LQ) secara bersamaan.

Dalam analisis overlay ini, terdapat 4 (empat) kemungkinan hasil yang diperoleh yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan masing-masing sektor/subsektor ekonomi, yaitu:

1) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), yang menunjukkan sektor/ subsektor ekonomi tersebut sangat dominan dalam perekonomian daerah studi, baik dilihat dari aspek pertumbuhannya maupun aspek kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) daerah studi tersebut selama periode pengamatan;
2) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), yang menunjukkan sektor/ subsektor ekonomi tersebut mempunyai pertumbuhan yang dominan tetapi kontribusinya terhadap pendapatan regional daerah studi adalah kecil. Sektor/subsektor ekonomi yang masuk kategori/ klasifikasi ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi sektor/subsektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian daerah studi.
3) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), yang menunjukkan sektor/ subsektor ekonomi tersebut mempunyai pertumbuhan yang kecil tetapi kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) daerah studi adalah besar. Sektor/subsektor ekonomi yang masuk kategori/ klasifikasi ini sangat memungkinkan merupakan sektor/subsektor

ekonomi yang sedang mengalami penurunan (kontraksi) dalam perekonomian daerah studi.

4) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), yang menunjukkan sektor/ subsektor ekonomi tersebut mempunyai pertumbuhan dan kontribusi yang kecil, sehingga sektor/subektor ekonomi yang termasuk kedalam klasifikasi ini merupakan sektor/subsektor ekonomi yang tidak potensil, baik dilihat dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) daerah studi.

Selanjutnya, dengan menggunakan hasil perhitungan dan analisis MRP dan LQ secara bersama-sama (overlay), maka dapat diidentifikasi dan ditentukan secara mudah sektor/subsektor ekonomi unggulan dalam perekonomian setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare sebagai daerah studi dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebaga daerah referensi (acuan) dalam penelitian ini selama periode pengamatan, yakni tahun 1999 – 2003.

d. Alat analisis "*Index Spesialisasi Regional*" (Index Krugman).

Alat analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat *spesialisasi regional* masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare yang tercipta dari adanya konsentrasi aktivitas ekonomi sektor/subsektor unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini.

Adapun formula alat analisis ini dapat dilihat sebagai berikut (dalam Kuncoro, 2004 : 227) :

$$SI_{jk} = \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{E_{ij}}{E_j} - \frac{E_{ik}}{E_k} \right|$$

dimana:

SI_{jk} = Index spesialisasi Kabupaten/Kota j dan k

E_{ij} = PDRB Sektor i pada Kabupaten/Kota j

E_j = Total PDRB Kabupaten/Kota j

E_{ik} = PDRB Sektor i pada Kabupaten/Kota k

E_k = Total PDRB Kabupaten/Kota k.

Nilai index ini berkisar antara 0 – 1. Adapun Kriteria pengukurannya menurut Kim (1995:883) adalah:

(1) Jika nilai index spesialisasi regional mendekati 0, maka kedua Kabupaten/Kota yang dianalisis tidak memiliki spesialisasi. Berarti tidak ada ketergantungan antara keduanya, sehingga keterkaitan ekonomi antar dua kabupaten/kota yang dianalisis tersebut adalah kecil.

(2) Sebaliknya jika nilai index spesialisasi regional antara dua kabupaten/kota yang dianalisis mendekati 1, maka kedua Kabupaten/Kota yang dianalisis tersebut memiliki spesialisasi regional, sehingga ada saling ketergantungan antara keduanya. Akibatnya, akan terjadi keterkaitan ekonomi yang cukup besar antar kedua kabupaten/kota yang dianalisis tersebut.

2. Untuk mengukur tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare, maka digunakan alat analisis "Model Keseimbangan Perdagangan Antar Daerah (MKPAD)".

Alat analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dan antara kabupaten/kota dalam wilayah ini dengan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare dengan melihat pada arus perdagangan barang dan jasa (output) antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare maupun antara kabupaten/kota dalam wilayah ini dengan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare yang dikategorikan sebagai ekspor dan impor dengan menggunakan pendekatan matriks dan metode ratio.

Formula model analisis ini dimodifikasi dari model keseimbangan perdagangan antar daerah (dalam Azis, 1994 : 51), sebagaimana terlihat berikut:

$$\sum_{r=1}^{n} S_r^{j} + \sum_{r=1}^{n} S_r^{j,k} + \sum_{r=1}^{n} S_r^{j,l} = \sum_{r=1}^{n} D_r^{j} + \sum_{r=1}^{n} D_r^{j,k} + \sum_{r=1}^{n} D_r^{j,l}$$

dimana:

$\sum_{r=1}^{n} S_r^{j}$ = Total penawaran barang/jasa r yang diproduksi di kab./kota j kepada konsumen di kab./kota j.

$\sum_{r=1}^{n} S_r^{j,k}$ = Total penawaran barang/jasa r yang diproduksi di kab./kota j kepada konsumen di kab./kota k (kabupaten/kota dalam

wilayah KAPET Parepare).

$\sum_{r=1}^{n} S_r^{j,J}$ = Total penawaran barang/jasa r yang diproduksi di kab./kota j kepada konsumen di luar wilayah KAPET Parepare.

$\sum_{r=1}^{n} D_r^{j}$ = Total permintaan barang/jasa r yang diproduksi di kab./kota j oleh konsumen di kab./kota j.

$\sum_{r=1}^{n} D_r^{j,k}$ = Total permintaan barang/jasa r yang diproduksi di kab./kota j oleh konsumen di kab./kota k (kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare).

$\sum_{r=1}^{n} D_r^{j,J}$ = Total permintaan barang/jasa r yang diproduksi di kab./kota j oleh konsumen di luar wilayah KAPET Parepare.

Asumsi bahwa:

Nilai barang dan jasa yang diminta dan ditawarkan masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare masih termasuk biaya transpor di dalamnya.

3. Untuk menganalisis dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di wilayah KAPET Parepare, maka digunakan alat analisis Typologi Klassen.

Untuk tujuan analisis ini, maka digunakan 3 (tiga) indikator yang dikaji, yakni: (1) pertumbuhan ekonomi; (2) kesempatan kerja; dan (3) pendapatan

perkapita masyarakat di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare.. Indikator-indikator tersebut selanjutnya diaplikasikan ke dalam matriks Typologi Klassen.

Analisis dilakukan dalam dua tahap, sebagai berikut:

Tahap 1

Pada tahap 1, digunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita guna melihat dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini. Dalam kaitannya dengan penggunaan matriks Typologi Klassen, maka terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pendapatan perkapita (y) / laju pertumb. Ek.(r)	$y_1 > y$	$y_1 < y$
$r_1 > r$	Daerah maju & tumbuh cepat.	Daerah berkembang cepat
$r_1 < r$	Daerah maju tapi tertekan.	Daerah relatif tertinggal.

Sumber : Syafrizal, 1997.

Dimana :

r_1 : laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di wil. KAPET
r : laju pertumbuhan ekonomi propinsi Sul-Sel.
y_1 : pendapatan perkapita Kabupaten/kota di wil. KAPET
y : pendapatan perkapita propinsi Sul-Sel.

Untuk dapat menentukan di kuadran mana posisi perekonomian masing-masing Kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam matriks typologi di atas selama periode pengamatan, maka dapat digambarkan posisinya sebagai berikut :

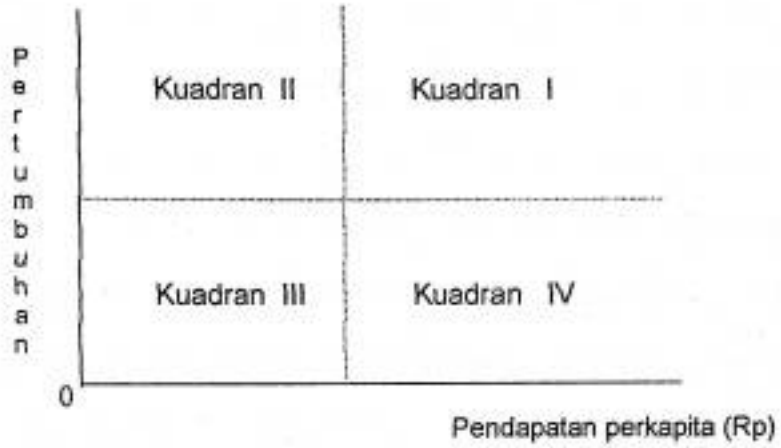

Keterangan Gambar :

a. Sumbu mendatar menunjukkan besarnya pendapatan perkapita.
b. Sumbu tegak menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi.
c. Garis lurus putus-putus yang sejajar dengan sumbu mendatar menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Propinsi Sul-Sel.
d. Garis lurus putus-putus yang sejajar dengan sumbu tegak menunjukkan pendapatan perkapita rata-rata masyarakat Propinsi Sul-Sel
e. Gambaran posisi klasifikasi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan adalah tertuang dalam 4 kuadran, yaitu:

(1). Kuadran I menunjukkan posisi kabupaten/kota di wilayah ini yang mempunyai pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di atas pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Sul-Sel.

(2). Kuadran II, menunjukkan posisi kabupaten/kota di wilayah ini yang mempunyai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi Sul-Sel, tetapi PDRB perkapita di bawah Sul-Sel.

(3). Kuadran III, menunjukkan posisi kabupaten/kota di wilayah ini yang mempunyai pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di bawah pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Sul-Sel.

(4). Kuadran IV, menunjukkan posisi kabupaten/kota di wilayah ini dengan PDRB perkapita di atas PDRB perkapita Sul-Sel tetapi mempunyai pertumbuhan ekonomi di bawah Sul-Sel.

Tahap 2

Pada tahap 2, digunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja guna melihat dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini. Ketentuan yang berlaku pada penggunaan indikator ini adalah sama dengan ketentuan di atas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL WILAYAH KAPET PAREPARE

Tantangan dan permasalahan pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang dihadapi dewasa ini demikian luas dan bersifat kompleks, untuk itu pemerintah menempuh kebijaksanaan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui pendekatan pengembangan Kawasan andalan di setiap propinsi di KTI dan salah satu strategi yang dikembangkan adalah pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada setiap Propinsi di Kawasan Indonesia Timur berdasarkan Keppres No. 89 tahun 1996. Kapet Parepare dibentuk berdasarkan KEPRES Nomor 164 tahun 1998 dengan wilayah meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.

KAPET Parepare mempunyai visi yaitu Mewujudkan Kapet Parepare sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang efisien dan terkemuka di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Tahun 2008. Sedangkan misi KAPET Parepare adalah :

1. KAPET Parepare sebagai Kawasan Ekonomi yang representatif dan merupakan perekat potensi antar wilayah.

2. Komoditas unggulan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kawasan.
3. Pengembangan pusat industri maritim, bandar niaga serta pusat transaksi Perdagangan dan jasa.
4. Pengembangan kawasan industri sebagai sentra pembangunan ekonomi kawasan.
5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
6. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
7. Kerja sama sinergi antar KAPET.

Dalam konteks ini pembangunan nasional Indonesia dalam lintasannya di Propinsi Sulawesi Selatan, terutama di kabupaten/kota seyogyanya berbasis pada potensi spesifik lokasi dengan mengutamakan keunggulan lokal, sehingga terbentuk suatu kemandirian dalam konteks yang tidak hanya mendukung KAPET Parepare tetapi juga sekaligus mendukung Propinsi Sulawesi Selatan bahkan nasional secara keseluruhan.

Wilayah KAPET Parepare meliputi 5 (lima) kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu: (1) Kota Parepare; (2) Kabupaten Sidrap; (3) Kabupaten Pinrang; (4) Kabupaten Barru; dan (5) Kabupaten Enrekang. Secara geografis wilayah ini terletak pada bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan dan berada pada bibir pantai Selat Makassar. Oleh karena itu, wilayah ini menempati posisi yang strategis, yakni berada pada persilangan jalur transportasi darat, poros Utara – Selatan dan Timur Barat pada bagian

tengah Sulawesi Selatan. Selain itu, di wilayah ini terdapat pula sarana pelabuhan laut yang dapat menjadi pintu gerbang jalur pelayaran antar pulau maupun antar negara, sehingga Kota Parepare merupakan pula kota pantai (*Coastel*). Untuk jelasnya mengenai letak/posisi wilayah KAPET Parepare di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada peta, sebagaimana yang nampak pada lampiran 1.

Letak geografis yang strategis itulah merupakan faktor pendukung Kota Parepare untuk dapat melakukan peran-peran strategisnya dalam pengembangan wilayah secara nasional bahkan secara internasional. Manfaat letak strategis tersebut adalah :

- Secara wilayah ditetapkan sebagai pusat wilayah pengembangan, pusat pelayanan dan pusat kawasan andalan pada bagian tengah Sulawesi Selatan. Daya dukung yang menguatkan posisi itu adalah, potensi daerah, hiterlandnya yang sangat besar di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Secara regional, kota ini sangat mudah berinteraksi dengan pusat-pusat kawasan andalan lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan seperti Makassar yang juga pusat pelayanan di KTI, Mamuju, Palopo (Luwu) dan Watampone.
- Secara Nasional, Kota Parepare merupakan titik sentral wilayah Nusantara dan memegang fungsi sebagai pintu gerbang jalur perhubungan laut untuk kegiatan bongkar muat barang dan

penumpang ke beberapa wilayah Nusantara seperti Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.

- Secara Internasional Kota Parepare juga merupakan pintu gerbang arus penumpang dan barang ke dan dari negara tetangga seperti Brunai Darrusalam, Singapura, Malaysia.

B. KEADAAN PEREKONOMIAN WILAYAH KAPET PAREPARE

Untuk melihat keadaan perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003, sebagai periode pengamatan, maka digunakan beberapa indikator ekonomi sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah KAPET Parepare

Indikator ekonomi yang pertama diperlihatkan untuk menggambarkan keadaan perekonomian wilayah KAPET Parepare adalah struktur ekonomi masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini yang dapat dilihat pada persentase kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB setiap kabupaten/kota di wilayah ini selama periode 1999 – 2003.

Kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare untuk tahun 1999 dan 2003 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Persentase kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan harga konstan 1993, Tahun 1999 – 2003

No	Sektor Ekonomi	Persentase kontribusi sektor ekonomi pada PDRB kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare (%)									
		Parepare		Sidrap		Barru		Pinrang		Enrekang	
		1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	2003
1	Pertanian	10.42	8.58	48.53	46.15	48.28	41.87	60.04	57.08	50.53	47.64
2	Pertambangan	0.42	0.37	2.41	2.55	1.05	1.03	0.55	0.56	0.71	0.68
3	Industri	3.67	3.26	4.60	4,72	5.29	5.29	6.55	6.29	6.48	6.32
4	Listrik, Air Ber.	1.98	1.87	0.98	1.14	0.87	0.80	0.83	0.98	0.92	0.95
5	Bangunan	8.19	7.00	8.12	9.21	6.02	7.27	4.14	4.45	4.93	4.72
6	Perdagangan	32.27	31.42	16.98	16.71	15.93	17.10	10.02	10.69	17.54	17.04
7	Angk./Komun.	26.38	25.53	4.27	4.42	6.22	6.71	3.53	3.58	2.62	2.95
8	Lembag. Keu.	5.62	12.16	4.84	5.17	3.86	5.50	3.17	4.29	3.50	5,74
9	Jasa-jasa	11.06	9.81	9.27	9.93	12.70	14.43	11.18	12.09	12.58	13.96
	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: PDRB Kabupaten dan Kota di Prop. Sul-Sel, Tahun 1999 – 2003

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sektor ekonomi yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Kota Parepare pada tahun 1999 dan 2003 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yakni masing-masing sebesar 32,27 % dan 31,42 %. Sedangkan sektor ekonomi yang paling kecil kontribusinya adalah sektor pertambangan dan galian, yakni masing-masing hanya sebesar 0,42 % pada tahun 1999 dan 0,37 % pada tahun 2003. Selanjutnya, terlihat pula bahwa persentase kontribusi semua sektor ekonomi di Kota Parepare, kecuali sektor lembaga keuangan, mengalami penurunan pada tahun 2003 dibandingkan pada tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor lembaga keuangan mengalami peningkatan yang cukup

pesat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang cukup besar persentasenya terhadap PDRB Kota Parepare selama periode 1999 – 2003.

Kemudian pada tabel 1 terlihat pula adanya peningkatan persentase kontribusi beberapa sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Sidrap, yakni sektor: (1) pertambangan; (2) industri pengolahan; (3) listrik, gas dan air bersih; (4) bangunan; (5) angkutan dan komunikasi; (6) lembaga keuangan; dan (7) jasa-jasa. Sebaliknya, terdapat pula dua sektor ekonomi di daerah ini yang menurun persentase kontribusinya terhadap PDRB daerah ini selama periode pengamatan, yakni sektor: (1) pertanian; dan (2) perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu, terlihat pula bahwa sektor ekonomi yang paling besar kontribusinya pada tahun 1999 dan 2003 adalah sektor pertanian, yakni sebesar 48,53 % pada tahun 1999 dan 46,15 % pada tahun 2003. Berarti perekonomian daerah ini masih didominasi atau bertumpu pada sektor pertanian selama periode pengamatan.

Selanjutnya, pada tabel 1 nampak pula bahwa sektor ekonomi yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Barru pada tahun 1999 adalah sektor pertanian, yakni sebesar 48,28 % dan sebaliknya yang paling kecil kontribusinya adalah sektor listrik, gas dan air bersih, yakni hanya sebesar 0,87 %. Demikian pula pada tahun 2003, sektor pertanian masih dominan, yakni sebesar 41,87 %, tetapi persentase kontribusinya pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 6,41 % dibanding pada tahun 1999. Sedangkan kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih hanya sebesar 0,80 %,

sehingga masih merupakan sektor ekonomi yang paling kecil kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2003. Kemudian terlihat pula beberapa sektor ekonomi yang meningkat kontribusinya terhadap PDRB daerah ini selama periode 1999 – 2003, yakni sektor: (1) bangunan; (2) perdagangan, hotel dan restoran; (3) angkutan dan komunikasi; (4) lembaga keuangan; dan (5) jasa-jasa. Sebaliknya, ada pula beberapa sektor ekonomi yang menurun kontribusinya selama periode pengamatan, yakni sektor: (1) pertanian; serta (2) pertambangan dan galian.

Pada tabel 1 dapat pula dilihat bahwa sektor ekonomi yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pinrang selama periode pengamatan adalah sektor pertanian, yakni sebesar 60,04 % pada tahun 1999 dan sebesar 57,08 % pada tahun 2003. Sebaliknya, sektor ekonomi yang paling kecil kontribusinya adalah sektor pertambangan, yakni hanya sebesar 0,55 % pada tahun 1999 dan sebesar 0,56 % pada tahun 2003. Berarti terlihat bahwa sektor pertanian masih sangat dominan pula dalam perekonomian Kabupaten Pinrang selama periode pengamatan, meskipun kontribusinya terhadap PDRB daerah ini menurun pada tahun 2003 dibandingkan kontribusinya pada tahun 1999. Selain itu, pada tabel 1 terlihat pula sektor-sektor ekonomi yang meningkat kontribusinya terhadap PDRB daerah ini selama periode 1999 - 2003, yakni sektor: (1) pertambangan dan galian; (2) listrik, gas dan air bersih; (3) bangunan; (4) perdagangan, hotel dan restoran; (5) angkutan dan komunikasi; (6) lembaga

keuangan; dan (7) jasa-jasa. Sebaliknya, ada pula sektor ekonomi yang menurun kontribusinya selama periode pengamatan, yakni sektor: (1) pertanian; dan (2) industri pengolahan.

Kemudian pada tabel 1 dapat pula dilihat bahwa sektor ekonomi yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Enrekang selama periode pengamatan adalah sektor pertanian, yakni sebesar 50,53 % pada tahun 1999 dan sebesar 47,64 % pada tahun 2003. Sebaliknya, sektor ekonomi yang paling kecil kontrbusinya adalah sektor pertambangan dan galian, yakni hanya sebesar 0,71 % pada tahun 1999 dan sebesar 0,68 % pada tahun 2003. Selain itu, pada tabel ini nampak pula sektor-sektor ekonomi yang meningkat kontribusinya terhadap PDRB daerah ini selama periode pengamatan, yakni sektor: (1) listrik, gas dan air bersih; (2) angkutan dan komunikasi; (3) lembaga keuangan; dan (4) jasa-jasa. Sebaliknya, terlihat pula sektor-sektor ekonomi yang menurun kontribusinya pada periode pengamatan tersebut, yakni sektor: (1) pertanian; (2) pertambangan; (3) industri pengolahan; (4) bangunan; dan (5) perdagangan, hotel dan restoran.

Melihat data secara keseluruhan pada tabel 1 di atas, maka dapat diketahui bahwa struktur perekonomian 4 (empat) kabupaten dalam wilayah KAPET Parepare, yakni Kabupaten Pinrang, Sidrap, Barru, dan Enrekang, masih didominasi oleh sektor pertanian yang telah memberikan kontribusi lebih dari 40 % terhadap PDRB keempat kabupaten tersebut selama periode pengamatan. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian

keempat kabupaten di wilayah ini adalah berkaitan erat dengan ketersediaan sumberdaya lahan pertanian pada masing-masing kabupaten tersebut yang cukup besar, utamanya untuk tanaman bahan makanan (padi dan beras), sehingga dua dari empat kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Pinrang dan Sidrap, telah ditetapkan sebagai daerah sentra produksi padi (beras) di Propinsi Sulawesi Selatan yang dikenal dengan istilah BOSOWA SIPILU. Demikian pula Kabupaten Enrekang telah ditetapkan sebagai daerah sentra produksi komoditi kopi yang dikenal dengan istilah MADUTORA. Hal ini dapat pula menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di keempat kabupaten dalam wilayah KAPET Parepare tersebut masih didominasi dan terkonsentrasi pada aktivitas di sektor pertanian.

Sedangkan struktur perekonomian Kota Parepare masih bertumpu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran ,yang memberikan kontribusi terhadap PDRB kota ini lebih dari 30 % selama periode pengamatan. Hal ini disebabkan karena di kota ini terdapat pelabuhan laut dengan kapasitas sebagai pelabuhan internasional yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi, baik yang ada di wilayah KAPET Parepare maupun dari luar wilayah ini, untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, utamanya aktivitas perdagangan antar pulau dan mobilitas tenaga kerja ke Malaysia, Brunai Darussalam dan Singapura. Oleh karena itu, pelabuhan Parepare telah berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang keluar-masuknya barang ke Propinsi Sulawesi Selatan, utamanya perdagangan antar pulau ke Pulau

Kalimantan dan Jawa serta propinsi-propinsi lainnya di KTI. Selain itu, pelabuhan laut di kota ini telah pula berfungsi sebagai pintu keluar dan masuknya tenaga kerja dari wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini ke Malaysia, Brunai Darussalam dan Singapura.

2. PDRB Kabupaten/Kota di Wilayah KAPET Parepare

Salah satu indikator keadaan perekonomian suatu kabupaten/kota adalah *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Hal ini disebabkan karena PDRB memperlihatkan jumlah nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi dari berbagai sektor/subsektor ekonomi di kabupaten/kota tersebut selama periode 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, perlu diperlihatkan PDRB kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare guna melihat keadaan perekonomian kabupaten/kota di wilayah selama periode 1999 – 2003, sebagaimana yang nampak pada tabel 2.

Pada tabel 2 nampak bahwa Kabupaten Pinrang merupakan kabupaten di wilayah KAPET Parepare yang paling besar PDRB-nya selama periode 1999 – 2003 dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 433.531.69 ribu. Sebaliknya, PDRB Kabupaten Enrekang yang paling rendah, yakni rata-rata hanya sebesar Rp. 140.679.34 ribu selama periode tersebut.

Selain itu, pada tabel 2 nampak pula adanya pertambahan jumlah PDRB masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan. PDRB Kota Parepare bertambah sebesar 20,35 %;

Tabel 2. PDRB kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan harga konstan 1993, Tahun 1999 – 2003

No	Kab./ Kota	PDRB (Rp 000)					
		1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
1	Parepare	163.015.26	167.892.67	176.722.45	186.172.16	196.188.29	177.998.17
2	Sidrap	286.019.19	296.070.95	307.041.41	319.523.24	334.442.89	308.619.54
3	Barru	156.648.09	158.115.75	165.363.23	172.577.24	181.606.27	166.862.12
4	Pinrang	398.175.35	416.248.64	437.004.25	448.173.39	468.056.80	433.531.69
5	Enrekang	128.811.27	133.440.33	139.693.36	146.538.58	154.913.16	140.679.34
	KAPET Parepare	1.132.669.16	1.171.768.34	1.225.824.70	1.272.984.61	1.335.207.41	1.227.690.84
	Sul-Sel	9.631.075.64	10.101.947.63	10.603.661.79	11.092.995.72	11.690.525.15	10.624.041.19

Sumber: PDRB Kabupaten dan Kota di Prop. Sul-Sel, Tahun 1999 – 2003

PDRB Kabupaten Sidrap bertambah sebesar 16,93 %; PDRB Kabupaten Barru bertambah sebesar 15,93 %; PDRB Kabupaten Pinrang bertambah sebesar 17,55 %; PDRB Kabupaten Enrekang bertambah sebesar 20,26 %. Kemudian PDRB wilayah KAPET Parepare yang merupakan penggabungan dari PDRB 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di dalammnya bertambah sebesar 17,88 %. Sedangkan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan bertambah sebesar 21,38 %. Berarti persentase pertambahan PDRB kota dan kabupaten-kabupaten yang ada di dalam wilayah KAPET Parepare tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pertambahan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan.

Adanya pertambahan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 1993 masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode

pengamatan menunjukkan adanya pertambahan riel jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi di berbagai sektor/subsektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan tersebut.

3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilaya KAPET Parepare

Selanjutnya, perlu pula dilihat indikator perkembangan kinerja perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dengan melihat ada-tidaknya perkembangan kinerja perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan. Perkembangan kinerja perekonomi masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi mereka selama periode 1999 – 2003, sebagaimana yang nampak pada tabel 3.

Tabel 3. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, Tahun 1999 – 2003

Kab./ Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
Parepare	7.41	2.99	5.26	5.35	5.35	5.28
Sidrap	3.15	3.51	3.71	4.07	4.67	3.82
Barru	4.20	0.94	4.58	4.36	5.23	3,86
Pinrang	0.97	4.54	4.99	2.56	4.44	3,50
Enrekang	4.78	3.59	4.69	4.90	5.71	4,73
KAPET Parepare	4,10	3,11	4,65	4,25	5,08	4,04
Sul-Sel	2.83	4.89	4.97	4.61	5.39	4.54

Sumber: PDRB Kabupaten dan Kota di Prop. Sul-Sel, Tahun 1999 - 2003

pengamatan menunjukkan adanya pertambahan riel jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi di berbagai sektor/subsektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan tersebut.

3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilaya KAPET Parepare

Selanjutnya, perlu pula dilihat indikator perkembangan kinerja perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare guna melihat ada-tidaknya perkembangan kinerja perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan. Perkembangan kinerja perekonomi masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi mereka selama periode 1999 – 2003, sebagaimana yang nampak pada tabel 3.

Tabel 3. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, Tahun 1999 – 2003

No	Kab./ Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
		1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
1	Parepare	7.41	2.99	5.26	5.35	5.35	5.28
2	Sidrap	3.15	3.51	3.71	4.07	4.67	3.82
3	Barru	4.20	0.94	4.58	4.36	5.23	3,86
4	Pinrang	0.97	4.54	4.99	2.56	4.44	3,50
5	Enrekang	4.78	3.59	4.69	4.90	5.71	4,73
	KAPET Parepare	4,10	3,11	4,65	4,25	5,08	4,04
	Sul-Sel	2.83	4.89	4.97	4.61	5.39	4.54

Sumber: PDRB Kabupaten dan Kota di Prop. Sul-Sel, Tahun 1999 - 2003

Pada tabel 3 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Parepare yang paling tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003, yakni mencapai 5,28 %. Bahkan lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata wilayah KAPET Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan tersebut. Sebaliknya, Kabupaten Pinrang merupakan kabupaten di wilayah ini yang paling rendah laju pertumbuhan rata-rata ekonominya selama periode pengamatan, yakni hanya 3,50 %.

Kemudian pada tabel ini terlihat pula bahwa ada 2 (dua) kabupaten/kota di wilayah ini yang lebih tinggi laju pertumbuhan rata-rata ekonominya dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan, yakni Kota parepare dan Kabupaten Enrekang. Hal ini sejalan dengan pertambahan PDRB kedua kabupaten/kota tersebut yang lebih tinggi daripada pertambahan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan.

Selanjutnya, dapat pula dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah KAPET Parepare dengan Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan, dimana terlihat pada tabel 3 bahwa laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi wilayah KAPET Parepare kecuali pada tahun 1999. Hal ini tidak terlepas dari adanya kontribusi laju pertumbuhan ekonomi Kota Parepare yang sangat tinggi pada tahun 1999, yakni mencapai 7,41 %. Namun demikian, jika dilihat

secara keseluruhan maka terlihat bahwa perbedaan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah KAPET Parepare tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini adalah cukup tinggi, sehingga telah memenuhi salah satu kriteria penetapannya sebagai KAPET, yakni memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga penetapannya sebagai KAPET yang dapat diharapkan menjadi penggerak (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi bagi *hinterland*-nya adalah sudah tepat dilihat dari kriteria ini.

4. Pendapatan Perkapita Masyarakat di Kabupat/Kota dalam Wilayah KAPET Parepare

Pada uraian di atas telah diperlihatkan perkembangan kinerja perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan. Namun demikian, perlu pula dilihat apakah perkembangan perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini telah mampu pula meningkatkan pendapatan perkapita masyarakatnya selama periode pengamatan. Oleh karena itu, perlu pula dilihat keadaan pendapatan perkapita masyarakat di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003, sebagaimana yang nampak pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pendapatan perkapita masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, berdasarkan harga konstan 1993, Tahun 1999 – 2003

No	Kab./ Kota	Pendapatan perkapita (Rp)					
		1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
1	Parepare	1.514.801	1.550.857	1.610.110	1.673.578	1.729.674	1.615.804
2	Sidrap	1.208.443	1.246.058	1.285.068	1.297.335	1.339.304	1.275.242
3	Barru	1.027.389	1.039.544	1.075.904	1.120.573	1.156.279	1.083.938
4	Pinrang	1.286.479	1.339.139	1.400.080	1.418.836	1.410.060	1.370.919
5	Enrekang	784.094	802.374	829.843	860.010	879.958	831.256
	KAPET Parepare	1.164.241	1.195.594	1.240.201	1.274.066	1.303.055	1.235.431
	Sul-Sel	1.248.747	1.294.843	1.343.632	1.389.587	1.404.912	1.336.344

Sumber: PDRB Kabupaten dan Kota di Prop. Sul-Sel, Tahun 1999 - 2003

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa diantara kabupaten/kota yang ada dalam wilayah KAPET Parepare, maka Kota Perapare yang paling tinggi pendapatan perkapita rata-rata masyarakatnya selama periode pengamatan, yakni sebesar Rp. 1.615.804. Sebaliknya, pendapatan perkapita rata-rata masyarakat Kabupaten Enrekang yang paling rendah di antara kabupaten/ kota dalam wilayah ini, yakni hanya sebesar Rp. 831.256,- selama periode pengamatan.

Selanjutnya, dapat pula dilihat pada tabel ini bahwa pendapatan perkapita rata-rata Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang lebih tinggi dibandingkan pendapatan perkapita rata-rata masyarakat di wilayah KAPET Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan. Selain itu, pada tabel 4 dapat pula dilihat bahwa pendapatan perkapita rata-

rata masyarakat Kabupaten Pinrang yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan.

Selanjutnya, pada tabel 4 dapat pula dilihat bahwa pendapatan perkapita rata-rata masyarakat di wilayah KAPET Parepare relatif masih lebih rendah daripada pendapatan perkapitan rata-rata masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Kemudian jika dilihat secara keseluruhan selama periode pengamatan, maka dapat diketahui bahwa pendapatan perkapita masyarakat di wilayah KAPET Parepare senantiasa mengalami peningkatan dengan laju peningkatan sebesar 11,92 %. Demikian pula pendapatan perkapita masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan telah mengalami peningkatan pula selama periode pengamatan dengan laju peningkatan sebesar 12,51 %. Hal ini menunjukkan bahwa laju peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di wilayah KAPET Parepare masih lebih rendah daripada laju peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan selama periode pengamatan.

C. ANALISIS SEKTOR/SUBSEKTOR EKONOMI UNGGULAN KAB./KOTA DALAM WILAYAH KAPET PAREPARE

Setelah mengenai gambaran umum keadaan perekonomian kabupaten/kota dalam wilayah KAPWET Parepare, maka selanjutnya perlu

dianalisis sektor/subsektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare yang menjadi sektor/subsektor ekonomi unggulan di masing-masing kabupaten/ kota tersebut selama periode pengamatan.

Untuk menentukan dan menganalisis sektor/subsektor ekonomi unggulan di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003 sebagai periode pengamatan, maka digunakan 3 (tiga) alat analisis, yakni: (1) Location Quotient (LQ); (2) Model Ratio Pertumbuhan (MRP); dan (3) Analisis Overlay. Analisis terhadap hasil perhitungan dengan menggunakan ketiga alat analisis di atas dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Alat analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor/subsektor ekonomi unggulan pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dilihat dari kriteria kontribusi masing-masing sektor/subsektor tersebut terhadap PDRB kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan. Oleh karena dalam penelitian ini, wilayah studi adalah wilayah KAPET Parepare, maka wilayah referensi (acuan) adalah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai tingkatan wilayah di atasnya.

Selanjutnya, dengan menggunakan formula LQ dan data PDRB kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare serta PDRB Propinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dihitung nilai LQ masing-masing sektor/subsektor ekonomi yang ada dalam perekonomian kabupaten/kota dalam wilayah ini

selama periode 1999 – 2003. Contoh perhitungan nilai LQ sector/subsektor ekonomi di Kota Parepare pada tahun 1999 dapat dilihat pada lampiran 2. Adapun nilai LQ masing-masing sektor/subsektor ekonomi di setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Nilai LQ rata-rata sektor/subsektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, periode 1999 – 2003

NO	Lapangan Usaha	Nilai LQ rata-rata di setiap kab./kota di wilayah KAPET Parepare				
		Sidrap	Parepare	Pinrang	Barru	Enrekang
1	T. Bahan Makanan	2,34	0,10	1,62	1,24	1,78
2	T. Perkebunan	4,06	0,02	0,78	0,44	2,06
3	Peternakan	3,40	0,90	1,78	1,82	2,02
4	Kehutanan	0,46	0,00	1,90	0,26	0,38
5	Perikanan	0,26	0,92	2,82	1,76	0,04
6	Penggalian	2,64	0,33	0,64	0,96	0,66
7	Industri tanpa Migas	0,40	0,28	0,50	0,35	0,50
8	Listrik	0,96	1,80	0,76	0,54	0,62
9	Air Bersih	0,16	4,00	0,30	0,76	1,00
10	Bangunan	1,80	1,52	0,88	1,34	1,02
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,94	1,60	0,58	0,92	1,00
12	Hotel	0,10	1,00	0,08	0,03	0,07
13	Restoran	0,78	5,00	0,86	1,12	0,70
14	Pengangkutan	0,72	3,90	0,52	1,03	0,42
15	Komunikasi	0,22	1,58	0,58	0,19	0,14
16	Bank	2,82	7,90	2,00	2,67	8,02
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	0,74	2,26	0,80	1,18	0,80
18	Sewa Bangunan	1,22	2,18	0,92	1,06	1,07
19	Jasa Perusahaan	0,74	0,66	0,30	0,10	0,08
20	Pemerintah Umum	0,79	1,72	0,96	1,16	1,18
21	Swasta	0,82	2,30	0,68	1,00	0,68

Sumber: Hasil perhitungan, seperti contoh pada lampiran 2.

Berdasarkan data pada tabel 5, maka dapat dilihat atau diidentifikasi sektor/subsektor ekonomi unggulan dan bukan unggulan di setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003 sebagai periode pengamatan. Pada tabel ini nampak bahwa ada 7 (tujuh)

sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Sidrap yang memiliki nilai LQ rata-rata lebih besar dari 1 (satu), sehingga dikategorikan sebagai sektor/ subsektor ekonomi unggulan daerah ini selama periode pengamatan.

Ketujuh sektor/subsektor yang dimaksud adalah: (1) tanaman bahan makanan; (2) tanaman perkebunan; (3) peternakan; (4) penggalian; (5) bangunan; (6) bank; dan (7) sewa bangunan. Di antara sektor/subsektor ini terdapat sektor/subsektor yang paling tinggi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Sidrap dibanding dengan sektor/subsektor ekonomi unggulan lainnya di daerah ini, yakni subsektor tanaman perkebunan dengan nilai LQ sebesar 4,06. Berdasarkan data ini, maka sebenarnya subsektor inilah yang harus lebih digenjot perkembangannya di masa datang karena Kabupaten Sidrap memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar untuk pengembangan tanaman perkebunan, seperti kakao, mente, dan tanaman perkebunan lainnya, sehingga produksi pertanian di daerah bukan bersifat monokultur padi.

Selanjutnya, pada tabel ini dapat pula dilihat bahwa ada 13 (tigabelas) sektor/subsektor ekonomi di Kota Parepare yang memiliki nilai LQ rata-rata lebih besar dari 1 (satu), sehingga dikategorikan sebagai sektor/subsektor unggulan di kota selama periode pengamatan dilihat dari aspek kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Parepare selama periode 1999 – 2003. Keduabelas sektor/subsektor unggulan tersebut adalah: (1) listrik; (2) air bersih; (3) bangunan; (4) perdagangan besar dan eceran; (5) hotel; (6) restoran; (7) pengangkutan; (8) komunikasi; (9) bank; (10) lembaga

keuangan tanpa bank; (11) sewa bangunan; dan (12) pemerintah umum dan (13) swasta. Di antara ketigabelas sektor/subsektor ekonomi unggulan ini, maka terlihat bahwa yang paling besar nilai LQ rata-ratanya adalah subsektor bank yang menunjukkan adanya peningkatan kontribusi subsektor ini terhadap pembentukan PDRB Kota Parepare selama periode pengamatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan sektor/subsektor ekonomi lainnya.

Pada tabel 5 terlihat pula bahwa terdapat 5 (lima) sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Pinrang yang memiliki nilai LQ rata-rata yang lebih besar dari 1 (satu), sehingga dikategorikan sebagai sektor/subsektor unggulan daerah ini selama periode pengamatan. Kelima sektor/subsektor ekonomi tersebut adalah: (1) tanaman bahan makanan; (2) peternakan; (3) kehutanan; (4) perikanan; dan (5) bank. Diantara kelima sektor/subsektor ekonomi unggulan ini, maka sektor/subsektor ekonomi yang paling besar nilai LQ rata-ratanya adalah subsektor perikanan yang menunjukkan kuatnya daya saing subsektor ini dalam perekonomian Kabupaten Pinrang dibandingkan dengan posisi subsektor yang sama dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sevagai daerah acuan (referensi). Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa hal ini disebabkan karena Kabupaten Pirang memiliki potensi sumberdaya lahan dan sumberdaya pendukung lainnya yang sangat besar dalam pengembangan aktivitas di subsektor perikanan ini, utamanya perikanan tambak yang menghasilkan komoditas udang sebagai salah satu komoditas ekspor andalan Sulawesi Selatan selama ini.

Selanjutnya, pada tabel 5 dapat pula dilihat bahwa ada 11 (sebelas) sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Barru yang memiliki nilai LQ rata-rata lebih besar dari 1 (satu), sehingga dikategorikan sebagai sektor unggulan di daerah ini dilihat dari aspek kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Barru selama periode pengamatan. Sektor/subsektor tersebut adalah: (1) tanaman bahan makanan; (2) peternakan; (3) perikanan; (4) bangunan; (5) restoran; (6) pengangkutan; (7) bank; (8) lembaga keuangan tanpa bank; (9) sewa bangunan; (10) pemerintahan umum; dan (11) swasta. Diantara kesebelas sektor/subsektor ekonomi unggulan ini, maka subsektor bank yang paling tinggi nilai LQ rata-ratanya. Hal ini menunjukkan kontribusi subsektor bank terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barru adalah cukup besar selama periode pengamatan. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa output (jasa) subsektor ini bukan hanya dinikmati oleh pelaku ekonomi yang ada di Kabupaten Barru, tetapi juga dapat dinikmati oleh para pelaku ekonomi yang berasal dari kabupaten-kabupaten di wilayah KAPET Parepare.

Pada tabel 5 nampak pula bahwa ada sembilan sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Enrekang yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1 (satu) selama periode pengamatan, sehingga dikategorikan sebagai sektor/ subsektor unggulan, yaitu: (1) tanaman bahan makanan; (2) tanaman perkebunan; (3) peternakan; (4) air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan besar dan eceran; (7) bank; (8) sewa bangunan; dan (9) pemerintahan umum. Diantara kesembilan sektor/subsektor unggulan, maka subsektor bank yang paling besar nilai LQ rata-ratanya, yang menunjukkan bahwa

kontribusi subsektor bank dalam pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang adalah cukup besar selama periode pengamatan. Selain itu, hal ini menunjukkan pula bahwa output subsektor bank, selain telah dinikmati oleh masyarakat di daerah ini, maka ada pula sisanya yang dapat dinikmati oleh pelaku ekonomi dari daerah-daerah lain di wilayah KAPET Parepare.

Selanjutnya, jika dilihat persamaan sektor/subsektor ekonomi unggulan setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare, maka subsektor tanaman bahan makanan menjadi subsektor unggulan 4 (empat) kabupaten di wilayah KAPET Parepare, yakni Kabupaten Sidrap, Pinrang, Barru, dan Enrekang. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa karakteristik ekonomi serta konsentrasi aktivitas ekonomi di keempat kabupaten dalam Wilayah KAPET Parepare adalah sama (homogen). Akibatnya, bentuk keterkaitan ekonomi antar keempat kabupaten ini, dilihat dari aspek ini cenderung berbentuk keterkaitan "*Aggregate*", bukan keterkaitan "*Complementary*", sehingga lebih cenderung menimbulkan persaingan antara keempat kabupaten di wilayah ini daripada saling membutuhkan dan saling melengkapi yang pada akhirnya justru kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan.

2. Analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP)

Alat analisis MRP ini digunakan untuk menentukan sektor/sub sektor ekonomi unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare sebagai daerah studi dalam kaitannya dengan perekonomian

Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan dilihat dari aspek tingkat pertumbuhan masing-masing sektor/subsector ekonomi di setiap kabupaten/ kota dalam wilayah KAPET Parepare sebagai wilayah studi dibandingkan tingkat pertumbuhan sektor/subsektor yang sama di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan. Oleh karena itu, dalam penggunaan alat analisis ini terdapat dua ratio pertumbuhan yang dilihat dan analisis ini, yaitu: (1) Ratio pertumbuhan wilayah/daerah studi (RPs), dan (2) Ratio pertumbuhan wilayah/daerah referensi (RPr).

Untuk menentukan/mengidentifikasi dan menganalisis sektor/subsektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dengan menggunakan alat analisis MRP, maka terlebih dahulu harus diperlihatkan data PDRB setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999 dan 2003 sebagai tahun pengamatan, yang dirinci menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 1993, sebagaimana yang nampak dalam lampiran 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 (tabel 24,25,26, 27,28 dan 29).

Berdasarkan data PDRB masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan pada lampiran 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan nilai ratio pertumbuhan (RP_R dan RPs) setiap sektor/subsektor ekonomi yang ada dalam perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, baik nilai riil maupun nominalnya, selama periode pengamatan, yakni tahun 1993 – 2003. Adapun contoh perhitungan nilai MRP masing-

Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan dilihat dari aspek tingkat pertumbuhan masing-masing sektor/subsector ekonomi di setiap kabupaten/ kota dalam wilayah KAPET Parepare sebagai wilayah studi dibandingkan tingkat pertumbuhan sektor/subsektor yang sama di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan. Oleh karena itu, dalam penggunaan alat analisis ini terdapat dua ratio pertumbuhan yang dilihat dan analisis ini, yaitu: (1) Ratio pertumbuhan wilayah/daerah studi (RPs), dan (2) Ratio pertumbuhan wilayah/daerah referensi (RPr).

Untuk menentukan/mengidentifikasi dan menganalisis sektor/subsektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dengan menggunakan alat analisis MRP, maka terlebih dahulu harus diperlihatkan data PDRB setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999 dan 2003 sebagai tahun pengamatan, yang dirinci menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 1993, sebagaimana yang nampak dalam lampiran 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 (tabel 24,25,26, 27,28 dan 29).

Berdasarkan data PDRB masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan pada lampiran 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan nilai ratio pertumbuhan (RP_R dan RPs) setiap sektor/subsektor ekonomi yang ada dalam perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, baik nilai riil maupun nominalnya, selama periode pengamatan, yakni tahun 1993 – 2003. Adapun contoh perhitungan nilai MRP masing-

masing sector/subsektor ekonomi di Kota Parepare dapat dilihat pada lampiran 9.

Hasil perhitungan dengan menggunakan alat analisis MRP ini dan analisisnya untuk setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare sebagai daerah studi dapat dilihat secara berturut pada tabel 6,7,8,9 dan 10.

Untuk menentukan atau mengidentifikasi sektor/subsektor unggulan di Kota Parepare selama periode pengamatan dengan menggunakan alat analisis MRP ini, maka dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Nilai ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kota Parepare (RPs) dan Prop. Sul-Sel (RPr), Periode 1999 – 2003

No	Lapangan Usaha	RPs		RPr		Ket.
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	
1	T. Bahan Makanan	0,40	-	0,83	-	TU
2	T. Perkebunan	0,18	-	0,61	-	TU
3	Peternakan	1,00	+	0,17	-	Pot
4	Kehutanan	0,00	-	1,01	+	TU
5	Perikanan	0,27	-	0,61	-	TU
6	Penggalian	0,47	-	0,83	-	TU
7	Industri tanpa Migas	0,35	-	0,94	-	TU
8	Listrik	0,60	-	1,11	+	TU
9	Air Bersih	0,81	-	0,89	-	TU
10	Bangunan	0,18	-	0,94	-	TU
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,06	-	1,39	+	TU
12	Hotel	1,63	+	0,44	-	Pot
13	Restoran	0,53	-	1,72	+	TU
14	Pengangkutan	0,58	-	1,33	+	TU
15	Komunikasi	0,46	-	2,06	+	TU
16	Bank	0,26	-	5,28	+	TU
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	0,50	-	1,22	+	TU
18	Sewa Bangunan	11,0	+	0,06	-	Pot
19	Jasa Perusahaan	0,46	-	1,44	+	TU
20	Pemerintah Umum	0,35	-	1,11	+	TU
21	Swata	0,19	-	1,17	+	TU

Sumber: Hasil perhitungan, seperti contoh pada lampiran 9.

Keterangan:

TU = Tidak Unggul U = Unggul Pot = Potensil

Pada tabel 6 terlihat bahwa tidak ada sektor/subsektor ekonomi di Kota Parepare yang merupakan sektor/subsektor unggulan dalam perekonomian kota ini dilihat dari aspek pertumbuhannya selama periode pengamatan. Selain itu, terlihat pula bahwa ada 3 (tiga) sektor/subsektor ekonomi yang merupakan) sektor/subsektor potensil, yakni: (1) peternakan; (2) hotel; dan (3) sewa bangunan. Hal ini terlihat pada nilai RPs ketiga subsektor tersebut yang positif (+) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ketiga subsektor tersebut dalam perekonomian Kota Parepare adalah menonjol meskipun pertumbuhannya pada perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan tidak menonjol yang terlihat pada nilai RPR-nya yang negatif (-), sehingga ketiga subsektor ini masuk klasifikasi ketiga. Oleh karena itu, ketiga subsektor inilah yang potensial untuk didorong peningkatan peranannya dalam memberikan kontribusi untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan di masa datang.

Selanjutnya, dapat pula dilihat sektor/subsektor unggulan di Kabupaten Sidrap berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat analisis MRP ini, sebagaimana yang nampak pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Nilai ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Sidrap (RPs) dan Prop. Sul-Sel (RPr), Periode 1999 – 2003

No	Lapangan Usaha	RPs		RPr		Ket.
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	
1	T. Bahan Makanan	0,67	-	0,83	-	TU
2	T. Perkebunan	0,18	-	0,61	-	TU
3	Peternakan	4,67	+	0,17	-	Pot
4	Kehutanan	18,67	+	1,01	+	U
5	Perikanan	2,10	+	0,61	-	Pot
6	Penggalian	1,27	+	0,83	-	Pot
7	Industri tanpa Migas	1,00	+	0,94	-	Pot
8	Listrik	1,35	+	1,11	+	U
9	Air Bersih	-0,19	-	0,89	-	TU
10	Bangunan	1,47	+	0,94	-	Pot
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,52	-	1,39	+	TU
12	Hotel	2,38	+	0,44	-	Pot
13	Restoran	0,68	-	1,72	+	TU
14	Pengangkutan	0,63	-	1,33	+	TU
15	Komunikasi	0,92	-	2,06	+	TU
16	Bank	0,66	-	5,28	+	TU
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	0,59	-	1,22	+	TU
18	Sewa Bangunan	12,0	+	0,06	-	Pot
19	Jasa Perusahaan	0,96	-	1,44	+	TU
20	Pemerintah Umum	1,05	+	1,11	+	U
21	Swata	0,67	-	1,17	+	TU

Sumber: Hasil perhitungan, seperti contoh pada lampiran 9.

Pada tabel 7 dapat dilihat hasil perhitungan niali ratio pertumbuhan setiap sektor/sub ekonomi yang ada dalam perekonomian Kabupaten Sidrap sebagai daerah studi dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan (referensi) untuk menentukan sektor/ subsektor ekonomi mana yang unggul, potensial dan tidak unggul, dilihat dari aspek pertumbuhannya masing-masing, di daerah ini selama periode pengamatan, yakni tahun 1999 - 2003.

Kemudian pada tabel 7 dapat pula dilihat bahwa ada 3 (tiga) sektor/ subsektor ekonomi yang merupakan sektor/subsektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Sidrap pada periode pengamatan dilihat dari aspek

pertumbuhan-nya, yaitu: (1) kehutanan; (2) listrik; dan pemerintahan umum. Hal tersebut terlihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan nilai RPR dan RPs ketiga sektor/subsektor ini adalah positif (+), sehingga ketiga sektor/subsektor ini masuk klasifikasi pertama. Artinya laju pertumbuhan ketiga sektor/subsektor ini, baik pada tingkat Propinsi Sulawesi Selatan maupun pada tingkat Kabupaten Sidrap, adalah menonjol (unggul) dibandingkan dengan sektor/ subsektor ekonomi lainnya dalam perekonomian Kabupaten Sidrap sebagai daerah studi.

Selanjutnya, pada tabel 7 dapat pula dilihat bahwa ada 7 (tujuh) sektor/subsektor ekonomi yang merupakan sektor/subsektor potensil, yakni: (1) peternakan; (2) perikanan; (3) penggalian; (4) industri tanpa Migas; (5) bangunan; (6) hotel; dan (7) sewa bangunan. Hal ini terlihat dari nilai RPs ketujuh sektor/subsektor ini yang positif (+) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ketujuh sektor/subsektor tersebut dalam perekonomian Kabupaten Sidrap adalah menonjol meskipun pertumbuhannya pada perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan tidak menonjol yang terlihat pada nilai RPR-nya yang negatif (-), sehingga ketujuh sektor/subsektor ini masuk klasifikasi ketiga. Oleh karena itu, ketujuh sektor/subsektor tersebut merupakan sektor/subsektor potensial yang dapat diharapkan akan semakin besar peranannya dalam memberikan kontribusi untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap dan Propinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan di masa datang.

Sedangkan sektor/subsektor ekonomi lainnya merupakan sektor/ subsektor tidak unggul. Hal ini terlihat pada nilai RPs- nya yang negatif (-), yang menunjukkan bahwa sektor/subsektor tersebut tidak menonjol pertumbuhannya pada tingkat perekonomian Kabupaten Sidrap. Kemudian diantara sektor/subsektor yang tidak unggul tersebut, terdapat 8 (delapan) sektor/subsektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR yang positif (+) yaitu sektor: (1) perdagangan besar dan eceran, (2) restoran, (3) pengangkutan; (4) komunikasi; (5) bank; (6) lembaga keuangan tanpa bank; (7) jasa perusahaan; dan (8) swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kedelapan sektor/subsektor tersebut di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan adalah menonjol, sehingga kedelapan sektor/subsektor ini masuk dalam klasifiksi kedua, yang berarti bahwa keempat sektor tersebut mempunyai pertumbuhan yang menonjol pada tingkat perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan tetapi tidak menonjol pertumbuhannya pada tingkat perekonomian Kabupaten Sidrap, sehingga kedelapan sektor/subsektor ini bukan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sidrap sebagai daerah studi.

Kemudian dapat pula dilihat hasil perhitungan untuk menentukan sektor/subsektor unggulan di Kabupaten Pinrang, sebagaimana yang nampak pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Nilai ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Pinrang (RPs) dan Prop. Sul-Sel (RPr), Periode 1999 – 2003

No	Lapangan Usaha	RPs		RPr		Ket.
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	
1	T. Bahan Makanan	1,27	+	0,83	-	Pot
2	T. Perkebunan	1,27	+	0,61	-	Pot
3	Peternakan	6,00	+	0,17	-	Pot
4	Kehutanan	-0,44	-	1,01	+	TU
5	Perikanan	-0,18	-	0,61	-	TU
6	Penggalian	1,13	+	0,83	-	Pot
7	Industri tanpa Migas	0,65	-	0,94	-	TU
8	Listrik	1,40	+	1,11	+	U
9	Air Bersih	0,75	-	0,89	-	TU
10	Bangunan	1,24	+	0,94	-	Pot
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,80	-	1,39	+	TU
12	Hotel	1,75	+	0,44	-	Pot
13	Restoran	0,61	-	1,72	+	TU
14	Pengangkutan	0,67	-	1,33	+	TU
15	Komunikasi	0,41	-	2,06	+	TU
16	Bank	0,57	-	5,28	+	TU
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	1,18	+	1,22	+	U
18	Sewa Bangunan	16,0	+	0,06	-	Pot
19	Jasa Perusahaan	0,54	-	1,44	+	TU
20	Pemerintah Umum	0,95	-	1,11	+	TU
21	Swata	1,10	+	1,17	+	U

Sumber: Hasil perhitungan, seperti contoh pada lampiran 9.

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Pinrang yang memiliki RPs dan RPr yang positip (+), sehingga dikategorikan sebagai sektor/subsektor unggulan dalam perekonomian daerah ini selama periode pengamatan, yakni sektor: (1) listrik; (2) lembaga keuangan tanpa bank; dan (3) swasta. Ketiga subsektor ini yang telah menunjukkan laju peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian Kab.Pinrang yang cukup menonjol dibandingkan kontribusinya pada perekonomian regional Sulawesi Selatan selama periode pengamatan, sehingga senantiasa perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa datang. Selain itu, terdapat pula 7 (tujuh) sektor/subsektor ekonomi yang

dikategorikan sebagai sektor/sub sektor potensil, yakni: (1) tanaman bahan makanan; (2) tanaman perkebunan; (3) peternakan; (4) penggalian; (5) bangunan; (6) hotel; dan (7) sewa bangunan. Ketujuh subsektor inilah yang cukup potensil untuk ditingkatkan peranannya dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dan Propinsi Sulawesi Selatan di masa datang.

Selanjutnya, dapat pula dilihat hasil perhitungan dengan menggunakan alat analisis MRP untuk menentukan sektor/subsektor unggulan di Kabupaten Enrekang selama periode 1999 – 2003, sebagaimana yang nampak pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Nilai ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Enrekang (RPs) dan Prop. Sul-Sel (RPr), Periode 1999 – 2003

No	Lapangan Usaha	RPs		RPr		Ket.
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	
1	T. Bahan Makanan	0,73	-	0,83	-	TU
2	T. Perkebunan	1,27	+	0,61	-	Pot
3	Peternakan	6,00	+	0,17	-	Pot
4	Kehutanan	4,00	+	1,01	+	U
5	Perikanan	0,64	-	0,61	-	TU
6	Penggalian	0,87	-	0,83	-	TU
7	Industri tanpa Migas	1,06	+	0,94	-	Pot
8	Listrik	1,05	+	1,11	+	U
9	Air Bersih	0,88	-	0,89	-	TU
10	Bangunan	0,77	-	0,94	-	TU
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,60	-	1,39	+	TU
12	Hotel	4,63	+	0,44	-	Pot
13	Restoran	0,26	-	1,72	+	TU
14	Pengangkutan	0,83	-	1,33	+	TU
15	Komunikasi	0,68	-	2,06	+	TU
16	Bank	0,06	-	5,28	+	TU
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	0,82	-	1,22	+	TU
18	Sewa Bangunan	11,0	+	0,06	-	Pot
19	Jasa Perusahaan	0,42	-	1,44	+	TU
20	Pemerintah Umum	1,25	+	1,11	+	U
21	Swata	0,95	-	1,17	+	TU

Sumber: Hasil perhitungan, seperti contoh pada lampiran 9.

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) subsektor ekonomi unggulan dalam perekonomian Kabupaten Enrekang dilihat dari aspek pertumbuhannya selama periode pengamatan, yakni: (1) kehutanan; dan (2) pemerintahan umum. Hal ini menunjukkan bahwa output kedua subasektor ini telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat selama periode pengamatan yang dapat dilihat pada nilai RPs dan RPr kedua subsektor ini yang positif (+), sehingga kedua subsektor ini masuk kategori/ klasifikasi 1, yakni subsektor yang memiliki keunggulan dalam perekonomian Kabupaten Enrekang karena dapat bertumbuh dengan pesat selama periode pengamatan.

Selain itu, pada tabel 9 terlihat pula bahwa ada 5 (lima) subsektor ekonomi potensil dalam perekonomian Kabupaten Enrekang selama periode pengamatan, yakni: (1) tanaman perkebunan; (2) peternakan; (3) industri tanpa Migas; (4) hotel; dan (5) sewa bangunan. Kelima subsektor inilah yang potensil untuk didorong pengembangannya di masa datang, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap perekonomian Kabupaten Enrekang dan perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian perlu pula dilihat sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Barru yang dikategorikan sebagai sektor/subsektor unggulan dilihat dari aspek laju pertumbuhannya selama periode pengamatan, sebagaimana yang nampak pada tabel 10.

Tabel 10. Nilai ratio pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Barru (RPs) dan Prop. Sul-Sel (RPr), Periode 1999 – 2003

No	Lapangan Usaha	RPs		RPr		Ket.
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	
1	T. Bahan Makanan	-1,07	-	0,83	-	TU
2	T. Perkebunan	2,18	+	0,61	-	Pot
3	Peternakan	3,70	+	0,17	-	Pot
4	Kehutanan	4,38	+	1,01	+	U
5	Perikanan	0,82	-	0,61	-	TU
6	Penggalian	0,80	-	0,83	-	TU
7	Industri tanpa Migas	1,01	+	0,94	-	Pot
8	Listrik	0,45	-	1,11	+	TU
9	Air Bersih	-2,50	-	0,89	-	TU
10	Bangunan	0,70	-	0,94	-	TU
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,76	-	1,39	+	TU
12	Hotel	4,88	+	0,44	-	Pot
13	Restoran	0,58	-	1,72	+	TU
14	Pengangkutan	0,79	-	1,33	+	TU
15	Komunikasi	0,65	-	2,06	+	TU
16	Bank	1,00	+	5,28	+	U
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	1,14	+	1,22	+	U
18	Sewa Bangunan	0,18	-	0,06	-	TU
19	Jasa Perusahaan	0,08	-	1,44	+	TU
20	Pemerintah Umum	1,20	+	1,11	+	U
21	Swata	0,09	-	1,17	+	TU

Sumber: Hasil perhitungan, seperti contoh pada lampiran 9.

Pada tabel 10 dapat dilihat sektor/subsektor yang memiliki nilai RPs dan RPr lebih besar 1 (positip), sehingga merupakan sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kabupaten Barru selama periode pengamatan dilihat dari aspek pertumbuhannya. Sektor/subsektor unggulan tersebut adalah: (1) kehutanan; (2) bank; (3) lembaga keuangan tanpa bank; dan (4) pemerintah-an umum. Hal ini menunjukkan bahwa output kedua subasektor ini telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, baik dalam perekonomian Kabupaten Barru maupun dalam perekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, selama periode pengamatan yang dapat dilihat pada nilai RPs dan RPr keempat subsektor ini yang positif (+), sehingga keempat subsektor ini masuk

kategori/klasifikasi 1, yakni subsektor yang memiliki keunggulan dalam perekonomian Kabupaten Enrekang karena dapat bertumbuh dengan pesat selama periode pengamatan.

Selain itu, pada tabel 10 terlihat pula bahwa ada 4 (empat) subsektor ekonomi dalam perekonomian Kabupaten Enrekang yang termasuk kategori sebagai sektor/subsektor ekonomi potensil selama periode pengamatan, yakni: (1) tanaman perkebunan; (2) peternakan; (3) industri tanpa Migas; dan (4) hotel. Keempat subsektor inilah yang potensil untuk didorong pengembangannya di masa datang, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Enrekang dan wilayah KAPET Parepare serta perekonomian regional Sulawesi Selatan.

Pada tabel 10 dapat pula dilihat sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Barru yang merupakan sektor/subsektor bukan unggulan dilihat dari aspek pertumbuhannya selama periode pengamatan. Sektor/subsektor ekonomi yang dimaksud adalah: (1) tanaman bahan makanan, (2) perikanan; (3) penggalian; (4) listrik; (5) air bersih; (6) bangunan; (7) perdagangan besar dan eceran; (8) restoran; (9) pengangkutan; (10) komunikasi; (11) sewa bangunan; (12) jasa perusahaan; dan (13) swasta. Ketigabelas sektor/sub sektor ini lamban pertumbuhannya selama periode pengamatan, sehingga dikategorikan sebagai sektor/subsektor tidak unggul dalam perekonomian Kabupaten Barru dilihat dari aspek pertumbuhannya selama periode pengamatan.

3. Analisis Overlay

Untuk lebih mempertajam analisis terhadap sektor/subsektor ekonomi unggulan dalam perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999- 2003, maka perlu pula dilakukan analisis *Overlay*. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor/subsektor unggulan dalam perekonomian setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare sebagai daerah studi berdasarkan kriteria pertumbuhan (MRP) dan kontribusi masing-masing sektor/ subsektor ekonomi (LQ) secara bersamaan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model MRP dan LQ, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi dan dianalisis sektor/subsektor ekonomi unggulan dalam perekonomian setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare sebagai daerah studi dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebaga daerah referensi (acuan) dengan menggunakan kriteria pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor/subsektor tersebut terhadap PDRB kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan secara bersamaan. Hasil *overlay* masing-masing sektor/subsektor ekonomi di setiap kabupaten/ kota dalam wilayah KAPET Parepare dapat dilihat pada tabel 11, 12, 13, 14, dan 15.

Hasil *overlay* masing-masing sektor/subsektor ekonomi di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel 11.

Pada tabel 11 di atas menunjukkan bahwa ada 2 (dua) subsektor ekonomi yang dominan dan unggul dalam perekonomian Kota Parepare sebagai daerah studi dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan selama periode pengamatan, yaitu: (1) subsektor hotel; dan (2) subsektor sewa bangunan. Hal tersebut terlihat pada nilai nominal RPs dan LQ kedua subsektor tersebut yang positif (+) atau lebih

Tabel 11. Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kota Parepare dalam konteks perekonomian Sul-Sel, periode 1999-2003

No	Lapangan Usaha	RPs		LQ		Total
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	Nominal
1	T. Bahan Makanan	0,40	-	0,10	-	- -
2	T. Perkebunan	0,18	-	0,02	-	- -
3	Peternakan	1,00	+	0,90	-	+ -
4	Kehutanan	0,00	-	0,00	-	- -
5	Perikanan	0,27	-	0,92	-	- -
6	Penggalian	0,47	-	0,33	-	- -
7	Industri tanpa Migas	0,35	-	0,28	-	- -
8	Listrik	0,60	-	1,80	+	- +
9	Air Bersih	0,81	-	4,00	+	- +
10	Bangunan	0,18	-	1,52	+	- +
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,06	-	1,60	+	- +
12	Hotel	1,63	+	1,00	+	+ +
13	Restoran	0,53	-	5,00	+	- +
14	Pengangkutan	0,58	-	3,90	+	- +
15	Komunikasi	0,46	-	1,58	+	- +
16	Bank	0,26	-	7,90	+	- +
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	0,50	-	2,26	+	- +
18	Sewa Bangunan	11,0	+	2,18	+	+ +
19	Jasa Perusahaan	0,46	-	0,66	-	- -
20	Pemerintah Umum	0,35	-	0,72	-	- -
21	Swata	0,19	-	2,30	+	- +

Sumber: Tabel 5 dan 6

besar dari 1. Oleh karena itu, kedua subsektor ini sangat dominan dalam perekonomian Kota Parepare selama periode pengamatan, baik dilihat dari aspek pertumbuhannya maupun kontribusinya terhadap PDRB kota ini,

sehingga kegiatan investasi di masa datang sebaiknya lebih banyak mengarahkan kepada dua subsektor ekonomi ini.

Selanjutnya, pada tabel 11 terlihat pula bahwa ada satu subsektor ekonomi di Kota Parepare yang masuk klasifikasi 2, yakni memiliki RPs (+) dan LQ (-), yaitu subsektor Peternakan. Berarti subsektor ini mempunyai pertumbuhan yang dominan tetapi kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kota Parepare adalah kecil selama periode pengamatan, sehingga memiliki potensi untuk dipacu di masa datang agar dapat menjadi subsektor yang dominan dalam perekonomi kota in.

Pada tabel 11 nampak pula subsektor yang masuk klasifikasi 3, yakni subsektor yang memiliki RPs (-) dan LQ (+). Subsektor dalam perekonomian Kota Parepare yang masuk klasifikasi 3 ini adalah: (1) listrik; (2) air bersih; (3) bangunan; (4) perdagangan besar dan eceran; (5) restoran; (6) pengangkutan; (7) komunikasi; (8) bank; (9) lembaga keuangan tanpa bank; dan (10) swasta. Kesepuluh subsektor ini merupakan subsektor yang mempunyai pertumbuhan yang rendah tetapi kontribusinya terhadap PDRB Kota Parepare selama periode pengamatan adalah besar yang ditunjukkan oleh nilai LQ subsektor-subsektor ini yang positif. Kesepuluh subsektor ini merupakan subsektor yang sedang mengalami penurunan (kontraksi) dalam perekonomian Kota Parepare selama periode pengamatan, sehingga perlu segera dilakukan berbagai upaya dan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhannya, sehingga tetap dapat dipertahankan menjadi subsektor yang tetap besar kontribusinya terhadap pendapatan regional Kota Parepare

dan senantiasa mengalami pertumbuhan dengan laju yang senantiasa meningkat dari waktu ke waktu di masa datang.

Selanjutnya, pada tabel 11 terlihat pula subsektor ekonomi di Kota Parepare yang termasuk dalam klasifikasi 4, yakni subsektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB Kota Parepare yang kecil, sehingga subsektor-subsektor ini merupakan subsektor yang tidak unggul dan tidak potensil bagi perekonomian Kota Parepare selama periodew pengamatan. Subsektor yang termasuk klasifikasi 4 ini adalah: (1) tanaman bahan makanan; (2) tanaman perkebunan; (3) kehutanan; (4) perikanan; (5) penggalian; (6) industri tanpa Migas, (7) jasa perusahaan; dan (8) pemerintahan umum. Kedelapan subsektor ini merupakan subsektor bukan unggulan dan andalan dalam perekonomian Kota Parepare selama periode pengamatan karena laju pertumbuhannya di Kota Parepare adalah lebih rendah daripada laju pertumbuhannya dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan. Demikian pula kontribusinya terhadap PDRB Kota Parepare adalah lebih rendah daripada kontribusinya terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedelapan subsektor tersebut tidak dapat diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Kota Parepare di masa datang.

Selanjutnya, diperlihatkan hasil *overlay* subsektor-subsektor ekonomi dalam perekonomian Kabupaten Sidrap, sebagaimana yang nampak pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kab. Sidrap dalam konteks perekonomian regional Sul-Sel, periode 1999-2003

No	Lapangan Usaha	RPs		LQ		Total
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	Nominal
1	T. Bahan Makanan	0,67	-	2,34	+	- +
2	T. Perkebunan	0,18	-	4,06	+	- +
3	Peternakan	4,67	+	3,40	+	+ +
4	Kehutanan	18,67	+	0,46	-	+ -
5	Perikanan	2,10	+	0,26	-	+ -
6	Penggalian	1,27	+	2,64	+	+ +
7	Industri tanpa Migas	1,00	+	0,40	-	+ -
8	Listrik	1,35	+	0,96	-	+ -
9	Air Bersih	-0,19	-	0,16	-	- -
10	Bangunan	1,47	+	1,80	+	+ +
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,52	-	0,94	-	- -
12	Hotel	2,38	+	1,01	+	+ +
13	Restoran	0,68	-	0,78	-	- -
14	Pengangkutan	0,63	-	0,72	-	- -
15	Komunikasi	0,92	-	0,22	-	- -
16	Bank	0,66	-	2,82	+	- +
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	0,59	-	0,74	-	- -
18	Sewa Bangunan	12,0	+	1,22	+	+ +
19	Jasa Perusahaan	0,96	-	0,74	-	- -
20	Pemerintah Umum	1,05	+	0,79	-	+ -
21	Swata	0,67	-	0,82	-	- -

Sumber: Tabel 5 dan 7

Pada tabel 12 dapat dilihat kategori masing-masing subsektor dalam perekonomian Kabupaten Sidrap setelah dioverlay dengan menggunakan kriteria pertumbuhan (RPs) dan kontribusinya terhadap PDRB Kab. Sidrap (LQ) selama periode pengamatan. Hasil overlay di atas menunjukkan bahwa ada 5 (lima) subsektor ekonomi yang masuk klasifikasi 1, yakni: (1) peternakan; (2) penggalian; (3) bangunan; (4) hotel; dan sewa bangunan. Kelima subsektor ini merupakan subsektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi serta memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kab. Sidrap, sehingga RPs dan LQ-nya positip atau lebih besar dari 1.

Hal ini menunjukkan bahwa kelima subsektor ini sangat dominan dalam perekonomian Kabupaten Sidrap selama periode pengamatan, baik dilihat dari aspek pertumbuhannya maupun kontribusinya terhadap PDRB daerah ini, sehingga merupakan subsektor yang sangat unggul daerah ini selama periode pengamatan dilihat dari kedua aspek tersebut.

Selanjutnya, pada tabel 12 dapat pula dilihat bahwa terdapat 5 (lima) subsektor ekonomi di Kabupaten Sidrap yang masuk klasifikasi 2, yakni subsektor yang memiliki RPs (+) dan LQ (-), yaitu: (1) kehutanan; (2) penggalian; (3) bangunan; (4) hotel; dan (5) sewa bangunan. Berari kelima subsektor ini mempunyai pertumbuhan yang dominan tetapi kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Sidrap adalah kecil selama periode pengamatan, sehingga memiliki potensi untuk dipacu di masa datang agar dapat menjadi subsektor yang dominan dalam perekonomi daerah ini.

Pada tabel 12 dapat pula dilihat subsektor yang masuk klasifikasi 3, yakni subsektor yang memiliki RPs (-) dan LQ (+). Subsektor yang dimaksud adalah: (1) Tanaman Bahan Makanan; (2) Perkebunan; dan (3) Bank. Ketiga subsektor ini merupakan subsektor yang mempunyai pertumbuhan yang rendah tetapi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Sidrap selama periode pengamatan adalah besar yang ditunjukkan oleh nilai LQ subsektor-subsektor ini yang positif. Ketiga subsektor ini merupakan subsektor yang sedang mengalami penurunan (kontraksi) dalam perekonomian Kabupaten Sidrap selama periode pengamatan, sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah konkrit untuk mendorong pertumbuhannya, sehingga dapat

dipertahankan menjadi subsektor yang tetap besar kontribusinya terhadap pendapatan regional Kabupaten Sidrap dan senantiasa mengalami pertumbuhan dengan laju yang senantiasa meningkat dari waktu ke waktu di masa datang.

Kemudian pada tabel 12 terlihat pula subsektor ekonomi di Kabupaten Sidrap yang termasuk dalam klasifikasi 4, yakni subsektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sidrap yang kecil, sehingga subsektor-subsektor ini merupakan subsektor yang tidak unggul dan tidak potensil bagi perekonomian Kabupaten Sidrap selama periode pengamatan. Subsektor yang dimaksud adalah: (1) air bersih; (2) perdagangan besar dan eceran; (3) restoran; (4) pengangkutan; (5) komunikasi; (6) lembaga keuangan tanpa bank, (7) jasa perusahaan; dan (8) swasta. Kedelapan subsektor ini merupakan subsektor bukan unggulan dan andalan dalam perekonomian Kabupaten Sidrap selama periode pengamatan karena laju pertumbuhannya di daerah ini adalah lebih rendah daripada laju pertumbuhannya dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Sidrap adalah lebih rendah daripada kontribusinya terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedelapan subsektor tersebut merupakan subsektor bukan unggulan dan tidak dapat diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap di masa datang.

Selanjutnya, dapat pula dilihat hasil overlay sektor/subekstor ekonomi di Kabupaten Pinrang, sebagaimana yang nampak pada tabel 13.

Tabel 13. Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kab. Pinrang dalam konteks perekonomian regional Sul-Sel, periode 1999-2003

No	Lapangan Usaha	RPs		LQ		Total
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	Nominal
1	T. Bahan Makanan	1,27	+	1,61	+	++
2	T. Perkebunan	1,27	+	0,78	+	++
3	Peternakan	6,00	+	1,78	+	++
4	Kehutanan	-0,44	-	1,90	+	-+
5	Perikanan	-0,18	-	2,82	+	-+
6	Penggalian	1,13	+	0,64	-	+-
7	Industri tanpa Migas	0,65	-	0,50	-	--
8	Listrik	1,40	+	0,76	-	+-
9	Air Bersih	0,75	-	0,30	-	--
10	Bangunan	1,24	+	0,88	-	+-
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,80	-	0,58	-	--
12	Hotel	1,75	+	0,08	-	+-
13	Restoran	0,61	-	0,86	-	--
14	Pengangkutan	0,67	-	0,52	-	--
15	Komunikasi	0,41	-	0,58	-	--
16	Bank	0,57	-	2,00	+	-+
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	1,18	+	0,80	-	+-
18	Sewa Bangunan	16,0	+	0,92	-	+-
19	Jasa Perusahaan	0,54	-	0,30	-	--
20	Pemerintah Umum	0,95	-	0,96	-	--
21	Swata	1,10	+	0,68	-	+-

Sumber: Tabel 5 dan 8

Pada tabel 13 dapat dilihat kategori masing-masing sektor/subsektor dalam perekonomian Kabupaten Pinrang setelah dioverlay dengan menggunakan kriteria pertumbuhan (RPs) dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pinrang (LQ) selama periode pengamatan. Hasil overlay pada tabel 13 di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) subsektor ekonomi di Kabupaten Pinrang yang masuk klasifikasi 1, yakni: (1) tanaman bahan makanan; (2) tanaman perkebunan; dan (3) peternakan. Ketiga subsektor ini

merupakan yang sangat dominan dalam perekonomian Kabupaten Pinrang selama periode pengamatan, baik dilihat dari aspek pertumbuhannya maupun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pinrang. Hal ini disebabkan karena subsektor-subsektor ini memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi serta memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang, sehingga RPs dan LQ-nya positip atau lebih besar dari 1. Hal ini menunjuk-kan bahwa ketiga subsektor ini merupakan subsektor yang sangat unggul di Kabupaten Pinrang selama periode pengamatan dilihat dari kedua aspek tersebut.

Selanjutnya, pada tabel 13 dapat pula dilihat bahwa terdapat 7 (tujuh) subsektor ekonomi di Kabupaten Pinrang yang masuk klasifikasi 2, yakni subsektor yang memiliki RPs (+) dan LQ (-). Subsektor tersebut adalah: (1) penggalian; (2) listrik; (3) bangunan; (4) hotel; (5) sewa bangunan; (6) lembaga keuangan tanpa bank, dan (7) swasta. Oleh karena RPs ketujuh subsektro ini positip (lebih besar dari 1), maka ketujuh subsektor ini mempunyai pertumbuhan yang dominan tetapi kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Pinrang adalah kecil selama periode pengamatan, sehingga LQ-nya lebih kecil dari 1 (negatip). Melihat keadaan ini, maka dapat dikatakan bahwa ketujuh subsektor ini memiliki potensi untuk dipacu di masa datang agar dapat menjadi subsektor yang dominan dalam perekonomi Kabupaten Pinrang dan wilayah KAPET Parepare serta Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada tabel 13 dapat pula dilihat sektor/subsektor di Kabupaten Pinrang yang masuk klasifikasi 3, yakni subsektor yang memiliki RPs (-) dan LQ (+). Subsektor yang dimaksud adalah: (1) kehutanan; (2) Perikanan; dan (3) Bank. Ketiga subsektor ini merupakan subsektor yang mempunyai pertumbuhan yang rendah tetapi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pinrang selama periode pengamatan adalah besar yang ditunjukkan oleh nilai LQ subsektor-subsektor ini yang positif. Ketiga subsektor ini merupakan subsektor yang sedang mengalami penurunan (kontraksi) dalam perekonomian Kabupaten Pinrang selama periode pengamatan, sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah konkrit untuk mendorong pertumbuhannya, sehingga dapat dipertahankan menjadi subsektor yang tetap besar kontribusinya terhadap pendapatan regional Kabupaten Pinrang dan dan dapat bertumbuh dengan laju yang senantiasa meningkat dari waktu ke waktu di masa datang.

Pada tabel 13 terlihat pula subsektor ekonomi di Kabupaten Pinrang yang termasuk dalam klasifikasi 4, yakni: (1) air bersih; (2) perdagangan besar dan eceran; (3) restoran; (4) pengangkutan; (5) komunikasi; (6) Industri tanpa Migas, (7) jasa perusahaan; dan (8) pemerintahan umum. Kedelapan subsektor ini merupakan subsektor bukan unggulan dan andalan dalam perekonomian Kabupaten Pinrang selama periode pengamatan karena laju pertumbuhannya di daerah ini adalah lebih rendah daripada laju pertumbuhannya dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pinrang adalah lebih rendah

daripada kontribusinya terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedelapan subsektor tersebut merupakan subsektor bukan unggulan dan tidak dapat diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang di masa datang.

Selanjutnya, dapat pula dilihat hasil overlay sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kabupaten Enrekang, sebagaimana yang nampak pada tabel 14.

Tabel 14. Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kab. Enrekang dalam konteks perekonomian regional Sul-Sel, periode 1999-2003

No	Lapangan Usaha	RPs		LQ		Total
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	Nominal
1	T. Bahan Makanan	0,73	-	1,78	+	- +
2	T. Perkebunan	1,27	+	2,06	+	++
3	Peternakan	6,00	+	2,02	+	++
4	Kehutanan	4,00	+	0,38	-	+ -
5	Perikanan	0,64	-	0,04	-	- -
6	Penggalian	0,87	-	0,66	-	- -
7	Industri tanpa Migas	1,06	+	0,50	-	+ -
8	Listrik	1,05	+	0,62	-	+ -
9	Air Bersih	0,88	-	1,00	+	- +
10	Bangunan	0,77	-	1,02	+	- +
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,60	-	1,01	+	- +
12	Hotel	4,63	+	0,07	-	+ -
13	Restoran	0,26	-	0,70	-	- -
14	Pengangkutan	0,83	-	0,42	-	- -
15	Komunikasi	0,68	-	0,14	-	- -
16	Bank	0,06	-	8,02	+	- +
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	0,82	-	0,80	-	- -
18	Sewa Bangunan	11,0	+	1,07	+	+ +
19	Jasa Perusahaan	0,42	-	0,08	-	- -
20	Pemerintah Umum	1,25	+	1,18	+	+ +
21	Swata	0,95	-	0,68	-	- -

Sumber: Tabel 5 dan 9

Data pada tabel 14 memperlihatkan klasifikasi masing-masing subsektor dalam perekonomian Kabupaten Enrekang setelah dioverlay

dengan menggunakan kriteria pertumbuhan (RPs) dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Enrekang (LQ) selama periode pengamatan. Pada tabel 14 terlihat bahwa terdapat 4 (empat) sektor/subsektor ekonomi di Kabupaten Enrekang yang masuk klasifikasi 1, yakni: (1) tanaman perkebunan; (2) peternakan; (3) sewan bangunan; dan (4) pemerintahan umum. Keempat sektor/subsektor tersebut merupakan sektor/subsektor yang sangat dominan dalam perekonomian Kabupaten Enrekang selama periode pengamatan, baik dilihat dari aspek pertumbuhannya maupun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan karena sektor/subsektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi serta memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Enrekang, sehingga RPs dan LQ-nya positip (lebih besar dari 1). Oleh karena itu, keempat sektor/subsektor ini merupakan sektor/subsektor yang sangat unggul dalam perekonomian Kabupaten Enrekang selama periode pengamatan.

Selanjutnya, pada tabel 14 dapat pula dilihat 4 (empat) subsektor ekonomi di Kabupaten Enrekang yang masuk klasifikasi 2, yakni subsektor yang memiliki RPs (+) dan LQ (-). Subsektor tersebut adalah: (1) kehutanan; (2) industri tanpa Migas; (3) listrik; dan (4) hotel. Oleh karena RPs keempat subsektor ini positip (lebih besar dari 1), berarti keempat subsektor ini mempunyai pertumbuhan yang dominan tetapi kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Enrekang adalah kecil selama periode pengamatan, sehingga LQ-nya lebih kecil dari 1 (negatip). Melihat

keadaan ini, maka dapat dikatakan bahwa keempat subsektor ini memiliki potensi untuk dipacu di masa datang agar dapat menjadi subsektor yang dominan dalam perekonomi Kabupaten Enrekang dan wilayah KAPET Parepare serta Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada tabel 14 dapat pula dilihat subsektor di Kabupaten Enrekang yang masuk klasifikasi 3, yakni subsektor yang memiliki RPs (-) dan LQ (+). Subsektor yang dimaksud adalah: (1) tanaman bahan makanan; (2) air bersih; (3) bangunan; (4) perdagangan besar dan eceran; dan (5) bank. Kelima subsektor ini merupakan subsektor yang mempunyai pertumbuhan yang rendah tetapi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Enrekang selama periode pengamatan adalah besar yang ditunjukkan oleh nilai LQ subsektor-subsektor ini yang positif. Kelima subsektor ini merupakan subsektor yang sedang mengalami penurunan (kontraksi) dalam perekonomian Kabupaten Enrekang selama periode pengamatan, sehingga pemerintah Kabupaten Enrekang perlu segera melakukan upaya-upaya nyata untuk mendorong pertumbuhan kelima subsektor ini, sehingga dapat dipertahankan menjadi subsektor yang tetap besar kontribusinya terhadap pendapatan regional Kabupaten Enrekang dan dapat bertumbuh dengan laju yang senantiasa meningkat dari waktu ke waktu di masa datang.

Selain itu, pada tabel 14 terlihat pula subsektor ekonomi di Kabupaten Enrekang yang termasuk dalam klasifikasi 4, yakni subsektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Enrekang yang kecil, sehingga subsektor-subsektor ini merupakan subsektor

yang tidak unggul dan tidak potensil bagi perekonomian Kabupaten Enrekang selama periode pengamatan. Subsektor yang dimaksud adalah: (1) perikanan; (2) penggalian; (3) restoran; (4) pengangkutan; (5) komunikasi; (6) lembaga keuangan tanpa bank, (7) jasa perusahaan; dan (8) swasta. Kedelapan subsektor ini merupakan subsektor bukan unggulan/andalan serta tidak potensil bagi perekonomian Kabupaten Enrekang selama periode pengamatan karena laju pertumbuhannya di daerah ini adalah lebih rendah daripada laju pertumbuhannya dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Enrekang yang lebih rendah daripada kontribusinya terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedelapan subsektor ini merupakan subsektor bukan unggulan dan tidak dapat diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang di masa datang karena tidak memiliki potensi.

Selanjutnya, diperlihatkan pula hasil overlay untuk menganalisis sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kabupaten Barru, sebagaimana yang nampak pada tabel 15.

Tabel 15. Deskripsi sektor/subsektor ekonomi unggulan di Kab. Barru dalam konteks perekonomian regional Sul-Sel, periode 1999-2003

No	Lapangan Usaha	RPs		LQ		Total
		Riil	Nominal	Riil	Nominal	Nominal
1	T. Bahan Makanan	-1,07	-	1,24	+	- +
2	T. Perkebunan	2,18	+	0,44	-	+ -
3	Peternakan	3,70	+	1,82	+	++
4	Kehutanan	4,38	+	0,26	-	+ -
5	Perikanan	0,82	-	1,76	+	- +
6	Penggalian	0,80	-	0,96	-	- -
7	Industri tanpa Migas	1,01	+	0,35	-	+ -
8	Listrik	0,45	-	0,54	-	- -
9	Air Bersih	-2,50	-	0,76	-	- -
10	Bangunan	0,70	-	1,34	+	- +
11	Perdag. Besar dan Eceran	0,76	-	0,92	-	- -
12	Hotel	4,88	+	0,03	-	+ -
13	Restoran	0,58	-	1,12	+	- +
14	Pengangkutan	0,79	-	1,03	+	- +
15	Komunikasi	0,65	-	0,19	-	- -
16	Bank	1,00	+	2,67	+	++
17	Lembaga Keu Tanpa Bank	1,14	+	1,18	+	++
18	Sewa Bangunan	0,18	-	1,06	+	- +
19	Jasa Perusahaan	0,08	-	0,10	-	- -
20	Pemerintah Umum	1,20	+	1,16	+	++
21	Swata	0,09	-	1,00	+	- +

Sumber: Tabel 5 dan 10

Pada tabel 15 terlihat klasifikasi masing-masing sektor/subsektor dalam perekonomian Kabupaten Barru setelah dioverlay dengan mengguna-kan kriteria pertumbuhan (RPs) dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Barru (LQ) selama periode pengamatan. Hasil overlay pada tabel R5 di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) subsektor ekonomi di Kabupaten Barru yang masuk klasifikasi 1, yakni: (1) peternakan; (2) bank; (3) lembaga keuangan tanpa bank; dan (4) pemerintahan umum. Keempat subsektor ini merupakan subsektor yang sangat dominan dalam perekonomian Kabupaten Barru selama periode pengamatan, baik dilihat dari aspek pertumbuhannya

maupun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Barru. Hal ini disebabkan karena subsektor-subsektor ini memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi serta memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Barru, sehingga RPs dan LQ-nya positip (lebih besar dari 1). Hal ini menunjukkan bahwa keempat subsektor ini merupakan subsektor yang sangat unggul dalam perekonomian Kabupaten Barru selama periode pengamatan.

Selanjutnya, pada tabel 15 dapat pula dilihat 4 (empat) subsektor ekonomi di Kabupaten Barru yang masuk klasifikasi 2, yakni subsektor yang memiliki RPs (+) dan LQ (-). Subsektor tersebut adalah: (1) tanaman perkebunan; (2) kehutanan; (3) Industri besar dan eceran; dan (4) hotel. Oleh karena RPs keempat subsektor ini positip (lebih besar dari 1), berarti keempat subsektor ini mempunyai pertumbuhan yang dominan tetapi kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Barru adalah kecil selama periode pengamatan, sehingga LQ-nya lebih kecil dari 1 (negatip). Melihat keadaan ini, maka dapat dikatakan bahwa keempat subsektor ini memiliki potensi untuk dipacu di masa datang agar dapat menjadi subsektor yang dominan dalam perekonomi Kabupaten Barru, utamanya dalam pembentukan PDRB daerah ini di masa datang.

Pada tabel 15 dapat pula dilihat subsektor di Kabupaten Barru yang masuk klasifikasi 3, yakni subsektor yang memiliki RPs (-) dan LQ (+). Subsektor yang dimaksud adalah: (1) tanaman bahan makanan; (2) perikanan; (3) bangunan; (4) restoran; (5) pengangkutan; (6) sewa bangunan; dan (7) swasta. Ketujuh subsektor ini merupakan subsektor yang mempunyai

pertumbuhan yang rendah tetapi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Barru selama periode pengamatan adalah cukup besar yang ditunjukkan oleh nilai LQ subsektor-subsektor ini yang positif. Ketujuh subsektor ini merupakan subsektor yang sedang mengalami penurunan (kontraksi) dalam perekonomian Kabupaten Barru selama periode pengamatan, sehingga perlu segera dilakukan berbagai langkah konkrit untuk mendorong pertumbuhannya di masa datang, sehingga dapat dipertahankan menjadi subsektor yang tetap besar kontribusinya terhadap pendapatan regional Kabupaten Barru dan dapat bertumbuh dengan laju yang senantiasa meningkat dari waktu ke waktu di masa datang.

Selain itu, pada tabel 15 terlihat pula subsektor ekonomi di Kabupaten Barru yang termasuk dalam klasifikasi 4, yakni subsektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Barru yang kecil, sehingga subsektor-subsektor ini merupakan subsektor yang tidak unggul dan tidak potensil bagi perekonomian Kabupaten Barru selama periode pengamatan. Subsektor yang dimaksud adalah: (1) penggalian; (2) listrik; (3) air bersih; (4) perdagangan besar dan ecewran; (5) komunikasi; dan (6) jasa perusahaan. Keenam subsektor ini merupakan subsektor bukan unggulan/andalan serta tidak potensil bagi perekonomian Kabupaten Barru selama periode pengamatan karena laju pertumbuhannya di daerah ini adalah lebih rendah daripada laju pertumbuhannya dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Barru yang lebih rendah daripada kontribusinya terhadap PDRB

Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keenam subsektor ini merupakan subsektor bukan unggulan dan tidak dapat diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru di masa datang karena tidak potensil.

4. Analisis Spesialisasi Regional

Setelah melakukan identifikasi sektor/subsektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare, maka selanjutnya analisis perlu diarahkan pada kajian mengenai apakah sektor/subsektor unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini seiring dengan adanya konsentrasi aktivitas sektor/subsektor unggulan di masing-masing kabupaten/ kota tersebut.

Untuk melakukan analisis tersebut, maka digunakan alat analisis "*Index Spesialisasi Regional*" yang lebih dikenal sebagai "*Index Krugman*" sebagai penemu alat analisis ini. Alat analisis ini digunakan dengan berdasarkan pada teori dan hasil pengujian empiris yang telah dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi wilayah dan ekonomi geografi, seperti P. Krugman (1991), Baldwin (1997), Baldwin dan Forslid (2000), Martin dan Ottaviano (2001, Fujita dan Thisse (2001), serta Sbergami (2002), di Eropa dan Amerika Serikat dengan menggunakan alat analisis ini dan telah menemukan serta sampai pada kesimpulan yang sama bahwa *spesialisasi regional* pada

masing-masing wilayah yang tercipta dari adanya konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu pada wilayah-wilayah tersebut mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar wilayah itu, utamanya keterkaitan ekonomi antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah *hinterland*-nya. Oleh karena itu, menurut mereka aglomerasi yang merupakan perwujudan dari konsentrasi aktivitas ekonomi di suatu wilayah perlu senantiasa didorong pembentukannya dalam rangka meningkatkan keterkaitan ekonomi antar wilayah dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Alat analisis ini telah digunakan oleh Sukkoo Kim (1995) untuk menganalisis *spesialisasi regional* di Amerika Serikat dan oleh Mudrajat Kuncoro (2004) untuk mengukur tingkat spesialisasi antar kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Selatan.

Adapun nilai *index spesialisasi regional* masing-masing kabupaten/ kota di wilayah KAPET Parepare dapat dilihat pada tabel 16 dan 17 yang diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan alat analisis *Index Krugman,* sebagaimana terlihat contoh perhitungannya pada lampiran 10.

Tabel 16. Index spesialisasi regional kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan, tahun 1999

	Pr	Sd	Pg	Br	Ek	Mks	Lt	Mm	Mj	Pm	Tt	Lw	Wj	Sp	Bn	Pk	Mr	Sj	Gw	Tk	Jp	Bt	Bk	Sy	Rata-rata
Pr		0,09	0,12	0,09	0,10	0,05	0,15	0,18	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,12	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	0,12	0,10	0,11	0,09	0,11
Sd			0,03	0,02	0,06	0,11	0,08	0,05	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,08	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,04
Pg				0,03	0,02	0,13	0,09	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,08	0,04	0,01	0,05	0,03	0,02	0,03	0,01	0,05	0,04
Br					0,01	0,11	0,09	0,05	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03	0,09	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Ek						0,11	0,09	0,05	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,03	0,03	0,09	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04
Mks							0,15	0,14	0,10	0,11	0,11	0,09	0,13	0,10	0,13	0,11	0,11	0,13	0,11	0,10	0,14	0,12	0,12	0,10	0,12
Lt								0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,07	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09
Mm									0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,02	0,09	0,04	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05
Mj										0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,05	0,08	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03
Pm											0,02	0,03	0,01	0,03	0,03	0,08	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,03	0,04	0,04
Tt												0,03	0,03	0,03	0,03	0,09	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03
Lw													0,04	0,02	0,04	0,07	0,04	0,05	0,03	0,01	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04
Wj														0,04	0,04	0,08	0,05	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
Sp															0,03	0,07	0,04	0,04	0,03	0,01	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04
Bn																0,08	0,04	0,02	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,05	0,03
Pk																	0,06	0,10	0,07	0,06	0,10	0,10	0,09	0,08	0,09
Mr																		0,05	0,05	0,03	0,05	0,04	0,03	0,05	0,04

Sj																			0,05	0,04	0,02	0,02	0,01	0,06	0,03
Gw																				0,03	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
Tk																					0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
Jp																						0,02	0,03	0,06	0,04
Bt																							0,02	0,04	0,04
Bk																								0,04	0,05
Sy																									0,05
Rata-rata																									0,05

Sumber: Hasil perhitungan, seperti contoh pada lampiran 3.

Tabel 17. Index spesialisasi regional kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan, tahun 2003

	Pr	Sd	Pg	Br	Ek	Mks	Lt	Mm	Mj	Pm	Tt	Lw	Wj	Sp	Bn	Pk	Mr	Sj	Gw	Tk	Jp	Bt	Bk	Sy	Rata-Rata
Pr		0,09	0,12	0,10	0,10	0,06	0,16	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,08	0,11
Sd			0,03	0,02	0,02	0,10	0,09	0,05	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,09	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,05	0,04
Pg				0,04	0,02	0,13	0,09	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,01	0,09	0,05	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,06	0,05
Br					0,02	0,09	0,10	0,05	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,04	0,09	0,05	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Ek						0,11	0,10	0,04	0,02	0,01	0,01	0,03	0,04	0,02	0,03	0,09	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,04	0,04
Mks							0,17	0,13	0,09	0,10	0,11	0,08	0,11	0,09	0,13	0,10	0,10	0,14	0,11	0,10	0,13	0,11	0,12	0,08	0,11
Lt								0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	0,10	0,10	0,11	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,10
Mm									0,05	0,04	0,05	0,04	0,06	0,04	0,02	0,09	0,05	0,03	0,06	0,04	0,02	0,03	0,03	0,07	0,05
Mj										0,02	0,01	0,02	0,04	0,01	0,04	0,09	0,04	0,04	0,02	0,01	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Pm											0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,09	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,05	0,04
Tt												0,03	0,02	0,03	0,04	0,10	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03
Lw													0,05	0,01	0,04	0,07	0,03	0,01	0,03	0,01	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
Wj														0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,03	0,04	0,05	0,04	0,03	0,06	0,05
Sp															0,04	0,08	0,03	0,04	0,03	0,01	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
Bn																0,09	0,05	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,06	0,04
Pk																	0,06	0,10	0,08	0,07	0,10	0,10	0,09	0,07	0,08
Mr																		0,05	0,04	0,03	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05

Sj																			0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,06	0,03
Gw																				0,02	0,04	0,03	0,03	0,05	0,05
Tk																					0,04	0,02	0,03	0,03	0,04
Jp																						0,02	0,03	0,05	0,05
Bt																							0,02	0,05	0,04
Bk																								0,06	0,04
Sy																									0,04
Rata-rata																									0,05

Sumber: Hasil perhitungan, seperti contoh pada lampiran 3.

KETERANGAN:

Pr	= Parepare	Pk	= Pangkep
Sd	= Sidrap	Mr	= Maros
Pg	= Pinrang	Sj	= Sinjai
Br	= Barru	Gw	= Gowa
Ek	= Enrekang	Tk	= Takalar
Miks	= Makassar	Jp	= Jeneponto
Lt	= Luwu Utara	Bt	= Bantaeng
Mm	= Mamuju	Bk	= Bulukumba
Mj	= Majene	Sy	= Selayar
Pm	= Polmas	Bn	= Bone
Tt	= Tator	Sp	= Soppeng
Lw	= Luwu	Wj	= Wajo

Berdasarkan hasil perhitungan, sebagaimana yang nampak pada tabel 16 dan 17, maka dapat dilihat bahwa tidak ada peningkatan nilai rata-rata *Index Spesialisasi* seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang dianalisis, baik dalam maupun di luar wilayah KAPET Parepare dari tahun 1999 sampai 2003, yakni sebesar 0,05. Hal ini disebabkan karena nilai rata-rata *index spesialisasi regional* kabupaten/kota, baik di dalam maupun di luar wilayah KAPET Parepare, pada umumnya tidak meningkat selama periode tersebut.

Kemudian pada tabel 16 dan 17 dapat pula dilihat bahwa besarnya rata-rata *index spesialisasi regional* kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare mengalami peningkatan yang sangat kecil selama periode 1999 – 2003, yakni sebesar 0,054 pada tahun 1999 menjadi 0,056 pada tahun 2003 atau meningkat sebesar 0,002. Sedangkan besarnya rata-rata *index spesialisasi regional* kabupaten/kota di luar wilayah KAPET Parepare tidak mengalami peningkatan selama periode 1999 – 2003 tersebut, yakni masing-masing sebesar 0,049 pada tahun 1999 dan 2003. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan konsentrasi aktivitas ekonomi atau *spesialisasi regional* di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare masih sangat kecil selama periode pengamatan. Hal ini disebabkan karena sektor/subsektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini belum mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini, sehingga belum terjadi konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu di setiap kabupaten/kota di wilayah ini.

Melihat nilai index spesialisasi masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare sebagaimana yang nampak pada tabel 16 dan 17, maka dapat diketahui bahwa nilai *index spesialisasi* tertinggi dimiliki oleh Kota Parepare dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 0,11 pada tahun 1999 dan 2003. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah ini memiliki nilai *index spesialisasi* yang hampir sama, yakni sebesar 0,04. Kemudian dapat pula dilihat bahwa diantara kelima kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, hanya Kabupaten Pinrang yang meningkat nilai *index spesialisasi regional*-nya yang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu di daerah ini selama periode pengamatan, meskipun masih sangat rendah. Oleh karena Kota Parepare memiliki nilai *index spesialisasi regional* yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan, maka dapat menjadi indikator bahwa di kota ini terdapat konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu, yakni aktivitas transportasi laut dengan tersedianya infrastruktur pelabuhan laut di kota ini, yang mampu menciptakan keterkaitan ekonomi yang antara kota ini dengan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah ini. Oleh karena itu, kota ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dalam wilayah KAPET Parepare dengan lebih banyak mengembangkan aktivitas ekonomi tertentu di kota ini yang mampu mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah ini di masa datang, seperti aktivitas industri pengolahan

hasil-hasil pertanian yang dihasilkan di kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah ini.

Namun demikian, Kota Parepare belum memiliki konsentrasi aktivitas ekonomi lainnya yang mampu meningkatkan tingkat spesialisasi regionalnya dan mendorong peningkatan keterkaitan ekonominya dengan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah KAPET Parepare, sehingga peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini belum dapat berjalan secara optimal, sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa hal tersebut disebabkan karena di Kota Parepare belum berkembang aktivitas di sektor agroindustri, yakni industri yang khusus mengolah produk pertanian yang banyak dihasilkan ileh kabupaten *hinterland*-nya. Selain itu, Kota Parepare belum pula dapat berperan sebagai pusat perdagangan bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh kabupaten-kabupaten *hinterland*-nya selama periode pengamatan karena belum memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas tersebut.

Berdasarkan data pada tabel 16 dan 17 dapat pula dilihat nilai index spesialisasi antara kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan yang berada di luar wilayah KAPET tersebut. Untuk Kota Parepare dengan Kota Makassar, sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pusat kegiatan ekonomi terbesar di daerah ini terlihat bahwa nilai index spesialisasi keduanya masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 0,05 pada tahun 1999

dan sebesar 0,06 pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa masih relative kecil konsentrasi aktivitas ekonomi di Kota Parepare yang membutuhkan bahan baku dari Kota Makassar serta memasarkan produknya ke Kota Makassar. Demikian sebaliknya, masih relative kecil konsentrasi aktivitas ekonomi di Kota Makassar yang membutuhkan bahan baku dari Kota Parepare.

Namun demikian, nilai index spesialisasi kedua kota ini mengalami peningkatan selama periode pengamatan yang menunjukan bahwa terdapat peningkatan konsentrasi aktivitas ekonomi di kedua kota ini meskipun masih sangat kecil, sehingga terlihat pula bahwa keterkaitan ekonomi antar kedua kota ini masih relatif kecil.

Kemudian pada tabel 16 dan 17 dapat pula dilihat bahwa nilai index spesialisasi keempat kabupaten dalam wilayah KAPET Parepare dengan kabupaten/kota lainnya di luar wilayah KAPET ini pada tahun 1999 dan 2003 adalah terbesar dengan Kota Makassar. Hal ini tak lepas dari fungsi Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi utama di Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki aktivitas ekonomi yang terkait dengan aktivitas ekonomi di empat kabupaten tersebut, utamanya dalam aktivitas proses lebih lanjut pada sektor industri pengolahan bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh keempat kabupaten tersebut, khususnya yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, dapat dicermati bahwa nilai *index spesialisasi regional* keempat kabupaten di wilayah KAPET Parepare dengan Kota Makassar

sebagai pusat kegiatan utama ekonomi di daerah ini tidak mengalami peningkatan dari tahun 1999 ke tahun 2003. Bahkan terlihat nilai index spesialisasi regional Kabupaten Sidrap dan Barru dengan Kota Makassar mengalami penurunan dari tahun 1999 ke tahun 2003. Hal ini menunjukkan adanya penurunan intensitas keterkaitan ekonomi antar kedua kabupaten ini dengan Kota Makassar selama periode tersebut.

Demikian pula nilai *index spesialisasi regional* antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare tidak mengalami peningkatan selama periode 1999 – 2003, kecuali antara Kabupaten Pinrang dengan Barru dan antara Kabupaten Barru dengan Enrekang serta antara Kota Parepare dengan kabupaten Barru. Bahkan sebaliknya terdapat penurunan nilai *index spesialisasi regional* antara Kabupaten Sidrap dengan Enrekang. Penurunan nilai index spesialisasi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya telah terjadi penurunan keterkaitan ekonomi antara kedua kabupaten ini selama periode pengamatan yang ditunjukkan pada penurunan nilai output (barang dan jasa) yang di transaksikan antar para pelaku ekonomi di kedua kabupaten tersebut.

Belum adanya peningkatan nilai *index spesialisasi regional* kabupaten/ kota dalam wilayah KAPET Parepare dari tahun 1999 sampai 2003 menunjukkan bahwa pada umumnya belum terjadi peningkatan konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET ini selama periode pengamatan tersebut yang cukup signifikan untuk mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare.

Rendahnya nilai *index spesialisasi regional* masing-masing kabupaten/ kota dalam wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003 menunjukkan pula bahwa tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini masih relatif rendah. Padahal sebenarnya di wilayah ini telah ada konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu yang cukup menonjol di masing-masing kabupaten/kota yang ada di dalamnya, yakni konsentrasi aktivitas transportasi laut di Kota Parepare dan konsentrasi aktivitas ekonomi di subsektor-subsektor pertanian tertentu di 4 kabupaten yang ada di wilayah ini. Dimana perbedaan konsentrasi aktivitas ekonomi antara Kota Parepare dengan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah ini seharusnya dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi antara Kota Parepare dengan keempat kabupaten tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa fakor penyebab, yakni:

1. Output sektor/subsektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare pada umumnya hampir habis dikonsumsi sendiri oleh konsumen yang ada di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini, sehingga masih sangat kecil kelebihan output sektor/subsektor tersebut yang dapat dijual ke kabupaten/kota lainnya di wilayah ini maupun ke wilayah-wilayah lainnya.
2. Rantai aktivitas produksi dan pemasaran sektor/subsektor unggulan kabupaten/kota di wilayah ini, utamanya sektor pertanian, masih relatif pendek. Misalnya gabah hanya diolah menjadi beras, padahal masih dapat diciptakan beberapa kegiatan ekonomi untuk memperpanjang

rantai aktivitas di sub sektor ini, seperti dengan mengadakan industri pengolahan hasil sektor ini menjadi beberapa jenis output, seperti industru pengolahan dedak menjadi pakan ternak, industri pengolahan jerami sebagai bahan pembuatan jok mobil atau kursi serta berikat sekam sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di daerah ini maupun atas prakarsa pemerintah pusat melalui Badan pengelola KAPET atau pemerintah daerah.

3. Tidak ada sektor inovasi di wilayah ini, termasuk sektor unggulan, yang dapat berfungsi sebagai mesin atau motor pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan aktivitas ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET ini. Padahal menurut Martin dan Ottavianu (2001) bahwa salah satu syarat terjadinya pertumbuhan dan konsentrasi kegiatan ekonomi serta keterkaitan ekonomi antar daerah adalah harus ada sektor inovasi yang berfungsi sebagai mesin atau motor penggerak. Sektor inovasi yang dimaksud adalah sektor yang mampu menghasilkan output yang bervariasi dalam posisi *increasing return to scale* dan biaya perdagangan yang murah.
4. Sangat kurang inovasi yang telah dilakukan dalam berbagai kegiatan ekonomi di wilayah KAPET Parepare selama ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya prakarsa dari pemerintah, sedangkan pihak

pengusaha swasta, utamanya pengusaha domestik dan lokal, masih menghadapi sejumlah kendala, utamanya kendala modal. Padahal menurut Rivera – Batiz dan Romer, 1991 (dalam Sbergami, 2002:3) bahwa pertumbuhan agregate regional dan konsentrasi aktivitas ekonomi tergantung pada total jumlah inovasi yang telah dilakukan pada masa lalu. Demikian pula, biaya inovasi akan berkurang seiring dengan banyaknya inovasi yang telah dilakukan di masa lalu.

5. Aktivitas transportasi laut yang menjadi spesialisasi Kota Parepare belum dapat berperan optimal dalam meningkatkan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan karena mendapat saingan dari pelabuhan laut Makassar, Mamuju dan pelabuhan-pelabuhan laut kecil lainnya di Kabupaten Barru dan Pinrang yang langsung dapat mengakses ke wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, utamanya ke Pulau Kalimantan. Akibatnya, telah banyak pelaku ekonomi di 4 kabupaten di wilayah KAPET yang tidak menggunakan jasa pelabuhan laut Kota Parepare dalam mengakses wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini.
6. Sektor perdagangan yang telah menjadi salah satu sektor unggulan Kota Parepare belum dapat pula berperan optimal dalam meningkatkan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui faktor penyebab sehingga Kota Parepare belum dapat berfungsi sebagai pusat perdagangan

produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh kabupaten-kabupaten di wilayah KAPET Parepare selama ini, yakni Kota Parepare selama ini hanya dilalui (hanya berfungsi sebagai leher pada manusia atau hewan) oleh produk-produk yang diperdagangankan untuk tujuan perdagangan antar pulau atau expor ke luar negeri. Berarti tidak ada proses pengolahan terlebih dahulu produk-produk tersebut sebelum dipasarkan ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare, sehingga nilai tambah yang mampu diciptakan oleh aktivitas perdagangan produk-komditi pertanian yang dihasilkan oleh keempat kabupaten di wilayah ini bagi Kota Parepare dan wilayah KAPET Parepare pada umumnya masih relatif kecil.

Melihat adanya faktor-faktor penyebab di atas, maka konsentrasi aktivitas ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare masih relatif kecil, sehingga belum mampu meningkatkan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/ kota di wilayah KAPET Parepare di masa datang. Langkah-langkah strategis yang diperlukan antara lain :

1. Membangun industri pengolahan produk pertanian secara terpadu, (agroindustri), yakni industri yang dapat menghasilkan beberapa macam output dengan hanya menggunakan 1 macam input. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan keterkaitan antara sektor pertanian

dengan sektor industri yang selanjutnya dapat diharapkan pula dapat meningkatkan keterkaitan antar kabupaten/kota dalam wilayah ini.

2. Membangun tempat yang berfungsi sebagai pusat pelelangan produk-produk yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare di Kota Parepare karena lebih dekat dengan akses keluar dari wilayah ini serta telah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pelabuhan laut.
3. Meningkatkan daya saing pelabuhan laut Kota Parepare dengan cara: (1) menambah fasilitas pelabuhan, utamanya panjang dermaga dan pelataran; (2) mempermudah proses administrasi di pelabuhan; (3) meningkatkan kapasitas dan ukuran kapal laut yang keluar dan masuk ke pelabuhan Parepare; (4) menambah rute pelayanan kapal laut yang masuk-keluar di pelabuhan ini.
4. Mengembangkan agrowisata sebagai aktivitas ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi ekonomi wilayah ini.
5. Mengembangkan agropolitan pada sentra-sentra produksi pertanian yang banyak terdapat di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini.
6. Memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan pada tingkatan (*level*) yang berbeda (*polycentric*) di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini yang dibentuk berdasarkan potensi ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang dimiliki, sehingga sesuai dengan aktivitas ekonomi yang telah tumbuh di lokasi tersebut.

D. ANALISIS KETERKAITAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH KAPET PAREPARE

Pembentukan KAPET Parepare dan penetapan wilayahnya adalah didasarkan pada Kepres RI No. 89, tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Dalam Kepres ini ditegaskan bahwa KAPET merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (a) Memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau (b) Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau (c) Memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya. Mengacu pada pertimbangan ini, maka wilayah KAPET Parepare ditetapkan meliputi 5 kabupate/kota di Propinsi Sulawesi Selatan, yakni :

1. Kota Parepare.
2. Kabupaten Pinrang.
3. Kabupaten Sidrap;
4. Kabutan Barru; dan
5. Kabupaten Enrekang.

Penetapan 5 kabupaten/kota ini sebagai wilayah KAPET Parepare didasarkan pada pertimbangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota tersebut serta faktor kedekatan daerahnya masing-masing, sehingga dapat diharapkan bahwa akan tercipta keterkaitan ekonomi yang kuat serta saling mendukung dan saling menguntungkan antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare tersebut.

Selain wilayah KAPET Parepare diharapkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya (*hinterland*), maka dalam wilayah ini sendiri diinginkan agar Kota Parepare dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan dan kabupaten lainnya yang ada di wilayah ini menjadi *hinterland*-nya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan posisi strategis dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kota Parepare, utamanya infrastruktur pelabuhan laut sebagai sub sektor unggulan yang telah menjadi salah satu pintu gerbang keluar-masuknya barang dan tenaga kerja dari Propinsi Sulawesi Selatan ke Pulau Kalimantan dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia serta ke luar negeri, yakni Malaysia, Brunai Darussalam dan Singapura.

Berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki dan aktivitas ekonomi yang dilakukan para pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare yang lebih menonjol daripada wilayah-wilayah lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dilihat terjadinya aktivtas ekonomi di wilayah ini yang menghasilkan barang dan jasa. Dimana barang dan jasa tersebut ditujukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah ini serta wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare, sehingga menimbulkan adanya aktivitas transaksi ekonomi antar pelaku ekonomi yang ada di wilayah KAPET Parepare serta antara pelaku ekonomi di wilayah ini dengan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare. Akibatnya, terjadi pula perpindahan (arus) barang dan jasa (output) dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya dalam wilayah KAPET Parepare

serta dari wilayah ini ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare.

Adanya aktivitas transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare yang menciptakan terjadinya arus barang dan jasa (output) antar kabupaten/kota dalam wilayah ini, maka dapat menjadi indikator bahwa telah terjadi keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare sebagai fokus analisis dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, perlu dianalisis hasil penelitian mengenai nilai barang dan jasa yang ditransaksikan oleh para pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare sebagai hasil survey yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang diminta oleh para konsumen di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini, baik yang diproduksi oleh produsen yang ada di kabupaten/kota tersebut maupun dari kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare. Selain itu, ditujukan pula untuk menghitung nilai barang dan jasa yang didistribusikan oleh para produsen di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini, baik kepada konsumen yang ada di kabupaten/kota tersebut maupun kepada konsumen yang ada di kabupaten/kota lainnya dalam wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare.

Nilai barang dan jasa diminta dan didistribusikan oleh para pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dihitung dengan menggunakan matriks dan metode ratio. Penghitungan ini dilakukan berdasarkan hasil survey dan nilai output domestik masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini pada tahun 2003 yang tersedia di BPS (tidak dipublikasikan) dengan mengacu pada Model Keseimbangan Perdagangan Antar Daerah (MKPAD) yang menunjukkan bahwa total penawaran = total permintaan. Contoh cara perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 11.

Adapun nilai barang dan jasa sektor/sub sektor ekonomi yang didistribusikan oleh masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare selama 1 (satu) tahun, baik kepada konsumen yang ada di kabupaten/kota-nya sendiri maupun kepada konsumen yang ada kabupaten/kota lainnya dalam wilayah ini serta konsumen di wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare, dapat dilihat pada tabel 18.

Nilai barang dan jasa diminta dan didistribusikan oleh para pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dihitung dengan menggunakan matriks dan metode ratio. Penghitungan ini dilakukan berdasarkan hasil survey dan nilai output domestik masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini pada tahun 2003 yang tersedia di BPS (tidak dipublikasikan) dengan mengacu pada Model Keseimbangan Perdagangan Antar Daerah (MKPAD) yang menunjukkan bahwa total penawaran = total permintaan. Contoh cara perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 11.

Adapun nilai barang dan jasa sektor/sub sektor ekonomi yang didistribusikan oleh masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare selama 1 (satu) tahun, baik kepada konsumen yang ada di kabupaten/kota-nya sendiri maupun kepada konsumen yang ada kabupaten/kota lainnya dalam wilayah ini serta konsumen di wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare, dapat dilihat pada tabel 18.

Sektor/Subsektor	Kab/Kota	Nilai barang dan jasa (output) setiap sektor/subsektor ekonomi yang disupply (dalam Rp. Juta dan %)						
		Barru	Sidrap	Pinrang	Enrekang	Parepare	Lainnya	Jumlah
1. PERTANIAN	Barru	154,065.67	1,019.18	244.79	-	90,579.40	178,748.27	424,657.31
		36.28	0.24	0.06	0,00	21.33	42.09	100.00
	Sidrap	3,786.94	757,061.65	88,123.19	2,865.79	89,351.79	82.289.26	1,023,498.22
		0.37	73.97	8.61	0.28	8.73	8.05	100.00
	Pinrang	5,505.08	125,189.67	978,069.84	19.981.41	207,562.03	702,611.96	2,038,919.82
		0.27	6.14	47.97	0.98	10.18	34.46	100.00
	Enrekang	6,305.46	15,703.02	65,297.35	221,297.35	182,797.67	114,892.73	606,294.11
		1.04	2.59	10.77	36.50	30.15	18.95	100.00
	Parepare	6,129.89	9,139.12	19,169.85	39.565.69	75,787.80	964,734.05	1,114,526.40
		0.55	0.82	1.72	3.55	6.80	86.57	100.00
a. Tanaman Bahan Makanan	Barru	111,918.77	1,010.28	-	-	15,049.18	38,872.57	166,850.80
		67.08	0.61	-	-	9.02	23.30	100.00
	Sidrap	3,766.49	660,758.51	77,032.49	-	25,353.94	11,192.49	778,103.92
		0.48	84.92	9.90	-	3.26	1.44	100.00
	Pinrang	5,531.72	118,806.70	785,273.82	13,112.70	10,262.42	25,179.49	958,166.85
		0.58	12.40	81.96	1.37	1.07	2.63	100.00
	Enrekang	6,294.33	15,453.70	32,455.48	164,343.96	40,596.40	52,596.36	311,740.23
		2.02	4.96	10.41	52.72	13.02	16.87	100.00

	Parepare	2.79	1.38	11.42	-			
b. Tanaman Perkebunan	Barru	3,044.10	-	-	-	14,105.56	14,537.66	31,687.33
		9.61	-	-	-	44.51	45.88	100.00
	Sidrap	-	23,618.69	8,170.11	-	29,245.47	32,571.37	93,605.64
		-	25.23	8.73	-	31.24	34.80	100.00
	Pinrang	-	7.51	95,850.81	-	142,987.61	231,696.47	470,542.41
		-	-	20.37	-	30.39	49.24	100.00
	Enrekang	-	22.54	14,745.50	17,076.51	65,773.25	36,297.90	133,915.70
		-	0.02	11.01	12.75	49.12	27.11	100.00
	Parepare	-	-	-	-	5,130.41	350,391.90	355,522.31
		-	-	-	-	1.44	98.56	100.00
c. Peternakan	Barru	16,015.42	-	-	-	60,425.96	86,017.73	162,459.10
		9.86	-	-	-	37.19	52.95	100.00
	Sidrap	-	35,993.70	2,902.04	2,821.56	32,824.66	38,643.10	113,185.06
		-	31.80	2.56	2.49	29.00	34.14	100.00
	Pinrang	-	-	20,969.01	-	25,012.89	116,635.97	162,617.87
		-	-	12.89	-	15.38	71.72	100.00
	Enrekang	-	198.40	18,110.50	12,745.41	76,409.87	22,337.03	129,801.20
			0.15	13.95	9.82	58.87	17.21	100.00
	Parepare	35.74	-	223.23	17,751.21	14,677.35	513,058.19	545,745.73
		0.01	-	0.04	3.25	2.69	94.01	100.00

	Sidrap	-	2,999.36	-	-	-	-	2,999.36
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
d. Kehutanan	Pinrang	-	1,007.03	4,276.94	553.86	-	2,165.10	8,002.93
		-	12.58	53.44	6.92	-	27.05	100.00
	Enrekang	-	-	-	3,365.27	-	3,642.31	7,007.58
		-	-	-	48.02	-	51.98	100.00
	Parepare	183.35	-	-	-	3,865.61	-	4,048.96
		4.53	-	-	-	95.47	-	100.00
e. Perikanan	Barru	21,203.24	-	-	-	1,019.24	39,341.04	61,563.52
		34.44	-	-	-	1.66	63.90	100.00
	Sidrap	-	33,711.39	-	-	1,887.59	-	35,598.98
		-	94.70	-	-	5.30	-	100.00
	Pinrang	-	5,435.96	71,699.26	6,359.62	29,204.84	326,944.97	439,644.65
		-	1.24	16.31	1.45	6.64	74.37	100.00
	Enrekang	-	-	-	23,766.21	-	-	23,766.21
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	1,937.76	7,126.59	2,716.35	16,225.43	24,499.80	14,778.32	67,284.25
		2.88	10.59	4.04	24.11	36.41	21.96	100.00
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	Barru	7,579.19	-	-	-	1,119.86	-	8,699.05
		87.13	-	-	-	12.87	-	100.00

		-	-	12,379.73	-	-	-	12,379.73
	Pinrang	-	-	100.00	-	-	-	100.00
		-	-	-	3,851.86	-	-	3,851.86
	Enrekang	-	-	-	100.00	-	-	100.00
		-	-	-	-	12,412.30	-	12,412.30
	Parepare	-	-	-	-	100.00	-	100.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	Barru	159,688.65	4,695.50	577.59	611.62	2,115.79	75,187.94	242,877.08
		65.75	1.93	0.24	0.25	0.87	30.96	100.00
	Sidrap	437.77	162,797.78	1,592.29	5,121.34	8,292.12	78,178.16	256,419.45
		0.17	63.49	0.62	2.00	3.23	30.49	100.00
	Pinrang	2,388.45	11,392.90	158,733.07	3,437.83	16,224.32	69,368.26	261,544.82
		0.91	4.36	60.69	1.31	6.20	26.52	100.00
	Enrekang	608.16	2,729.13	1,102.67	118,902.66	368.85	52,035.07	175,746.54
		0.35	1.55	0.63	67.66	0.21	29.61	100.00
	Parepare	20,229.39	42,371.53	27,640.34	18,856.79	152,956.92	46,935.88	308,990.85
		6.55	13.71	8.95	6.10	49.50	15.19	100.00
a. Makanan, Minuman, dan Tembakau	Barru	117,334.10	-	-	-	-	63,179.77	180,513.87
		65.00	-	-	-	-	35.00	100.00
	Sidrap	-	113,660.95	-	3,225.59	5,384.78	61,202.03	183,473.36
		-	61.95	-	1.76	2.93	33.36	100.00

	Enrekang	-	-	-	82,374.50	-	44,355.71	126,730.21
		-	-	-	65.00	-	35.00	100.00
	Parepare	19,899.03	33,636.78	24,654.95	13,460.68	120,913.00	19,960.78	232,525.23
		8.56	14.47	10.60	5.79	52.00	8.58	100.00
b. Barang dari Kayu	Barru	14,195.75	4,695.50	577.59	611.62	1,009.06	7,392.40	28,481.91
		49.84	16.49	2.03	2.15	3.54	25.95	100.00
	Sidrap	178.26	23,957.53	181.63	1,309.82	419.10	11,179.50	37,225.85
		0.48	64.36	0.49	3.52	1.13	30.03	100.00
	Pinrang	519.93	5,041.31	23,573.25	1,107.28	4,386.09	8,077.65	42,705.51
		1.22	11.80	55.20	2.59	10.27	18.91	100.00
	Enrekang	608.16	2,279.91	565.92	16,234.40	366.85	4,281.86	24,339.09
		2.50	9.37	2.33	66.70	1.52	17.59	100.00
	Parepare	294.08	7,731.52	621.84	4,296.43	5,786.64	8,085.12	26,815.63
		1.10	28.83	2.32	16.02	21.58	30.15	100.00
c. Logam Dasar Besi dan Baja	Barru	9,208.05	-	-	-	312.21	1,625.12	11,145.37
		82.62	-	-	-	2.80	14.58	100.00
	Sidrap	259.51	4,389.46	135.40	319.76	1,393.31	1,062.47	7,559.91
		3.43	58.06	1.79	4.23	18.43	14.05	100.00
	Pinrang	429.79	178.37	3,855.38	185.36	1,995.19	716.61	7,360.71
		5.84	2.42	52.38	2.52	27.11	9.74	100.00
		-	64.73	20.11	3,630.29	-	1,340.10	5,055.23

	Parepare	0.19	3.33	3.71	1.42	21.01	70.34	100.00
d. Barang Lainnya	Barru	18,950.75	-	-	-	794.52	2,990.66	22,735.93
		83.35	-	-	-	3.49	13.15	100.00
	Sidrap	-	20,739.84	1,275.26	266.15	1,094.92	4,734.16	28,160.34
		-	73.83	4.53	0.95	3.89	16.81	100.00
	Pinrang	1,438.73	936.33	25,308.94	185.58	1,647.66	3,499.63	33,016.88
		4.36	2.84	76.65	0.56	4.99	10.60	100.00
	Enrekang	-	384.50	516.65	16,663.47	-	2,057.39	19,622.01
		-	1.96	2.63	84.92	-	10.49	100.00
	Parepare	-	373.24	1,661.57	830.29	22,279.20	5,569.67	30,713.97
		-	1.22	5.41	2.70	72.54	18.13	100.00
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	Barru	4,416.08	-	-	-	-	-	4,416.08
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	16,336.49	-	-	-	-	16,336.49
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	20,834.69	-	-	-	20,834.69
		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	6,123.43	-	-	6,123.43
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	-	-	-	-	11,352.15	-	11,352.15
		-	-	-	-	100.00	-	100.00

		100.00	-					
	Sidrap	-	200,540.41	-	-	-	-	200,540.41
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	167,473.98	-	-	-	167,473.98
5. BANGUNAN		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	51,659.89	-	-	51,659.89
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	-	-	-	-	154,007.20	-	154,007.20
		-	-	-	-	100,00	-	100,00
	Barru	51,659.17	287.30	238.07	52.44	31,538.81	28,473.39	112,249.18
		46.02	0.26	0.21	0.05	28.10	25.37	100.00
	Sidrap	974.92	76,503.82	49,690.93	6,289.94	197,214.75	278,845.15	609,519.51
		0.16	12.55	8.15	1.03	32.36	45.75	100.00
	Pinrang	880.67	2,142.67	106,180.09	5,261.04	191,080.30	364,813.68	670,358.45
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN		0.13	0.32	15.84	0.78	28.50	54.42	100.00
	Enrekang	-	61.23	30.51	54,245.31	13.99	19,204.35	73,555.39
		-	0.08	0.04	73.75	0.02	26.11	100.00
	Parepare	441.94	487.73	7,143.21	20.98	77,868.26	535,632.92	621,595.03
		0.07	0.08	1.15	0,01	12.52	86.17	100.00
a.Perdagangan Besar & Eceran	Barru	39,579.37	-	-	-	31,340.86	23,252.88	94,173.11
		42.03	-	-	-	33.28	24.69	100.00

	Pinrang	880.67	1,899.03	87,831.59	5,258.68	190,621.91	358,572.44	645,064.32
		0.14	0.29	13.62	0.82	29.55	55.59	100.00
	Enrekang	-	-	-	46,192.01	-	17,803.86	63,995.86
		-	-	-	72.18	-	27.82	100.00
	Parepare	23.87	-	6,660.29	-	30,012.26	520,473.86	557,170.28
		-	-	1.20	-	5.39	93.41	100.00
b.Hotel	Barru	163.00	-	-	-	-	130.64	293.64
		55.51	-	-	-	-	44.49	100.00
	Sidrap	-	295.00	-	-	-	158.27	453.27
		-	65.08	-	-	-	34.92	100.00
	Pinrang	-	-	326.00	-	-	234.84	560.84
		-	-	58.13	-	-	41.87	100.00
	Enrekang	-	-	-	218.00	-	17.52	235.52
		-	-	-	92.56	-	7.44	100.00
	Parepare	-	-	-	-	312.00	3,279.80	3,591.80
		-	-	-	-	8.69	91.31	100.00
c. Restauran	Barru	11,916.80	287.30	238.07	52.44	197.95	5,089.87	17,782.43
		67.01	1.62	1.34	0.29	1.11	28.62	100.00
	Sidrap	-	13,280.89	70.60	63.78	80.91	4,891.44	18,387.61
		-	72.23	0.38	0.35	0.44	26.60	100.00

	Enrekang	-	61.23	30.51	7,835.30	13.99	1,382.97	9,324.00
		-	0.66	0.33	84.03	0.15	14.83	100.00
	Parepare	418.06	487.73	482.92	20.98	47,544.00	11,879.26	60,832.95
		0.69	0.80	0.79	0.03	78.16	19.53	100.00
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	Barru	33,976.53	152.32	15.44	-	628.62	4,695.53	39,468.45
		86.09	0.39	0.04	-	1.59	11.90	100.00
	Sidrap	133.78	43,720.44	692.91	274.64	920.38	5,820.70	51,562.85
		0.25	84.79	1.34	0.53	1.78	11.29	100.00
	Pinrang	84.79	713.72	59,733.53	454.93	913.14	9,553.40	71,453.50
		0.12	1.00	83.60	0.64	1.28	13.37	100.00
	Enrekang	34.50	632.42	233.27	21,913.80	594.90	3,155.90	26,564.80
		0.13	2.38	0.88	82.49	2.24	11.88	100.00
	Parepare	860.99	1,008.11	1,812.48	474.85	71,229.54	10,681.13	86,067.09
		1.00	1.17	2.11	0.55	82.76	12.41	100.00
a. Pengangkutan Darat	Barru	31,121.05	152.32	15.44	-	628.62	4,695.53	36,612.97
		85.00	0.42	0.04	-	1.72	12.82	100.00
	Sidrap	133.78	38,951.64	692.91	274.64	920.38	5,820.70	46,794.05
		0.29	83.24	1.48	0.59	1.97	12.44	100.00
	Pinrang	84.79	713.72	54,136.50	454.93	913.14	9,553.40	65,856.47
		0.13	1.08	82.20	0.69	1.39	14.51	100.00
		34.50	632.42	233.27	19,386.98	594.90	3,155.90	24,037.98

	Parepare	1.43	1.67	3.00	0.79	75.42	17.69	100.00
b. Komunikasi	Barru	2,855.48	-	-	-	-	-	2,855.48
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	4,768.80	-	-	-	-	4,768.80
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	5,597.03	-	-	-	5,597.03
		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	2,526.82	-	-	2,526.82
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	-	-	-	-	25,695.39	-	25,695.39
		-	-	-	-	100.00	-	100.00
8. LEMBAGA KEUANGAN	Barru	11,958.00	-	-	-	-	-	11,958.00
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	16,791.00	-	-	-	-	16,791.00
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	21,864.00	-	-	-	21,864.00
		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	9,721.00	-	-	9,721.00
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	-	-	-	-	29,235.00	-	29,235.00
		-	-	-	-	100.00	-	100.00

		98.78	0.02	0.15	0.01	0.09	0.94	
9. JASA - JASA	Sidrap	-	98,216.78	134.21	64.05	210.57	650.47	99,276.08
		-	98.93	0.14	0.06	0.21	0.66	100.00
	Pinrang	-	79.98	183,553.47	21.13	244.03	838.10	184,736.71
		-	0.04	99.36	0.01	0.13	0.45	100.00
	Enrekang	-	13.90	13.90	69,208.05	152.88	104.24	69,492.97
		-	0.02	0.02	99.59	0.22	0.15	100.00
	Parepare	172.36	210.72	298.27	82.86	70,260.77	1,721.07	72,746.05
		0.24	0.29	0.41	0.11	96.58	2.37	100.00
a. Pemerintahan Umum	Barru	77,650.23	-	-	-	-	-	77,650.23
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	92,154.97	-	-	-	-	92,154.97
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	174,925.22	-	-	-	174,925.22
		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	65,265.35	-	-	65,265.35
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	-	-	-	-	60,035.63	-	60,035.63
		-	-	-	-	100.00	-	100.00
b. Swasta	Barru	5,449.54	20.78	130.20	12.16	71.65	790.44	6,474.77
		84.17	0.32	2.01	0.19	1.11	12.21	100.00

	Sidrap	-	85.12	1.88	0.90	2.96	9.13	100.00
	Pinrang	-	79.98	8,628 25	21.13	244.03	838.10	9,811.49
		-	0.82	87.94	0.22	2.49	8.54	100.00
	Enrekang	0.56	10.50	11.97	3,946.33	152.34	105.91	4,227.62
		0.01	0.25	0.28	93.35	3.60	2.51	100.00
	Parepare	172.36	210.72	298.27	82.86	10,225.14	1,721.07	12,710.42
		1.36	1.66	2.35	0.65	80.45	13.54	100.00
JUMLAH	Barru	609,259.48	6,166.18	1,213.06	676.22	126,074.66	287,916.30	1,031,305.90
		59.08	0.60	0.12	0.07	12.22	27.92	100.00
	Sidrap	5,312.96	1,386,745.88	143,613.28	14,822.27	302,446.99	445,901.44	2,298,842.83
		0.23	60.32	6.25	0.64	13.16	19.40	100.00
	Pinrang	8,885.62	139,586.46	1,708,822.39	29,201.10	415,929.56	1,147,195.44	3,449,620.58
		0.26	4.05	49.54	0.85	12.06	33.26	100.00
	Enrekang	6,937.55	19,107.93	66,689.91	556,926.96	183,909.60	189,374.83	1,022,946.79
		0.68	1.87	6.52	54.44	17.98	18.51	100.00
	Parepare	27,812.15	53,163.45	56,026.06	59,022.91	655,109.93	1,559,610.81	2,410,745.31
		1.15	2.21	2.32	2.45	27.17	64.69	100.00

Sumber : Hasil wawancara (data diolah), Septembaer 2004

Pada tabel 18 terlihat bahwa produk pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Barru lebih banyak yang didistribusikan (disupply) ke wilayah-wilayah di luar wilayah KAPET Parepare dan Kota Parepare, yakni mencapai 42,09 % dan 21,33 %. Hal ini disebabkan karena kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah ini menghasilkan pula produk-produk pertanian yang sama dengan yang dihasilkan oleh Kabupaten Barru dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen di daerahnya masing-masing.

Kemudian pada tabel 18 nampak pula jumlah nilai produk pertanian Kabupaten Sidrap yang didistribusi ke kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 8,61 % ke Kabupaten Pinrang; sebesar 8,73 % ke Kota Parepare; sebesar 0,37 % ke Kabupaten Barru; sebesar 0,28 % ke Kabupaten Enrekang; serta sebesar 8,05 % ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah KAPET Parepare menghasilkan produk-produk pertanian yang sama dengan yang dihasilkan di Kabupaten Sidrap; (2) jumlah produk pertanian yang ada di Kabupaten Sidrap masih lebih banyak yang digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh penduduknya, yakni mencapai 73,97 %.

Pada tabel 18 nampak pula bahwa produk pertanian di Kabupaten Pinrang lebih banyak dikonsumsi sendiri oleh penduduknya, yakni mencapai 47,97 %. Selebihnya didistribusikan ke Kota Parepare sebesar 10,18 %; ke Kabupaten Sidrap sebesar 6,18 %; ke Kabupaten Enrekang sebesar 0,98 %;

ke Kabupaten Barru sebesar 0,27 %; serta ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare sebesar 34,46%. Hal ini menunjukkan bahwa produk pertanian yang ada di Kabupaten Pinrang lebih banyak yang didistribusi ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare daripada ke kabupaten/kota lainnya di wilayah ini. Faktor-faktor penyebab-nya adalah: (1) produk subsektor perikanan, utamanya udang, yang dihasilkan di Kabupaten Pinrang pada umumnya didistribusi ke Kota Makassar untuk selanjutnya diekspor ke luar negeri; (2) produk beras yang dihasilkan di Kabupaten Pinrang lebih banyak yang dijual ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare, utamanya ke DKI, Propinsi Papua, serta propinsi-propinsi lainnya di KTI dan Pulau Kalimantan.

Selanjutnya, pada tabel 18 nampak pula bahwa produk pertanian di Kabupaten Enrekang yang dikonsumsi sendiri penduduknya sendiri mencapai 36,50%. Selebihnya didistribusi ke Kota Parepare sebesar 30,15%; ke Kabupaten Sidrap sebesar 2,59%; ke Kabupaten Pinrang sebesar 10,77%; ke Kabupaten Barru sebesar 1,04 %; serta ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare sebesar 18,95%. Relatif besar produk pertanian Kabupaten Enrekang yang didistribusi ke Kota Parepare disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) produk pertanian yang dihasilkan daerah ini, utamanya sayuran dan buah-buahan, lebih banyak yang dipasarkan ke Pulau Kalimantan melalui Kota Parepare oleh pedagang antar pulau yang ada di Kota Parepare dan melakukan pengepakan produk tersebut sebelum dikirim ke Pulau Kalimantan untuk dijual agar tidak cepat

rusak; (2) Kota Parepare tidak mampu menghasilkan produk pertanian untuk memenuhi seluruh permintaan penduduknya karena adanya keterbatasan sumberdaya lahan yang dimiliki, sehingga harus mendatangkannya dari kabupaten-kabupaten sekitarnya, termasuk dari Kabupaten Enrekang.

Pada tabel 18 nampak pula bahwa produk pertanian di Kota Parepare lebih banyak yang didistribusi ke wilayah-wilayah di luar wilayah KAPET Parepare, yakni mencapai 86,57 %. Sedangkan yang didistribusi ke kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah ini adalah sebesar 3,55 % ke Kabupaten Enrekang; sebesar 1,72 % ke Kabupaten Pinrang; sebesar 0,82% ke Kabupaten Sidrap; dan sebesar 0,55 % ke Kabupaten Barru. Hal ini menunjukkan bahwa produk pertanian di Kota Parepare lebih banyak yang didistribusi ke wilayah-wilayah di luar wilayah KAPET Parepare yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) Kabupaten-kabupaten di wilayah KAPET Parepare menghasilkan produk pertanian yang sama dengan produk pertanian yang ada di Kota Parepare; (2) produk-produk pertanian yang didistribusi oleh kota ini pada umumnya berasal dari kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah KAPET Parepare serta dari wilayah-wilayah di luar wilayah ini yang selanjutnya didistribusi ke wilayah-wilayah lainnya, seperti ke Pulau Kalimantan dan Jawa serta propinsi-propinsi lainnya di KTI yang membutuhkan produk pertanian, utamanya beras, sayuran dan buah-buahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare telah mendistribusi-kan (mensupply) produk pertaniannya ke kabupaten/kota lainnya dalam

wilayah KAPET Parepare tetapi masih dalam jumlah yang cukup kecil dibandingkan dengan yang dikonsumsi sendiri di masing-masing kabupaten/ kota tersebut serta yang didistribusi ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (a) produk pertanian yang dihasilkan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini langsung di-konsumsi dan diolah sendiri penduduk di masing-masing kabupaten/kota tersebut; (b) produk pertanian yang dihasilkan tersebut belum diolah menjadi bahan untuk menghasilkan beberapa macam produk turunannya, sehingga rantai produksinya masih relative pendek dan macam produk pertanian yang dihasilkan masih kurang variatif dan terbatas jumlahnya; (c) di wilayah ini belum berkembang kegiatan agroindustri, utamanya industri yang mengolah limbah tanaman padi sebagai produk unggulan di wialayah ini, seperti industri pembuatan brikat sekam sebagai bahan bakar alternative pengganti BBM, industri pengolah dedak menjadi pakan ternak, serta industri makanan ringan yang menggunakan bahan baku jagun, seperti cheeke; (d) belum dikembangkan aktivitas ekonomi lainnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, seperti agrowisata. Akibatnya, produk sektor pertanian yang telah menjadi sektor andalan 4 (empat) kabupaten di wilayah ini belum mampu menciptakan keterkaitan ekonomi yang kuat, utamanya dalam bentuk keterkaitan pemasaran, antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare selama ini.

Selanjutnya, pada tabel 18 terlihat pula bahwa ada 3 (tiga) kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare yang tidak mendistribusikan

produk sektor pertambangan dan galiannya ke kabupaten/kota lainnya di wilayah ini serta ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini, yaitu: Kabupaten Pinrang, Enrekang, dan Kota Parepare, sehingga semua produk yang dihasilkan dari sektor ini dikonsumsi sendiri oleh penduduk di masing-masing kabupaten/kota tersebut. Kemudian di Kabupaten Barru, selain dikonsumsi sendiri, maka produk yang dihasilkan dari sektor pertambangan dan galian ini telah didisritribusikan pula ke Kota Parepare, tetapi masih dalam jumlah yang cukup kecil, yakni hanya sebesar 12,87 % dari total nilai produk pertambangan dan galiannya. Demikian pula Kabupaten Sidrap telah mendistribusikannya ke Kabupaten Pinrang, Enrekang dan Kota Parepare, tetapi juga masih dalam jumlah yang kecil dibandingkan dengan jumlah yang tinggal di daerah ini untuk dikonsumsi sendiri oleh penduduknya. Hal ini disebabkan karena aktivitas pertambangan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini belum berkembang dan hanya terbatas berupa aktivitas pertambangan galian C yang menghasilkan produk yang terbatas jumlah dan jenisnya, sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumen di daerahnya sendiri. Padahal sebenarnya wilayah ini memiliki potensi tambang yang cukup potensil dan prospektif untuk dikembangkan, seperti potensi pertambangan "*Cromit*" di Kabupaten Barru yang dibutuhkan sebagai bahan baku industri pembuatan besi *Stainless* yang selama ini masih diimpor dari luar negeri. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi di sector ini belum mampu pula meningkatkan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan.

Pada tabel 18 nampak pula bahwa semua kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare lebih banyak mengkonsumsi sendiri produk sektor industri pengolahannya, yakni lebih dari 60 % kecuali Kota Parepare, dibanding dengan yang didistribusikannya ke kabupaten/kota lainnya dalam wilayah ini serta ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare. Namun demikian terlihat pula bahwa semua kabupaten/kota di wilayah ini telah mendistribusikan produk sektor industri pengolahannya ke kabupaten/kota lainnya di wilayah ini tapi masih dalam jumlah yang kecil, yakni kurang dari 15% dari total nilai produk ini yang didistribusikan dan lebih dari 15 % dari total nilai produk ini yang didistribusikan ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare. Berarti persentase nilai produk sektor industri pengolahan yang didistribusikan oleh masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare ke kabupaten/kota lainnya di wilayah ini masih relatif kecil, yakni kurang dari 15%. Hal ini disebabkan karena aktivitas di sektor industri pengolahan ini kurang variatif dan belum berkembang di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini, sehingga hanya mampu menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di daerahnya sendiri. Industri yang ada di wilayah ini masih terbatas hanya berupa industri penggilingan padi, industri kecil, seperti industri pandai besi di Massepe Kabupaten Sidrap dan industri meubel, serta industri rumahtangga yang menghasilkan produk makanan ringan dan makanan tradisional. Padahal di wilayah ini sangat potensil untuk dikembangkan beberapa macam industri, utamanya agro industri, karena telah tersedia bahan baku yang cukup besar

dan variatif. Akibatnya, kegiatan distribusi produk ini belum mampu memperkuat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare selama ini.

Kemudian dalam tabel 18 terlihat pula bahwa semua kabupaten/ kota di wilayah KAPET Parepare tidak mendistribusikan produk yang dihasilkan dari 3 (tiga) sektor ekonomi, yakni: (1) sektor listrik, gas, dan air bersihnya; (2) sektor bangunan; dan (3) sektor lembaga keuangan, ke kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini, tetapi habis dikonsumsi sendiri oleh penduduknya. Berarti tidak ada kegiatan distribusi antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare maupun antara kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dengan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini untuk produk ketiga sektor tersebut, sehingga tidak menciptakan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas di 3 (tiga) sektor tersebut belum berkembang di wilayah ini, sehingga hanya mampu menghasilkan produk dengan jumlah yang terbatas, yakni hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen di kabupaten/kota-nya sendiri. Relatif rendahnya aktivitas di ketiga sektor tersebut disebabkan oleh faktor masih terbatasnya bahan baku dan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini untuk mengembangkan ketiga sektor ini.

Selain itu, data pada pada tabel 18 menunjukkan pula bahwa ada 3 (tiga) kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare yang lebih banyak mendistribusikan produk sektor perdagangan, hotel dan restorannya ke

wilayah-wilayah lain diluar wilayah ini dibandingkan dengan yang didistribusikan ke kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare serta yang dikonsumsi sendiri oleh penduduknya. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sidrap yang mendistribusikan produk sektor ini ke wilayah-wilayah lain diluar wilayah KAPET Parepare sebesar 45,75 %, Kabupaten Pinrang yang mendistribusi sebesar 54,42 %; dan Kota Parepare yang mendistribusi sebesar 86,17 % dari total nilai produk sektor ini yang didistribusikan ooleh ketiga kabupaten/kota tersebut. Di lain pihak terlihat pula bahwa nilai produk sektor ini yang dikonsumsi sendiri oleh penduduk Kabupaten Barru dan Kabupaten Enrekang lebih dominan, yakni masing-masing sebesar 46,02 % dan 73,75 % dari total nilai produk sektor ini yang didistribusikan kedua kabupaten tersebut. Kemudian pada tabel ini terlihat pula bahwa semua kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare telah mendistribusikan produk sektor perdagangan, hotel dan restorannya ke kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare, kecuali Kabupaten Enrekang yang tidak mendistribusikannya ke Kabupaten Barru, serta mendistribusikannya ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pinrang dan Sidrap merupakan daerah lumbung pangan di Propinsi Sulawesi Selatan (daerah BOSOWA-SIPILU) yang banyak menghasilkan beras dan memperdagang-kannya ke kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare dan ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah in. Aktivitas perdagangan tersebut didukung pula adanya infrastruktur pelabuhan laut di Kota Parepare yang

telah banyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi dari kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini untuk akses keluar, utamanya ke Pulau Kalimantan dan Jawa serta wilayah-wilayah lainnya di KTI. Selain itu, produk jasa hotel dan restoran di wilayah ini masih lebih banyak yang dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang-orang dari luar wilayah ini yang datang berkunjung ke kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dengan berbagai tujuan.

Nilai produk sektor angkutan dan komunikasi yang didistribusikan oleh masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dapat pula dilihat pada tabel 18 yang menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare lebih banyak mengkonsumsi sendiri produk ini yang dihasilkannya, yakni lebih dari 80 % dari total nilai produk sektor ini yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/ kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk sektor ini masih lebih banyak yang dikonsumsi sendiri oleh konsumen di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dibanding dengan nilai yang didistribusikan ke kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini, sehingga belum mampu menghasilkan produk (jasa) dalam jumlah yang lebih besar dan variatif untuk dapat dijual ke kabupaten/kota lainnya dalam wilayah ini serta ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini. Selain itu, pelabuhan laut Kota Parepare telah disaingi pula

oleh pelabuhan laut Mamuju dalam memenuhi permintaan konsumen di wilayah ini akan jasa (pelayanan) pelabuhan laut untuk mengakses beberapa kabupaten/kota yang ada di Pulau Kalimantan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ditemukan bahwa ada kecenderungan para pedagang dari kabupaten sentra produksi yang ada di wilayah ini lebih memilih membawa barang dagangan ke Pulau Kalimantan melalui pelabuhan laut Mamuju daripada melalui pelabuhan laut Parepare dengan beberapa pertimbangan, seperti: (1) kapal ferry yang melayani pelayaran Parepare – Balikpapan masih terbatasnya kapasitasnya, sehingga belum mampu memuat mobil-mobil truk yang besar (10 dan 12 roda) yang banyak digunakan para pedagang di wilayah ini untuk mengangkut barang dagangan mereka; (2) proses administrasi lebih cepat dan biaya retribusi lebih murah di pelabuhan Mamuju daripada di pelabuhan Parepare karena tidak ada pungutan liar oleh oknum petugas pelabuhan; (3) waktu tempuh pelayaran dari Parepare ke Kalimantan lebih lama daripada Mamuju – Kalimantan. Akibatnya, kegiatan distribusi produk sektor angkutan dan komunikasi ini belum mampu pula memperkuat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama ini.

Kemudian pada tabel 18 nampak pula bahwa lebih dari 95 % dari total nilai produk sektor jasa-jasa di masing-masing kabupaten/ kota di wilayah KAPET Parepare tidak didistribusikan ke kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare serta ke wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini, tetapi habis dikonsumsi sendiri oleh penduduk di masing-masing kabupaten/kota di

wilayah ini. Hal ini disebabkan karena aktivitas di sektor jasa-jasa di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini masih kurang berkembang dan kurang variatif sebagai akibat dari kurang kreatif dan inovatifnya sumberdaya manusia yang ada di wilayah ini, sehingga tidak mampu menemukan bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan produk-produk jasa yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi di wilayah ini dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare . Aktivitas di sektor jasa-jasa ini masih sangat didominasi oleh jasa pemerintahan umum. Sedangkan produk jasa yang dihasilkan oleh pihak swasta yang telah berkembang dengan baik selama ini masih terbatas hanya dalam beberapa bentuk yang cukup menonjol, seperti jasa warung telekomunikasi (Wartel), salon, bengkel motor dan mobil. Padahal sebenarnya masih banyak peluang usaha yang sangat prospektif untuk dikelola oleh masyarakat di wilayah ini yang dapat menghasilkan produk berupa jasa yang dibutuhkan masyarakat, seperti jasa pengurusan SIM, STNK, Sertifikat, jasa pendidikan luar sekolah, dan sebagainya. Akibatnya, kegiatan distribusi produk sektor jasa-jasa ini belum mampu pula memperkuat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama ini.

Selanjutnya, dapat pula dilihat nilai barang dan jasa setiap sektor/ subsektor ekonomi yang diminta oleh konsumen di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari kabupaten/kota serta wilayah lainnya, selama satu tahun, sebagaimana yang nampak pada tabel 19.

dalam wilayah KAPET Parepare.

SEKTOR	Kab/Kota	Nilai barang dan jasa (output) setiap sektor/subsektor ekonomi yang diminta (dalam Rp. Juta dan %)						
		Barru	Sidrap	Pinrang	Enrekang	Parepare	Lainnya	Jumlah
1. PERTANIAN	Barru	323,334.08	797.45	5,520.54	6,284.93	6,115.06	79,623.25	424,657.31
		76.14	0.89	1.30	1.48	1.44	18.75	100.00
	Sidrap	1,023.50	823,404.34	125,276.17	15,659.52	9,109.13	49,025.56	1,023,498.22
		0.10	80.45	12.24	1.53	0.89	4.79	100.00
	Pinrang	203.89	88,081.34	1,553,249.17	65,245.43	19,165.85	312,974.18	2,038,919.82
		0.01	4.32	76.18	3.20	0.94	15.35	100.00
	Enrekang	-	2,849.58	20,007.71	520,685.38	39,591.01	23,160.44	606,294.11
		-	0.47	3.30	85.88	6.53	3.82	100.00
	Parepare	90,610.99	89,273.56	207,524.81	182,782.32	69,657.92	474,676.79	1,114,526.40
		8.13	8.01	18.62	16.40	6.25	42.59	100.00
a. Tanaman Bahan Makanan	Barru	132,057.23	3,766.49	5,531.72	6,294.33	3,950.62	15,250.44	166,850.83
		79.15	2.26	3.32	3.77	2.37	9.14	100.00
	Sidrap	1,010.28	601,261.83	118,806.70	15,453.70	1,958.77	39,612.64	778,103.92
		0.13	77.27	15.27	1.99	0.25	5.09	100.00
	Pinrang	-	77,032.49	599,608.26	32,455.48	16,192.18	232,878.44	958,166.85
		-	8.04	62.58	3.39	1.69	24.30	100.00
	Enrekang	-	-	13,112.70	275,322.49	5,610.80	17,694.24	311,740.23
		-	-	4.21	88.32	1.80	5.68	100.00

		10.62	17.89	7.24	28.64	4.62	30.99	100.00
b. Tanaman Perkebunan	Barru	24,828.83	-	-	-	-	6,858.50	31,687.33
		78.36	-	-	-	-	21.64	100.00
	Sidrap	-	93,395.25	7.51	22.54	-	180.33	93,605.64
		-	99.78	0.01	0.02	-	0.19	100.00
	Pinrang	-	8,170.11	410,870.30	14,745.50	-	36,756.50	470,542.41
		-	1.74	87.32	3.13	-	7.81	100.00
	Enrekang	-	-	-	133,915.70	-	-	133,915.70
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	14,105.56	29,245.47	142,987.61	65,773.25	295.02	103,115.40	355,522.31
		3.97	8.23	40.22	18.50	0.08	29.00	100.00
c. Peternakan	Barru	113,003.90	-	-	-	35.74	49,419.46	162,459.10
		69.56	-	-	-	0.02	30.42	100.00
	Sidrap	-	109,237.14	-	198.40	-	3,749.52	113,185.06
		-	96.51	-	0.18	-	3.31	100.00
	Pinrang	-	2,902.04	103,151.27	18,110.50	223.23	38,230.84	162,617.87
		-	1.78	63.43	11.14	0.14	23.51	100.00
	Enrekang	-	2,821.56	-	108,601.06	17,751.21	627.37	129,801.20
		-	2.17	-	83.67	13.68	0.48	100.00
	Parepare	60,425.96	32,824.66	25,012.89	76,409.87	27,845.97	323,226.38	545,745.73
		11.07	6.01	4.58	14.00	5.10	59.23	100.00

	[illegible]	46.05	-	-	-	8.58	45.36	100.00
d. Kehutanan	Sidrap	-	751.72	1,007.03	-	-	1,240.62	2,999.36
		-	25.06	33.57	-	-	41.36	100.00
	Pinrang	251.76	-	2,716.05	-	-	5,035.13	8,002.93
		3.15	-	33.94	-	-	62.92	100.00
	Enrekang	-	-	553.86	1,612.03	-	4,841.68	7,007.58
		-	-	7.90	23.00	-	69.09	100.00
	Parepare	-	-	-	-	-	4,048.96	4,048.96
		-	-	-	-	-	100.00	100.00
e. Perikanan	Barru	52,491.18	-	-	-	1,937.76	7,134.58	61,563.52
		85.26	-	-	-	3.15	11.59	100.00
	Sidrap	-	18,743.28	5,435.96	-	7,126.59	4,293.15	35,598.98
		-	52.65	15.27	-	20.02	12.06	100.00
	Pinrang	-	-	436,928.30	-	2,716.35	-	439,644.65
		-	-	99.38	-	0.62	-	100.00
	Enrekang	-	-	6,359.62	1,181.16	16,225.43	-	23,766.21
		-	-	26.76	4.97	68.27	-	100.00
	Parepare	1,019.24	1,887.59	29,204.84	-	34,930.09	242.50	67,284.25
		1.51	2.81	43.41	-	51.91	0.36	100.00
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	Barru	8,631.07	-	-	-	-	67.99	8,699.05
		99.22	-	-	-	-	0.78	100.00

	Sidrap	-	99.55	-	-	-	0.45	100.00
	Pinrang	-	3,398.30	7,671.87	-	-	1,309.56	12,379.73
		-	27.45	61.97	-	-	10.58	100.00
	Enrekang	-	250.74	-	3,436.29	-	164.83	3,851.86
		-	6.51	-	89.21	-	4.28	100.00
	Parepare	1,119.86	6,497.52	-	-	2,527.20	2,267.71	12,412.30
		9.02	52.35	-	-	20.36	18.27	100.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	Barru	105,798.53	437.77	2,388.45	608.16	20,229.39	113,414.80	242,877.08
		43.56	0.18	0.98	0.25	8.33	46.70	100.00
	Sidrap	4,695.50	101,725.17	11,392.90	2,729.13	42,371.53	93,505.22	256,419.45
		1.83	39.67	4.44	1.06	16.52	36.47	100.00
	Pinrang	577.59	1,592.29	116,550.30	1,102.67	27,640.34	114,081.62	261,544.82
		0.22	0.61	44.56	0.42	10.57	43.62	100.00
	Enrekang	611.62	5,121.34	3,437.83	77,213.20	18,856.79	70,505.77	175,746.54
		0.35	2.91	1.96	43.93	10.73	40.12	100.00
	Parepare	2,115.79	8,292.12	16,224.32	368.85	105,320.25	176,669.53	308,990.85
		0.68	2.68	5.25	0.12	34.09	57.18	100.00
a. Makanan, Minuman, dan Tembakau	Barru	65,554.05	-	-	-	19,899.03	95,060.79	180,513.87
		36.32	-	-	-	11.02	52.66	100.00
	Sidrap	-	58,099.90	5,236.88	-	33,636.78	86,499.80	183,473.36
		-	31.67	2.85	-	18.33	47.15	100.00

	Pinrang	-	-	37.27	-	13.82	48.91	100.00
	Enrekang	-	3,225.59	1,959.61	45,654.75	13,460.68	62,429.58	126,730.21
		-	2.55	1.55	36.03	10.62	49.26	100.00
	Parepare	-	5,384.78	8,195.37	-	60,183.00	158,762.07	232,525.23
		-	2.32	3.52	-	25.88	68.28	100.00
b. Barang dari Kayu	Barru	14,592.90	178.26	519.93	608.16	294.08	12,288.59	28,481.91
		51.24	0.63	1.83	2.14	1.03	43.15	100.00
	Sidrap	4,695.50	16,511.99	5,041.31	2,279.91	7,731.52	965.62	37,225.85
		12.61	44.36	13.54	6.12	20.77	2.59	100.00
	Pinrang	577.59	181.63	18,485.25	565.92	621.84	22,273.27	42,705.51
		1.35	0.43	43.29	1.33	1.46	52.16	100.00
	Enrekang	611.62	1,309.82	1,107.28	12,938.56	4,296.43	4,075.38	24,339.09
		2.51	5.38	4.55	53.16	17.65	16.74	100.00
	Parepare	1,009.06	419.10	4,386.09	368.85	10,532.03	10,100.52	26,815.63
		3.76	1.56	16.36	1.38	39.28	37.67	100.00
c. Logam Dasar Besi dan Baja	Barru	7,837.98	259.51	429.79	-	36.28	2,581.81	11,145.37
		70.33	2.33	3.86	-	0.33	23.16	100.00
	Sidrap	-	5,809.99	178.37	64.73	629.99	876.83	7,559.91
		-	76.85	2.36	0.86	8.33	11.60	100.00
	Pinrang	-	135.40	5,725.00	20.11	701.97	778.23	7,360.71
		-	1.84	77.78	0.27	9.54	10.57	100.00

	Enrekang	-	6.33	3.67	73.33	5.33	11.35	100.00
	Parepare	312.21	1,393.31	1,995.19	-	12,036.60	3,198.70	18,936.02
		1.65	7.36	10.54	-	63.56	16.89	100.00
d. Barang Lainnya	Barru	17,813.60	-	1,438.73	-	-	3,483.60	22,735.93
		78.35	-	6.33	-	-	15.32	100.00
	Sidrap	-	21,303.30	936.33	384.50	373.24	5,162.97	28,160.34
		-	75.65	3.33	1.37	1.33	18.33	100.00
	Pinrang	-	1,275.26	25,822.50	516.65	1,661.57	3,740.89	33,016.88
		-	3.86	78.21	1.56	5.03	11.33	100.00
	Enrekang	-	266.15	185.58	14,912.73	830.29	3,427.26	19,622.01
		-	1.36	0.95	76.00	4.23	17.47	100.00
	Parepare	794.52	1,094.92	1,647.66	-	22,568.63	4,608.24	30,713.97
		2.59	3.56	5.36	-	73.48	15.00	100.00
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	Barru	4,416.08	-	-	-	-	-	4,416.08
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	16,336.49	-	-	-	-	16,336.49
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	20,834.69	-	-	-	20,834.69
		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	6,123.43	-	-	6,123.43
		-	-	-	100.00	-	-	100.00

	Parepare	-	-	-	-	100.00	-	100.00
5. BANGUNAN	Barru	102,816.42	-	-	-	-	-	102,816.42
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	200,540.41	-	-	-	-	200,540.41
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	167,473.98	-	-	-	167,473.98
		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	51,659.89	-	-	51,659.89
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	-	-	-	-	154,007.20	-	154,007.20
		-	-	-	-	-	-	-
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	Barru	99,070.88	974.92	880.67	-	441.94	10,880.77	112,249.18
		88.26	0.87	0.78	-	0.39	9.69	100.00
	Sidrap	287.30	597,752.21	2,142.67	61.23	487.73	8,788.36	609,519.51
		0.05	98.07	0.35	0.01	0.08	1.44	100.00
	Pinrang	238.07	49,690.93	606,056.40	30.51	7,143.21	7,199.34	670,358.45
		0.04	7.41	90.41	-	1.07	1.07	100.00
	Enrekang	52.44	6,289.94	5,261.04	45,402.54	20.98	16,528.45	73,555.39
		0.07	8.55	7.15	61.73	0.03	22.47	100.00
	Parepare	31,538.81	197,214.75	191,080.30	13.99	66,725.26	135,021.91	621,595 03
		5.07	31.73	30.74	-	10.73	21.72	100.00

		87.25	1.04	0.94	-	0.03	10.75	100.00
a.Perdagangan Besar & Eceran	Sidrap	-	580,784.76	1,899.03	-	-	7,994.84	590,678.63
		-	98.33	0.32	-	-	1.35	100.00
	Pinrang	-	49,620.33	582,349.18	-	6,660.29	6,434.52	645,064.32
		-	7.69	90.28	-	1.03	1.00	100.00
	Enrekang	-	6,226.17	5,258.68	36,098.48	-	16,412.54	63,995.86
		-	9.73	8.22	56.41	-	25.65	100.00
	Parepare	31,340.86	197,133.84	190,621.91	-	4,926.14	133,147.52	557,170.28
		5.63	35.38	34.21	-	0.88	23.90	100.00
b.Hotel	Barru	273.83	-	-	-	-	19.81	293.64
		93.25	-	-	-	-	6.75	100.00
	Sidrap	-	418.60	-	-	-	34.67	453.27
		-	92.35	-	-	-	7.65	100.00
	Pinrang	-	-	519.14	-	-	41.70	560.84
		-	-	92.57	-	-	7.44	100.00
	Enrekang	-	-	-	226.56	-	8.96	235.52
		-	-	-	96.20	-	3.80	100.00
	Parepare	-	-	-	-	3,245.28	346.52	3,591.80
		-	-	-	-	90.35	9.65	100.00
c. Restauran	Barru	16,631.02	-	-	-	418.06	733.35	17,782.43
		93.53	-	-	-	2.35	4.12	100.00

	Sidrap	1.56	90.00	1.33	0.33	2.65	4.13	100.00
	Pinrang	238.07	70.60	23,188.08	30.51	482.92	723.12	24,733.29
		0.96	0.29	93.75	0.12	1.95	2.92	100.00
	Enrekang	52.44	63.78	2.36	9,077.50	20.98	106.95	9,324.00
		0.56	0.68	0.03	97.36	0.23	1.15	100.00
	Parepare	197.95	80.91	458.39	13.99	58,553.85	1,527.87	60,832.95
		0.33	0.13	0.75	0.02	96.25	2.51	100.00
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	Barru	37,134.53	133.78	84.79	34.50	860.99	1,219.86	39,468.45
		94.09	0.34	0.21	0.09	2.18	3.09	100.00
	Sidrap	152.32	47,511.66	713.72	632.42	1,008.11	1,544.62	51,562.85
		0.30	92.14	1.38	1.23	1.96	3.00	100.00
	Pinrang	15.44	692.91	66,943.89	233.27	1,812.48	1,755.52	71,453.50
		0.02	0.97	93.69	0.33	2.54	2.46	100.00
	Enrekang	-	274.64	454.93	24,245.82	474.85	1,114.56	26,564.80
		-	1.03	1.71	91.27	1.79	4.20	100.00
	Parepare	628.62	920.38	913.14	594.90	81,434.06	1,575.99	86,067.09
		0.73	1.07	1.06	0.69	94.62	1.83	100.00
a. Pengangkutan Darat	Barru	34,279.05	133.78	84.79	34.50	860.99	1,219.86	36,612.97
		93.63	0.37	0.23	0.09	2.35	3.33	100.00
	Sidrap	152.32	42,742.86	713.72	632.42	1,008.11	1,544.62	46,794.05
		0.33	91.34	1.53	1.35	2.15	3.30	100.00

		0.02	1.05	93.15	0.35	2.75	2.67	
	Enrekang	-	274.64	454.93	21,719.00	474.85	1,114.56	24,037.98
		-	1.14	1.89	90.35	1.98	4.64	100.00
	Parepare	628.62	920.38	913.14	594.90	55,738.67	1,575.99	60,371.70
		1.04	1.52	1.51	0.99	92.33	2.61	100.00
b. Komunikasi	Barru	2,855.48	-	-	-	-	-	2,855.48
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	4,768.80	-	-	-	-	4,768.80
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	5,597.03	-	-	-	5,597.03
		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	2,526.82	-	-	2,526.82
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	-	-	-	-	25,695.39	-	25,695.39
		-	-	-	-	100.00	-	100.00
8. LEMBAGA KEUANGAN	Barru	11,958.00	-	-	-	-	-	11,958.00
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	16,791.00	-	-	-	-	16,791.00
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	21,864.00	-	-	-	21,864.00
		-	-	100.00	-	-	-	100.00

	Pinrang	0.02	1.09	93.15	0.35	2.75	2.67	100.00
	Enrekang	-	274.64	454.93	21,719.00	474.85	1,114.56	24,037.98
		-	1.14	1.89	90.35	1.98	4.64	100.00
	Parepare	628.62	920.38	913.14	594.90	55,738.67	1,575.99	60,371.70
		1.04	1.52	1.51	0.99	92.33	2.61	100.00
b. Komunikasi	Barru	2,855.48	-	-	-	-	-	2,855.48
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	4,768.80	-	-	-	-	4,768.80
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	5,597.03	-	-	-	5,597.03
		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	2,526.82	-	-	2,526.82
		-	-	-	100.00	-	-	100.00
	Parepare	-	-	-	-	25,695.39	-	25,695.39
		-	-	-	-	100.00	-	100.00
8. LEMBAGA KEUANGAN	Barru	11,958.00	-	-	-	-	-	11,958.00
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	16,791.00	-	-	-	-	16,791.00
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	21,864.00	-	-	-	21,864.00
		-	-	100.00	-	-	-	100.00

	Enrekang	-	-	-	-	29,235.00	-	29,235.00
	Parepare	-	-	-	-	100.00	-	100.00
9. JASA - JASA	Barru	83,623.78	-	-	0.56	172.36	328.29	84,125.00
		99.40	-	-	-	0.20	0.39	100.00
	Sidrap	20.78	98,788.03	79.98	10.50	210.72	166.07	99,276.08
		0.02	99.51	0.08	0.01	0.21	0.17	100.00
	Pinrang	130.20	134.21	183,827.93	11.97	298.27	334.13	184,736.71
		0.07	0.07	99.51	0.01	0.16	0.18	100.00
	Enrekang	12.16	64.05	21.13	69,180.19	82.86	132.59	69,492.97
		0.02	0.09	0.03	99.55	0.12	0.19	100.00
	Parepare	71.65	210.57	244.03	152.34	71,444.65	622.82	72,746.05
		0.10	0.29	0.34	0.21	98.21	0.86	100.00
a. Pemerintahan Umum	Barru	77,650.23	-	-	-	-	-	77,650.23
		100.00	-	-	-	-	-	100.00
	Sidrap	-	92,154.97	-	-	-	-	92,154.97
		-	100.00	-	-	-	-	100.00
	Pinrang	-	-	174,925.22	-	-	-	174,925.22
		-	-	100.00	-	-	-	100.00
	Enrekang	-	-	-	65,265.35	-	-	65,265.35
		-	-	-	100.00	-	-	100.00

		-	-	-	-	[illegible]		[illegible]
b. Swasta	Barru	5,973.55	-	-	0.56	172.36	328.29	6,474.77
		92.26	-	-	0.01	2.66	5.07	100.00
	Sidrap	20.78	6,633.06	79.98	10.50	210.72	166.07	7,121.11
		0.29	93.15	1.12	0.15	2.96	2.33	100.00
	Pinrang	130.20	134.21	8,902.71	11.97	298.27	334.13	9,811.49
		1.33	1.37	90.74	0.12	3.04	3.41	100.00
	Enrekang	12.16	64.05	21.13	3,914.84	82.86	132.59	4,227.62
		0.29	1.51	0.50	92.60	1.96	3.14	100.00
	Parepare	71.65	210.57	244.03	152.34	11,409.02	622.82	12,710.42
		0.56	1.66	1.92	1.20	89.76	4.90	100.00
JUMLAH	Barru	776,814.03	5,312.96	8,885.62	6,937.55	27,812.15	205,543.61	1,031,305.93
		75.32	0.52	0.86	0.67	2.70	19.93	100.00
	Sidrap	6,166.18	1,927,625.90	139,586.46	19,107.93	53,163.45	153,192.90	2,298,842.83
		0.27	83.85	6.07	0.83	2.31	6.66	100.00
	Pinrang	1,213.06	143,613.28	2,744,497.22	66,689.91	56,026.06	437,581.06	3,449,620.58
		0.04	4.16	79.56	1.93	1.62	12.68	100.00
	Enrekang	676.22	14,822.27	29,201.10	807,614.80	59,022.91	111,609.49	1,022,946.79
		0.07	1.45	2.85	78.95	5.77	10.91	100.00
	Parepare	126,074.66	302,446.99	415,929.56	183,909.60	591,665.69	790,718.80	2,410,745.30
		5.23	12.55	17.25	7.63	24.54	32.80	100.00

Sumber : Hasil wawancara (data diolah) , Oktober 2004

Pada tabel 19 dapat dilihat bahwa keempat kabupaten dalam wilayah KAPET Parepare lebih banyak memenuhi sendiri kebutuhan penduduknya akan produk pertanian, yakni sebesar 76,14 % di Kabupaten Barru; sebesar 80,45 % di Kabupaten Sidrap; sebesar 76,18 % di Kabupaten Pinrang; dan sebesar 85,88 % di Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) keempat kabupaten di wilayah ini merupakan sentra produksi produk-produk pertanian, sehingga mereka mampu memenuhi sendiri permintaan penduduknya; (2) belum berkembangaktivtas agroindustri di 4 kabupaten dalam wilayah ini, sehingga mereka belum membutuhkan produk pertanian dalam jumlah banyak untuk digunakan sebagai bahan baku, sehingga jumlah permintaan mereka akan produk pertanian masih terbatas, yakni hanya untuk dikonsumsi langsung sebagai barang akhir (*final goods*).

Selain itu, dalam tabel 19 nampak pula bahwa produk pertanian yang dihasilkan di Kota Parepare hanya mampu memenuhi permintaan penduduk-nya sebesar 6,25 % dari total permintaan mereka. Sedangkan selebihnya harus diminta (didatangkan) dari kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini. Data pada tabel 19 menunjukkan bahwa produk pertanian yang ada di Kota Parepare lebih banyak yang didatangkan dari wilayah-wilayah di luar wilayah KAPET Parepare, yakni mencapai 42,59% dari total permintaan kota ini. Hal ini disebabkan karena produk pertanian yang dihasilkan oleh keempat kabupaten yang ada di wilayah ini lebih banyak, yakni lebih dari 75%, yang digunakan untuk memenuhi permintaan penduduknya masing-masing.

Secara keseluruhan pada tabel ini terlihat bahwa semua kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare telah mendatangkan produk sektor pertanian dari kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare, serta dari wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini, meskipun persentasenya masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah produk sektor ini yang dipenuhi sendiri di masing-masing kabupaten/kota tersebut.

Berdasarkan data pada tabel 19, maka dapat diketahui bahwa aktivitas permintaan akan produk pertanian di setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare belum mampu menciptakan keterkaitan ekonomi yang kuat antar kabupaten/kota di wilayah ini. Dari penelitian ini, maka dapat diketahui faktor penyebabnya, yakni karena jenis produk yang dihasilkan dari sektor pertanian di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini masih terbatas jumlahnya dan kurang variatif, sehingga ada produk pertanian tertentu yang dibutuhkan oleh konsumen di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini yang belum mampu dihasilkan oleh produsen di kabupaten/kota-nya sendiri. Selain itu, beberapa produk unggulan sektor pertanian yang dihasilkan oleh kabupaten-kabupaten di wilayah ini, seperti produk kakao, kopi, udang, beras, dan sayuran pada umumnya dipasarkan di luar wilayah KAPET Parepare, yakni langsung di bawa ke Makassar untuk selanjutnya diolah dan diekspor ke luar negeri (berorientasi ekspor) dan diperdagangkan antar pulau.

Selanjutnya, pada tabel 19 nampak pula bahwa kebutuhan setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare akan produk sektor pertambang-

an dan galian dipenuhi sendiri oleh produksi di masing-masing kabupaten/ kota di wilayah ini dengan persentase yang cukup besar, yakni lebih dari 60 % dari total kebutuhan mereka, kecuali Kota Parepare yang lebih banyak mendatangkan produk ini dari Kabupaten Sidrap untuk memenuhi permintaan penduduknya. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa semua kabupaten/ kota di wilayah KAPET Parepare telah mendatangkan produk sektor pertambangan dan galian dari wilayah-wilayah lain di luar wilayah KAPET Parepare untuk memenuhi kebutuhan penduduk mereka, tetapi persentasenya masih sangat kecil, yakni paling tinggi sebesar 18,27 % dari total kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan karena permintaan konsumen akan produk pertambangan dan galian di setiap kabupaten/kota dalam wilayah ini masih terbatas jumlah serta tertentu jenisnya, yakni terutama pada hasil tambang galian C, seperti pasir, kerikil dan timbunan yang mereka butuhkan dalam melakukan pembangunan rumah tinggal atau gedung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terlihat bahwa aktivitas di sektor pertambangan dan galian di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini belum berkemban dan hanya terbatas dalam bentuk galian C yang menghasilkan produk, berupa pasir dan tanah timbunan, dengan jumlah yang terbatas hanya untuk memenuhi permintaan konsumen di daerahnya masing-masing. Akibatnya, aktivitas ekonomi di sektor ini belum mampu pula mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan.

Kemudian pada tabel 19 nampak pula bahwa semua kabupaten/ kota di wilayah KAPET Parepare telah mendatangkan produk sektor industri pengolahan dari kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini karena produksi sektor industri pengolahan di masing-masing kabupaten/kota tersebut belum mampu memenuhi semua kebutuhan penduduknya. Pada tabel 19 terlihat bahwa ada 2 (dua) kabupaten/kota di wilayah ini, yakni Kabupaten Barru dan Kota Parepare, yang lebih banyak mendatangkan produk sektor ini dari wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah KAPET Parepare dibandingkan dengan jumlah yang dihasilkan sendiri dan yang didatangkan dari kabupaten/kota di dalam wilayah KAPET Parepare, yakni masing-masing sebesar 46,70 % dan 57,18 % dari total kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan karena jumlah permintaan konsumen di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini terhadap produk sektor ini adalah cukup besar dan variatif sedangkan jumlah produksi dan variasi produk yang mampu dihasilkan oleh para produsen di masing-masing kabupaten/kota tersebut masih relatif rendah, sehingga belum mampu menghasilkan produk sesuai dengan jumlah permintaan dan selera konsumen di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Akibatnya, terlihat bahwa telah terjadi kecenderungan kegiatan permintaan produk sektor industri pengolahan di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare lebih besar kepada wilayah-wilayah lainnya daripada kepada kabupaten/kota yang ada dalam wilayah KAPET Parepare. Hal ini terlihat pada persentase nilai produk

sektor ini yang diminta setiap kabupaten/kota di dalam wilayah KAPET Parepare dari wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini dengan persentase yang cukup tinggi, yakni lebih dari 35 % dari toral permintaan mereka. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa aktivitas permintaan produk sektor ini belum mampu pula menciptakan keterkaitan ekonomi yang besar antar kabupaten/kota di dalam wilayah KAPET Parepare.

Pada tabel 19 nampak pula bahwa kebutuhan masing-masing kabupaten/kota di dalam wilayah KAPET Parepare akan produk 3 sektor ekonomi, yakni: (1) sektor listrik, gas dan air bersih; (2) sektor bangunan; dan (3) sektor lembaga keuangan, dipenuhi sendiri tanpa mendatangkannya dari kabupaten/kota di dalam wilayah KAPET Parepare maupun dari wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini. Berarti jumlah kebutuhan penduduk masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare akan produk sektor ini telah mampu dipenuhi sendiri oleh produksi di dalam kabupaten/ kota tersebut, sehingga mereka tidak mendatangkannya dari kabupaten/kota lainnya di dalam wilayah KAPET Parepare dan dari wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini. Hal ini disebabkan karena jumlah permintaan konsumen di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini terhadap produk ketiga sektor tersebut masih relatif terbatas, sehingga masih mampu dipenuhi sendiri oleh produsen yang ada di kabupaten/kota-nya masing-masing selama periode pengamatan.

Selanjutnya, pada tabel 19 nampak nampak pula bahwa kebutuhan konsumen di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare

akan produk sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih banyak dipenuhi sendiri, yakni lebih dari 60 % dari total kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan karena aktivitas di sektor ini pada masing-masing kabupaten/kota tersebut telah mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di setiap kabupaten/kota tersebut. Keadaan ini tidak terlepas dari faktor adanya dukungan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengelola usaha di sektor ini pada masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini.

Untuk memenuhi kebutuhan akan produk sektor angkutan dan komunikasi, maka semua kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare lebih banyak memenuhinya dengan menggunakan produk sektor ini yang dihasilkan sendiri oleh produsen di masing-masing kabupaten/kota tersebut, yakni lebih dari 90 % dari total kebutuhan mereka. Kemudian selebihnya didatangkan dari kabupaten/kota lainnya di dalam wilayah KAPET Parepare dan dari wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini. Hal ini menjadi indikator pula bahwa aktivitas permintaan penduduk di setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare akan produk sektor ini belum mampu memper-kuat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET ini. Keadaan ini disebabkan oleh faktor adanya keterbatasan jumlah dan jenis produk sektor ini yang diminta/dibutuhkan oleh konsumen di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini, sehingga produk sektor ini yang dihasilkan oleh para produsen di masing-masing kabupaten/kota tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan konsumen di daerahnya masing-masing.

Kemudian pada tabel 19 terlihat pula bahwa kebutuhan konsumen di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare akan produk jasa-jasa juga lebih banyak dipenuhi dengan menggunakan produksi yang dihasilkan di dalam masing-masing kabupaten/kota-nya sendiri, yakni mencapai lebih dari 98 % dari total kebutuhan mereka. Namun demikian, terlihat pula bahwa semua kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare telah mendatangkan produk sektor jasa-jasa ini dari kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah lainnya di luar wilayah ini, kecuali Kabupaten Barru yang tidak mendatangkan produk sektor ini dari Kabupaten Sidrap dan Pinrang. Tetapi jumlahnya masih sangat kecil, yakni kurang dari 5 % dari total nilai kebutuhan mereka akan produk sektor jasa-jasa ini. Hal ini disebabkan karena permintaan konsumen di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini terhadap produk sektor jasa-jasa masih terbatas jumlah dan variasinya, sehingga jumlah dan jenis produk yang dihasilkan oleh para produsen di kabupaten/kota tersebut telah mampu memenuhi permintaan para konsumen di masing-masing kabupaten/kota mereka. Akibatnya, terlihat bahwa aktivitas permintaan pelaku ekonomi akan produk sektor jasa-jasa di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare belum mampu pula menciptakan keterkaitan yang kuat antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama ini.

Berdasarkan data pada tabel 18 dan 19 dan uraiannya di atas , maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare yang wujud dalam bentuk

keterkaitan perdagangan barang dan jasa (output) antar kabupaten/kota di wilayah ini yang terlihat pada adanya arus barang dan jasa yang masuk dan keluar dari masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini ke kabupaten/kota lainnya dalam wilayah ini maupun ke wilayah-wilayah lainnya adalah masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

(1) Output sektor/subsektor ekonomi, termasuk sektor/subsektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini pada umumnya habis dikonsumsi sendiri oleh konsumen yang ada di setiap kabupaten/kota di wilayah ini, sehingga sangat sedikit yang dapat disupply ke kabupaten/kota lainnya serta diekspor ke luar wilayah KAPET Parepare; dan

(2) Ragam macam produk yang dapat dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota di wilayah ini masih relatif sedikit, sehingga produk-produk yang dihasilkan di setiap kabupaten/kota di wilayah ini hampir sama.

(3). Rantai produksi dan pemasaran produk sektor/subsektor ekonomi unggulan di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini masih relatif pendek, sehingga belum mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini dan antara wilayah KAPET Parepare dengan wilayah-wilayah lainnya.

E. ANALISIS DAMPAK KETERKAITAN EKONOMI ANTAR KAB./KOTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT DI KAPET PAREPARE

Untuk menganalisis dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan perkapita masyarakat di wilayah KAPET Parepare, maka digunakan alat analisis *Typologi Klassen*. Dalam analisis ini digunakan 3 (tiga) indikator, yakni pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan kesempatan kerja pada masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare. Oleh karena yang dianalisis di sini adalah dampak keterkaiatn ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET terhadap tiga indikator tersebut, maka analisis ini dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yakni: (1) analisis yang ditujukan untuk melihat dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitan masyarakat di wilayah ini dengan cara membandingkan posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini sebelum dan setelah ditetapkan KAPET Parepare dalam matriks typology yang ditetapkan berdasarkan kriteria pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita; (2) analisis yang ditujukan untuk melihat dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap kesempatan kerja dengan cara membandingkan posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini sebelum dan setelah ditetapkan KAPET

Parepare dalam matriks typology yang ditetapkan berdasarkan kriteria pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Adapun hasil analisis mengenai dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapitan dan kesempatan kerja di wilayah ini yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Typologi Klassen*, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Typologi Kabupaten/Kota di Wilayah KAPET Parepare Berdasarkan Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita.

Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa untuk menganalisis dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat di wilayah ini, maka analisis dilakukan dengan membandingkan posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini sebelum dan setelah penetapan KAPET Parepare, sehingga secara langsung dapat dilihat bagaimana dampak keterkarkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakatnya setelah ditempuh kebijakan penetapan KAPET Parepare.

Untuk melakukan analisis ini, maka terlebih dahulu dilihat dan di-analisis posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode sebelum penetapan KAPET Parepare. Untuk melakukan analisis ini, maka digunakan data pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat masing-masing kabupaten/kota di

wilayah KAPET Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan selama tahun 1995 – 1997 sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare, sebagaimana yang nampak pada lampiran 12 (tabel 30 dan 31). Berdasarkan data pada kedua tabel tersebut, maka dapat dilihat posisi klasifikasi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare setiap tahun selama periode 1995 – 1997, sebagaimana yang nampak pada gambar 2, 3, dan 4 secara berturut sebagai berikut:

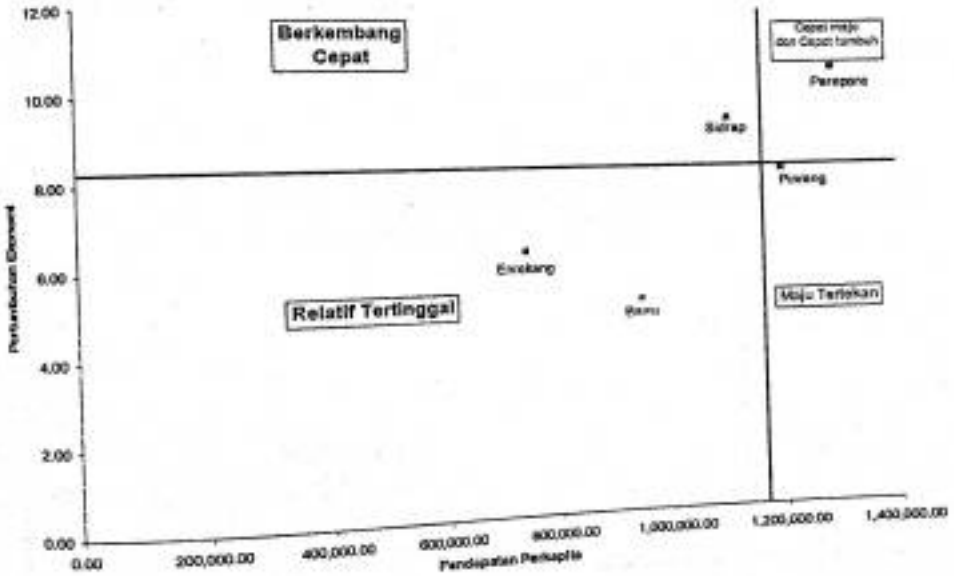

Gambar 2. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1995.

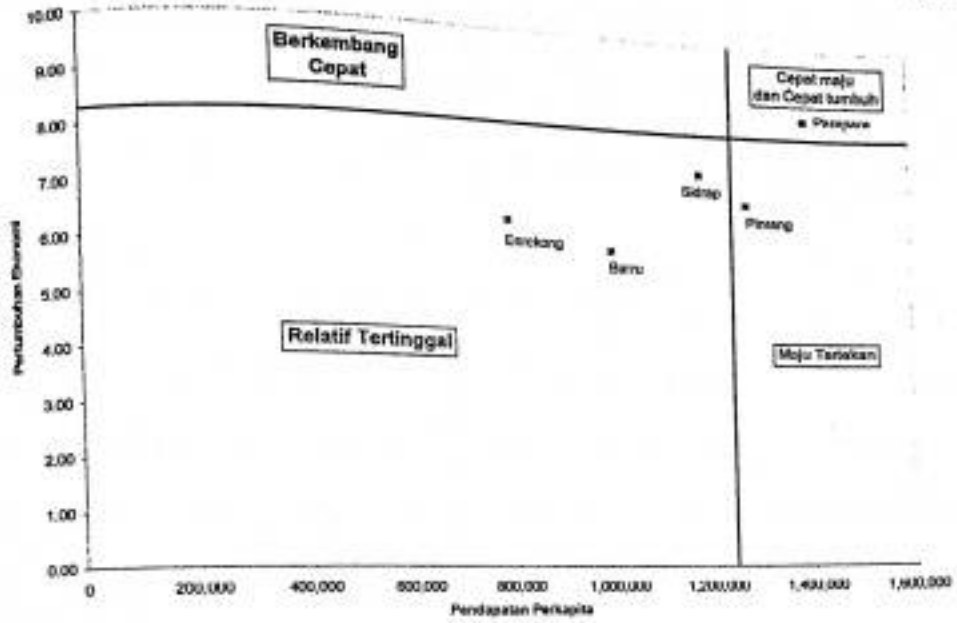

Gambar 3. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1996.

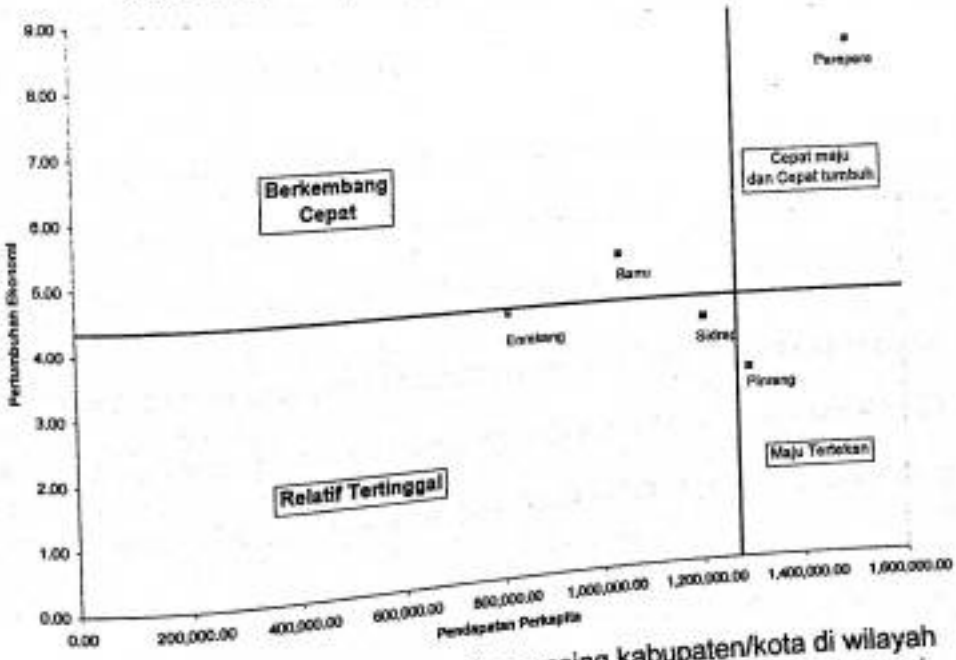

Gambar 4. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1997.

Pada gambar 2, 3, dan 4 di atas dapat dilihat posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan selama periode 1995 – 1997 berdasarkan hasil analisis typologi.

Selanjutnya, perlu pula dilihat dan dianalisis posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003 sebagai periode setelah dilakukan penetapan KAPET Parepare untuk dapat membandingkan posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini sebelum dan setelah ditempuh kebijakan penetapan KAPET Parepare, sehingga lebih lanjut akan dapat dilihat dan dianalisis dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitan masyarakat di wilayah ini setelah adanya KAPET Parepare.

Untuk melakukan hal ini, maka digunakan data pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003, sebagaimana yang nampak pada tabel 3 dan 4.

Berdasarkan data pada kedua tabel tersebut, maka dapat dilihat posisi klasifikasi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare setiap tahun selama periode 1999 – 2003, sebagaimana yang nampak pada gambar 5, 6, 7, 8, dan 9 berikut:

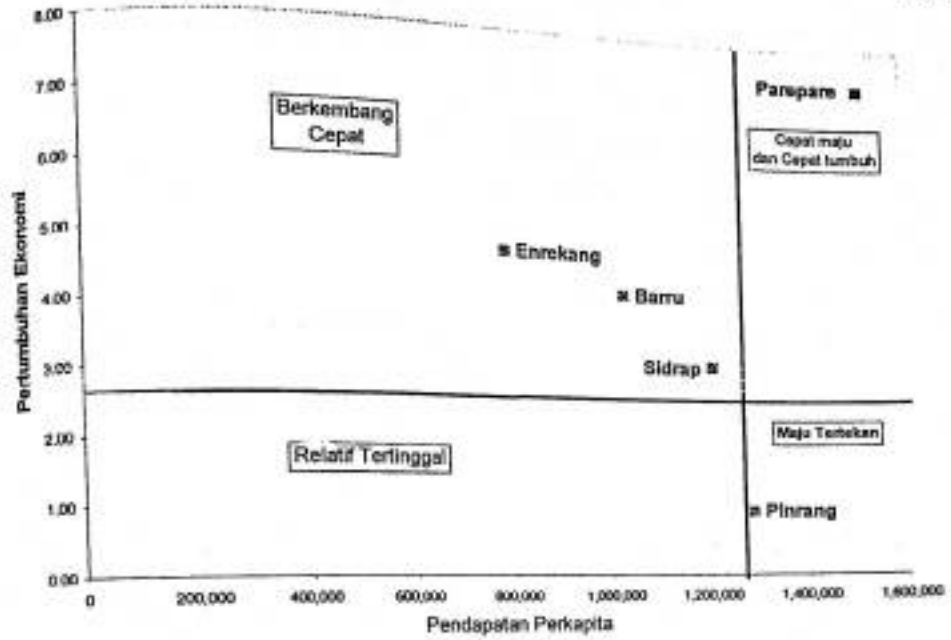

Gambar 5. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1999

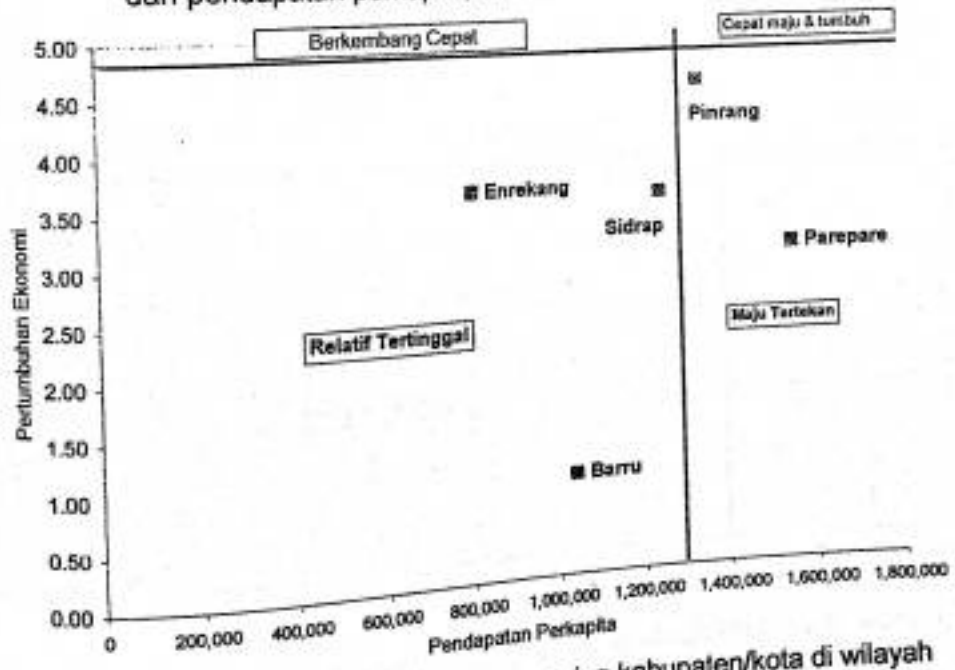

Gambar 6. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 2000

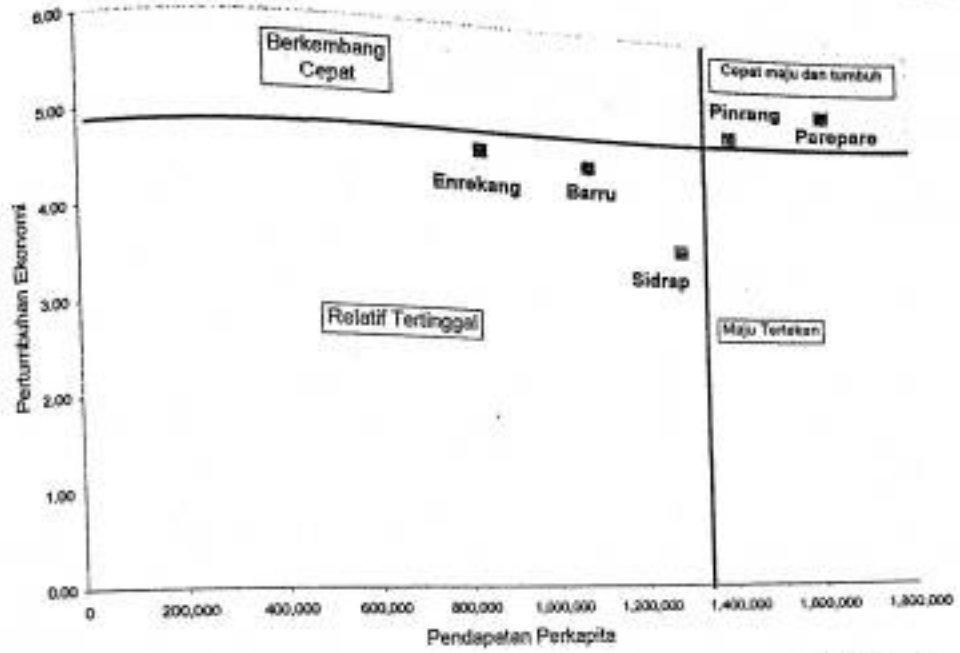

Gambar 7. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 2001

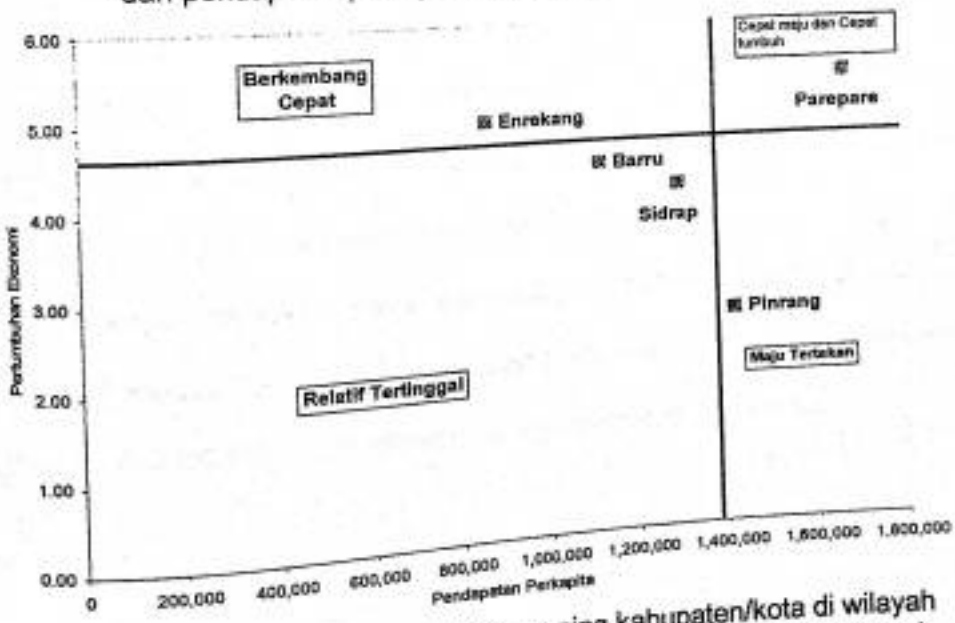

Gambar 8. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 2002

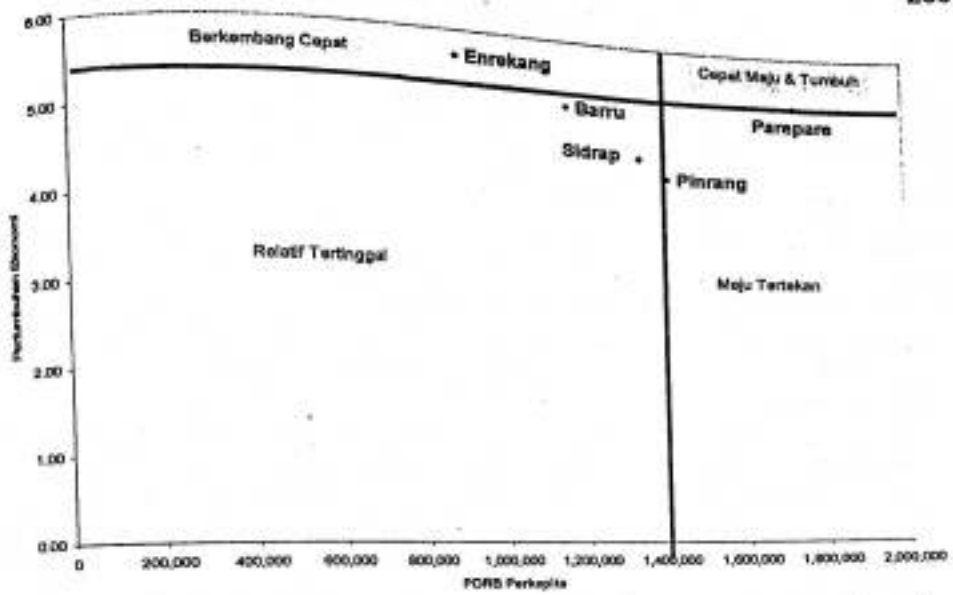

Gambar 9. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 2003

Pada gambar 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas dapat dilihat posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1999 – 2003 berdasarkan hasil analisis typologi.

Deskripsi mengenai posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1995 - 1997 dapat dilihat ringkasannya pada tabel 20 berikut:

Tabel 20. Posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam konteks perekonomian Prop. Sul-Sel, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1995-1997

No	Kab./Kota	Posisi Perekonomian Kab./Kota di Wil. KAPET Parepare		
		1995	1996	1997
1	Parepare	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"
2	Sidrap	Berada pd kategori "Daerah Berkem-bang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"
3	Pinrang	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"
4	Barru	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"
5	Enrekang	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal".	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"

Sumber: Gambar 2, 3, dan 4.

Kemudian deskripsi mengenai posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999 - 2003 dapat dilihat ringkasannya pada tabel 21.

Tabel 20. Posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam konteks perekonomian Prop. Sul-Sel, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1995-1997

No	Kab./Kota	Posisi Perekonomian Kab./Kota di Wil. KAPET Parepare		
		1995	1996	1997
1	Parepare	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"
2	Sidrap	Berada pd kategori "Daerah Berkem-bang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"
3	Pinrang	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"
4	Barru	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"
5	Enrekang	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal".	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"

Sumber: Gambar 2, 3, dan 4.

Kemudian deskripsi mengenai posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999 - 2003 dapat dilihat ringkasannya pada tabel 21.

Tabel 21. Posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam konteks perekonomian Prop. Sul-Sel, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tahun 1999-2003

No	Kab./Kota	Posisi Perekonomian Kab./Kota di Wil. KAPET Parepare				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Parepare	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"
2	Sidrap	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"
3	Pinrang	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"
4	Barru	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"
5	Enrekang	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"

Sumber: Gambar 5, 6, 7, 8 dan 9.

Pada tabel 20 dapat dilihat posisi perekonomian Kota Parepare pada tahun 1995, 1996 dan 1997 sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare berada pada kuadran I, yakni masuk ke dalam kategori sebagai "*daerah cepat maju dan cepat tumbuh*". Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

perekonomian Kota Parepare dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan adalah sangat baik selama periode 1995 – 1997 sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare. Kemudian pada tabel 21 dapat dilihat posisi perekonomian Kota Parepare pada tahun 1999 berada pada kuadran I, yakni masuk ke dalam kategori sebagai "*daerah cepat maju dan cepat tumbuh*". Sedangkan posisinya pada tahun 2003 berada pada kuadran IV, yakni masuk kategori "*daerah maju tapi tertekan*". Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kota Parepare pada tahun 2003 mengalami penurunan dilihat dari aspek tingkat pertumbuhan ekonomi kota ini yang lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2003, padahal lebih tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (a) peranan pelabuhan laut Kota Parepare sebagai sub sector unggulan kota ini mengalami penurunan selama periode pengamatan akibat hadirnya pelabuhan laut Mamuju sebagai pesaing dalam melayani kebutuhan konsumen di wilayah ini akan jasa transportasi laut ke Pulau Kalimantan; (b) peranan jasa perbankan di kota ini belum optimal dalam memberikan jasa keuangan kepada para pelaku ekonomi di wilayah ini akibat adanya krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia sejak pertengahan tahun 1997; dan (c) peranan jasa hotel dan restoran juga menurun karena kunjungan wisatawan manca negara di Propinsi Sulawesi Selatan menurun sejak masa krisis ekonomi, terlebih lagi setelah adanya peristiwa peledakan

bom di Bali yang menewaskan ratusan wisatawan mancanegara; (d) adanya penurunan aktivitas perdagangan pakaian bekas layak pakai (cakar) sejak Menteri Perindustrian mengeluarkan Surat Keputusan yang melarang perdagangan barang bekas impor dalam negeri.

Melihat keadaan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya aktivitas ekonomi dalam wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah KAPET Parepare sejak ditetapkannya belum dapat memberikan dampak yang optimal dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Parepare, sehingga dapat bertahan pada posisi laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada yang dicapai pada tahun 1999.

Selanjutnya, pada tabel 20 dapat dilihat posisi perekonomian Kabupaten Sidrap dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan pada periode 1995 – 1997, yakni berada pada kategori sebagai "*daerah berkembang cepat*" pada tahun 1995 dan berada pada posisi sebagai "*daerah relatif tertinggal*" pada tahun 1996 dan 1997. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Sidrap mengalami penurunan selama periode 1995 – 1997 sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare. Kemudian pada tabel 21 dapat pula dilihat posisi perekonomian Kabupaten Sidrap terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan selama periode 1999 - 2003. Pada tahun 1999, posisi perekonomian daerah ini berada pada kuadran I, yakni pada posisi sebagai "*daerah cepat maju dan cepat tumbuh*". Tetapi pada tahun berikutnya, yakni tahun 2000 – 2003, perekonomian daerah ini berada pada posisi sebagai " *daerah*

relatif tertinggal". Pergeseran posisi perekonomian Kabupaten Sidrap ini menunjuk-kan adanya penurunan drastis kinerja perekonomian Kabupaten Sidrap selama periode pengamatan dilihat dari aspek tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah ini dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) perekonomian Kabupaten Sidrap terlalu bertumpu pada subsektor tanaman pangan (padi) yang tidak terlepas dari sifat-sifatnya, seperti cepat rusak, permintaannya bersifat inelastis, sehingga tidak mampu dalam mendorong peningkatan pendapatan perkapita petani dan laju pertumbuhan ekonomi di daerah ini; (2) belum dilakukan diversifikasi pengolahan produk unggulan daerah ini, seperti padi hanya diolah untuk menghasilkan beras, sedangkan dedak dan jeramianya dibuang. Padahal masih dapat diolah untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat. Faktor-faktor tersebut telah menjadi salah satu penyebab masih rendahnya keterkaitan ekonomi antara Kabupaten Sidrap dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Sidrap masih sangat kecil pula selama periode pengamatan.

Pada tabel 20 dapat pula dilihat posisi perekonomian Kabupaten Pinrang dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1995 – 1997. Pada tabel ini terlihat bahwa posisi perekonomian Kabupaten Pinrang pada periode 1995 – 1997 tetap

beara pada kategori sebagai "*daerah maju tapi tertekan*". Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Pinrang dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan tidak mengalami peningkatan selama periode ini. Selanjutnya, pada tabel 21 dapat dilihat posisi perekonomian Kabupaten Pinrang selama periode 1999 – 2003, yakni tetap berada pada posisi sebagai "*daerah maju tapi tertekan*" pada tahun 1999, 2000, 2002, dan 2003, sebagaimana yang terjadi pada periode 1995 - 1997. Pada posisi ini, terlihat bahwa pendapatan perkapita daerah ini lebih tinggi daripada pendapatan perkapita Propinsi Sulawesi Selatan, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomianya masih lebih rendah dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, baik pada periode sebelum maupun pada periode setelah penetapan KAPET Parepare. Tingginya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pinrang daripada Propinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan selama periode pengamatan disebabkan karena aktivitas ekonomi yang dikelola masyarakat di daerah ini, utamanya di subsektor perkebunan dan perikanan, telah menghasilkan produk ekspor, yakni kakao dan udang, sehingga daerah ini telah menjadi salah satu sentra produksi udang yang menjadi salah satu produk ekspor unggulan Propinsi Sulawesi Selatan. Apalagi produk-produk ekspor tersebut telah meningkat harganya secara drastis di pasar internasional seiring dengan peningkatan nilai kurs US $ terhadap rupiah sejak perekonomian Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di daerah ini setelah tahun

1997. Selain itu, daerah ini dikenal pula sebagai lumbung pangan di Propinsi Sulawesi Selatan (masuk wilayah BOSOWA-SIPILU) yang telah menghasilkan produk beras yang banyak di pasarkan ke kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan dan wilayah lainnya di Indonesia serta diekspor ke luar negeri.

Namun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah ini lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan, kecuali tahun 2001, meskipun dalam tingkat yang sangat kecil. Relatif rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dibanding dengan Propinsi Sulawesi Selatan pada periode pengamatan adalah disebabkan karena pertambahan jumlah produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari sector-sektor ekonomi di daerah ini masih relative lebih rendah daripada di Propinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: (1) aktivitas produksi pada subsektor perikanan tambak dan tanaman pangan (padi) sebagai sector unggulan daerah ini telah mencapai tingkat "*constant return to scale*", bahkan beberapa diantara lokasi tambak di daerah yang telah berproduksi dalam kondisi "*decreasing return to scale*"; (2) aktivitas di sector industri belum berkembang di daerah ini, sehingga pertambahan kontribusinya terhadap PDRB daerah ini relative kecil pula selama periode pengamatan. Padahal di daerah ini sangat potensil untuk mengembangkan aktivitas agroindustri karena cukup banyak tersedia bahan baku, utamanya yang selama ini hanya terbuang menjadi limba, seperti jerami dan dedak; (3) beberapa aktivitas ekonomi

yang sebenarnya sangat potensil dikelola untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini belum tersentuh, seperti agrowisata.

Melihat uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa belum terjadi peningkatan kinerja ekonomi Kabupaten Pinrang secara signifikan dilihat dari kriteria pertumbuhan ekonomi dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan dalam periode setelah penetapan KAPET Parepare dibandingkan periode sebelum penetapannya. Berarti keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003, sebagai periode setelah penetapan KAPET Parepare, belum dapat memberikan dampak positip terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabuapten Pinrang selama periode pengamatan. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian Kabupaten Pinrang, utamanya pertumbuhan ekonominya, di masa datang, maka aktivitas agroindustri dan agrowisata perlu segera dikembangkan di daerah ini, sehingga Kabupaten Pinrang mampu menghasilkan berbagai macam produk yang berbasis pada produk-produk pertanian.

Kemudian pada tabel 20 dapat pula dilihat posisi perekonomian Kabupaten Barru dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1995 – 1997 sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare. Pada tabel ini terlihat bahwa posisi perekonomian Kabupaten Barru pada tahun 1995 dan 1996 berada pada kategori sebagai "*daerah relatif tertinggal*". Sedangkan posisinya pada tahun 1997 berubah menjadi "*daerah berkembang cepat*". Hal ini disebabkan

karena laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 1997 lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pada tabel 21 dapat pula dilihat posisi perekonomian Kabupaten Barru selama periode 1999 - 2003. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Barru mengalami penurunan dalam periode 1999 – 2000, kemudian stagnan pada periode 2000 – 2003. Hal ini terlihat pada posisi perekonomian daerah ini pada tahun 1999 yang berada pada kuadran II, yakni kategori "*daerah berkembang cepat*" karena tingkat pertumbuhan ekonomi daerah ini lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, meskipun lebih kecil pendapatan perkapitanya. Tetapi posisinya pada tahun 2000 bergeser menjadi "*daerah relatif tertinggal*" dan bertahan sampai pada tahun 2001 dan 2002 yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah ini pada tahun 2000, 2001 dan 2002 lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena harga udang yang menjadi salah satu produk unggulan daerah ini mengalami peningkatan yang sangat besar di pasar internasional pada tahun 1998 sampai 1999 seiring dengan peningkatan nilai kurs US $ terhadap rupiah setelah masa krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini dengan laju yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Silawesi Selatan. Tetapi harga produk ini mengalami penurunan yang cukup tajam di

pasar internasional pada tahun 2000 – 2003 yang diringi dengan penurunan nilai kurs US $ terhadap rupiah pada periode tersebut, sehingga kontribusi-nya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini menurun pula. Akibatnya, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah ini pada tahun 2000 - 2003 lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan. Di lain pihak aktivitas ekonomi di sektor lainnya, seperti sector pertambangan belum berkembang dan masih bertumpu pada sector pertanian, seperti tanaman pangan (padi) yang tidak diekspor produknya. Padahal sebenarnya daerah ini memiliki potensi pertambangan yang cukup besar berdasarkan hasil penelitian Dinas Pertambangan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Departemen Pertambangan yang telah menemukan potensi tambang di daerah ini berupa "*Cromit*", yakni bahan baku pembuatan besi Stainless yang selama ini masih diimpor. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan tetap stabil pada periode 2000 – 2003, meskipun harga udang di pasar internasional turun seiring dengan penurunan nilai kurs US $ terhadap rupiah, disebabkan karena masih ada beberapa aktivitas ekonomi di sector-sektor lainnya, utamanya sector industri, perdagangan dan jasa, yang mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi selama periode tersebut.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa keterkaitan ekonomi antar kabupate/kota di wilayah KAPET Parepare belum dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita

Kabupaten Barru selama periode 1999 – 2003 sebagai periode setelah penetapan KAPET Parepare dibandingkan dengan periode 1995 – 1997 sebagai periode sebelum penetapan KAPET tersebut. Hal in menunjukkan bahwa keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003 belum mampu menumbuhkan konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Barru yang selanjutnya dapat menggeser posisi perekonomian daerah ini *"daerah relatif tertinggal"* ke posisi yang lebih baik, seperti *"daerah berkembang cepat"* atau *"daerah cepat maju dan cepat tumbuh"* dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan.

Pada tabel 20 terlihat pula posisi perekonomian Kabupaten Enrekang dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1995 – 1997. Pada tabel ini terlihat bahwa posisi perekonomian Kabupaten Enrekang pada periode ini tetap berada pada kategori sebagai *"daerah relatif tertinggal"* yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Enrekang lebih rendah daripada Propinsi Sulawesi Selatan selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah ini dilihat dari aspek prtumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita tidak mengalami peningkatan selama periode 1995 – 1997 sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare. Selanjutnya, pada tabel 21 dapat pula

dilihat posisi perekonomian Kabupaten Enrekang selama periode 1999-2003, sebagai periode setelah penetapan KAPET Parepare. Pada tabel ini terlihat posisi perekonomian daerah ini pada tahun 1999, 2002 dan 2003 berada pada posisi kuadran II atau kategori "*daerah berkembang cepat*" karena tingkat pertumbuhan ekonominya pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, meskipun pendapatan perkapitanya masih lebih rendah. Rendahnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Enrekang daripada tingkat pendapatan masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan pada periode pengamatan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) jumlah produksi aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dan berorientasi ekspor daerah ini, seperti kopi dan kakao, masih terbatas karena adanya keterbatasan lahan yang tersedia; (2) pertambahan jumlah penduduk daerah ini relative lebih tinggi daripada pertambahan jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan; (3) aktivitas ekonomi di sub sector tanaman pangan lebih banyak bertumpu pada tanaman sayuran dan buah-buahan yang sifatnya cepat rusak, dijual dalam keadaan belum diolah sehingga harganya lebih rendah dan permintaannya bersifat elastis; (4) belum ada aktivitas ekonomi lainnya di daerah ini yang potensil untuk mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakatnya selama periode pengamatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare telah

mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di daerah ini, sehingga dapat melewati tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan pada periode 1999 – 2003 sebagai periode setelah penetapan KAPET Parepare, dimana pada periode sebelum penetapan KAPET ini tingkat pendapatan perkapita masyarakatnya masih lebih rendah daripada di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003 telah mampu menciptakan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi di daerah ini yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakatnya, sehingga mampu melewati tingkat pendapatan perkapita Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan pada periode ini. Namun demikian, keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini selama periode 1999 – 2003 belum mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang, sehingga masih tetap lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang terjadi pada periode 1995 – 1997 sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare. Adapun faktor-faktor penyebabnya telah diuraikan di atas.

2. Typologi Kabupaten/Kota di Wilayah KAPET Parepare Berdasarkan Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Setelah menganalisis mengenai dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat di wilayah ini berdasarkan posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota tersebut setiap tahun selama periode 1995 – 1997, sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare, sebagaimana yang nampak pada tabel 20, serta posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota tersebut selama periode 1999 – 2003, sebagai periode setelah penetapan KAPET Parepare, maka selanjutnya perlu pula dianalisis dampak keterkaitan ekonomi kabupaten/kota di wilayah ini terhadap kesempatan kerja yang tercipta dalam perekonomian masing-masing kabupaten/kota tersebut, baik selama periode 1995 – 1997 (periode sebelum penetapan KAPET Parepare) maupun selama periode 1999 – 2003 (periode setelah penetapan KAPET Parepare).

Untuk melakukan analisis tersebut, maka terlebih dahulu perlu dilihat posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini setiap tahun selama periode pengamatan dengan menggunakan kriteria pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dalam analisis ini digunakan indikator persentase angkatan kerja yang bekerja pada setiap sektor/subsektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode pengamatan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat daya serap masing-masing sektor/subsektor ekonomi di setiap kabupaten/kota di wilayah

kapet ini, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator dalam melihat dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan di wilayah ini selama periode pengamatan.

Untuk melakukan analisis ini, maka terlebih dahulu perlu dilihat data pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang nampak pada tabel 3 dan 30, serta persentase angkatan kerja yang bekerja di setiap kabupaten/kota di wilayah ini dan Propinsi Sulawesi Selatan periode 1995 – 1997 dan periode 1999 - 2003, sebagaimana yang nampak pada tabel 32 dan 33 (lampiran 13 dan 14). Data-data tersebut selanjutnya diaplikasikan ke dalam matriks Typologi Klassen untuk dapat menentukan di kuadran mana posisi perekonomian masing-masing Kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam matriks typologi selama periode pengamatan.

Berdasarkan ketentuan di atas dan dengan menggunakan data pada tabel 30 (lampiran 12) serta tabel 32 (lampiran 13), maka dapat dilihat dan dianalisis posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare setiap tahun selama periode 1995 – 1997, sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare, seperti yang nampak pada gambar 10, 11 dan 12 berikut:

kapet ini, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator dalam melihat dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan di wilayah ini selama periode pengamatan.

Untuk melakukan analisis ini, maka terlebih dahulu perlu dilihat data pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang nampak pada tabel 3 dan 30, serta persentase angkatan kerja yang bekerja di setiap kabupaten/kota di wilayah ini dan Propinsi Sulawesi Selatan periode 1995 – 1997 dan periode 1999 - 2003, sebagaimana yang nampak pada tabel 32 dan 33 (lampiran 13 dan 14). Data-data tersebut selanjutnya diaplikasikan ke dalam matriks Typologi Klassen untuk dapat menentukan di kuadran mana posisi perekonomian masing-masing Kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam matriks typologi selama periode pengamatan.

Berdasarkan ketentuan di atas dan dengan menggunakan data pada tabel 30 (lampiran 12) serta tabel 32 (lampiran 13), maka dapat dilihat dan dianalisis posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare setiap tahun selama periode 1995 – 1997, sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare, seperti yang nampak pada gambar 10, 11 dan 12 berikut:

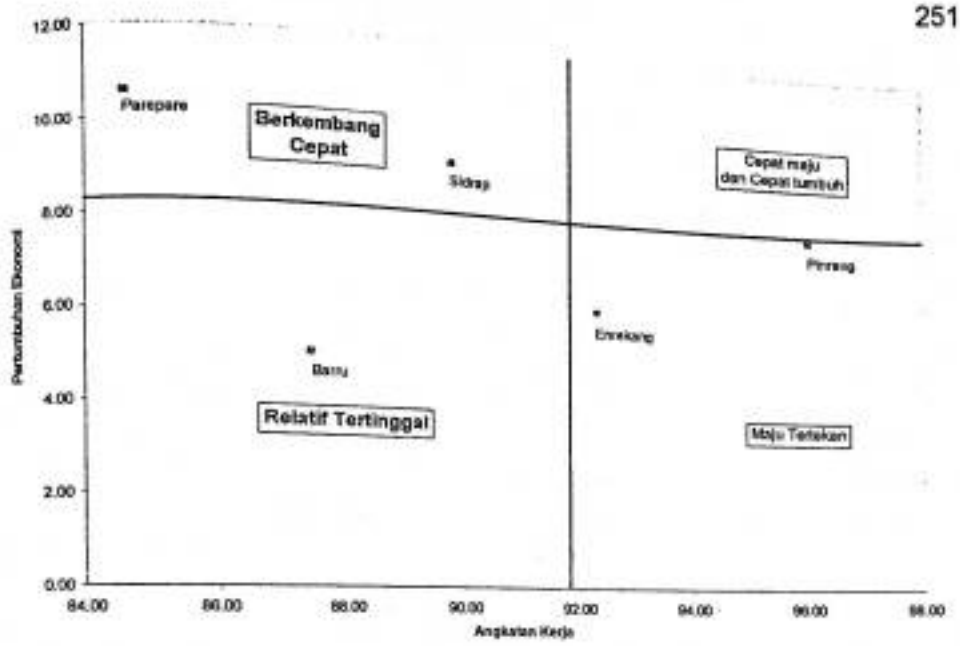

Gambar 10. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1995

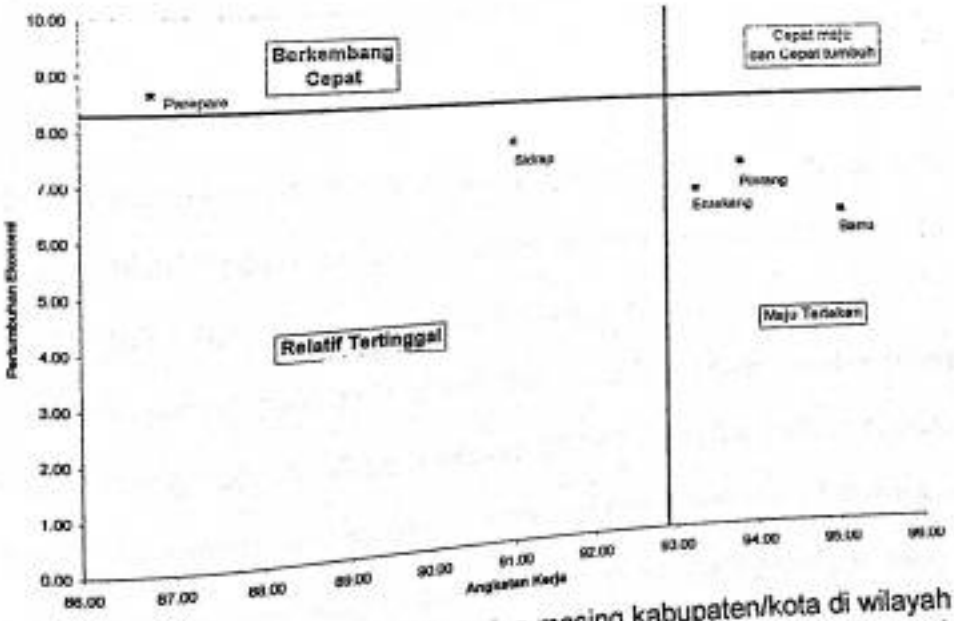

Gambar 11. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET *Parepare berdasarkan indikator* pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1996

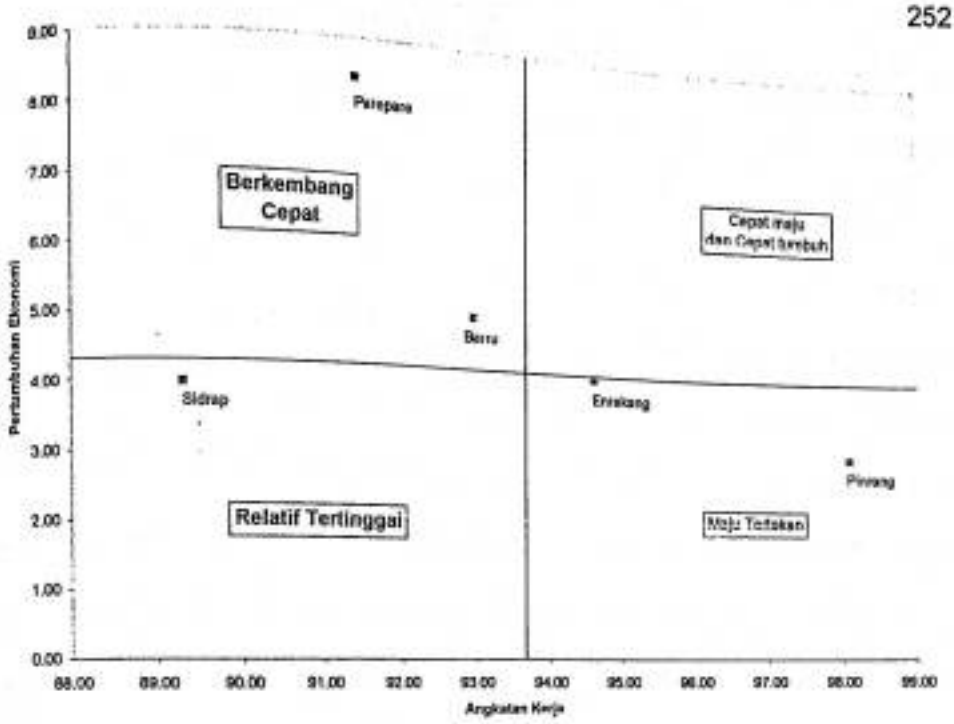

Gambar 12. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1997.

Pada gambar 10, 11 dan 12 di atas dapat dilihat posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1995 – 1997 berdasarkan hasil analisis typologi.

Selanjutnya, perlu pula dilihat dan dianalisis posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003 sebagai periode setelah dilakukan penetapan KAPET Parepare untuk dapat membandingkan posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini sebelum dan setelah ditempuh kebijakan penetapan

KAPET Parepare, sehingga lebih lanjut akan dapat dilihat dan dianalisis dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini terhadap kesempatan kerja di wilayah ini setelah adanya KAPET Parepare.

Untuk melakukan hal ini, maka digunakan data pertumbuhan ekonomi dan persentase angkatan kerja yang terserap dalam sektor-sektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare selama periode 1999 – 2003, sebagaimana yang nampak pada tabel 3 dan tabel 33 (lampiran 14). Berdasarkan data pada kedua tabel tersebut, maka dapat dilihat posisi klasifikasi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare setiap tahun selama periode 1999 – 2003, sebagaimana yang nampak pada gambar 13, 14, 15, 16, dan 17 berikut:

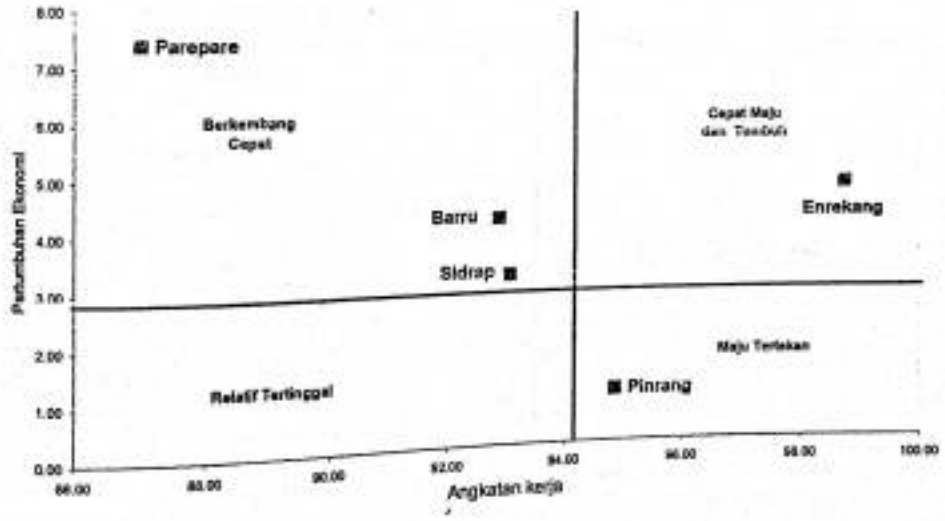

Gambar 13. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1999

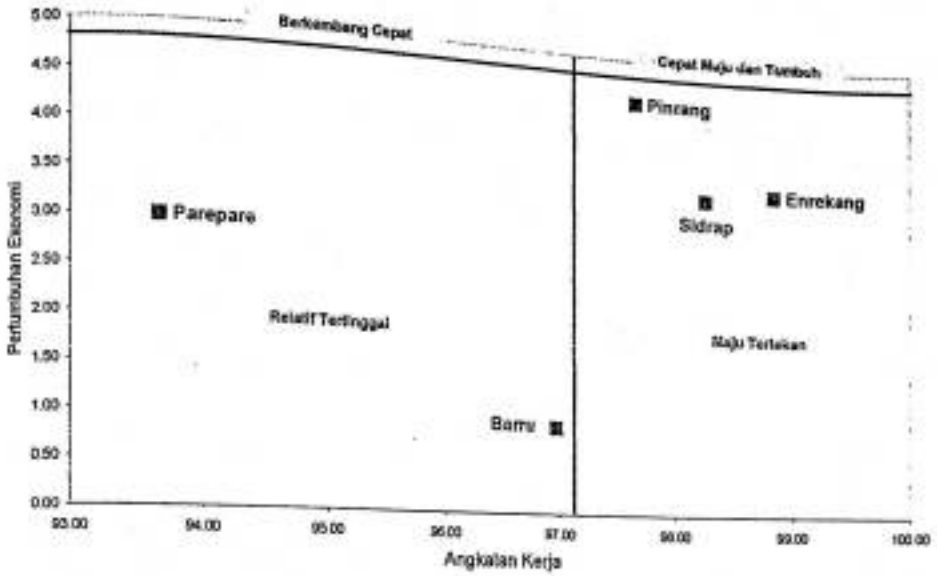

Gambar 14. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 2000

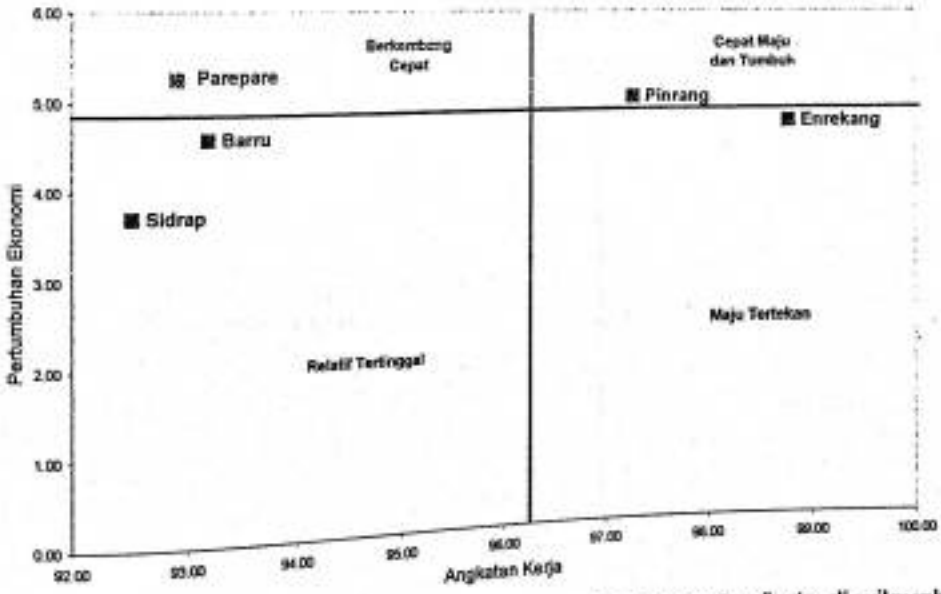

Gambar 15. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 2001

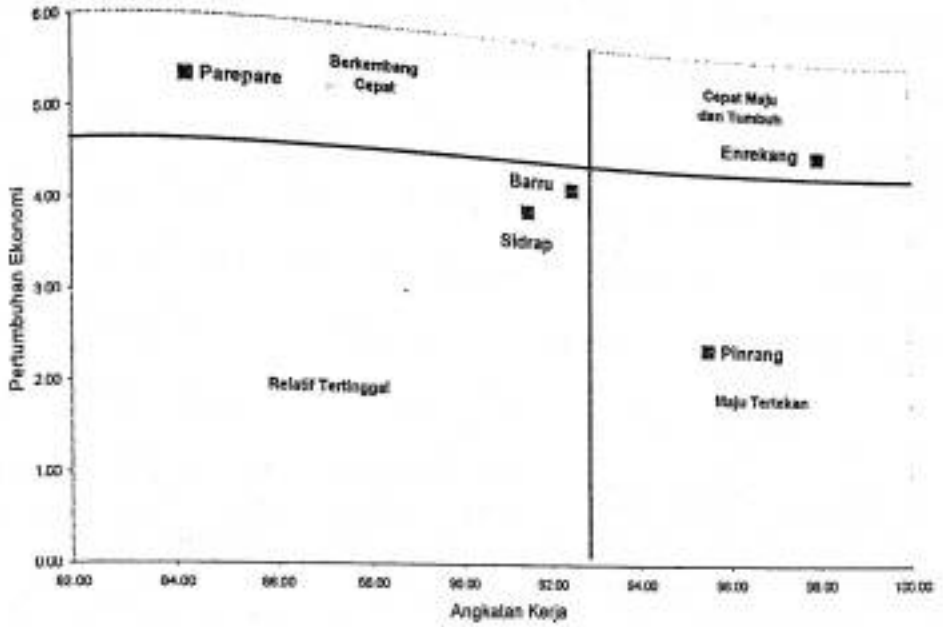

Gambar 16. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 2002

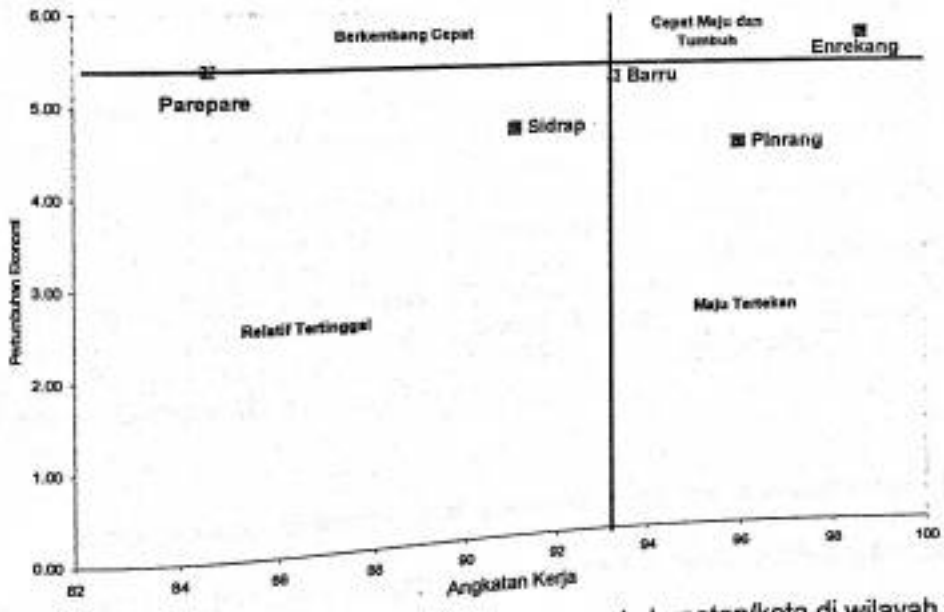

Gambar 17. Posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 2003

Pada gambar 13, 14, 15, 16 dan 17 di atas dapat dilihat posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1999 – 2003 berdasarkan hasil analisis typologi.

Deskripsi mengenai posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1995 - 1997 dapat dilihat ringkasannya pada tabel 22 berikut:

Tabel 22. Posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam konteks perekonomian Prop. Sul-Sel, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1995-1997

No	Kab./Kota	Posisi Perekonomian Kab./Kota di Wil. KAPET Parepare		
		1995	1996	1997
1	Parepare	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"
2	Sidrap	Berada pd kategori "Daerah Berkem-bang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"
3	Pinrang	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"
4	Barru	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"
5	Enrekang	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal".	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"

Sumber: Gambar 10, 11, dan 12.

Kemudian deskripsi mengenai posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999 - 2003 dapat dilihat ringkasannya pada tabel 23.

Tabel 23. Posisi perekonomian kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dalam konteks perekonomian Prop. Sul-Sel, berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, tahun 1999 - 2003

No	Kab./Kota	Posisi Perekonomian Kab./Kota di Wil. KAPET Parepare				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Parepare	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Ter-tinggal"	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Ter-tinggal"
2	Sidrap	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat".	Berada pd kategori "Daerah Maju Tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Relatif Tertinggal"
3	Pinrang	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"
4	Barru	Berada pd kategori "Daerah Berkembang Cepat"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Reltif Tertinggal"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan".
5	Enrekang	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh".	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Maju tapi Tertekan"	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh".	Berada pd kategori "Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh".

Sumber: Gambar 13, 14, 15, 16 dan 17

Pada tabel 22 dapat dilihat bahwa posisi perekonomian Kota Parepare selama periode 1995 – 1997 tetap berada pada kategori sebagai "*daerah berkembang cepat*". Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja yang tercipta dalam perekonomian Kota Parepare masih tetap lebih rendah daripada dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah

acuan, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi kota ini tetap lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan dalam periode 1995 – 1997 tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa posisi perekonomian kota ini dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan tidak mengalami peningkatan dilihat dari aspek kesempatan kerja selama periode 1995 – 1997, sebegai periode sebelum penetapan wilayah KAPET Parepare. Selanjutnya, pada tabel 23 terlihat pula bahwa meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Parepare lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan pada periode pengamatan, keculai tahun 2000, tetapi persentase angkatan kerja yang terserap pada berbagai sektor ekonomi di kota ini masih tetap lebih rendah daripada di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan, sehingga posisinya tetap sebagai "*daerah berkembang cepat*" dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja selama periode 1999 – 2003 sebagai periode setelah penetapan KAPET Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare belum mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja yang cukup besar bagi angkatan kerja yang ada di kota ini, sehingga persentase angkatan kerja yang terserap di kota lebih tetap lebih rendah daripada di Propinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui beberapa faktor penyebabnya, yakni: (1) aktivitas perdagangan yang merupakan aktivitas ekonomi yang sangat menonjol di kota ini dan telah banyak menarik tenaga

kerja dari kabupaten-kabupaten *hinterland*, ternyata belum mampu pula menyediakan lapangan kerja secara optimal karena adanya beberapa kendala, seperti sarana pasar yang tersedia masih kurang memadai kapasitasnya serta kurang variatif. Padahal di kota sangat potensi untuk didirikan pasar pelelangan dan promosi produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh kabupaten-kabupaten lainnya dalam wilayah KAPET Parepare; (2) aktivitas ekonomi di sector jasa sebagai sector unggulan kota ini lebih cenderung hanya menyediakan lapangan kerja informal, sepertu buruh di pelabuhan, pasar dan terminal angkutan darat, sehingga sifatnya tidak tetap. Pada di sektor jasa ini masih sangat banyak bentuk usaha yang dapat dikembangkan untuk membuka lapangan kerja di kota ini, seperti jasa pengurusan SIM, STNK, travel, rumah makan, bengkel kendaraan, lembaga kursus, dan sebagainya; (3) aktivitas ekonomi di sector lainnya, seperti sector pertanian dan pertambangan, tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang luas karena adanya faktor kendala keterbatasan lahan dan sumberdaya alam lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan ekonomi antara Kota Parepare dengan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah KAPET Parepare belum dapat memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kesempatan kerja di kota ini selama periode pengamatan.

Pada tabel 22 terlihat bahwa posisi perekonomian Kabupaten Sidrap pada tahun 1995 berada pada kategori sebagai "*daerah berkembang cepat*" kemudian berubah menjadi "*daerah relatif tertinggal*" pada tahun 1996 dan 1997. Berarti kinerja perekonomian Kabupaten Sidrap dalam konteks

perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan dilihat dari kriteria pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja mengalami penurunan selama periode 1995 – 1997. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1995 berubahn menjadi lebih rendah pada tahun 1996 dan 1997. Sedangkan persentase angkatan kerja yang dapat terserap pada berbagai sektor ekonomi di daerah ini tetap lebih rendah daripada di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1995 – 1997. Kemudian pada tabel 23 dapat pula dilihat bahwa persentase angkatan kerja yang terserap pada masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Sidrap lebih rendah daripada di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan selama periode 1999 - 2003. Demikian pula tingkat prtumbuhan ekonominya hanya pada tahun 1999 lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, sedangkan pada tahun 2000 – 2003, sudah berubah menjadi lebih rendah, sehingga posisi perekonomian daerah ini yang masuk kategori sebagai "*daerah berkembang cepat*" pada tahun 1999 berubah menjadi "*daerah relative tertinggal*" pada tahun 2001 - 2003.

Relatif lebih rendahnya persentase angkatan kerja yang terserap pada masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Sidrap dibandingkan dengan di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan selama periode pengamatan adalah disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) peluang kerja di sector pertanian sebagai sector unggulan daerah ini semakin terbatas

seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan tekhnologi dalam pengelolaannya yang kurang membutuhkan tenaga kerja, misalnya traktor, mesin perontok padi, mesin panen, dan sebagainya; (2) aktivitas di sector lainnya belum berkembang karena adanya faktor-faktor kendala yang dihadapi, seperti skill, jiwa kewirausahaan dan inovasi sumberdaya manusia yang ada di daerah ini relative masih rendah, sehingga belum mampu menemukan dan memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada, daya beli masyarakat di daerah ini masih rendah, dan sebagainya. Padahal sebenarnya masih banyak peluang usaha yang prospektif dikelola di daerah ini dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonominya, seperti industri pembuatan sekam jerami sebagai bahan baker alternative pengganti BBM, industri pakan ternak dengan menggunakan bahan baku dedak, industri makanan ringan dan makanan anak-anak dengan menggunakan bahan baku jagung, sepeti cheeke; pengembangan agro- wisata, industri kecil yang memproduksi mesin panen, khususnya di daerah Massepe sebagai sentra industri kecil pandai besi di daerah ini; (3) tingkat pertumbuhan penduduk daerah ini relative lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare belum memberikan dampak positip terhadap peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Sidrap selama periode pengamatan.

seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan tekhnologi dalam pengelolaannya yang kurang membutuhkan tenaga kerja, misalnya traktor, mesin perontok padi, mesin panen, dan sebagainya; (2) aktivitas di sector lainnya belum berkembang karena adanya faktor-faktor kendala yang dihadapi, seperti skill, jiwa kewirausahaan dan inovasi sumberdaya manusia yang ada di daerah ini relative masih rendah, sehingga belum mampu menemukan dan memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada, daya beli masyarakat di daerah ini masih rendah, dan sebagainya. Padahal sebenarnya masih banyak peluang usaha yang prospektif dikelola di daerah ini dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonominya, seperti industri pembuatan sekam jerami sebagai bahan baker alternative pengganti BBM, industri pakan ternak dengan menggunakan bahan baku dedak, industri makanan ringan dan makanan anak-anak dengan menggunakan bahan baku jagung, sepeti cheeke; pengembangan agro- wisata, industri kecil yang memproduksi mesin panen, khususnya di daerah Massepe sebagai sentra industri kecil pandai besi di daerah ini; (3) tingkat pertumbuhan penduduk daerah ini relative lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare belum memberikan dampak positip terhadap peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Sidrap selama periode pengamatan.

Selanjutnya, pada tabel 22 dapat pula dilihat posisi perekonomian Kabupaten Pinrang dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1995 – 1997, sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare. Pada tabel ini terlihat bahwa posisi perekonomian Kabupaten Pinrang tetap berada pada kategori sebagai "daerah maju tapi tertekan" selama periode 1995 – 1997 tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja yang terserap di Kabupaten Pinrang lebih besar daripada di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan selama periode tersebut, meskipun laju pertumbuhan ekonominya masih tetap lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula pada tabel 23 dapat dilihat bahwa persentase angkatan kerja yang terserap di Kabupaten Pinrang lebih besar daripada di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan selama periode 1999 – 2003, sebagai periode setelah penetapan KAPET Parepare, meski-pun tingkat pertumbuhan ekonominya masih lebih rendah pada tahun 1999, 2000, 2002, dan 2003, sehingga posisi perekonomian daerah ini masih tetap termasuk kategori sebagai "*daerah maju tapi tertekan*" selama periode ini.

Tingginya tingkat persentase angkatan kerja yang terserap pada masing-masing sector ekonomi di Kabupaten Pinrang disbanding dengan di Propinsi Selatan sebagai daerah acuan selama periode pengamatan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) di daerah ini masih tersedia lahan yang cukup luas, sehingga masih dapat dibuka sebagai lahan pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja; (2) di daerah ini telah

berkembang beberapa aktivitas ekonomi yang menterap tenaga kerja yang ada, seperti pabrik terasi, cold storage, pabrik es, usaha pembenihan bibit udang windu (*hatchery*), dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare telah memberikan dampak positip terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Pinrang, yakni mampu mempertahankan posisi dimana persentase angkatan kerja yang terserap di Kabupaten Pinrang untuk tetap lebih besar daripada dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan, sebagaimana yang terjadi pada periode 1995 – 1997, yakni periode sebelum penetapan KAPET Parepare.

Pada tabel 22 nampak pula posisi perekonomian Kabupaten Barru dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1995 – 1999. Pada tabel ini terlihat bahwa posisi perekonomian Kabupaten Barru yang berada pada kategori sebagai "*daerah relatif tertinggal*" pada tahun 1995 berubah menjadi "*daerah maju tapi tertekan*" pada tahun 1996 dan sebagai "*daerah berkembang cepat*" pada tahun 1997. Hal ini menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja yang terserap pada berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Barru lebih kecil daripada dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1995 dan 1997. Sedangkan pada tahun 1996, persentasenya lebih besar, sehingga dikategorikan sebagai "*daerah maju tapi tertekan*". Selanjutnya, pada tabel 23 dapat pula dilihat posisi perekonomian Kabupaten Barru selama periode 1999 – 2003, sebagai periode setelah penetapa KAPET

Parepare. Pada tabel ini terlihat bahwa posisi perekonomian Kabupaten Barru pada tahun 1999 berada pada kuadran II, yakni kategori "*daerah berkembang cepat*" karena tingkat pertumbuhan ekonomi daerah ini lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, meskipun lebih kecil persentase angkatan kerjanya yang bekerja dibandingkan dengan persentase rata-rata angkatan kerja yang bekerja di Propinsi Sulawesi Selatan. Tetapi posisi perekonomian daerah ini pada tahun 2000, 2001, dan 2002 bergeser menjadi "*daerah relatif tertinggal*" yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan persentase angkatan kerja yang bekerja daerah ini pada tahun 2000, 2001, dan 2002 lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi dan persentase rata-rata angkatan kerja yang terserap dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kinerja perekonomian daerah ini mengalami peningkatan pada tahun 2003, sehingga posisinya berubah menjadi kategori sebagai "*daerah maju tetapi tertekan*" yang menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja yang terserap pada berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Barru lebih tinggi daripada dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare selama periode 1999-2003 telah memberikan dampak positip bagi perekonomian Kabupaten Barru dalam bentuk persentase angkatan kerja yang dapat terserap pada berbagai sektor ekonomi di daerah ini yang lebih besar daripada dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan pada tahun 2003 tersebut.

Selanjutnya, pada tabel 22 terlihat pula posisi perekonomian Kabupaten Enrekang dalam konteks perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah acuan selama periode 1995 – 1997. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa posisi perekonomian Kabupaten Enrekang tetap berada pada kategori sebagai "*daerah maju tapi tertekan*" selama periode 1995 – 1997, sebagai periode sebelum penetapan KAPET Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja yang terserap dalam berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Enrekang tetap lebih tinggi daripada dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan selama periode tersebut, meskipun laju pertumbuhan ekonominya masih tetap lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada tabel 23 dapat pula dilihat posisi perekonomian Kabupaten Enrekang selama periode 1999– 2003 Pada tabel ini dapat dilihat bahwa pada tahun 1999, 2002 dan 2003, posisi perekonomian daerah ini berada pada posisi kuadran I atau kategori sebagai "*daerah cepat maju dan cepat tumbuh*" yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan persentase angkatan kerja yang bekerja di daerah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan persentase rata-rata angkatan kerja yang bekerja di Propinsi Sulawesi Selatan. Tetapi pada tahun 2000 dan 2001, posisi perekonomian daerah ini berada pada posisi sebagai "*daerah maju tetapi tertekan*" karena tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan meskipun persentase angkatan kerja yang bekerja di daerah ini masih tetap lebih tinggi daripada persentase rata-

rata angkatan kerja yang bekerja di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan.

Lebih tingginya persentase angkatan kerja yang terserap pada berbagai sector ekonomi di Kabupaten Enrekang disbanding dengan di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah acuan selama periode pengamatan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) karena aktivitas di sector pertanian, utamanya subsektor tanaman pangan, yakni sayuran, sangat menonjol, sehingga mampu menyerap angkatan kerja yang sangat besar, yakni rata-rata lebih dari 80 % dari total angkatan kerja yang ada di daerah ini selama periode pengamatan; (2) tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi, sehingga mampu melewati tingkat pertumbuhan ekonomi Prpopinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999, 2002 dan 2003, telah mampu mendorong peningkatan lapangan kerja di daerah ini.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare telah mampu meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang, sehingga persentase angkatan kerja yang bekerja di daerah ini tetap lebih tinggi daripada persentase angkatan kerja yang terserap pada perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Namun demikian, ternyata keter-kaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini selama periode pengamatan belum mampu mempertahankan posisi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah ini di atas tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa dampak keterkaitan ekonomi antar

kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Enrekang belum optimal selama periode pengamatan. Oleh karena itu, masih sangat perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi antara daerah ini dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare dan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia di masa datang, yakni dengan mendorong peningkatan konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu yang unggul di daerah ini, seperti aktivitas budidaya tanaman sayuran, tanaman perkebunan, seperti kopi dan kakao, dan agrowisata. Dimana produk yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut diolah lebih lanjut dan dipasarkan di kabupaten/kota lainnya di wilayah KAPET Parepare.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis *overlay* dengan menggunakan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor/subsektor terhadap PDRB kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare secara bersamaan, memperlihatkan sektor/subsektor unggulan masing-masing kabupaten/ kota di wilayah ini, yakni: di Kota Parepare adalah: (1) hotel; dan (2) bangunan. Sedangkan di Kabupaten Sidrap adalah: (1) peternakan; (2) penggalian; (3) hotel; (4) sewa bangunan; dan (5) bangunan. Kemudian di Kabupaten Pinrang adalah: (1) tanaman bahan makanan; (2) tanaman perkebunan dan (3) peternakan. Selanjutnya di Kabupaten Enrekang adalah: (1) tanaman perkebunan; (2) peternakan; (3) sewa bangunan; (4) pemerintahan umum. Sektor/subsektor unggulan Kabupaten Barru adalah: (1) peternakan; (2) bank; (3) lembaga keungan dan (4) pemerintahan umum.
2. Nilai *index spesilisasi regional* masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare lebih kecil dari 1 (tabel 16 dan 17) menunjukkan bahwa masih sangat rendah tingkat konsentrasi aktivitas sektor/subsektor

unggulan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini, sehingga belum mampu mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini selama periode pengamatan.

3. Tingkat keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare masih relatif rendah, sebagaimana yang terlihat pada tabel 18 dan 19, menunjukkan bahwa pada umumnya (diatas 50 %) dari total output masing-masing sektor/subsektor ekonomi di setiap kabupaten/kota di wilayah ini dikonsumsi sendiri oleh konsumen di kabupaten/kota tersebut, sehingga masih relatif kecil jumlahnya yang dapat didistribusi ke kabupaten/kota lainnya di wilayah ini maupun ke wilayah lainnya.

4. Hasil analisis typologi dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan perkapita, baik pada periode sebelum maupun setelah penetapan KAPET Parepare, menunjukkan bahwa dampak keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan perkapita masyarakat di wilayah ini masih relatif kecil.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini dapat pula dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di wilayah KAPET Parepare, maka keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini serta antara wilayah KAPET Parepare dengan wilayah-wilayah di luar wilayah ini sangat perlu ditingkatkan di masa datang dengan dimotivasi oleh semangat kebersamaan dalam membangun perekonomian di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah ini serta dengan memanfaatkan moment otonomi daerah dan desentralisasi.

2. Dilihat dari aspek potensi ekonomi yang dimiliki dan produk yang dihasilkan oleh sektor/subsektor unggulan masing-masing kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, maka dapat dikembangkan 2 (dua) bentuk keterkaitan di wilayah ini, yakni keterkaiatan *aggregate* dan keterkaitan *complementary*. Bentuk keterkaitan *aggregate* diterapkan untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi antara 4 kabupaten di wilayah ini yang sama-sama memiliki potensi sektor pertanian yang cukup besar. Sedangkan keterkaitan *complementary* diterapkan untuk meningkatkan keterkaitan keempat kabupaten di wilayah ini dengan Kota Parepare yang memiliki

potensi ekonomi yang menonjol di bidang transportasi laut, perdagangan dan jasa perbankan.

3. Bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia melalui penerapan konsep pusat pertumbuhan, sebagaimana yang diterapkan dengan membentuk KAPET, masih sangat dibutuhkan karena adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia dan perbedaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Tetapi penerapan konsep ini tidak akan dapat berhasil jika sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dan tanpa ada intervensi pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan konsentrasi aktivitas ekonomi dan memperpanjang rantai aktivitas produksi dan pemasaran sektor/subsektor unggulan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena kemampuan investasi pihak swasta dan daya beli masyarakat di wilayah ini masih relatif kecil. Oleh karena itu, Badan Pengelola KAPET harus berperan sebagai mediator dan koordinator bagi pemda kabupaten/kota di wilayah dalam mensikronkan aktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini di masa datang.

4. Konsentrasi aktivitas ekonomi untuk meningkatkan *spesialisasi regional* masing-masing Kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare masih relatif kecil, sehingga aktivitas ekonomi di wilayah ini masih relatif rendah. Akibatnya, wilayah ini belum mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Oleh karena itu,

strategi yang paling tepat ditempuh untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini adalah dengan memperbanyak membentuk konsentrasi aktivitas ekonomi dalam berbagai tingkatan di masing-masing kabupaten/kota yang saling terkait, baik dalam bentuk keterkaitan ke depan maupun ke belakang, sehingga mampu menciptakan integrasi ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah ini.

5. Untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare di masa datang, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis, yakni :

   a. Membangun industri pengolahan komoditi pertanian secara terpadu, yakni industri yang dapat menghasilkan beberapa macam output dengan hanya menggunakan 1 macam input.
   b. Membangun tempat yang berfungsi sebagai pusat pelelangan komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare.
   c. Daya saing pelabuhan Parepare perlu ditingkatkan dengan cara : (1) menambah fasilitas pelabuhan, utamanya panjang dermaga dan pelataran; (2) mempermudah proses administrasi di pelabuhan; (3) meningkatkan kapasitas dan ukuran kapal laut yang keluar dan masuk ke pelabuhan Parepare; (4) menambah rute pelayaran kapal laut yang masuk-keluar di pelabuhan ini.
   d. Membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh para investor;

e. Perlu ada informasi secara detail dan mendalam mengenai potensi subsektor/kegiatan usaha unggulan di setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare.

f. Perlu dibangun koordinasi yang terpadu antar Pemda kabupaten/ kota dalam wilayah KAPET Parepare dengan Badan Pengelola KAPET Parepare yang bertindak sebagai fasilitator dan mediator.

g. Program-program pembangunan ekonomi di setiap kabupaten/kota harus terintegrasi secara menyeluruh dengan master plan KAPET Parepare yang disusun oleh Badan Pengelola KAPET Parepare secara komprehensif dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Yusuf, Muhammad, 1995. *Analisis Keterkaitan Pembangunan Ekonomi Desa dan Kota di Sulawesi Tenggara*. Disertasi pada PPS-Unhas, Makassar (tidak dipublikasikan)

Abdiwidjaya, Buchari, 2001. *Pertumbuhan dan Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 1993*. Tesis pada PPS-Unhas, Makassar (tidak dipublikasikan).

Achyar, Nuzul, 2003. *Mengurangi Kesenjangan dengan UU Otonomi?*. Yayasan Harkat Bangsa dan Partnership, Jakarta.

Arifin, Zainal dan Kuncoro, 2003. *Konsentrasi Spasial dan Dinamika Pertumbuhan Industri Manufaktur di Jawa Timur*. (Studi Kasus Industri Besar dan Sedang, 1994 – 1999). Jurnal SOSIOHUMANIKA, No. 16 A. UGM, Yogyakarta.

Armstrong, Harvey & Taylor, Jim, 1985. *Regional Economics and Policy*. Philip Allan Publisher, Britain.

Arsyad, Lincolin, 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbit STIE, YKPN, Yogyakarta.

Aswandi, Hairul dan Kuncoro, Mudrajad, 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan*. Studi Empiris di Kalimantan Selatan, 1993 – 1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI), Vol. 17, No. 1, FE-UGM, Yogyakarta.

Azis, Iwan Jaya, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Lembaga Penerbit FE – UI, Jakarta.

Baley, D. Kenneth, 1982. *Methods of Social Research*. Collier Macmillan Publisher, London.

Bappeda Kab. Majalengka, 2003. *Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal* (KAPET/KPEL), Kab. Majalengka.

Bendavid, Avrom, 1991. *Regional and Local Economi Analysis for Practitioners*. Praeger Publishers, New York.

Blakely, J. Edward, 1989. *Planning Local Economic Development*: Theory and Practice. Sage Publications, Inc. Newbury Park, London.

Daryanto, Arief 2003. *Disparitas Pembangunan Perkotaan-Pedesaan di Indonesia*. Majalah Agrimedia, vol. 8.

David, A. Preston, 1978. *Farmers and Towns: Rural – Urban Relations in Highland Bolivia*. University of East Auglia- Geo Abstracts, Norwich.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.

Fisher, H. & Rushton, 1975. *Rural Growth Centre*. Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for Asian Studies, San Francisco.

Fujita, M. and J. F. Thisse, 2001. *Does Gheographical Agglomeration Foster Economic Growth*? And Who Gains and Looses from It? Mimeo.

Glasson, John, 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.

Gore, Charles, 1984. *Region in Question: Space, Development Theory and Regional Policy*. Methuen, London.

Hanafiah T. 1986. *Strategi Pembagunan Wilayah Pedesaan: Kerangka Pemikiran Bagi Pembagunan Desa Terpadu*. Fakultas Pertanian, IPB. Bogor

Hansen, M. Niles, 1972. *Criteria for a Growth Centre Policy*. Mouton, the Hague, London.

Harris, E. Seymor, 1957. *International and Interregional Economics*. Mc Graw-Hill Book Company, Inc. New York.

Hasanuddin, Basri. 1990. *Perspektif Perekonomian Regional Sulawesi Selatan di Tahun 1990-an*. Makalah pada Seminar ISEI Cabang Makassar di Bank Dagang Negara, Makassar.

Hayter, R. 1997. *The Dynamic of Industrial Location : The Factory, The Firm, and The Production System*. John Wiley and Sons Chichester.

H.B. Fisher and G. Rushton, 1975. *Rural Growth Centers : Experiences in The Pilot Research Project 1969 – 1974*. Paper Presented at The Annual Meeting of The Association for Studies, San Fransisco.

Hirschman, Albert, O. 1970. *Strategi Pembangunan Ekonomi* (Terjemahan Paul Sitohan). PT. Dian Rakyat, Jakarta.

Ikhwanuddin, Mawardi, 1997. *Daya Saing Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.* Prisma No. 3, Tahun 1997.

John, Friedman & Mike, Douglas, 1975. *Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia.* Paper Presented at the Seminar on Industrialization Strategies and the Growth Pole Approach to Regional Planning and Development. United Nations Centre for Regional Development, Nagoya, Japan.

Isard, Walter, 1967. *Methods of Regional Analysis.* Fifth Printing. The Massachusetts Institute of Technology, USA.

----------, 1998. *Methods of Interregional and Regional Analysis.* Ashgate Publishing Company, USA.

Jakti, Kuntjoro, Dorodjatun, 1986. *Teori Pembangunan Ekonomi: Menuju Ketidakpastian?.* Makalah pada Diskusi Masalah-masalah Pembangunan, Kerjasama Sema STF Driyarkara dengan The Asia Foundation, Jakarta.

Jhingan, L.M. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan perencanaan* (terjemahan). Rajawali Pers, Jakarta.

Kadariah, 1985. *Ekonomi Perencanaan.* Lembaga Penerbit FE – UI, Jakarta.

Kamaluddin, Rustian, 1988. *Pengembangan Kota Sekunder dalam Rangka Pembangunan Daerah: Kotamadya Padang Panjang.* Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XXXVI, No. 4, Tahun 1988. LPEM Fak. Ekonomi, UI, Jakarta.

Krisnamurthi, Bayu, 2003. *Peran Pembangunan Pertanian dalam Pembangunan Industri dan Daerah.* Pusat Studi IPB, Bogor.

Krugman, P. 1991. *Geography and Trade.* MIT Press. Cambridge.

----------, 1995. *Development, Geography, and Economic Theory.* The MIT Press, Cambridge and London.

----------,1998. *Space : The Final Frontier.* Journal of Economic Perspective, 12 (2). PP. 74 – 161.

Krugman, P. and A. Venables, 1995. *Globalization and the Inequality of Nations*. Quarterly Journal of Economics, 110, pp 857 – 880.

Kuncoro, Mudrajad, 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPPAMP-YKPN, Yogyakarta.

----------, 2002. *Analisis Spasial dan Regional*. UPP, AMP – YKPN, Yogyakarta.

----------, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.

Kunarjo, 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. UI-Press, Jakarta.

L. Agustino, Erlangga, 2004. *Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur*. Tinjauan Empiris di Kota Surabaya. FE-Univ. Erlangga, Surabaya.

Manning, Chris, 2002. *Public Polices for Regional Growth and Equity*. Makalah pada Lokakarya "Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Era Desentralisasi", Kerjasama FE-Unhas dengan LPEM-UI & IRI, di Hotel Sedona, Makassar.

Marsuki, dkk. 2001. *Analisis Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Parepare*. Kerjasama Pemerintah Kota Parepare dengan Yayasan Bina Daya, Makassar.

Martin, Philippe, 1997. *Can Regional Policies Affect Growth and Geography in Europe?*. Graduate Institute of International Studies, Geneva.

Martin, P. and G. Ottaviano, 2001. *Growth and Agglomeration*. International Economic Review 42, No. 4, pp 947 – 968.

Michael, Schatzberg, 1979. Island of Privilege: *Small Cities in Africa and the Dynamics of Class Formation*. Urban Anthropology, Vol. 8, No.2, PP 173 – 1999.

Misra, R. P. 1975. *Gorwth Pole and Growth Centers in The Contex* of India's Urban and Regional Development Problem.

Mody, Ashoka & Wang, Fang-Yi, 1997. *Explaining Industrial Growth in Coastal China: Economic Reform ..... and What Else?*. The World Bank Economic Review, Vol. 11, No. 2, Mei 1997.

Nazara, Suahasil, 1994. *Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia.* Prisma No. 8, Tahun XXII.

Nazir, Mochammad, 1981. *Kaitan Antar Sektoral di Indonesia dan Hubungannya dengan Pembangunan Ekonomi.* Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.

Ohamae, K. 1995. *The End of The Nation State:* The Rise of Regional Economics. Harper Collis, London.

Panetto, Rachman, A. 1989. *Alternatif-alternatif Kebijaksanaan Pengembangan Ekonomi Sulawesi Selatan dalam Kerangka Keterkaitan dengan Pola Ekonomi nasional dan daerah-daerah Sekitarnya.* Lembaga Penelitian Unhas, Ujung Pandang.

----------, 1990. *Indikator Pembangunan Ekonomi Sektoral.* Makalah pada Penataran Tenaga Perencana Pembangunan Daerah se Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.

----------, 2001. *Regional Economic Development ini KTI and KBI Prospect, Problem and int Basic Solution.* Jurnal Ekonomi, Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin, Vol. 3 No. 2, Mei 2001, Makassar.

Perroux, F. 1964. *La Nation de Pole de Croissance*, l'economic de xxeme Sicle, Paris.

Poerwowidagdo, Sapto, J. 1999. *Geoekonomi: Abstraksi Impelementasinya di Negara Kepualauan RI.* Program Pascasarjana –IPB, Bogor.

Pleeter, Saul, 1980. *Economic Impact Analysis: Methodology and Application.* Martinus, Nijhof, Publishing, Boston.

Porter, M.E. 1990. *The Competitive Advantage of Nation.* The Free Press, New York.

Preer, R.N, 1992. *The Emergence of Richnopolis* : Krowledge – Intensive Technologies and Regional Development. Procger Publishers, New York

Preston, David, A. 1978. *Farmers and Town: Rural – Urban Relations in Highland Bolivia.* University of East Anglia – Geo Abstracs, Norwich.

Prodipto, Roy & B.R. Patil, 1977. *Manual for Block Level Planning.* The Macmillan Company of India, Delhi.

Rappaport, Jordan, 1999. *Local Growth Empirics*. CID Working Paper, No. 23. Center for International Development at Harvard University, USA.

Ray, Bromley, 1982. Market Centre Analysis in the Urban Functions in Rural Development Approach. Paper Presented at International Symposium on Small Towns in National Development. Asian Institute of Technology, Bangkok.

Richardson, Harry, W. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. (diterjemahkan oleh Sitohang, Paul). Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.

Rivai, Deddy, E. 2003. *Pengembangan Kawasan Agropolitan Sebagai Pendekatan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Program Pascasarjana – IPB, Bogor.

Rodriguez – Pose, A. 1998 *The Dynamics of Regional Growth in Europe* : Social and Political Factors. Clareadon Press, Oxperd.

Rondirelli, Dennis, A. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis*, The Spatial Dimensions of Development Policy. Westview Press, London

Sasono, Adi, 1986. *Pembangunan di Indonesia: Analisa Persoalan Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Makalah pada Diskusi Masalah-masalah Pembangunan, Kerjasama Sema STF Driyarkara dengan The Asia Foundation, Jakarta.

Sbergami, Frederica, 2002. *Agglomeration and Economic Growth: Some Puzzles*. The Graduate Institute of Internasional Studies, Geneva.

Setiono, Djoko, 2001. *Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: Harapan dan Kenyataan*. Program Pascasarjana IPB, Bogor.

Siebert, Horst, 1969 *Regional Economics Growth: Theory and Policy*. International Text book Company, Seranton Pensylvania.

Simandjuntak, S. Djisman, 1986. *Model-model Pembangunan dan Kenyataan Kebijakan Ekonomi*. Makalah pada Diskusi Masalah-masalah Pembangunan, Kerjasama Sema STF Driyarkara dengan The Asia Foundation, Jakarta.

Sjafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma No. 3, Maret 1997, Jakarta.

Soegiyoko, S.T. Budhy, 2003. *The Impact of Large Scale Industrial Projects: The Case of Lhok Seumawe Industrial Zone*. Prisma, No. 39.

Soepono, Prasetyo, 2001. *Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor): Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 16, No.1. Fak. Ekonomi UGM, Yogyakarta.

Stohr, W.B. and F. Todling, 1977. *Spatial Equity, Some Antithesis to Current Regional Development Strategi.* Papers of Regional Science Association.

Suedekum, Jens, 2004. *Concentration and Specialization Trend in Germany Since Reunification.* University of Konstanz, department of Economics, Konstanz, Germany.

Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan.* Lembaga Penerbit FE – UI, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 2000. *Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan Pertanian.* PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Suryana, 2001. *Ekonomi Pembangunan: Problematikan dan Pendekatan.* Salemba Empat, Jakarta.

Syafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia Barat.* Prisma No.3.

Syahrani, Husainie, A. 2001. *Penerapan Agropolitan & Agrobisnis dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.* Jurnal FRONTIR, No. 33, Jakarta.

Tjiptoherijanto, Prijono, 1995. *Pengembangan Pembangunan Daerah.* Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XLIII, No. 2, Tahun 1995. LPEM Fak. Ekonomi, UI, Jakarta.

Todaro, P. Michael, 2000. *Pembangunan Ekonomi.* (Terjemahan). Bumi Aksara, Jakarta.

Walter, Stohr & Franz, Todling, 1977. *Spatial Equity: Some Anti-Theses to Current Regional Development Doctrine.* Papers of the Regional Science Association, Vol. 38, pp. 33-53.

Wheeler, H. Christopher, 2001. A Note the Spatial Correlation Structure of County – Level Growth in the USA. Journal of Regional Science, Vol. 41, No. 3, pp. 433-449.

Wiranta, Sukarna, 1996. *Perdagangan Intra Regional dalam Pusat Pertumbuhan IMT – GT*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XLIV, No. 2, Tahun 1996. LPEM Fak. Ekonomi, UI, Jakarta.

Ying, Gen, Long, 2000. *China's Changin Regional Disparitas During the Reform Period*. Economic Geography, pp. 59-70.

Yotopoulos, Pan, A. and Nugent, Jeffrey, B. 1973. *A Balance-Growth Version of the Linkage Hypothesis*: A Text. The Quarterly Journal of Economics, Vol. LXXXVII, No. 2.

Yusuf, Maulana, 1999. *Model Ratio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota. Aplikasi Model*: Milayah Bangka – Belitung. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XLVII, No. 2, Tahun 1999. LPEM Fak. Ekonomi, UI, Jakarta

PETA WILAYAH KAPET PAREPARE

Contoh Perhitungan *Location Quotient* (LQ)

No	Sektor/Sub Sektor	LQ	(EIJ/Ej)	(Ein/En)	LQ
1	Tanaman Bahan Makanan	0.074751	0.0158	0.2114	0.07475
2	Tanaman Perkebunan	0.017158	0.00109	0.06324	0.01716
3	Peternakan	0.70645	0.00852	0.01206	0.70645
4	Kehutanan	0	0	0.00257	0
5	Perikanan	1.038939	0.07875	0.0758	1.03894
6	Pertambangan dan Penggalian	0.095505	0.00415	0.04349	0.0955
7	*Industri Non Migas*	0.290969	0.0367	0.12613	0.29097
8	Listrik	1.212308	0.01585	0.00295	5.36749
9	Air Bersih	4.094466	0.00393	0.04323	0.09088
10	Perdagangan Besar dan Eceran	1.74759	0.27037	0.15471	1.74759
11	Hotel	0.23388	0.00328	0.01403	0.23388
12	Restoran	4.969464	0.04908	0.01307	3.75467
13	Pengangkutan	4.073375	0.06904	0.16798	0.411
14	Komunikasi	1.812751	0.04151	0.07747	0.53591
15	Lembaga Keuangan Non Bank	2.198179	0.00882	0.02855	0.30905
16	Sewa Bangunan	2.054209	0.07897	0.01573	5.02205
17	Jasa Perusahaan	0.717893	0.00234	0.00611	0.38312
18	*Pemerintahan Umum*	0.832419	0.08892	0.0229	3.88272
19	Swasta	2.800597	0.02167	0.04463	0.48561

Tabel 24. PDRB Kota Parepare menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 1993 tahun 1999 - 2003 (dalam juta Rp)

LAPANGAN USAHA	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	**16,979.58**	**16,413.12**	**16,008.36**	**16,409.36**	**16,838.50**
a. Tanaman Bahan Makanan	2,576.07	2,620.38	2,635.25	2,714.99	2,740.33
b. Tanaman Perkebunan	176.89	170.35	170.47	172.24	173.32
c. Peternakan	1,388.97	1,402.82	1,395.18	1,416.15	1,427.84
d. Kehutanan	-	-	-	-	-
e. Perikanan	12,837.65	12,219.57	11,807.46	12,105.98	12,497.01
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	**677.10**	**687.20**	**694.31**	**710.92**	**724.51**
- Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	677.10	687.20	694.31	710.92	724.51
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**5,982.45**	**5,839.74**	**6,145.03**	**6,254.98**	**6,393.04**
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	5,982.45	5,839.74	6,145.03	6,254.98	6,393.04
1). Besar/ Sedang	126.19	129.78	133.67	135.89	136.63
2). Kecil dan Kerajinan RT	5,856.26	5,709.96	6,011.36	6,119.29	6,256.41
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	**3,223.71**	**3,313.74**	**3,406.35**	**3,536.60**	**3,667.87**
- Listrik	2,583.26	2,660.25	2,731.82	2,829.76	2,928.34
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	640.45	653.49	674.53	706.74	739.53
5. BANGUNAN	**13,353.84**	**12,591.76**	**12,792.62**	**13,265.72**	**13,739.86**
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	**52,609.55**	**52,982.55**	**55,263.26**	**58,677.00**	**61,640.21**
- Perdagangan Besar & Eceran	44,073.92	44,305.89	46,016.06	49,029.48	51,465.17
- Hotel	534.95	547.01	562.88	582.15	611.79
- Restauran	8,000.68	8,129.65	8,684.32	9,065.37	9,563.25
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**42,999.61**	**43,373.62**	**44,699.59**	**47,651.65**	**50,083.50**
a. Pengangkutan	36,232.06	36,490.98	37,613.83	40,043.92	41,926.89
1). Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2). Angkutan Jalan Raya	11,254.25	11,226.80	11,422.03	12,173.36	13,215.79
3). Angkutan Laut	23,999.44	24,266.26	25,190.02	26,842.01	27,625.12
4). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
5). Jasa Penunjang Angkutan	978.37	997.92	1,001.78	1,028.55	1,087.98
b. Komunikasi	6,767.55	6,882.64	7,085.76	7,607.73	8,154.61
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	**9,160.87**	**15,249.41**	**19,595.11**	**21,053.61**	**23,855.30**
a. Bank	(5,532.94)	623.89	4,666.67	5,367.14	7,409.62
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1,438.22	1,445.95	1,495.06	1,549.92	1,605.37
c. Sewa Bangunan	12,874.01	12,806.72	13,050.78	13,728.62	14,407.63
d. Jasa Perusahaan	381.58	372.85	382.60	407.93	432.68
9. JASA - JASA	**18,028.55**	**17,441.53**	**18,117.82**	**18,612.42**	**19,245.50**
a. Pemerintahan Umum	14,495.36	14,041.93	14,641.82	15,041.71	15,573.83
b. Swasta	3,533.19	3,399.60	3,476.00	3,570.71	3,671.67
1). Sosial Kemasyarakatan	1,478.91	1,487.95	1,562.66	1,593.59	1,629.51
2). Hiburan dan Rekreasi	529.53	485.25	465.58	482.04	498.92
3). Perorangan dan Rumah tangga	1,524.75	1,426.40	1,447.76	1,495.08	1,543.24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**163,015.26**	**167,892.67**	**176,722.45**	**186,172.16**	**196,188.29**

Sumber:PDRB Kota Parepare, Tahun 1999 - 2003.

Tabel 25 . PDRB Kabupaten Barru, menurut lapangan usaha, atas dasar harga konstan 1993 tahun 1999 - 2003 (dalam Juta Rp)

LAPANGAN USAHA/Indsutrial Origin	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. PERTANIAN	75,624.68	74,828.42	72,680.12	75,092.71	76,037.89
a. Tanaman Bahan Makanan	40,829.63	42,554.41	37,243.62	37,347.90	36,543.56
b. Tanaman Perkebunan	3,677.88	4,009.99	4,305.93	4,669.78	4,823.34
c. Peternakan	2,907.32	2,673.78	3,359.56	3,173.80	3,261.40
d. Kehutanan	37.21	156.82	81.24	145.82	181.27
e. Perikanan	28,172.64	25,431.44	27,689.75	29,755.41	31,228.30
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	1,642.51	1,506.51	1,628.54	1,762.41	1,875.03
- Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	1,642.51	1,506.51	1,628.54	1,762.41	1,875.03
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	7,954.12	7,531.99	8,632.59	9,484.16	9,617.50
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	7,954.12	7,531.99	8,632.59	9,484.16	9,617.50
1). Besar/ Sedang	498.89	767.89	1,407.85	1,903.96	1,806.86
2). Kecil dan Kerajinan RT	7,455.23	6,764.10	7,224.74	7,580.20	7,810.64
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	1,370.62	1,349.67	1,374.29	1,421.05	1,446.67
- Listrik	1,186.10	1,214.52	1,277.24	1,309.43	1,314.67
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	184.52	135.15	97.05	111.62	132.00
5. BANGUNAN	9,422.63	9,982.60	11,257.38	11,990.23	13,196.45
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	24,951.83	26,315.97	28,288.32	29,787.38	31,055.31
- Perdagangan Besar & Eceran	23,110.69	24,395.64	26,242.90	27,583.91	28,805.88
- Hotel	10.48	10.63	11.21	12.81	17.39
- Restauran	1,830.65	1,909.70	2,034.21	2,190.64	2,232.04
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	9,738.46	9,809.60	10,808.47	11,278.56	12,184.38
a. P e n g a n g k u t a n	8,977.43	9,024.95	9,921.27	10,332.18	11,200.52
1). Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2). Angkutan Jalan raya	7,459.23	7,634.52	8,272.00	8,577.24	9,197.37
3). Angkutan laut	1,437.38	1,314.19	1,569.01	1,668.80	1,912.11
4). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
5). Jasa Penunjang Angkutan	80.82	76.24	80.26	86.14	91.04
b. K o m u n i k a s i	761.03	784.65	887.20	946.38	983.86
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	6,040.99	6,798.15	6,948.79	7,138.93	9,995.20
a. B a n k	124.66	469.59	270.98	47.74	2,687.25
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	654.74	711.24	849.36	921.64	869.57
c. Sewa Bangunan	5,231.35	5,584.47	5,793.41	6,132.32	6,399.08
d. Jasa Perusahaan	30.24	32.85	35.04	37.23	39.30
9. JASA - JASA	19,902.25	19,992.84	23,744.73	24,621.83	26,197.64
a. Pemerintahan Umum	18,719.88	18,716.31	22,397.83	23,201.98	24,733.31
b. S w a s t a	1,182.37	1,276.53	1,346.90	1,419.85	1,464.53
1). Sosial Kemasyarakatan	331.63	345.58	366.22	378.85	389.72
2). Hiburan dan Rekreasi	99.91	111.06	110.59	118.62	121.89
3). Perorangan dan Rumah tangga	750.83	819.91	870.09	922.38	952.92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	156,648.09	158,115.75	165,363.23	172,577.24	181,606.27

Sumber: PDRB Kabupaten Barru, Tahun 1999 - 2003

Tabel 26 . PDRB Kabupatan Sidrap menurut lapangan usaha, atas dasar harga konstan 1993, tahun 1999 - 2003 (dalam juta Rp)

LAPANGAN USAHA/Indsutrial Origin	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PERTANIAN	138,817.36	144,629.07	142,449.41	148,139.40	154,341.43
a. Tanaman Bahan Makanan	114,257.66	120,266.35	117,643.89	122,576.77	127,572.97
b. Tanaman Perkebunan	9,562.22	9,100.61	9,006.66	9,340.33	9,470.23
c. Peternakan	10,253.96	10,269.31	10,401.75	10,950.13	11,923.38
d. Kehutanan	691.81	176.07	195.17	157.22	158.90
e. Perikanan	4,051.69	4,816.73	5,041.83	5,114.96	5,215.96
PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	6,865.96	7,165.96	7,756.92	8,106.00	8,535.81
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	6,865.96	7,165.96	7,756.92	8,106.00	8,535.81
INDUSTRI PENGOLAHAN	13,161.21	13,458.15	14,615.87	15,109.11	15,794.59
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	13,161.21	13,458.15	14,615.87	15,109.11	15,794.59
1). Besar/ Sedang	5,175.91	5,150.56	5,591.61	5,696.22	6,038.95
2). Kecil dan Kerajinan RT	7,985.30	8,307.59	9,024.26	9,412.89	9,755.64
LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	2,606.41	2,847.66	3,522.27	3,707.92	3,818.37
- Listrik	2,758.88	2,799.86	3,476.66	3,661.84	3,770.28
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	47.55	48.00	45.60	46.08	48.09
BANGUNAN	23,212.20	24,975.71	27,413.07	29,027.90	30,792.41
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	46,561.18	49,262.12	52,271.95	54,690.39	55,865.05
- Perdayangan Besar & Eceran	45,698.01	47,302.89	50,134.91	52,428.05	53,821.06	
- Hotel	70.39	73.85	82.64	85.14	86.98
- Restauran	1,792.78	1,885.38	2,054.39	2,177.21	2,277.01
ANGKUTAN & KOMUNIKASI	12,205.47	12,861.52	13,752.89	14,088.78	14,767.46
a. Penpangkutan	11,088.69	11,557.23	12,156.23	12,417.81	13,077.71
1). Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2). Angkutan Jalan raya	10,982.13	11,426.72	12,020.08	12,280.17	12,925.17
3). Angkutan laut	-	-	-	-	-
4). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
5). Jasa Penunjang Angkutan	126.56	130.51	136.16	137.65	152.54
b. Komunikasi	1,116.78	1,324.29	1,596.66	1,670.97	1,689.75
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	13,849.27	13,807.43	14,715.42	14,906.11	17,280.62
a. Bank	918.21	435.20	540.47	415.85	2,464.29
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	793.63	824.39	852.50	889.74	907.15
c. Sewa Bangunan	11,873.31	12,266.08	13,014.02	13,275.11	13,557.58
d. Jasa Perusahaan	264.12	281.76	308.44	325.42	351.61
JASA - JASA	26,520.13	27,023.13	30,543.61	31,747.63	33,227.15
a. Pemerintahan Umum	24,884.01	25,321.21	28,682.95	29,867.92	31,320.90
b. Swasta	1,636.12	1,701.92	1,860.66	1,879.71	1,906.25
1). Sosial Kemasyarakatan	724.06	766.00	885.12	896.34	907.03
2). Hiburan dan Rekreasi	141.13	142.00	144.65	147.32	157.01
3). Perorangan dan Rumah tangga	770.93	791.92	830.89	836.05	842.20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	286,019.19	296,070.95	307,041.41	319,523.24	334,442.89

Sumber: PDRB Kabupaten Sidrap, Tahun 1999 - 2003

Tabel 27. PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha, atas dasar harga konstan 1993, tahun 1999 - 2003 (dalam juta Rp)

LAPANGAN USAHA/Indsutrial Origin	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	239,070.76	247,566.78	258,024.85	259,267.89	267,102.15
a. Tanaman Bahan Makanan	120,050.93	134,476.48	139,420.50	137,520.62	145,241.54
b. Tanaman Perkebunan	18,475.51	19,632.06	20,636.60	21,020.15	21,526.13
c. Peternakan	6,154.76	6,374.38	6,652.99	7,008.78	7,458.50
d. Kehutanan	898.51	908.48	926.22	893.38	833.26
e. Perikanan	93,491.05	86,175.38	90,388.33	92,724.96	92,102.72
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	2,172.74	2,248.31	2,359.82	2,483.50	2,619.38
- Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	2,172.74	2,248.31	2,359.82	2,483.50	2,619.38
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	26,094.35	26,681.23	27,226.77	28,068.87	29,429.38
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	26,094.35	26,681.23	27,226.77	28,068.87	29,429.38
1). Besar/ Sedang	2,160.08	1,712.02	1,227.57	1,098.43	1,181.86
2). Kecil dan Kerajinan RT	23,934.27	24,969.22	25,999.20	26,970.44	28,247.52
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	3,299.51	3,764.62	3,899.08	4,122.99	4,571.56
- Listrik	3,171.74	3,646.07	3,786.05	3,983.92	4,427.16
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	127.77	138.55	113.03	139.07	144.40
5. BANGUNAN	16,468.96	17,085.31	17,848.34	19,307.33	20,526.63
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	39,894.59	42,389.84	44,491.01	47,696.33	50,034.27
- Perdagangan Besar & Eceran	36,400.28	38,713.41	40,671.07	43,657.67	45,710.31
- Hotel	63.04	65.57	68.50	69.52	72.93
- Restauran	3,431.27	3,610.86	3,751.44	3,939.14	4,251.03
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	14,046.86	14,768.12	15,732.71	16,114.74	16,759.86
a. Pengangkutan	11,901.64	12,552.50	13,345.83	13,644.37	14,229.69
1). Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2). Angkutan Jalan raya	11,867.79	12,516.48	13,306.69	13,599.58	14,184.25
3). Angkutan laut	-	-	-	-	-
4). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
5). Jasa Penunjang Angkutan	33.85	36.02	39.13	44.79	45.44
b. Komunikasi	2,145.22	2,215.62	2,386.88	2,470.37	2,530.17
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	12,617.69	15,256.83	16,215.44	17,575.27	20,072.27
a. Bank	-1,470.39	493.93	601.22	1,330.49	3,217.94
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1,087.06	1,147.32	1,211.19	1,401.11	1,461.86
c. Sewa Bangunan	12,804.52	13,411.61	14,189.62	14,624.62	15,163.99
d. Jasa Perusahaan	196.50	203.96	213.40	219.05	228.48
9. JASA - JASA	44,509.89	46,467.60	51,206.23	53,566.47	56,579.30
a. Pemerintahan Umum	42,395.40	44,246.13	48,862.40	51,044.38	53,843.66
b. Swasta	2,114.49	2,221.47	2,343.83	2,522.09	2,735.64
1). Sosial Kemasyarakatan	905.64	959.99	1,024.65	1,116.44	1,223.33
2). Hiburan dan Rekreasi	346.43	354.87	367.94	373.47	399.75
3). Perorangan dan Rumah tangga	862.42	906.61	951.23	1,032.18	1,112.56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	396,175.35	416,248.64	437,004.25	448,173.39	468,056.80

Sumber: PDRB Kabupaten Pinrang, Tahun 1999 - 2003

Tabel 28. PDRB Kabupaten Enrekang menurut lapangan usaha, atas dasar harga konstan 1993, tahun 1999 - 2003 (dalam juta Rp)

LAPANGAN USAHA/Indsutrial Origin	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. PERTANIAN	65,068.86	66,315.47	67,730.01	70,476.47	73,805.23
a. Tanaman Bahan Makanan	45,393.52	45,775.88	46,683.96	48,731.42	50,949.56
b. Tanaman Perkebunan	16,465.23	17,283.86	17,731.66	18,160.06	19,184.39
c. Peternakan	2,530.64	2,726.14	2,779.91	3,001.87	3,073.46
d. Kehutanan	313.62	138.47	139.63	174.65	182.30
e. Perikanan	385.85	391.14	394.85	408.47	415.52
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	919.30	941.27	942.65	979.41	1,051.35
- Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	919.30	941.27	942.65	979.41	1,051.35
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	8,342.16	8,744.72	8,915.83	9,426.00	9,797.83
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Penglangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	8,342.16	8,744.72	8,915.83	9,426.00	9,797.83
1). Besar/ Sedang	567.27	391.83	315.96	308.41	335.03
2). Kecil dan Kerajinan RT	7,774.91	8,352.89	8,599.87	9,117.59	9,462.80
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	1,176.22	1,271.28	1,356.53	1,410.40	1,469.61
- Listrik	1,049.34	1,137.63	1,213.39	1,262.30	1,320.01
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	126.88	133.65	145.14	148.10	149.60
5. BANGUNAN	6,347.52	6,380.31	6,381.69	6,520.84	7,318.41
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	22,994.84	22,969.87	23,457.54	24,394.30	26,394.84
- Perdagangan Besar & Eceran	21,554.31	21,927.67	22,387.33	23,289.44	25,275.68
- Hotel	29.61	21.55	21.07	21.22	21.67
- Restauran	1,010.92	1,020.65	1,049.14	1,083.64	1,097.49
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	3,626.44	3,864.63	4,016.79	4,319.95	4,564.20
a. Pengangkutan	3,024.93	3,256.25	3,363.93	3,594.11	3,765.56
1). Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2). Angkutan Jalan raya	3,012.85	3,244.09	3,351.70	3,580.75	3,745.16
3). Angkutan laut	-	-	-	-	-
4). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
5). Jasa Penunjang Angkutan	12.08	12.16	12.23	13.36	20.40
b. Komunikasi	601.51	628.38	652.86	725.87	798.64
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	4,509.56	6,461.29	7,227.64	8,271.10	8,894.08
a. Bank	(1,749.44)	(28.33)	688.24	1,429.99	1,867.14
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	345.04	366.95	377.40	402.82	420.30
c. Sewa Bangunan	5,891.17	6,096.67	6,137.22	6,415.31	6,580.97
d. Jasa Perusahaan	22.79	23.76	24.79	24.98	25.67
9. JASA - JASA	16,204.35	16,471.49	19,662.68	20,740.06	21,617.61
a. Pemerintahan Umum	15,623.66	15,878.46	19,053.62	20,111.21	20,888.09
b. Swasta	580.69	593.03	609.06	628.87	729.52
1). Sosial Kemasyarakatan	349.00	359.32	367.15	381.78	438.08
2). Hiburan dan Rekreasi	60.84	61.31	66.24	67.39	81.30
3). Perorangan dan Rumah tangga	170.85	172.40	175.67	179.70	210.14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	128,811.27	133,440.33	139,693.36	146,538.58	154,913.16

Sumber: PDRB Kabupaten Enrekang, Tahun 1999 - 2003

Tabel 28. PDRB Propinsi Sulawesi Selatan, menurut lapangan usaha, atas dasar harga konstan 1993, tahun 1999 - 2003 (dalam juta Rp)

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	1999	2000	2001	2002	2003
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PERTANIAN	3,518,067.92	3,519,653.06	3,556,929.82	3,720,905.89	3,726,982.30
a. Tanaman Bahan Makanan	2,036,055.21	1,971,570.49	1,954,539.06	2,012,783.30	2,066,725.89
b. Tanaman Perkebunan	509,090.87	636,441.33	649,292.43	695,197.42	687,063.61
c. Peternakan	116,160.40	89,843.00	107,814.58	113,119.06	119,385.85
d. Kehutanan	24,728.89	25,855.06	27,045.45	28,084.00	29,978.10
e. Perikanan	730,032.54	795,842.28	820,239.28	871,422.21	823,538.85
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	418,885.58	486,409.28	494,043.97	503,213.57	532,515.15
- Minyak dan Gas Bumi	32,575.71	35,043.47	37,205.45	38,760.28	39,110.58
- Pertambangan Tanpa Migas	280,974.90	347,655.21	345,978.74	350,160.05	374,851.39
- Penggalian	101,314.97	103,712.60	110,858.79	114,273.24	118,444.21
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1,214,728.08	1,306,702.60	1,356,373.09	1,390,895.97	1,459,982.52
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	1,214,728.08	1,306,702.60	1,356,373.09	1,390,895.97	1,459,982.52
1). Makanan, Minuman, dan Tembakau	508,048.17	521,735.20	564,564.64	628,523.90	663,656.39
2). Tekstil, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	23,056.81	25,547.42	20,302.10	23,443.42	31,200.24
3). Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	191,444.42	220,118.18	213,666.85	218,280.48	225,048.38
4). Kertas dan Barang Cetakan	28,434.35	46,884.09	16,200.84	15,599.92	16,004.16
5). Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet	5,000.70	5,805.82	6,367.00	6,435.76	7,068.23
6). Semen dan Barang Galian bukan Logam	416,241.63	445,682.90	462,477.52	447,909.48	499,677.66
7). Logam Dasar Besi dan Baja	8,212.21	8,392.42	8,872.72	9,605.60	9,969.17
8). Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya	33,476.43	31,987.77	34,695.42	34,016.06	35,957.62
9). Barang Lainnya	716.37	839.00	1,026.02	1,109.33	1,228.23
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	136,134.54	137,302.26	156,702.16	165,276.37	168,221.14
- Listrik	125,893.01	127,467.57	145,129.77	154,650.28	157,248.47
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	9,241.33	9,834.69	11,572.39	10,626.09	10,972.73
5. BANGUNAN	449,214.73	441,773.06	481,836.23	502,314.27	537,727.42
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1,817,782.22	1,899,229.34	1,913,584.45	2,017,344.36	2,169,851.82
- Perdagangan Besar & Eceran	1,490,008.25	1,564,870.35	1,769,824.94	1,865,218.51	1,997,462.50
- Hotel	32,655.69	33,830.71	31,712.15	31,921.45	35,636.64
- Restauran	95,118.28	99,528.28	112,047.33	120,204.40	136,750.68
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	746,081.65	801,648.15	885,834.72	951,128.15	1,042,815.17
a. Pengangkutan	525,515.02	547,145.63	603,721.80	638,158.37	688,586.96
1). Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2). Angkutan Jalan raya	274,045.04	285,074.93	306,911.97	322,503.09	345,207.31
3). Angkutan laut	151,453.64	144,804.63	155,483.00	163,241.60	170,957.40
4). Angkutan Udara	58,844.04	76,679.77	93,910.98	101,545.94	115,945.16
5). Jasa Penunjang Angkutan	40,272.29	40,586.30	47,415.85	50,867.73	56,477.10
b. Komunikasi	220,566.63	254,502.32	282,112.92	312,969.78	352,028.19
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	429,859.80	434,088.58	422,538.15	505,984.49	680,261.95
a. Bank	(10,496.32)	(16,835.30)	(1,903.57)	65,264.06	216,314.92
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	38,655.28	39,646.93	42,416.21	45,006.78	48,512.28
c. Sewa Bangunan	370,267.54	379,325.49	346,497.38	357,654.57	372,013.17
d. Jasa Perusahaan	31,433.10	31,949.55	35,529.15	38,059.06	42,421.58
9. JASA - JASA	1,103,341.52	1,278,022.30	1,323,719.20	1,336,230.55	1,374,667.67
a. Pemerintahan Umum	1,028,806.07	1,199,254.44	1,241,557.43	1,248,371.72	1,280,579.71
b. Swasta	74,535.45	78,767.86	82,161.77	87,858.83	94,087.96
1). Sosial Kemasyarakatan	36,030.22	37,507.15	42,850.52	45,800.49	49,531.22
2). Hiburan dan Rekreasi	6,931.67	7,574.06	8,744.46	8,815.98	7,425.32
3). Perorangan dan Rumah tangga	31,573.56	32,186.65	32,766.77	35,142.36	37,131.42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9,631,075.64	10,101,947.63	10,603,661.79	11,092,995.72	11,690,525.15

Sumber : Kantor Statistik Prop. Sulawesi Selatan, Tahun 2004

Contoh Perhitungan Nilai RPr dan RPs sektor/sub sektor Ekonomi di setiap kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare Periode 1999 - 2003

No	Subsektor	EiR	Δ EiR(t)	ER	Δ ER(t)	RPr
1	Bahan Makanan	30,720.68	2,066,725.89	2,059,449.51	11,699,525.15	0.08444327
2	Perkebunan	77,972.74	687,063.89	2,059,449.51	11,699,525.15	0.64470755
3	Peternakan	3,225.45	119,385.85	2,059,449.51	11,699,525.15	0.15348097
4	Perikanan	93,496.31	823,528.85	2,059,449.51	11,699,525.15	0.64495894
5	Penggalian	17,129.24	118,444.21	2,059,449.51	11,699,525.15	0.82156389
6	Industri Tanpa Mogas	245,254.44	1,459,983.52	2,059,449.51	11,699,525.15	0.95430239
7	Listrik	31,355.40	157,248.41	2,059,449.51	11,699,525.15	1.13277373
8	Air Bersih	1,731.40	10,972.73	2,059,449.51	11,699,525.15	0.89639579
9	Bangunan	88,512.69	537,727.42	2,059,449.51	11,699,525.15	0.93510514
10	Perdagangan Besar dan Eceran	507,454.24	1,997,462.50	2,059,449.51	11,699,525.15	1.4432293
11	Hotel	41,632.42	136,750.68	2,059,449.51	11,699,525.15	1.72949475
12	Restoran					
13	Angkutan	163,071.96	688,586.98	2,059,449.51	11,699,525.15	1.34535709
14	Komunikasi	131,461.57	352,028.19	2,059,449.51	11,699,525.15	2.12147764
15	Perbankan	205,848.60	216,314.92	2,059,449.51	11,699,525.15	5.40603096
16	Lembaga Keuangan Tanpa Bank	10,857.00	49,512.28	2,059,449.51	11,699,525.15	1.24570153
17	Sewa Bangunan	1,745.53	372,013.17	2,059,449.51	11,699,525.15	0.02655545
18	Jasa Perusahaan	11,013.48	42,421.58	2,059,449.51	11,699,525.15	1.47487364
19	Pemerintahan Umum	251,773.64	1,280,579.71	2,059,449.51	11,699,525.15	1.11691656
20	Swasta	19,552.51	94,087.96	2,059,449.51	11,699,525.15	1.18055317

CONTOH PERHITUNGAN NILAI INDEX SPESIALISASI

1) Hasil perhitungan Index Spesialisasi tahun 1999

a. Spesialisasi Kota Parepare terhadap Kabupaten Barru.

(1). Sektor Pertanian.

$$SI_{Pr-Br} = \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{Ei\ Pr}{EPr} - \frac{Ei\ Br}{EBr} \right|$$

$$= \sum_{i=}^{n} \left| \frac{16.979.58}{163.015.26} - \frac{77.175.74}{156.648.11} \right|$$

$$= \left| 0.10 - 0.49 \right| = 0.39$$

(2). Pertambangan.

$$= \left| \frac{677.10}{163.015.26} - \frac{1.642.51}{156.648.11} \right| = \left| 0.004 - 0.11 \right| = 0.01$$

(3). Industri Pengolahan

$$= \left| \frac{5.982.45}{163.015.26} - \frac{7.954.12}{156.648.11} \right| = \left| 0.04 - 0.05 \right| = 0.01$$

(4). Listrik, Gas dan Air Bersih

$$= \left| \frac{3.223.71}{163.015.26} - \frac{1.370.62}{156.648.11} \right| = \left| 0.02 - 0.009 \right| = 0.01$$

(5). Bangunan

$$= \left| \frac{13.353.84}{163.015.26} - \frac{9.422.63}{156.648.11} \right| = \left| 0.08 - 0.06 \right| = 0.02$$

(6). Perdagangan

$$= \left| \frac{52.609.55}{163.015.26} - \frac{24.951.84}{156.648.11} \right| = \left| 0.32 - 0.16 \right| = 0.16$$

(7). Sektor Angkutan dan Komunikasi

$$= \left| \frac{42.999.61}{163.015.26} - \frac{9.738.46}{156.648.11} \right| = \left| 0.26 - 0.06 \right| = 0.20$$

(8). Lembaga Keuangan

$$= \left| \frac{9.160.87}{163.015.26} - \frac{6.580.90}{156.648.11} \right| = \left| 0.06 - 0.04 \right| = 0.02$$

(9). Jasa

$$= \left| \frac{18.028.55}{163.015.26} - \frac{19.902.24}{156.648.11} \right| = \left| 0.11 - 0.13 \right| = 0.01$$

Nilai index masing-masing sektor ekonomi di atas dijumlah kemudian dibagi 9 untuk memperoleh nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata itulah yang dimasukkan ke dalam tabel 16 dan 17.

Lampiran 11.

Contoh cara perhitungan nilai barang dan jasa yang diminta dan didistribusi (disupply) oleh para pelaku ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare berdasarkan hasil survey.

1. Cara menghitung nilai barang dan jasa yang didistribusi (disupply) oleh setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, sebagaimana yang nampak pada tabel 16.

   Contoh perhitungan produk sektor pertanian di Kabupaten Barru.

   Tahap 1.

   Dimasukkan nilai output pertanian yang ada di Kabupaten Barru yang diperoleh dari data output daerah ini yang tersedia di BPS Propinsi Sulawesi Selatan (tidak dipublikasikan) kedalam matriks permintaan, yakni sebesar Rp. 154.065, 67 juta,-.

   Tahap 2

   Kemudian memasukkan nilai ratio permintaan akan produk pertanian di Kabupaten Barru dari kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah di luar wilayah ini sebagai hasil survey, yakni sebesar 36,28% dari Kab. Barru sendiri; sebesar 0,24 % dari Kab. Sidrap; sebesar 0,06 % dari kab. Pinrang; sebesar 21,33 % dari Kota parepare; dan sebesar 42,09 % dari wilayah-wilayah diluar wilayah KAPET Parepare.

Tahap3

Berdasarkan nilai ratio yang diperoleh dari survey dan nilai output sektor pertanian di Kabupaten Barru yang tersedia di BPS tersebut, maka selanjutnya dapat dihitungan total nilai produk sektor pertanian yang diminta oleh pelaku ekonomi di Kabupaten Barru dengan ketentuan bahwa total nilai produk sector pertanian sebesar Rp. 154.065, 67 juta,- adalah equivalent dengan 36,28 % permintaan pelaku ekonomi di daerah ini terhadap produk sector pertanian dari Kabupaten Barru sendiri, sehingga total nilai produk pertanian yang diminta di Kabupaten Barru adalah sebesar Rp. 154.065,67 juta : 36,28 % = Rp. 424.657,31 juta,-. Kemudian besarnya nilai produk ini yang dimintan dari Kabupaten Sidrap = Rp 424.657,31 juta X 0,24 % = 1.019,18 juta; dan seterusnya untuk kabupaten lainnya.

2. Cara menghitung nilai barang dan jasa yang diminta oleh setiap kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, sebagaimana yang nampak pada tabel 17.

   Contor: Produk Sektor Pertanian di Kabuapetn Barru

   Tahap 1

   Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan prinsip Model Kesimbangan Perdagangan Antar Daerah (MKPAD), yakni total penawaran = total permintaan. Oleh karena total nilai permintaan produk sektor pertanian di kabupaten Barru = Rp Rp. 424.657,31 juta,- maka total nilai penawarannya juga = Rp. 424.657,31 juta,-.

Tahap 2

Total nilai penawaran sebesar Rp. 424.657,31 juta,- tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam matriks penawaran, sebagaimana terlihat pada tabel 17.

Tahap 3

Kemudian memasukkan nilai ratio penawaran produk sector pertanian oleh pelaku ekonomi di Kab. Barru ke kabupaten/kota dalam wilayah KAPET Parepare dan wilayah-wilayah di luar wilayah ini dalam bentuk persentase sebagai hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil survey, maka diperoleh nilai ratio (persentase) produk sector pertanian yang didisitribusi (disupply) oleh pelaku ekonomi di Kab. Barru, yakni sebesar 76,14 % ke Kab. Barru sendiri; sebesar 0,89 % ke Kab. Sidrap; sebesar 1,30 % ke Kab. Pinrang; sebesar 1,48 % ke Kab. Enrekang; sebesar 1,44 % ke Kota Parepare; dan sebesar 18,75 % ke wilayah-wilayah diluar wilayah KAPET Parepare.

Tahap 4

Berdasarkan nilai ratio tersebut, maka dapat dihitung nilai produk sector pertanian yang didistribusi oleh pelaku ekonomi di Kabupaten Barru, yakni sebesar 76,14 % X Rp. 424.657,31 juta,- = Rp. 323.334,07 juta yang didistribusi ke Kab. Barru sendiri; sebesar 0,89% X Rp. 424.657,31 juta,- = Rp. 3.779,45 juta,- yang didistribusi ke Kabupaten Sidrap; dan seterusnya untuk kabupaten/kota lainnya.

Tabel 30. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah KAPET Parepare, periode 1995 – 1997 (dalam %).

No	Kabupaten/kota	1995	1996	1997	Rata-rata
1	Parepare	10,59	8,65	8,45	9,23
2	Sidrap	9,40	7,54	4,00	6,98
3	Barru	5,07	6,00	5,09	5,39
4	Pinrang	8,13	6,99	3,13	6,08
5	Enrekang	6,30	6,49	4,27	5,69
	Sul-Sel	8,28	8,31	4,30	6,96

Sumber: PDRB kabupaten/kota di wil. KAPET Parepare, tahun 1993 – 1997

Tabel 31. Pendapatan perkapita masyarakat di wilayah KAPET Parepare, periode 1995 – 1997 (dalam Rp.)

No	Kab./kota	1995	1996	1997	Rata-rata
1	Parepare	1.410.574	1.614.704	1.872.161	1.632.480
2	Sidrap	1.328.629	1.569.067	1.784.114	1.558.937
3	Barru	996.637	1.125.459	1.278.001	1.133.366
4	Pinrang	1.375.465	1.555.055	1.696.650	1.542.390
5	Enrekang	738.964	786.444	812.891	779.433
	Sul-Sel	*1.379.954*	*1.548.429*	1.742.421	*1.556.935*

Sumber: PDRB kabupaten/kota di wil. KAPET Parepare, tahun 1993 - 1997

Tabel 32. Persentase angkatan kerja yang bekerja di setiap sektor ekonomi di kabupaten/kota, di Prop. Sulawesi Selatan, tahun 1995 – 1997

N0	Kab./ Kota	Persentase angkatan kerja (%)					
		1995		1996		1997	
		Bekerja	Mencari kerja	Bekerja	Mencari kerja	Bekerja	Mencari kerja
1	Selayar	93,86	6,14	97,45	2,55	95,38	4,62
2	Bulukumba	93,75	6,25	92,51	7,49	93,62	6,38
3	Bantaeng	95,10	4,90	96,51	3,49	96,56	3,44
4	Jeneponto	99,06	0,94	97,97	2,03	97,63	2,37
5	Takalar	98,38	1,62	96,23	3,77	96,01	1,99
6	Gowa	91,09	8,91	94,04	5,96	94,54	5,46
7	Sinjai	94,47	5,53	96,58	3,42	96,11	1,89
8	Maros	94,16	5,84	93,37	6,63	95,17	4,83
9	Pangkep	93,48	6,52	91,82	8,18	94,85	5,15
10	Barru	87,40	12,60	95,02	4,98	92,95	7,05
11	Bone	90,50	9,50	95,69	4,31	93,06	6,94
12	Soppeng	88,49	11,51	93,05	6,95	94,98	5,02
13	Wajo	88,91	11,09	93,60	6,40	90,82	9,18
14	Sidrap	89,76	10,24	91,00	9,00	89,29	10,71
15	Pinrang	96,03	3,97	93,80	6,20	98,10	1,90
16	Enrekang	92,31	7,69	93,26	6,74	94,60	5,40
17	Luwu	92,48	7,52	96,62	3,38	95,88	4,12
18	Tator	94,41	5,59	95,37	4,63	94,83	5,17
19	Polmas	97,39	2,61	97,71	2,29	98,11	1,89
20	Majene	89,71	10,21	93,80	6,20	93,42	6,58
21	Mamuju	97,17	2,83	96,02	3,98	97,09	2,91
22	Makassar	82,05	17,95	79,71	20,29	84,53	15,47
23	Parepare	84,60	15,40	86,77	13,23	91,39	8,61
	Sul-Sel	91,84	8,16	92,88	7,12	93,65	6,35

Sumber: Statistik Sosial dan Ekonomi R. Tangga, tahun 1995, 1996, & 1997.

Lampiran 14.

Tabel 33. Persentase angkatan kerja yang bekerja di setiap sektor ekonomi di kabupaten/kota, di Prop. Sulawesi Selatan, tahun 1999 – 2003

N0	Kab./ Kota	Persentase angkatan kerja (%)									
		1999		2000		2001		2002		2003	
		Bekerja	Mencari kerja	Bekerja	Mencari kerja	bekerja	Mencari kerja	Bekerja	Mencari kerja	Bekerja	Mencari kerja
1	Selayar	96.10	3.90	97.87	2.13	96.19	3.81	93.55	6.45	94.26	5.74
2	Bulukumba	94.47	5.03	97.66	2.34	98.46	1.54	94.49	5.51	91.85	8.15
3	Bantaeng	97.15	2.85	98.29	1.71	99.28	0.72	97.62	2.38	97.74	2.26
4	Jeneponto	97.94	2.06	99.26	0.74	97.79	2.21	97.50	2.50	96.27	3.73
5	Takalar	96.90	3.10	97.66	2.34	97.39	2.61	95.54	4.46	96.62	3.38
6	Gowa	94.43	5.57	98.65	1.35	95.55	4.45	93.81	6.19	91.74	8.26
7	Sinjai	98.94	1.06	99.04	0.96	99.29	0.71	97.71	2.29	98.09	1.91
8	Maros	91.96	8.04	95.44	4.56	95.47	4.53	90.18	9.82	95.50	4.50
9	Pangkep	94.01	5.99	93.77	6.23	94.98	5.02	92.63	7.37	91.99	8.01
10	Barru	92.86	7.14	96.96	3.04	93.17	6.83	92.43	7.57	93.27	6.73
11	Bone	92.23	7.77	97.91	2.09	98.08	1.92	93.31	6.69	96.21	3.79
12	Soppeng	96.42	3.58	98.15	1.85	96.52	3.48	92.25	7.75	94.54	5.46
13	Wajo	92.99	7.01	98.72	1.28	97.04	2.96	93.96	6.04	93.04	6.96
14	Sidrap	93.05	6.95	98.25	1.75	92.51	7.49	91.42	8.58	91.06	8.94
15	Pinrang	94.86	5.14	97.64	2.36	97.26	2.74	95.50	4.50	95.99	4.01
16	Enrekang	98.73	1.27	98.84	1.16	98.77	1.23	97.97	2.03	98.66	1.34
17	Luwu	95.51	4.49	98.29	1.71	98.36	1.64	94.22	5.78	92.63	7.37
18	Tator	97.79	2.21	97.34	2.66	95.75	4.25	95.91	4.09	95.70	4.30
19	Polmas	94.85	5.15	99.21	0.79	99.33	0.67	97.59	2.41	97.66	2.23
20	Majene	94.96	5.04	97.50	2.50	95.43	4.57	91.60	8.40	96.20	3.80
21	Mamuju	97.19	2.81	99.37	0.63	99.76	0.24	98.36	1.64	97.86	2.14
22	Luwu Utara	-	-	-	-	97.72	2.28	90.87	9.13	93.75	6.25
23	Makassar	84.47	15.53	90.95	9.05	89.62	10.38	82.77	17.23	82.59	17.41
24	Pare-pare	87.00	13.00	93.66	6.34	92.90	7.10	84.19	15.81	84.57	15.43
	Sul-Sel	94.15	5.85	97.08	2.92	96.26	3.74	92.82	7.18	93.14	6.86

Sumber: Statistik Sosial dan Ekonomi R. Tangga, tahun 1999 - 2003.